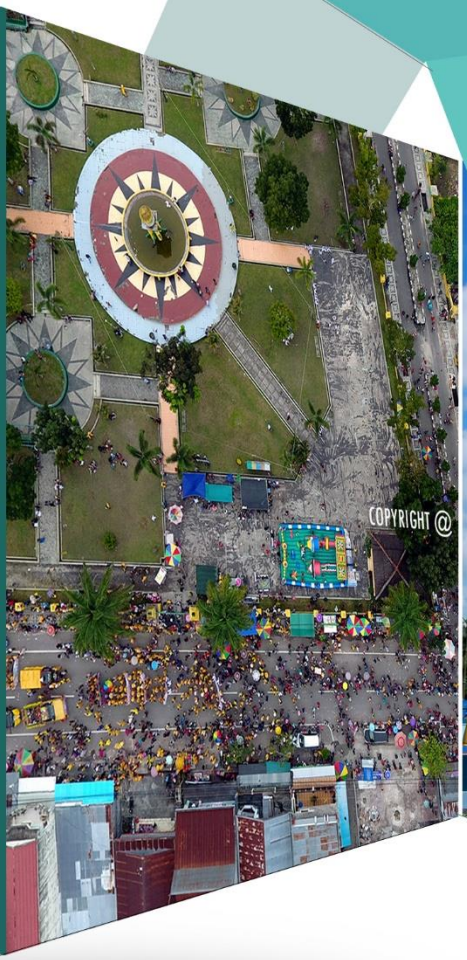
RPJMD





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2017-2022



Daftar Isi

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vii
Sambutan x
BAB 1: PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 5
1.3 Hubungan Antar Dokumen 7
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 9
1.4.1 Maksud 9
1.4.2 Tujuan 10
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 10
BAB 2: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 13
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 13
2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis 13
2.1.2 Kondisi Topografi 14
2.1.3 Keadaan Geologi 15
2.1.4 Hidrologi 18
2.1.5. Klimatologi 19
2.1.6. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung 21
2.1.7. Gambaran Umum Demografi 28
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 33
2.2.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 33
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 43
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga 49
2.3. Aspek Pelayanan Umum 50
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 50
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 69
2.3.3. Urusan Pemerintahan pilihan 84
2.4. Aspek Daya Saing 94
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 94
2.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 94

2.4.1.2 Pertanian, Perkebunan, Peternakan 95
2.4.1.3 PERIKANAN DAN KELAUTAN 101
2.4.1.4 KEHUTANAN 103
2.4.1.5. INDUSTRI 104
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 106
2.4.2.1 Perhubungan 106
2.4.2.2. Air Bersih Dan Listrik 109
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia 112
2.4.3.1. Ketenagakerjaan 112
2.4.3.2. Rasio Ketergantungan 114
2.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan 115
BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 157
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 160
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 160
3.1.2 Neraca Daerah 168
3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu 176
3.1.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 177
3.1.3.2. Analisis Pembiayaan 178
3,1,4 Proyeksi Kerangka Pendanaan 184
3.1.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan belanja 185
3.1.4.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan 193
BAB 4: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 195
4.1. Analisis Tahapan RPJP Berjalan 195
4.2. RPJMN Tahun 2015-2019 197
4.3. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 198
4.3.1. Isu-isu strategis Provinsi 200
4.4. Telaah Dokumen RPJMD Daerah Lainnya 204
4.5. Platform Bupati Terpilih 206
4.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 221
4.7. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 224
4.6.1 Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis 224
4.6.2. Rekomendasi Perbaikan 225
4.8. Permasalahan Pembangunan 226
4.9. Isu Strategis 231
BAB V: PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 239

5.1 VISI. 239
5.2 MISI 242
Misi I “Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan” 243
Misi II “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Olahraga.”244
MISI III “Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Sumber Energi Melalui Infrastruktur dan Memperhatikan Lingkungan Hidup” 245
MISI IV “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat” 246
MISI V “Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis.” 247
MISI VI “Melestarikan Situs Budaya, Kesenian Lokal Dan Masyarakat Lainnya Guna Meningkat Kunjungan Wisata” 248
5.3 Tujuan Dan Sasaran 250
5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi I 250
5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi II 251
5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi III 252
5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV 253
5.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi V 254
5.3.6 Tujuan dan Sasaran Misi VI 255
5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran 256
BAB VI: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 263
6.1 Strategi Pembangunan Daerah 265
6.2. ARAH KEBIJAKAN 279
6.3. Program Pembangunan Daerah 281
BAB VII: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 367
7.1 Indikasi Program Prioritas disertai Indikator Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan. 367
BAB VIII: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 427
8.1 Indikator Kinerja Utama 427
8.2 Indikator Sasaran 429
BAB IX: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 437
9.1. Pedoman Transisi 438
9.2. Kaidah Pelaksanaan 438
9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan 439
9.4. Penutup 440

Daftar Tabel

Tabel 2. 1: Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan 13
Tabel 2. 2: Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat 14
Tabel 2. 3: Kondisi Geologi 15
Tabel 2. 4: Formasi Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat..... 16
Tabel 2. 5: Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman..... 19
Tabel 2. 6: Suhu Udara Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2014 19
Tabel 2. 7: Kecepatan Angin Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2014..... 20
Tabel 2. 8: Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kotawaringin Barat..... 20
Tabel 2. 9: Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2011 – 2014..... 28
Tabel 2. 10: Banyaknya Rumah tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 28
Tabel 2. 11: Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, ... 29
Tabel 2. 12: Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2014 30
Tabel 2. 13: Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk Menurut Kecamatan, 2014 30
Tabel 2. 14: Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 31
Tabel 2. 15: Angkatan Kerja..... 31
Tabel 2. 16: Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2014..... 32
Tabel 2. 17: PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2011-2015..... 35
Tabel 2. 18: PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2011-2015..... 36
Tabel 2. 19: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2015..... 38
Tabel 2. 20: PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 42
Tabel 2. 21: Indikator Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015..... 42
Tabel 2. 22: Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015..... 48
Tabel 2. 23: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015 48
Tabel 2. 24: Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat,..... 49
Tabel 2. 25: Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2012-2016 50
Tabel 2. 26: Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2012-2016..... 54
Tabel 2. 27: Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 – 2015 61
Tabel 2. 28: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya 62
Tabel 2. 29: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya 62
Tabel 2. 30: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya 63
Tabel 2. 31: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan 63
Tabel 2. 32: Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya..... 64
Tabel 2. 33: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang 64
Tabel 2. 34: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2012 – 2015..... 65
Tabel 2. 35: Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri..... 66
Tabel 2. 36: Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2015..... 67
Tabel 2. 37: Capaian Kinerja Penaggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat..... 68
Tabel 2. 38: Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015..... 68
Tabel 2. 39: Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2012-2015 69

Tabel 2. 40: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 70
Tabel 2. 41: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 71
Tabel 2. 42: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersedian Pangan (Beras) 71
Tabel 2. 43: Perkembangan Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Dan Luas Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015 72
Tabel 2. 44: Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 – 2016 73
Tabel 2. 45: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat ... 73
Tabel 2. 46: Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012-2015 74
Tabel 2. 47: Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 74
Tabel 2. 48: Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 – 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah 76
Tabel 2. 49: Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2015 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016..... 76
Tabel 2. 50: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 – 2015..... 78
Tabel 2. 51: Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 79
Tabel 2. 52: Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 – 2015 80
Tabel 2. 53: Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 2012-2015 81
Tabel 2. 54: capaian Indikator Kepemudan dan Olahraga:..... 81
Tabel 2. 55: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2012 – 2015 82
Tabel 2. 56: Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2012 – 2015 83
Tabel 2. 57: Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2012 – 2015 83
Tabel 2. 58: Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016 84
Tabel 2. 59: Capaian Kinerja Sub Sektor Peternakan..... 85
Tabel 2. 60: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2015..... 87
Tabel 2. 61: Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan 2012 – 2015 88
Tabel 2. 62: Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan Tahun 2012-2016 89
Tabel 2. 63: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2015..... 90
Tabel 2. 64: Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 91
Tabel 2. 65: Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan Tahun 2012 – 2015 91
Tabel 2. 66: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat 92
Tabel 2. 67: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat..... 93
Tabel 2. 68: Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2012 – 2015..... 93
Tabel 2. 69: Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016 95
Tabel 2. 70: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2015 Berdasarkan RPJMD 2012- 2016 96
Tabel 2. 71: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2015 Berdasarkan RPJMD 2012- 2016 99
Tabel 2. 72: Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan 101
Tabel 2. 73: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Di Kabupaten..... 103
Tabel 2. 74: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2012 - 2016 104
Tabel 2. 75: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2015..... 105
Tabel 2. 76:Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2012 – 2016 106

Tabel 2. 77: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 - 2015 108
Tabel 2. 78: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2012 – 2015 109
Tabel 2. 79: Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2015 berdasarkan Indikator RPJMD 2012-2016 112
Tabel 2. 80: Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan 115
Tabel 3. 1: Rata-rata Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 161
Tabel 3. 2: Rata-rata Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 164
Tabel 3. 3: Rata-Rata perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016 166
Tabel 3. 4: Neraca Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015 169
Tabel 3. 5: Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2015 . 174
Tabel 3. 6: Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 177
Tabel 3. 7: Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 178
Tabel 3. 8: Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 180
Tabel 3. 9: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat 182
Tabel 3. 10: Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 183
Tabel 3. 11: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Rupiah) 187
Tabel 3. 12: Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (milyar rupiah) 190
Tabel 3. 13: Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2021 (milyar rupiah) 192
Tabel 3. 14: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 193
Tabel 3. 15: Anggaran berdasarkan prioritas pembangunan 194
Tabel 4. 1: Telaah Dokumen RPJMD Daerah Lainnya 204
Tabel 5. 1: Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah 257
Tabel 6. 1: Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Strategi 274
Tabel 6. 2: Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD tahun 2017-2022 280
Tabel 6. 3: Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 294
Tabel 6. 4: Program Pembangunan Daerah dan kerangka Pendanaan tahun 2017 301
Tabel 6. 5: Justifikasi empat perspektif balanced Sore Card Strategi, terhadap program pembangunan daerah 330
Tabel 7. 1: Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022 369
Tabel 7. 2: Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah Tahun 2018-2022 370
Tabel 7. 3: Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 372
Tabel 7. 4. Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022 373
Tabel 7. 5: Capaian Kinerja Program Prioritas 2 dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 373
Tabel 7. 6. Capaian Kinerja Program Prioritas 2 dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022 385
Tabel 7. 7: Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 412
Tabel 7. 8. Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022 417
Tabel 8. 1: Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat 428
Tabel 8. 2: Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (impact) Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat 429

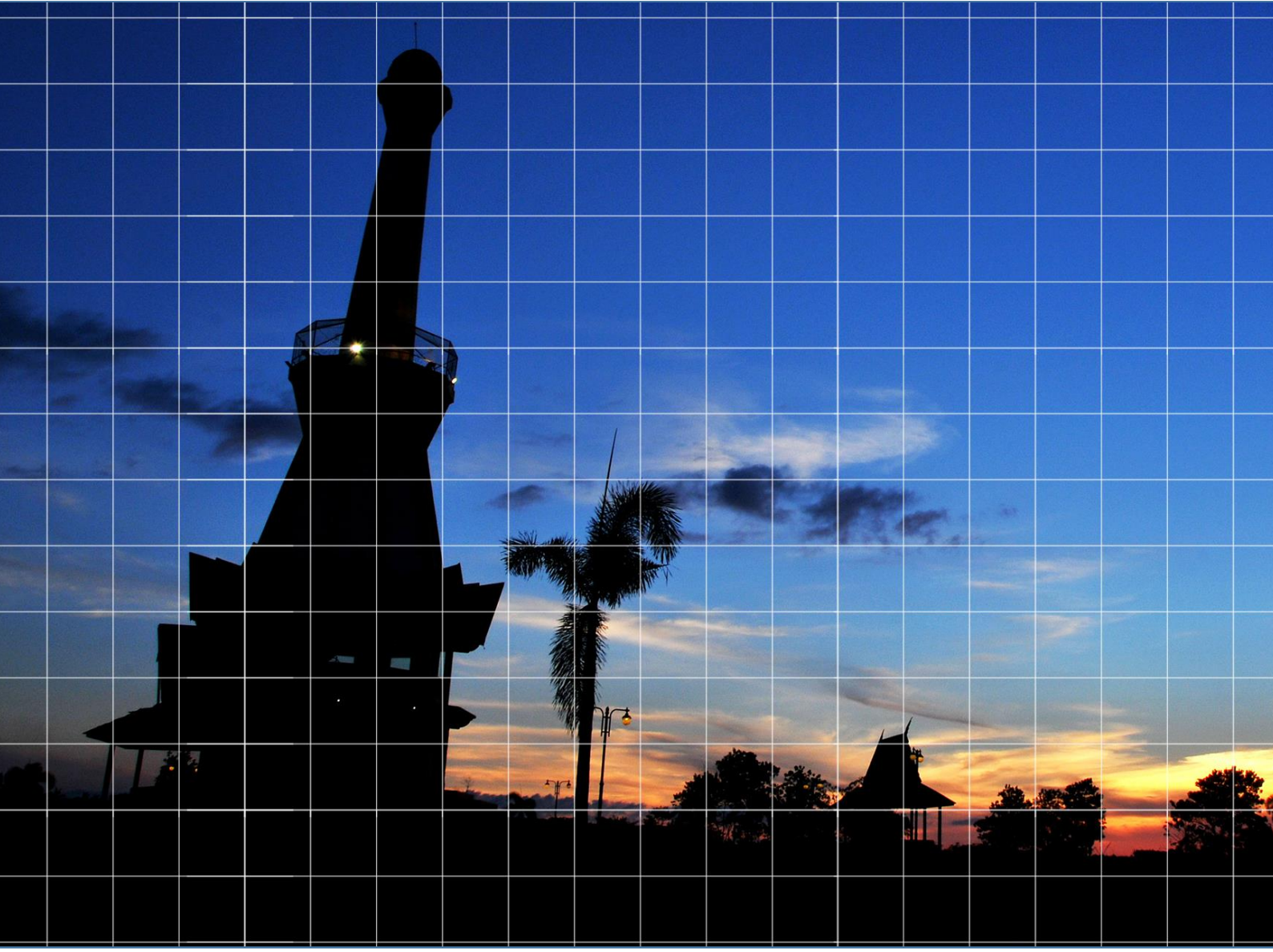
Daftar Gambar

Gambar 1. 1: Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 4
Gambar 1. 2: Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 8
Gambar 2. 1: Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat 17
Gambar 2. 2: Tingkat Kebakaran Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat 23
Gambar 2. 3: IPM Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015 33
Gambar 2. 4: PDRB kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2015 37
Gambar 2. 5: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 39
Gambar 2. 6: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%) 40
Gambar 2. 7: Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 41
Gambar 2. 8: Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 43
Gambar 2. 9: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%) 44
Gambar 2. 10: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 45
Gambar 2. 11: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 46
Gambar 2. 12: Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 46
Gambar 2. 13: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2015 47
Gambar 2. 14: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Tahun 2012 – 2016 55
Gambar 2. 15: Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan Tahun 2012- 2016 56
Gambar 2. 16: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2012 – 2016 57
Gambar 2. 17: Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan Tahun 2012 – 2016 58
Gambar 2. 18: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB Paru Tahun 2012 – 2016 58
Gambar 2. 19: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2012-2016 59
Gambar 2. 20: Cakupan Yankes Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2012-2015 59
Gambar 2. 21: Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2012-2015 60
Gambar 2. 22: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan terhadap PDRB (%) 86
Gambar 2. 23: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) 90
Gambar 2. 24: Pertumbuhan Ekonomi 94

Gambar 2. 25: Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat 95
Gambar 2. 26: Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) 98
Gambar 2. 27: Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%) 98
Gambar 2. 28: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat 100
Gambar 2. 29: Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan 102
Gambar 2. 30: Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%) 103
Gambar 2. 31: Realisasi Kontribusi Sektor Industri dan Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat 104
Gambar 2. 32: Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat 105
Gambar 2. 33: Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) kabupaten Kotawaringin Barat 106
Gambar 2. 34: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat 107
Gambar 2. 35: Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat 111
Gambar 2. 36: Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat 111
Gambar 2. 37: Angkatan kerja dan Pengangguran 113
Gambar 2. 38: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat 113
Gambar 5. 1: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1 244
Gambar 5. 2: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 245
Gambar 5. 3: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 246
Gambar 5. 4: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4 247
Gambar 5. 5: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 248
Gambar 5. 6: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-6 249
Gambar 5. 7: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 1 251
Gambar 5. 8: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2 252
Gambar 5. 9: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 3 253
Gambar 5. 10: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 4 254
Gambar 5. 11: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 5 255
Gambar 5. 12: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 6 256
Gambar 6. 1: Pemetaan Isu-Isu Sektoral Berdasarkan 4 Kuadran SWOT 266
Gambar 6. 2: Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2017-2022 267
Gambar 6. 3: Arah Kebijakan Pembangunan 279

Gambar 6. 4: Ilustrasi Transformasi agenda Politik kepala daerah 282

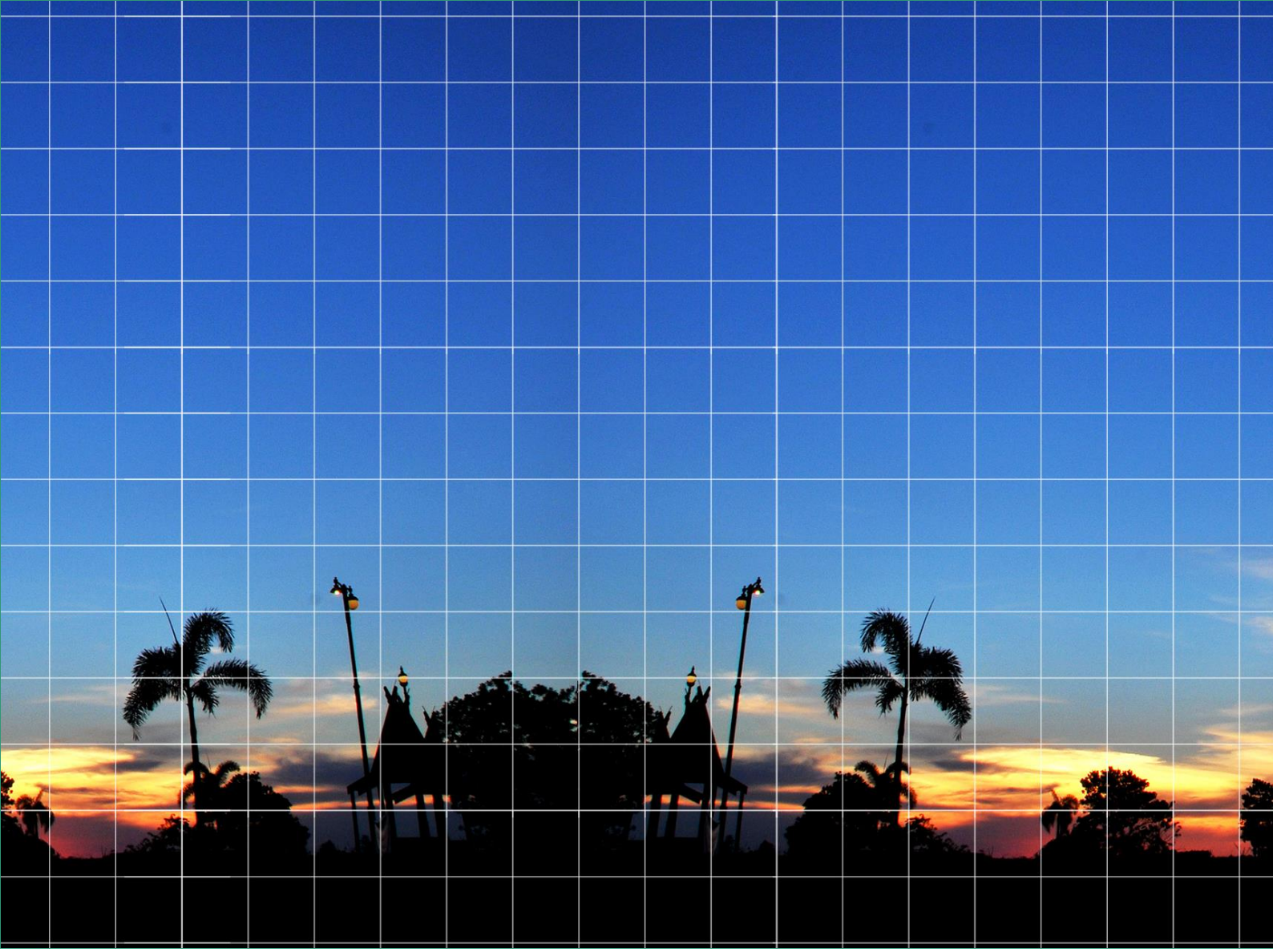
Sambutan



BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harusterencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.



Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi kepala daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah , kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama.

Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

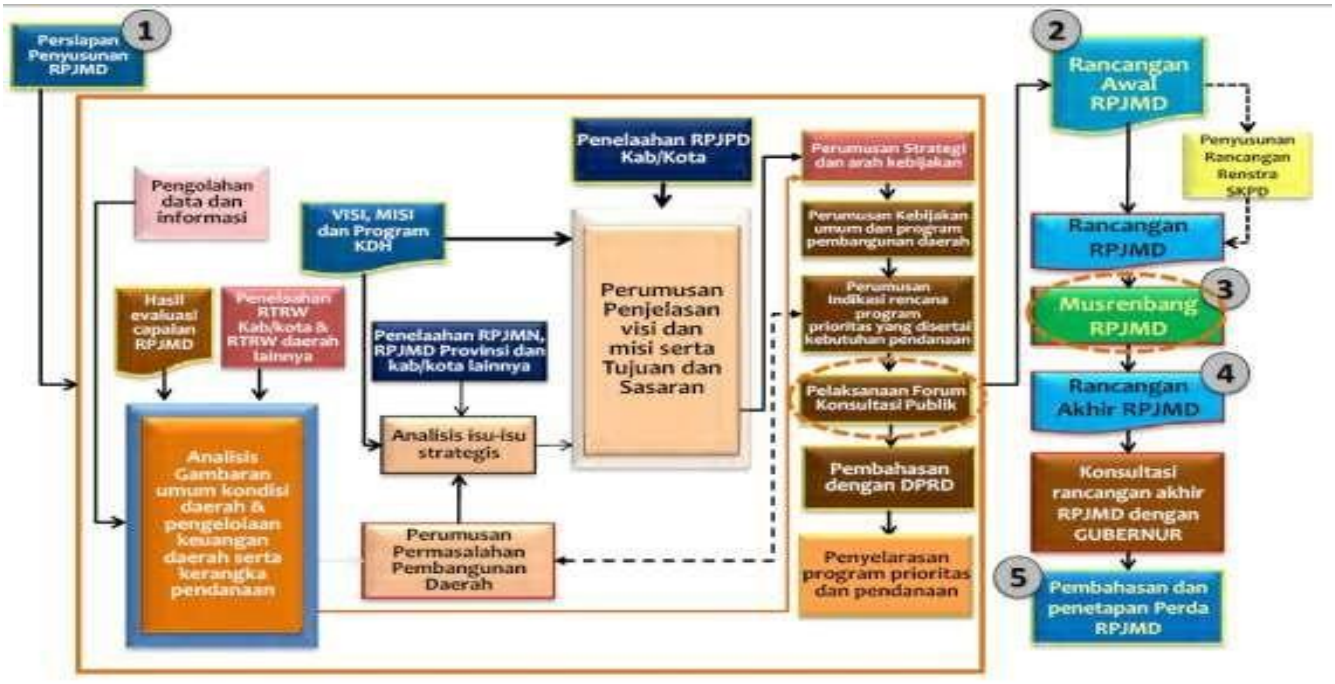
Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Keempat, pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas PERANGKAT DAERAH, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunanya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).



Gambar 1. 1: Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

a. Peraturan perundangan yang berlaku:
   1. Landasan idiil Pancasila
   2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

b. Landasan operasional sebagai berikut :
   1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan
   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
   4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.
   5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
   6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
   7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
   8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
   10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
   12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
   13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
   14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
   17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
   18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana Pembangunan Daerah

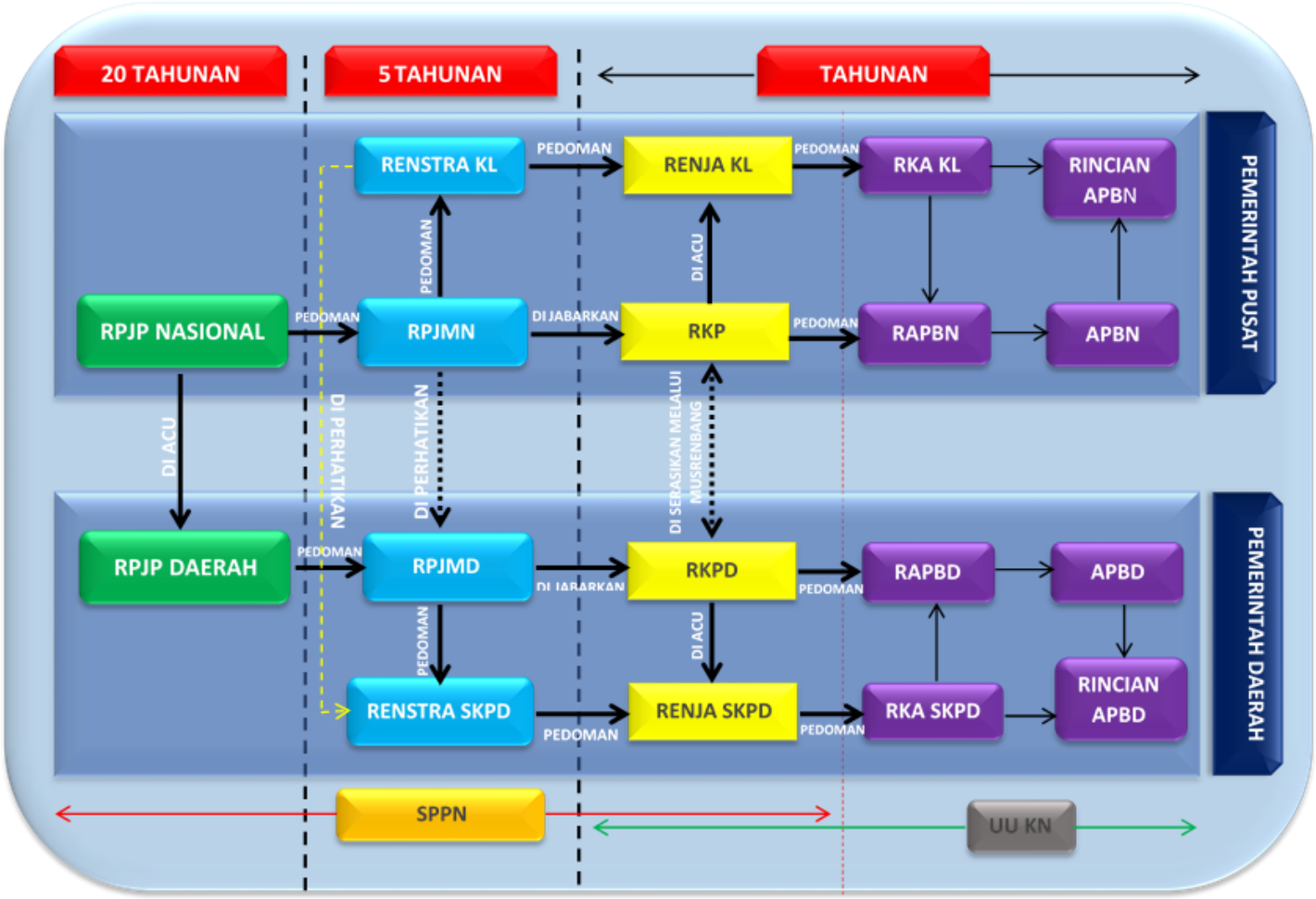
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
22. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 tahun 2006
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahaan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyesuaian Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor..... Tahun..... Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotwaringin Barat Nomor..... Tahun..... Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Waringin Barat

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 1. 2: Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 ditujukan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainibility development)* serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat ini juga meliputi rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, semua dokumen operasional dalam perencanaan periode Tahun 2017-2022 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat harus mengacu pada RPJMD ini.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat ini antara lain:

a. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Pembangunan daerah tahun 2017-2022.
b. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis tahun 2017-2022, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD tahun 2017-2022;
d. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022;
e. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
f. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.2 Neraca Daerah
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.2 Analisis Pembiayaan
3.3 Kerangka Pendanaan
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX PENUTUP

BAB 2: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km^2 atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1: Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM^2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	10.759	100,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2010

Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003, secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, 111°13'-112°6' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

2.1.2 Kondisi Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;
2. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;
3. Sebelah selatan adalah danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

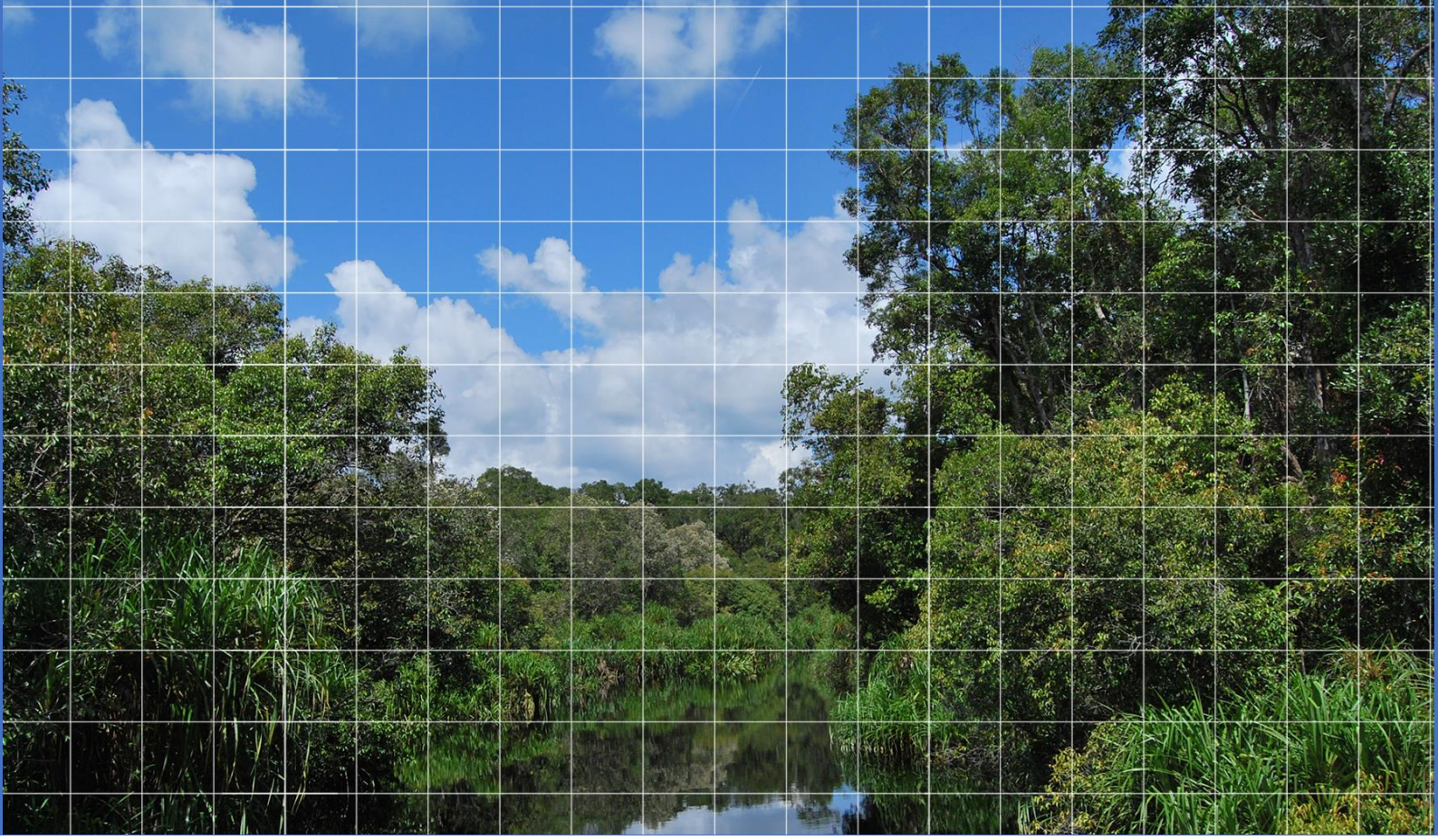
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya petanian, jika faktor lain mendukung.

Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan < 40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

Tabel 2. 2: Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				
		0 - 2 %	2 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %	Jumlah
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah		462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%		46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat



2.1.3 Keadaan Geologi

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3: Kondisi Geologi

Jenis Tanah	Tersebar di Daerah
Podsolik Merah Kuning	Tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai
Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)	Di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama
Kompleks Regosol (Podsol)	Bagian timur Kecamatan Kumai
Aluvial	Aliran sunga Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai
Organosol	Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan
Okisol (Lateritik)	Bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara

Rincian mengenai susunan geologi Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat pada tabel berikut.

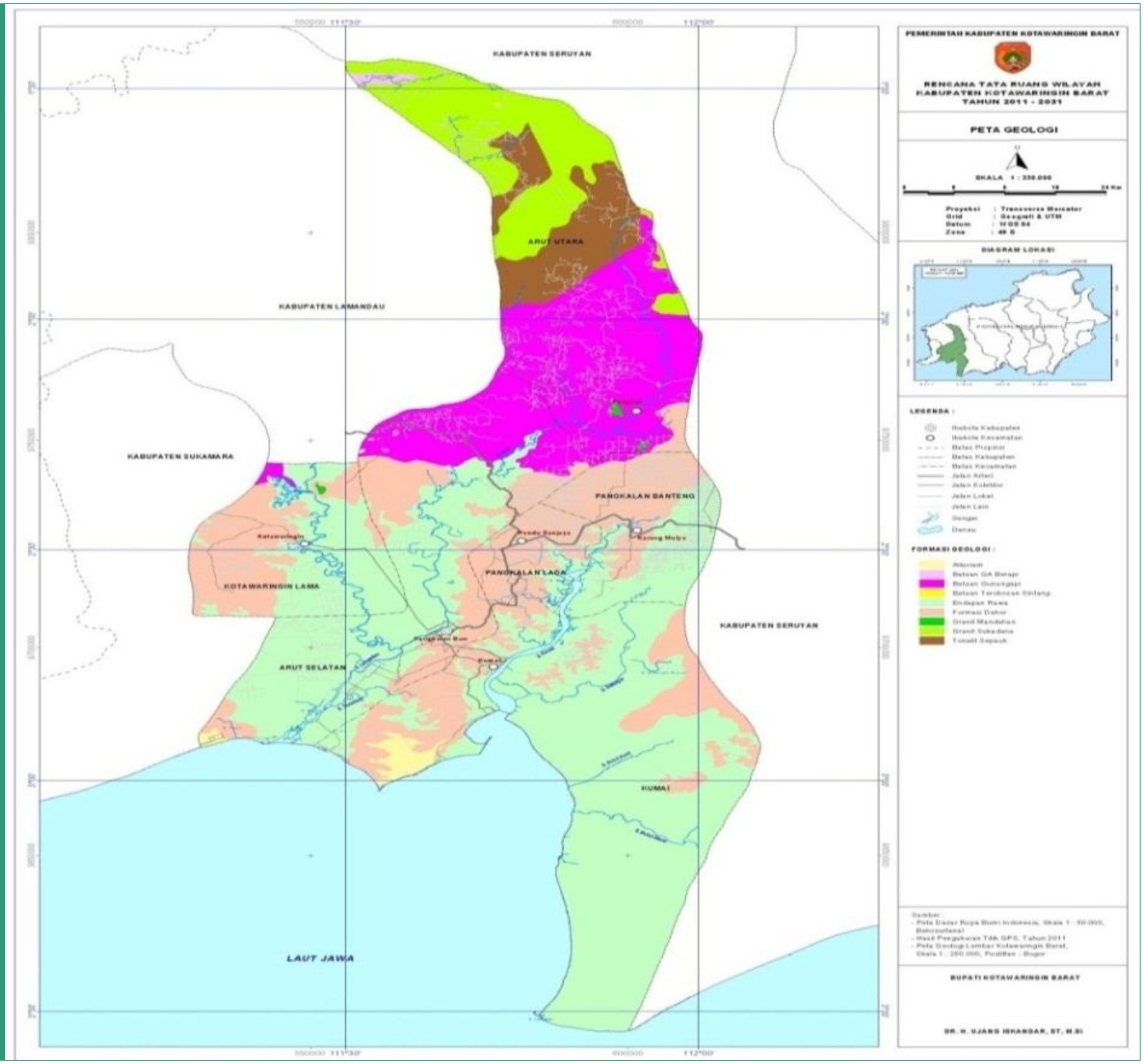
Tabel 2. 4: Formasi Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	%tase (%)
		Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai*	Arut Utara	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada		
1.	Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
2.	Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
3.	Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
4.	Batuan GA Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
5.	Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
6.	Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,68	24.208,56	223.223,25	25,61
7.	Endapan Rawa	52.640,00	118.916,03	120.353,27	0	37.083,02	7.101,18	336.093,50	38,56
8.	Batuan Gunung api	0	48.533,61	0	108.479,87	792,87	0	157.806,35	18,11
9.	Alluvium	0	129,33	6.912,01	0	0	0	7.041,34	0,81
10.	Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
JUMLAH		113.643,89	217.663,86	186.711,46	249.450,98	72.832,57	31.309,74	871.612,50	100,00

Sumber: Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

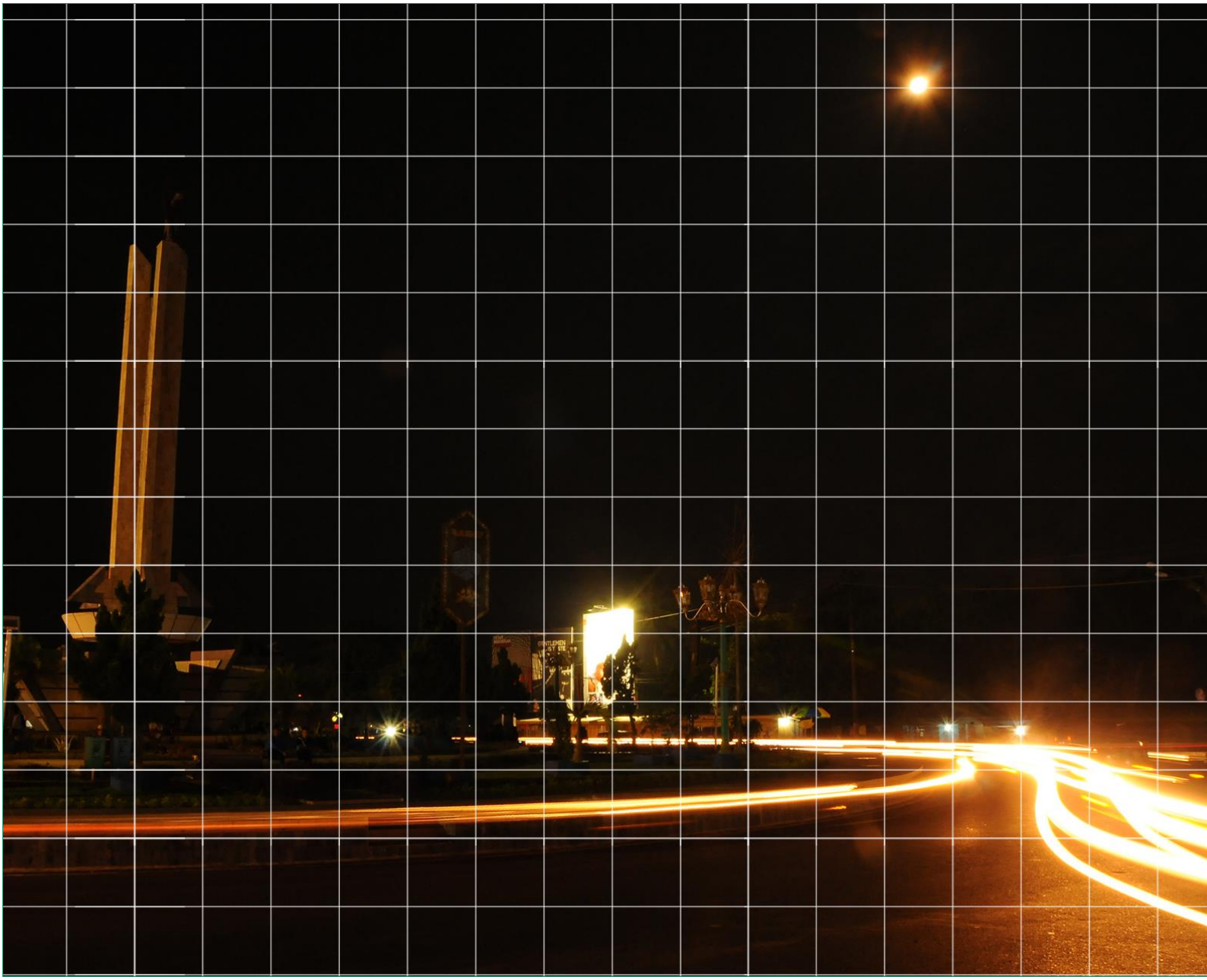
* Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting

Gambar 2.1: Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat



Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, terlihat bahwa formasi geologi terbanyak adalah formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. Lebih lanjut mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

.



2.1.4 Hidrologi

Pada umumnya di Kalimantan sungai mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, selain tempat mencari nafkah berperan sebagai sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktisvitasnya.

Tabel 2. 5: Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

2.1.5. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Rincian kondisi klimatologi Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 6: Suhu Udara Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2014

Bulan		Suhu Udara (°C)					
		2012		2013		2014	
		Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.
01.	32,9	32,9	23,0	32,5	23,4	34,4	22,2
02.	33,5	32,8	23,0	32,7	23,3	36,4	22,0
03.	32,7	32,9	23,1	33,8	23,5	34,8	22,0
04.	32,7	33,5	23,4	32,8	23,6	34,4	22,4
05.	33,6	33,5	23,1	32,6	23,9	35,8	20,0
06.	32,6	32,6	22,6	33,1	23,6	35,4	18,8
07.	32,5	31,2	22,4	31,6	22,5	33,4	21,0
08.	32,6	32,2	21,2	31,5	22,5	33,8	21,3
09.	31,4	33,0	22,0	32,1	23,0	35,5	21,0
10.	33,3	33,6	23,0	33,4	22,9	36,2	20,8
11.	32,5	33,0	23,3	32,5	23,0	35,4	22,0
12.	32,6	32,3	23,2	31,9	23,4	35,0	22,2

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2. 7: Kecepatan Angin Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2014

Bulan		Kecepatan Angin					
		2012		2013		2014	
		Maks.	Rata-rata	Maks.	Rata-rata	Maks	Rata-rata
01.	Januari	13,0	7,6	15	2,5	19	3,1
02.	Pebruari	14,0	7,8	11	2,1	11	2,5
03.	Maret	15,0	8,0	15	2,2	16	2,2
04.	April	12,0	7,6	16	2,3	12	1,6
05.	Mei	33,5	7,5	16	2,2	13	2,4
06.	Juni	16,0	9,2	21	2,1	18	2,4
07.	Juli	18,0	10,4	16	2,4	14	2,9
08.	Agustus	14,0	10,4	15	3,2	14	3,4
09.	September	14,0	10,0	15	3,0	22	3,6
10.	Oktober	12,0	8,6	15	2,8	16	3,3
11.	Nopember	16,0	8,2	22	2,3	12	2,4
12.	Desember	12,0	7,4	14	2,4	12	2,3

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2. 8: Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kotawaringin Barat

Bulan		Jumlah Hari Hujan			Curah Hujan (mm)		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
01.	Januari	26	19	12	227,4	152,5	139,2
02.	Pebruari	23	19	16	202,3	180,9	208,4
03.	Maret	25	25	24	164,3	233,2	423,8
04.	April	17	24	27	362,6	326	193,6
05.	Mei	8	22	23	123	236,2	321,7
06.	Juni	11	15	19	68,5	229	229,1
07.	Juli	11	18	10	68,6	224,3	38,6
08.	Agustus	11	15	15	81,3	201,1	132,1
09.	September	4	18	8	4	146,7	48,9
10.	Oktober	16	12	10	181,2	139,2	62,7
11.	Nopember	21	25	21	231,8	341,7	308,4
12.	Desember	27	27	25	351,8	353,4	200,4
Jumlah		200	239	210	2 066,8	2 764,2	2 306,9

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

2.1.6. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya (hutan lindung) mempunyai skor lereng, jenis tanah, curah hujan > 175 ; kemiringan > 40 % dan ketinggian > 500 m dpl. Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya, terdiri dari :

1) Hutan Lindung

Hutan lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas hutan lindung persebarannya terletak disebagian Kecamatan Arut Utara dengan luas kurang lebih 8.754 hektar dan Pulau Kelapa, Pulau Samudera Kecil, Pulau Batimbul, Pulau Bengaris, Pulau Seluluk, dan Pulau Terusan Pulau Samudera di Desa Tanjung Putri.

2) Kawasan Bergambut dan Resapan Air

a) Kawasan Bergambut

Kawasan bergambut berada diantara Sungai Arut dan Sungai Lamandau Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas kurang lebih 132.927 hektar.

b) Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air di Kabupaten kotawaringin Barat seluas 28,991 hektar yang berada di Kecamatan Arut Selatan seluas 491 hektar, Kecamatan Kumai seluas 5000 hektar, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 6000 hektar, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 4500 hektar, Kecamatan Arut Utara seluas 8000 hektar dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 5000 hektar.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

1) Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai ini membentang di bagian selatan wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, mulai dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Kumai sampai wilayah pesisir selatan Kecamatan Arut Selatan. Panjang pantai ini kurang lebih 156 Km, sehingga luas lahan perlindungan sempadan pantai adalah 1.560 hektar.

2) Kawasan Sempadan Sungai

Sungai-sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu dilindungi adalah sungai-sungai besar seperti Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai Lamandau. Perlindungannya sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri dan kanan sungai dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai tersebut melintasi lingkungan permukiman, maka areal

perlindungannya adalah 10-50 meter di kiri-kanan sungai.

Sempadan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas kurang lebih 725 Km². Untuk DAS Arut luas sempadan sungai sekitar 250 Km², sedangkan DAS Lamandau yang mengalir dari Kabupaten Lamandau memiliki sempadan sungai yang harus dilindungi seluas 325 Km² dan DAS Kumai yang merupakan kumpulan anak - anak sungai memiliki luas 150 Km².

3) Kawasan Sempadan Danau/Rawa

Danau-danau yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Danau Kenambui dan Sulung di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal dan Danau Masorayan di Kecamatan Kotawaringin Lama. Areal yang perlu dilindungi adalah selebar 50-100 meter dari bibir danau ke arah darat.

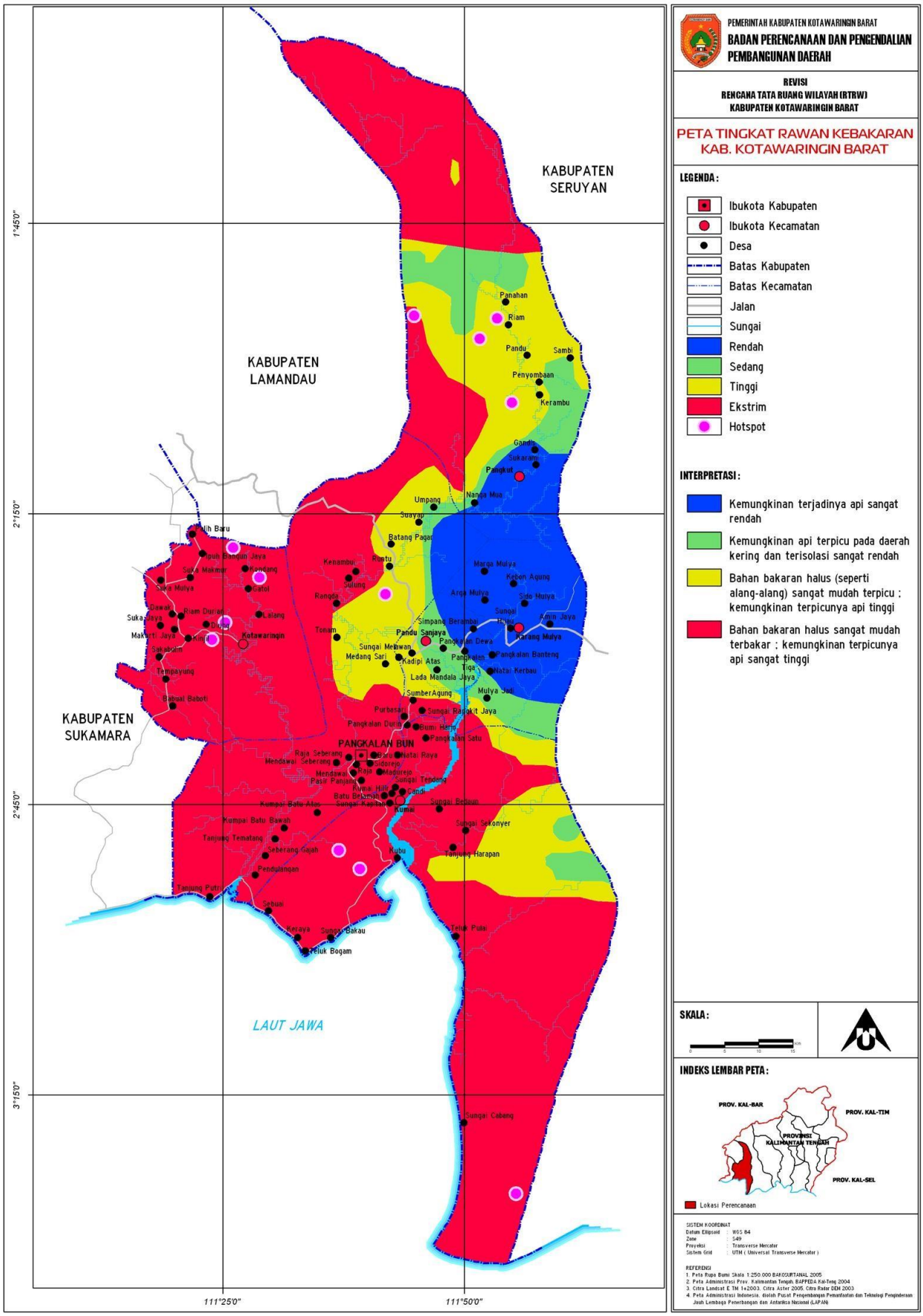
4) Kawasan air terjun

Kawasan air terjun patih mambang desa keraya kecamatan kumai; dan

5) Kawasan kearifan lokal lainnya

Kawasan kearifan lokal lainnya meliputi desa pasir panjang kecamatan arut selatan dan desa sekonyer kecamatan kumai.

Gambar 2. 2: Tingkat Kebakaran Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat



c. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Kebakaran
   Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1122 titik rawan atau seluas 205 km2 . Kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama.

2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang
   Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai terutama Tanjung Pengujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai Sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai;

3) Kawasan Rawan Banjir
   Kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang. di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang;

4) Jalur Evakuasi Bencana
   Jalur evakuasi bencana berada pda kawasan bandara baru di Kecamatan Kumai dan Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan; dan

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

1) Kawasan Suaka Alam
   Kawasan yang merupakan kawasan suaka alam di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:
   a) Taman Nasional Tanjung Puting secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Seruyan. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 266.546 hektar.
   b) Taman Wisata Alam Tanjung Keluang berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 2.563 hektar.

2) Kawasan Pelestarian Alam
   Kawasan pelestarian alam yaitu Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau dan suaka alam laut (kawasan padang lamun yang berada di sepanjang garis pantai Desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas kurang lebih 35.822 hektar. kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan sepagar. daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang);

3) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Istana Kuning/Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam dan Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Di Kecamatan Arut Utara yaitu Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahiang Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi.

4) Kawasan Lindung Geologi

Sumber mata air terbesar berasal dari tiga sungai yang berada di Kabupaten kotawaringin barat yaitu, Sungai Kumai sepanjang 175 Km, Sungai Lamandau sepanjang 325 Km dan Sungai Arut sepanjang 250 Km. Untuk kawasan mata air lainnya berada di kecamatan Arut Selatan meliputi tebing tinggi, Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui. Terdapat kawasan mata air yang berasal dari danau di Kecamatan Kotawaringin Lama (Danau Gatal, Masorayan, Terusan, Asam, Purun dan Batang Pagar) seluas 1,210 hektar.

e. Kawasan Lindung Lainnya

1) Kawasan Perlindungan Plasma-Nutfah

Kawasan lindung hutan plasma-nutfah merupakan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) seluas 266.546hektar, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau seluas 35.822 hektar dan Tanjung Keluang seluas 2.563 hektar.

2) Kawasan Terumbu Karang dan Biota Laut yang di Lindungi

Kawasan yang merupakan daerah Konservasi Laut Daerah (KKLD) terutama terumbu karang, ikan dan padang lamun yang dilindungi berada di Gosong Senggora dan Sepagar dan daerah perlindungan laut terutama ikan berada di Gosong Sebogor dan Tanjung Keluang.

3) Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang di Lindungi

kawasan koridor bagi jenis satwa dan biota laut yang di lindungi yaitu ikan, terumbu karang dan padang lamun di Gosong Senggora, Sepagar, Gosong Sebogor, dan Tanjung Keluang di Kecamatan Kumai;

4) Kawasan Cagar Biosfer

Kawasan cagar biosfer yang terdiri dari zona inti/area inti, zona penyangga, dan zona transisi berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

5) Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Kawasan pantai berhutan bakau yaitu di sungai mambang desa kubu hingga Desa Sungai Bakau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 6,973 hektar;

6) Kawasan Konservasi Perairan Sungai Atau Danau

Kawasan konservasi perairan sungai atau danau, meliputi:

a) Kawasan konservasi perairan sungai Arut di sungai Desa Panahan seluas 1.500 hektar;
b) Kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas 200 hektar;
c) Kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas 1.500 hektar;
d) Kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas 250 hektar;
e) Kawasan konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.

7) Kawasan Hutan Kota

Kawasan hutan kota yang telah ditetapkan dengan Perda seluas 785,75 hektar, meliputi:

a) Kawasan Wisata Alam Kelurahan Sidorejo seluas 5 hektar
b) Kawasan Pangkalan TNI AU seluas 713 hektar
c) Hutan Kota Desa Purbasari seluas 55,75 hektar
d) Kawasan Klinik Rehabilitasi Orang Utan seluas 12 hektar
e) Hutan lindung dalam arti khusus Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seluas 411 hektar;
f) Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai (penanaman turus jalan di Kecamatan Arut Selatan seluas 25 hektar); dan
g) Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan (penanaman turus jalan di Kota Pangkalan Bun seluas 10 hektar).

8) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

Kawasan Padang Lamun yang berada di sepanjang garis pantai desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 hektar. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 200 hektar. Daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang.

9) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

a) Kriteria Kawasan Budidaya

Terdapat banyak kriteria untuk penentuan kawasan budidaya khususnya untuk budidaya pertanian dalam arti luas. Beberapa diantaranya adalah: Kepmentani No. 837/Kpts/UM/II/1980 dan No. 683/Kpts/UM/8/1981 dimana jumlah bobot nilai dari ketiga faktor fisik (lereng, jenis tanah dan curah hujan) haruslah berbobot < 124, dan juga kriteria landsystem yang berpedoman pada kesesuaian lahan dan berdasarkan kriteria fisik lahan.

b) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi diarahkan pemanfaatannya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kayu serta keperluan industri, baik untuk tujuan lokal, nasional maupun ekspor. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari 3 kawasan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 286.485 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 53.582 hektar dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) seluas 160.185 hektar.

c) Kawasan Hutan Rakyat (HTR)

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 668 hektar berada di Kecamatan Arut Utara yang meliputi Desa Nanga Mua, Desa Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu, dan Desa Gandis.

d) Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL)

Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain adalah kawasan dengan peruntukan kegiatan budidaya, kawasan pemukiman kota, desa, kawasan industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hutan rakyat, serta penggunaan lain selain diatas.

2.1.7. Gambaran Umum Demografi

2.1.7.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 269.629 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,05 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9: Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2011 - 2014

No	Kecamatan	Tahun				Laju Pertumb. 2013-2014
		2011	2012	2013	2014	
1	Kotawaringin Lama	17.321	17.777	18.232	18.695	2,54
2	Arut Selatan	101.999	105.176	108.378	111.658	3,03
3	Kumai	48.176	49.612	51.056	52.534	2,89
4	Pangkalan Banteng	32.309	33.890	35.525	37.231	4,80
5	Pangkalan Lada	28.928	29.804	30.686	31.589	2,94
6	Arut Utara	16.167	16.740	17.323	17.922	3,46
Kotawaringin Barat		244.900	253.000	261.200	269.629	3,23

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Pada pertengahan tahun 2014 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 3,23 %, dari 261.200 jiwa pada tahun 2013 menjadi 269.629 jiwa pada pertengahan tahun 2014. Rasio jenis kelamin dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10: Banyaknya Rumah tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kotawaringin Lama	5.110	9.901	8.794	18.695	112,59
2	Arut Selatan	29.642	58.178	53.480	111.658	108,78
3	Kumai	11.991	27.476	25.058	52.534	109,65
4	Pangkalan Banteng	10.506	20.078	17.153	37.231	117,05
5	Pangkalan Lada	8.662	16.811	14.778	31.589	113,76
6	Arut Utara	4.954	10.298	7.624	17.922	135,07
Jumlah 2014		70.865	142.742	126.887	269.629	112,50
2013		68.600	138.200	123.000	261.200	112,36

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2014 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 135 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 135 penduduk laki-laki.

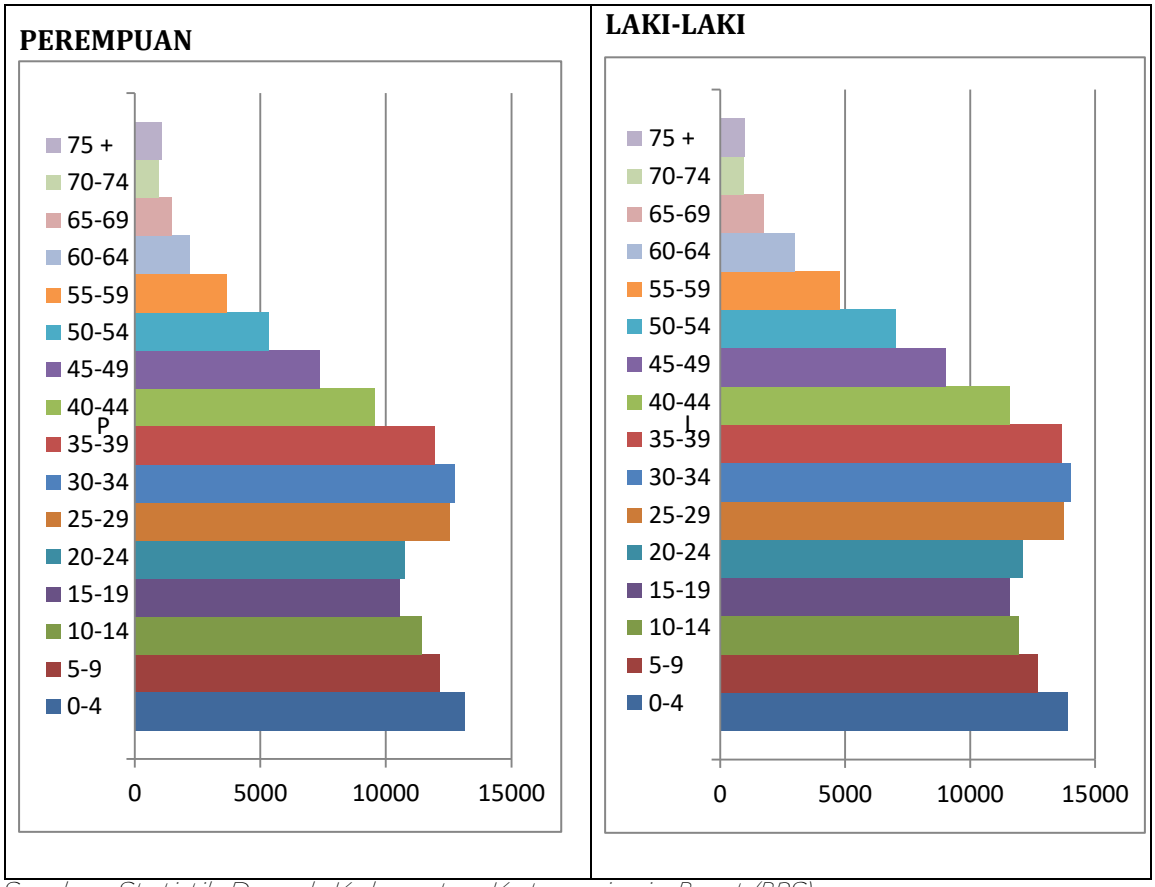
Tabel 2. 11: Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin,

Kelompok Umur	*Jenis Kelamin*			Seks Rasio	% terhadap Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
0 – 4	13.907	13.145	27.052	105,80	10,03
5 – 9	12.717	12.155	24.872	104,62	9,22
10 – 14	11.951	11.437	23.388	104,49	8,67
15 – 19	11.582	10.540	22.122	109,89	8,20
20 – 24	12.115	10.748	22.863	112,72	8,48
25 – 29	13.733	12.541	26.274	109,50	9,74
30 – 34	14.021	12.734	26.755	110,11	9,92
35 – 39	13.682	11.954	25.636	114,46	9,51
40 – 44	11.596	9.575	21.171	121,11	7,85
45 – 49	9.022	7.355	16.377	122,66	6,07
50 – 54	7.005	5.331	12.336	131,40	4,58
55 – 59	4.768	3.667	8.435	130,02	3,13
60 – 64	2.989	2.202	5.191	135,74	1,93
65 – 69	1.729	1.475	3.204	117,22	1,19
70 – 74	957	944	1.901	101,38	0,71
75 +	968	1.084	2.052	89,30	0,76
Jumlah	142.742	126.887	269.629	112,50	100,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Tabel diatas memperlihatkan penduduk kelompok umur 0 - 4 tahun lebih banyak dibanding penduduk kelompok umur 5 - 9 tahun. Hal ini mengindikasikan tingkat fertilitas pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2013

Tabel 2. 12: Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2014



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Dari piramida penduduk tersebut terlihat komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa, kemudian kelompok penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar dibanding penduduk perempuan di usia yang sama.

Tabel 2. 13: Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk Menurut Kecamatan, 2014

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)	Rata-rata Penduduk	
			Per Desa	Per Rumah Tangga
1	Kotawaringin Lama	15,35	1.099,71	3,66
2	Arut Selatan	46,52	5.582,90	3,77
3	Kumai	17,98	2.918,56	4,38
4	Pangkalan Banteng	28,51	2.190,06	3,54
5	Pangkalan Lada	137,94	2.871,73	3,65
6	Arut Utara	6,67	1.629,27	3,62
Jumlah 2014		25,06	2.868,39	3,80
2013		24,28	2.778,72	3,81

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2014 sebesar 25,06 jiwa per km², Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 137,94 jiwa per km² dan disusul Kecamatan Arut Selatan 46,52 jiwa per km², Kecamatan Pangkalan Banteng 28,51 jiwa per km², Kecamatan Kumai 17,98 jiwa per km², Kecamatan Kotawaringin Lama 15,35 jiwa per km² dan terakhir Kecamatan Arut Utara 6,67 jiwa per km².

2.1.7.2. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebanyak 195.373 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14: Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2013		Tahun 2014	
		Jiwa	%	jiwa	%
I	*Angkatan Kerja*	126.935	67,63	136.864	70,05
1.	Bekerja	122.307	65,16	133.222	68,19
2.	Pengangguran	4.628	2,47	3.642	1,86
II	*Bukan Angkatan Kerja*	60.759	32,37	58.509	29,95
1.	Sekolah	15.141	8,07	17.465	8,94
2.	Mengurus Rumah Tangga	39.732	21,17	35.598	18,22
3.	Lainnya	5.886	3,14	5.446	2,79
Jumlah		187.694	100	195.373	100

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tahun 2014, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 195.373 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 70,05 % merupakan angkatan kerja, sedangkan 29,95 % bukan merupakan angkatan kerja. Jumlah tersebut masih berada dibawah target RPJMD pada tahun 2014 yang mana mensyaratkan TPAK sebesar 78 %. Dari 136.864 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 3.642 orang atau 1,86 %. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut sudah berada dibawah target RPJMD 2014 yang sebesar 2,3 %.

Tabel 2. 15: Angkatan Kerja

No.	Tahun	AK (Jiwa)	TPAK (%)	TKK (%)	TPT (%)
1.	2011	123.110	74,04	97,19	2,81
2.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
3.	2013	126.935	67,63	97,53	2,47
4.	2014	136.864	70,05	98,14	1,86

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 269.629 jiwa terdapat Angkatan Kerja (AK) sebanyak 136.864 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,05 %, dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 98,14% serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,86 %. Progres Tingkat Pengangguran tujuh tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 5,43 % pada tahun 2008 menjadi 1,86 % pada tahun 2014. Proporsi jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2012 - 2014 berdasarkan perhitungan PDRB tahun dasar 2000 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2. 16: Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2012		2013		2014	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47.612	40,43	45.505	38,07	65.960	49,51
2	Pertambangan & Penggalian	13.704	11,64	13.662	11,43	3.724	2,80
3	Industri Pengolahan	7.761	6,59	9.848	8,24	6.049	4,54
4	Listrik, Gas & Air	526	0,45	513	0,43	240	0,18
5	Bangunan/ Konstruksi	6.031	5,12	8.628	7,22	8.801	6,61
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	21.811	18,52	21.040	17,60	25.925	19,46
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	5.350	4,54	6.469	5,41	6.983	5,24
8	Keuangan, Perbankan & Jasa Perusahaan	803	0,68	1.132	0,95	1.352	1,01
9	Jasa-jasa	14.164	12,03	12.736	10,65	14.188	10,65
JUMLAH		117.762	100	119.533	100	133.222	100

Sumber: Data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Sektor Pertanian dalam arti luas masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2014 yaitu sebesar 49,51 %, diikuti oleh sektor Perdagangan sebesar 19,46 % dan sektor Jasa-jasa sebesar 10,65 % yang menjadi tiga sektor utama sebagai penyedia lapangan usaha sebesar 79,62%.

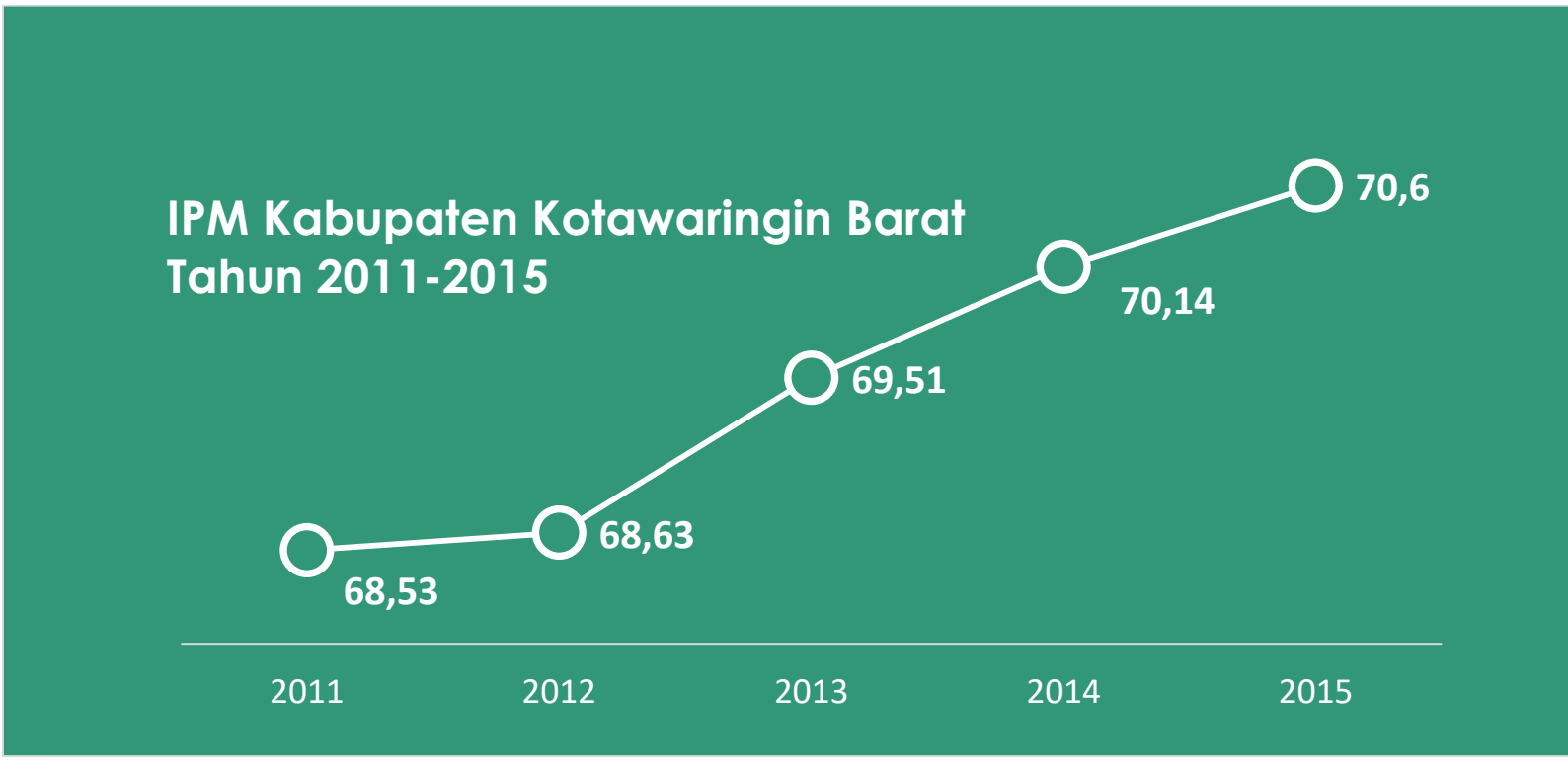
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga

2.2.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

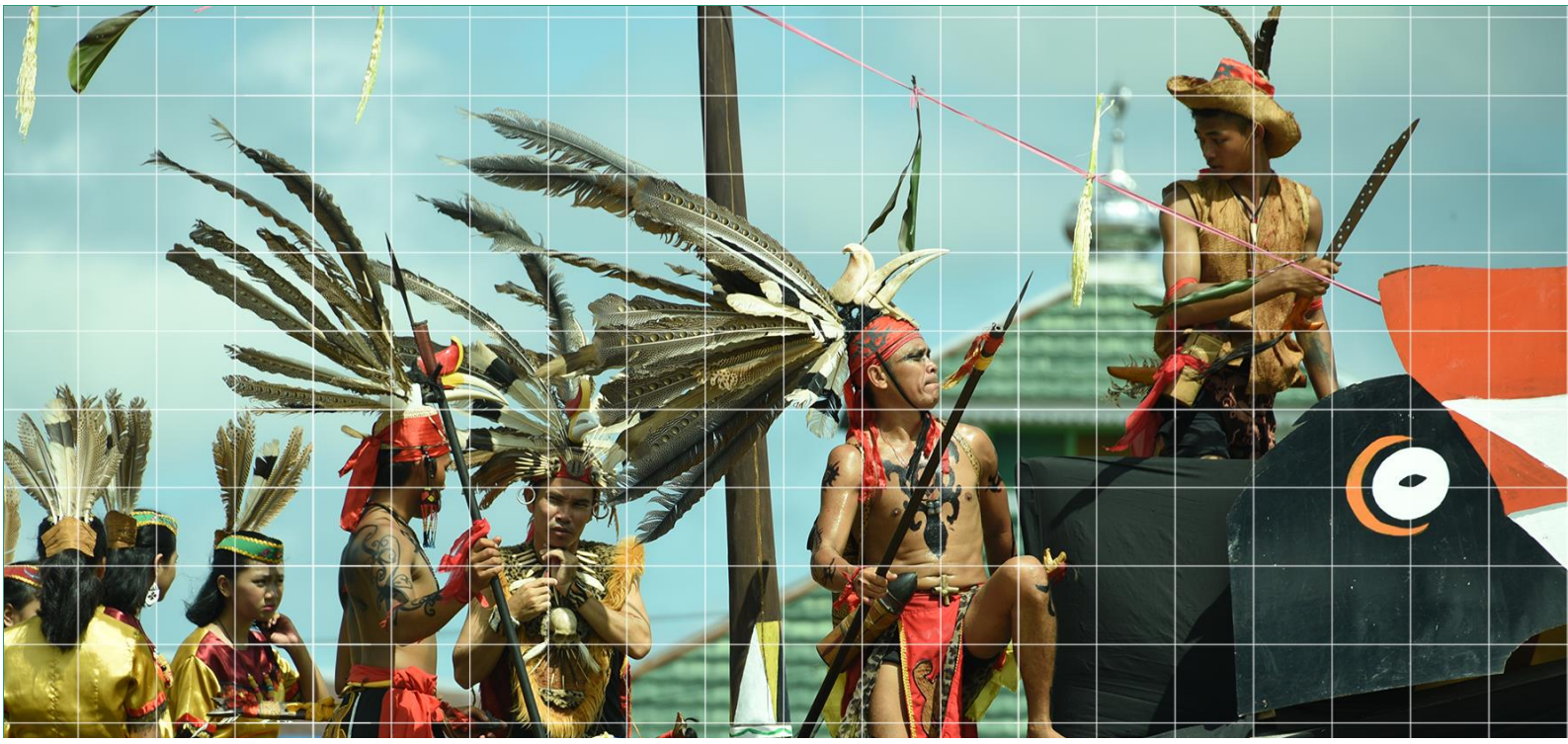
a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3: IPM Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016



b. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.17. Selanjutnya dalam Tabel 2.18. Dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2015 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi leading sector dalam pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan kontribusi sekitar 26,38 %. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,43 %, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 12,59 %.

Tabel 2. 17: PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2011-2015

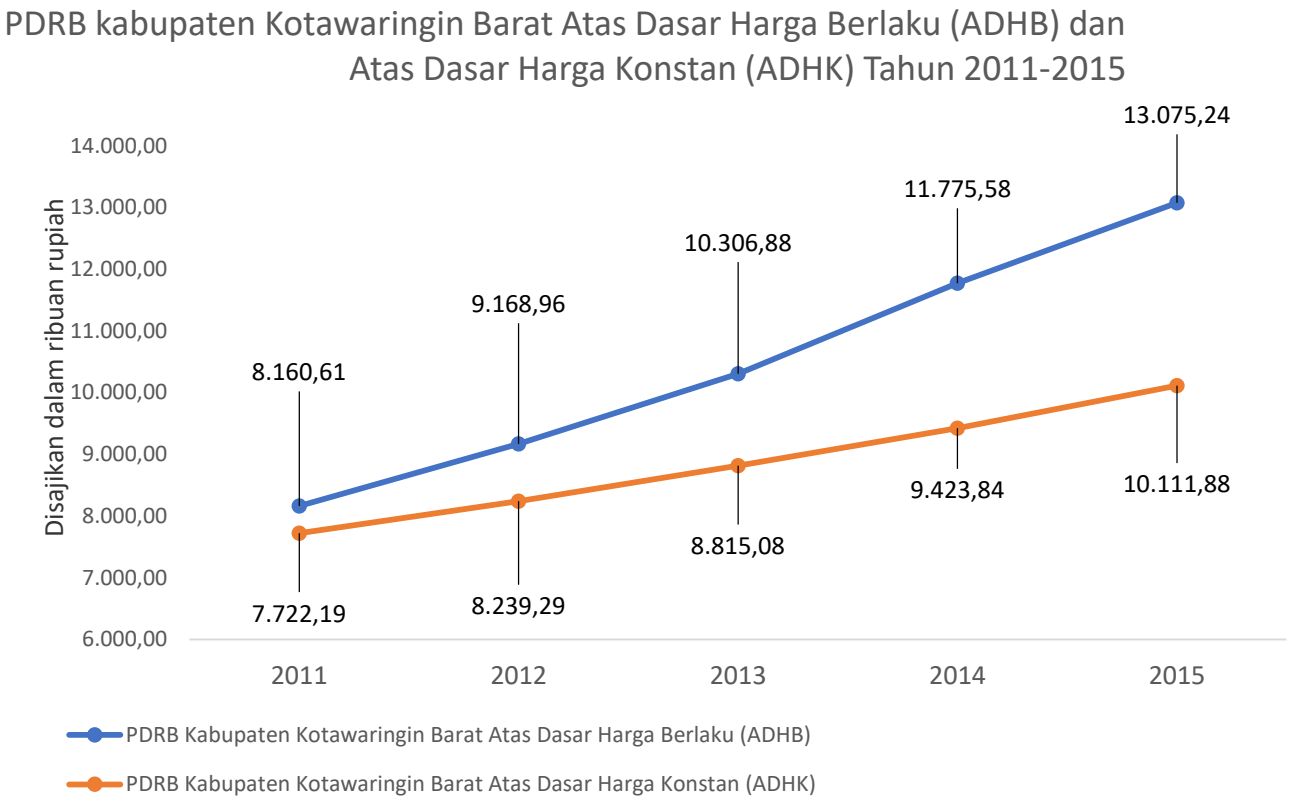
NO	LAPANGAN USAHA	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.460.314,6	30,15	2.732.704,7	29,80	2.918.476,2	28,32	3.261.355,0	27,70	3.449.449,6	26,38
B	Pertambangan dan Penggalian	142.317,0	1,74	165.002,9	1,80	180.262,9	1,75	169.228,7	1,44	179.041,2	1,37
C	Indsutri pengolahan	1.974.179,2	24,19	2.223.038,1	24,25	2.557.543,4	24,81	3.028.657,3	25,72	3.324.772,6	25,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.322,2	0,04	3.453,0	0,04	3.545,1	0,03	4.204,9	0,04	6.322,9	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.730,3	0,08	7.574,3	0,08	8.350,2	0,08	10.009,4	0,09	11.492,4	0,09
F	Konstruksi	667.868,8	8,18	748.255,7	8,16	853.762,5	8,28	971.321,7	8,25	1.103.333,4	8,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	984.287,1	12,06	1.092.119,7	11,91	1.229.551,7	11,93	1.415.030,0	12,02	1.646.500,6	12,59
H	Transportasi dan Pergudangan	613.838,5	7,52	683.899,1	7,46	822.714,6	7,98	939.272,8	7,98	1.096.937,1	8,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100.201,8	1,23	115.987,7	1,27	132.236,8	1,28	145.588,9	1,24	171.901,2	1,31
J	Informasi dan Komunikasi	81.268,7	1,00	90.458,9	0,99	99.599,0	0,97	116.329,3	0,99	128.076,0	0,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	353.659,9	4,33	429.195,8	4,68	502.906,9	4,88	604.010,7	5,13	694.010,0	5,31
L	Real Estate	143.046,8	1,75	165.177,5	1,80	188.299,8	1,83	203.163,3	1,73	240.223,9	1,84
M,N	Jasa Perusahaan	3.535,9	0,04	4.115,3	0,04	4.877,2	0,05	5.732,5	0,05	6.432,2	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	245.149,1	3,00	283.222,5	3,09	331.890,5	3,22	375.914,0	3,19	419.649,9	3,21
P	Jasa Pendidikan	218.488,3	2,68	237.629,6	2,59	265.091,5	2,57	288.035,6	2,45	326.455,8	2,50
Q_	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90.083,3	1,10	102.504,0	1,12	111.058,5	1,08	130.909,9	1,11	148.270,3	1,13
RSTU	Jasa Lainnya	72.318,6	0,89	84.621,5	0,92	96.714,7	0,94	106.819,2	0,91	122.369,4	0,94
	JUMLAH	8.160.610,0		9.168.960,2		10.306.881,5		11.775.583,2		13.075.238,5	

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 2. 18: PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2011-2015

NO	LAPANGAN USAHA	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.242.691,1	29,04	2.355.547,2	28,59	2.430.133,1	27,57	2.593.036,2	27,52	2.745.466,5	27,15
B	Pertambangan dan Penggalian	133.356,8	1,73	140.985,4	1,71	151.113,2	1,71	131.436,5	1,39	133.371,6	1,32
C	Indsutri pengolahan	1.940.558,6	25,13	2.061.316,3	25,02	2.217.996,9	25,16	2.391.937,9	25,38	2.558.264,8	25,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.551,0	0,05	3.894,1	0,05	4.239,3	0,05	4.673,0	0,05	5.447,9	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.588,4	0,09	7.152,4	0,09	7.505,5	0,09	8.221,6	0,09	8.896,2	0,09
F	Konstruksi	646.317,4	8,37	697.800,0	8,47	763.670,2	8,66	815.094,6	8,65	885.898,2	8,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	929.528,0	12,04	1.007.960,6	12,23	1.080.903,7	12,26	1.132.837,9	12,02	1.232.135,6	12,19
H	Transportasi dan Pergudangan	596.912,8	7,73	646.977,0	7,85	737.655,2	8,37	775.545,3	8,23	829.053,3	8,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	92.369,1	1,20	99.906,5	1,21	107.934,4	1,22	118.108,0	1,25	128.555,8	1,27
J	Informasi dan Komunikasi	80.632,3	1,04	88.771,0	1,08	94.447,0	1,07	102.192,5	1,08	110.037,5	1,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	333.467,0	4,32	367.448,7	4,46	404.316,9	4,59	468.437,7	4,97	515.071,9	5,09
L	Real Estate	130.532,0	1,69	143.252,0	1,74	156.668,6	1,78	170.990,5	1,81	186.011,3	1,84
M,N	Jasa Perusahaan	3.354,7	0,04	3.672,6	0,04	4.036,3	0,05	4.357,3	0,05	4.666,2	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	226.473,8	2,93	242.866,1	2,95	259.908,4	2,95	287.129,9	3,05	315.723,4	3,12
P	Jasa Pendidikan	200.964,8	2,60	205.619,4	2,50	219.004,2	2,48	234.213,2	2,49	252.615,9	2,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84.931,8	1,10	91.312,6	1,11	96.579,9	1,10	101.046,6	1,07	110.359,1	1,09
RSTU	Jasa Lainnya	69.965,5	0,91	74.812,1	0,91	78.971,2	0,90	84.579,1	0,90	90.308,9	0,89
	Jumlah	7.722.194,9		8.239.294,0		8.815.084,0		9.423.837,8		10.111.884,1	

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat



Gambar 2. 4: PDRB kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2015

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016

Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori industri pengolahan serta kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang diusahakan baik masyarakat maupun perkebuanan swasta besar. Adanya perkebunan swasta besar diikuti dengan berdirinya industri pengolahan kelapa sawit meskipun belum optimal dengan hasil yang utama adalah minyak CPO dan minyak goreng, selain itu juga adanya industri pengolahan hasil hutan yang sudah lama eksis di Kabupaten Kotawaringin Barat.

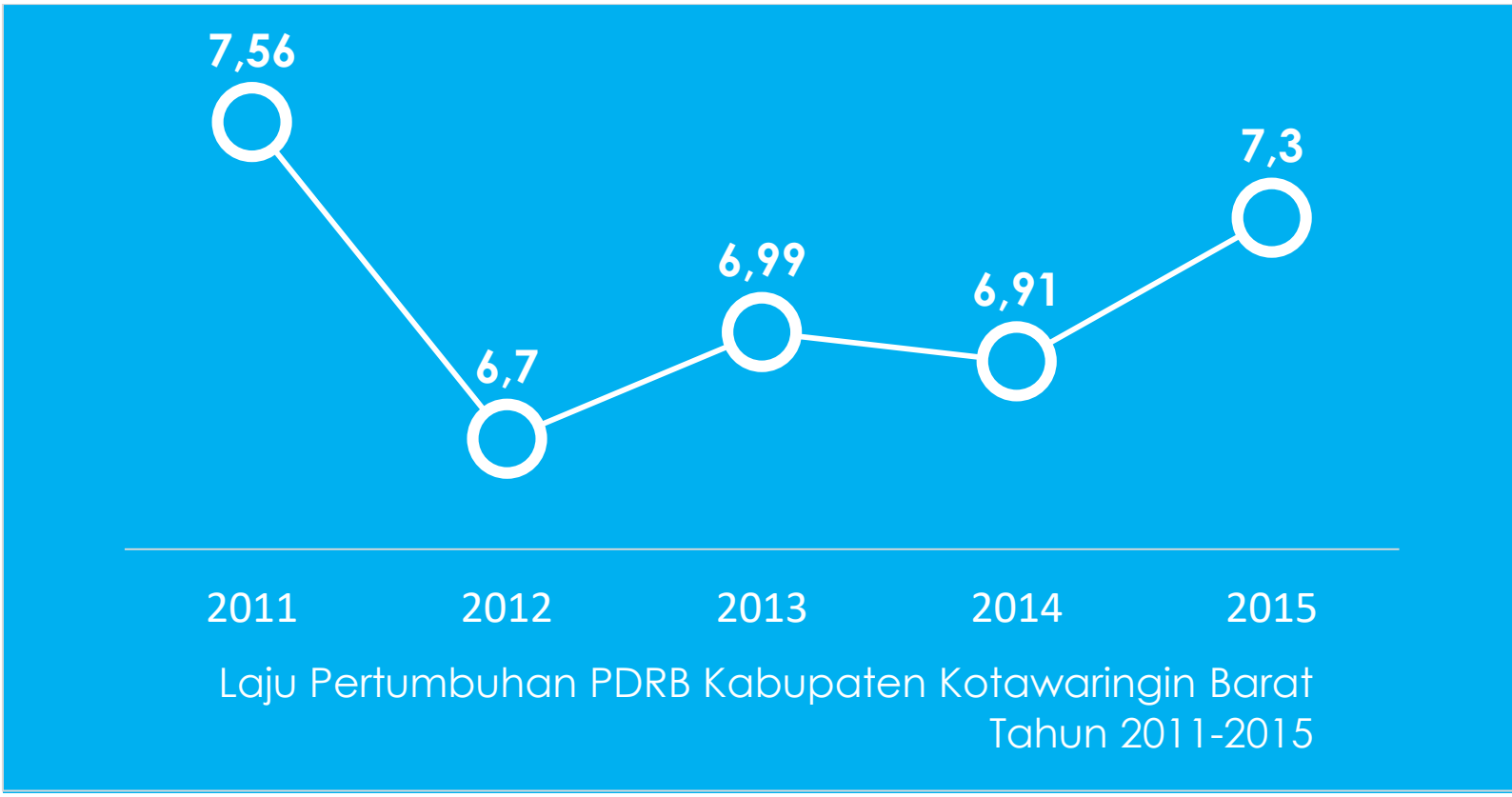
c. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

Kinerja perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha. Selama kurun waktu 5 tahun pertumbuhan kategori pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tumbuh cukup bervariasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 19: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 - 2015

NO	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,09	5,03	3,17	6,70	5,88
B	Pertambangan dan Penggalian	7,55	5,72	7,18	13,02	1,47
C	Indsutri pengolahan	6,48	6,22	7,60	7,84	6,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,42	9,66	8,87	10,23	16,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,19	8,56	4,94	9,54	8,21
F	Konstruksi	6,30	7,97	9,44	6,73	8,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,57	8,44	7,24	4,80	8,77
H	Transportasi dan Pergudangan	17,55	8,39	14,02	5,14	6,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,28	8,16	8,04	9,43	8,85
J	Informasi dan Komunikasi	11,35	10,09	6,39	8,20	7,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	32,12	10,19	10,03	15,86	9,96
L	Real Estate	9,73	9,74	9,37	9,14	8,78
M, N	Jasa Perusahaan	9,82	9,48	9,90	7,95	7,09
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,87	7,24	7,02	10,47	9,96
P	Jasa Pendidikan	6,12	2,32	6,51	6,94	7,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,72	7,51	5,77	4,62	9,22
RSTU	Jasa Lainnya	5,25	6,93	5,56	7,10	6,77
Jumlah		7,56	6,70	6,99	6,91	7,30

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat,

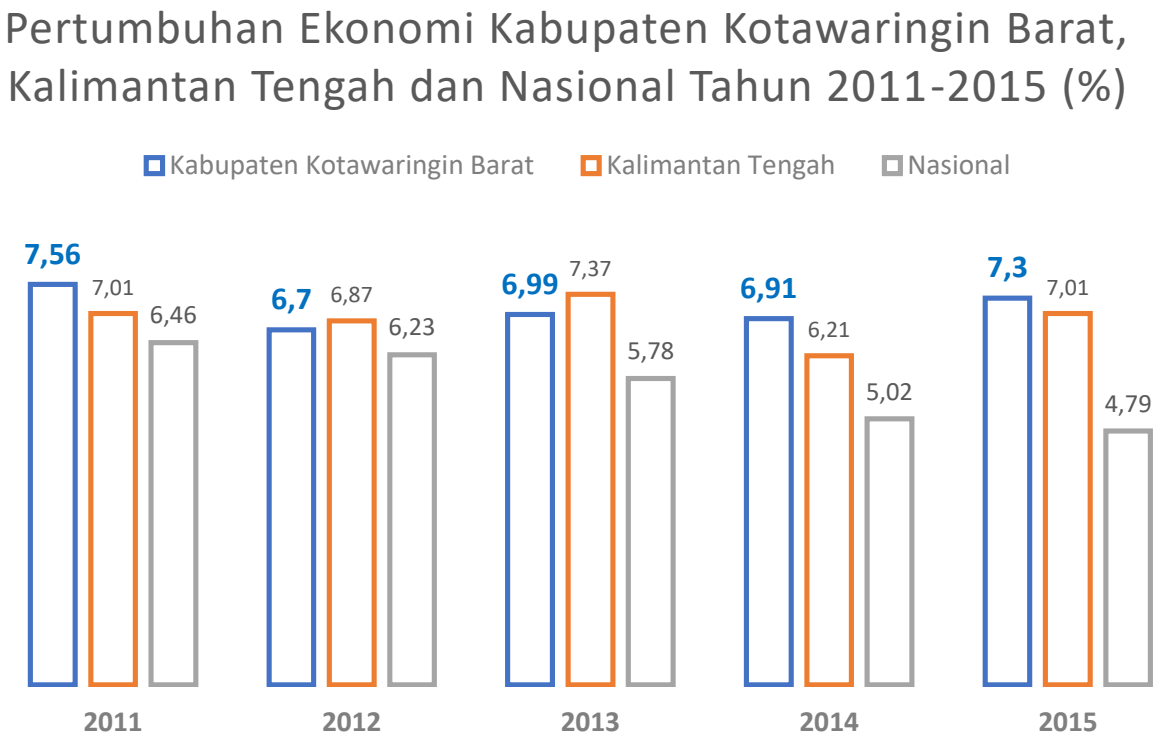


Gambar 2. 5: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat,

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan yang positif

Berdasarkan uraian diatas sektor - sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat mampu tumbuh stabil di kisaran 6 hingga 7%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan Nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perlambatan sejak tahun 2014 dan 2015 yang berada dikisaran 6 %, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Kalimantan Tengah dan Nasional seperti nampak pada Gambar 2.6 dibawah ini.

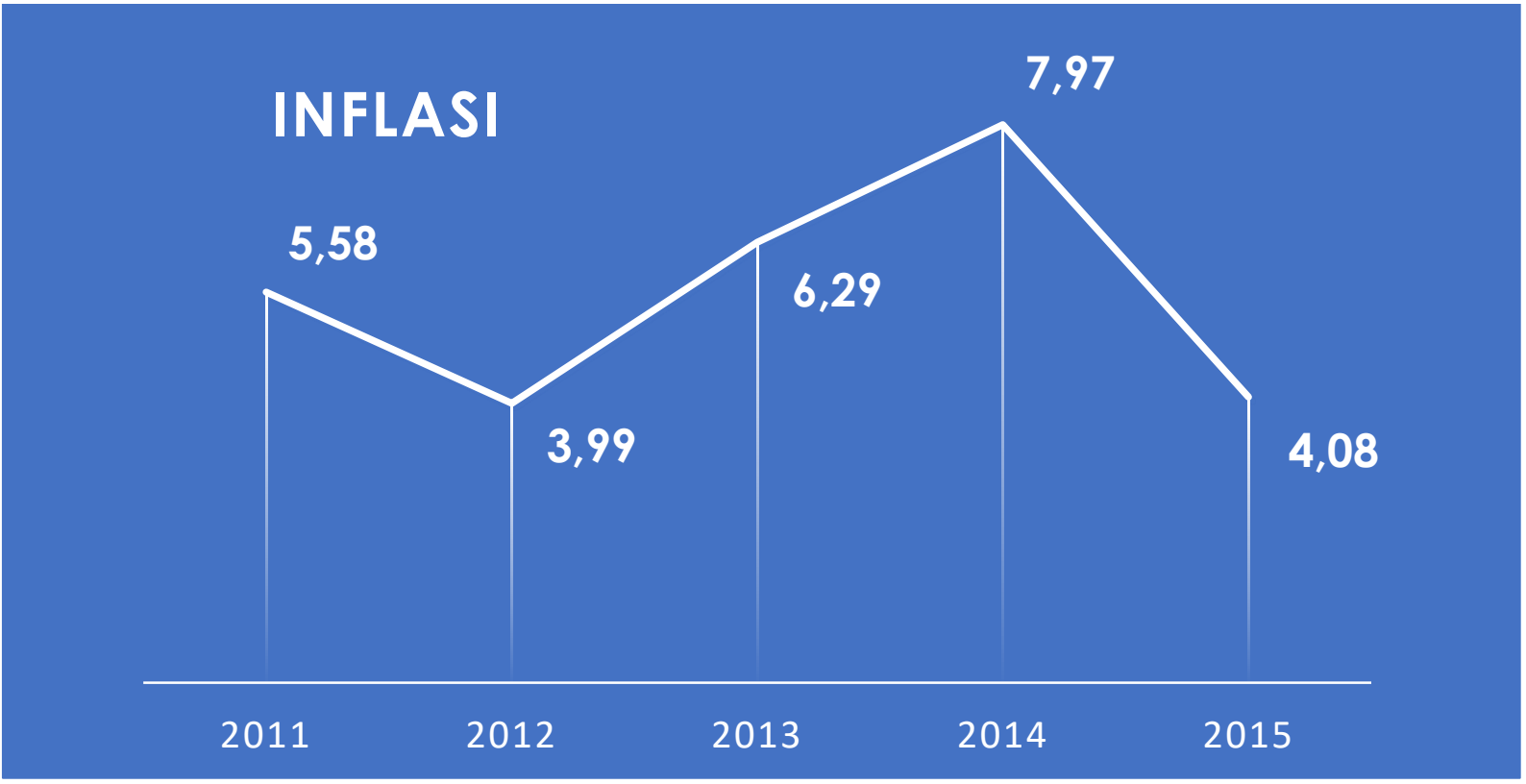


Gambar 2. 6: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat,

d. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Perkembangan inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 tahun cukup fluktuatif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,97 %. Angka tersebut tergolong dalam inflasi ringan yang nilainya dibawah angka 10 %. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka Inflasi pada Tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.7 berikut ini:



Gambar 2. 7: Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat krbutuhan bahan pokok Kabupaten Kotawaringin Barat banyak yang didatangkan dari Pulau Jawa.

e. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 20: PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Juta Rp)	8.160.610,0	9.168.960,2	10.306.881,45	11.775.583,11	13.075.238,45
PDRB Per Kapita (Juta Rp)			40.738.661,86	45.082.630,57	48.493.442,64
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Juta Rp)	7.722.194,9	8.239.294,0	8.815.083,85	9.423.837,66	10.111.883,82
PDRB Per Kapita(Juta Rp)			34.842.228,65	36.079.010,96	37.502.953,37

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat, PDRB per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

f. Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 sebesar Rp 279.080,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah). Angka Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjukkan pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2. 21: Indikator Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015

Indikator Kemiskinan	2011	2012	2013	2014	2015
Garis Kemiskinan (Rp)	238.987	263.840	273.467	279.080	
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	16,5	14,37	14,30	14,33	
Angka Kemiskinan (%)	6,19	5,63	5,44	5,27	

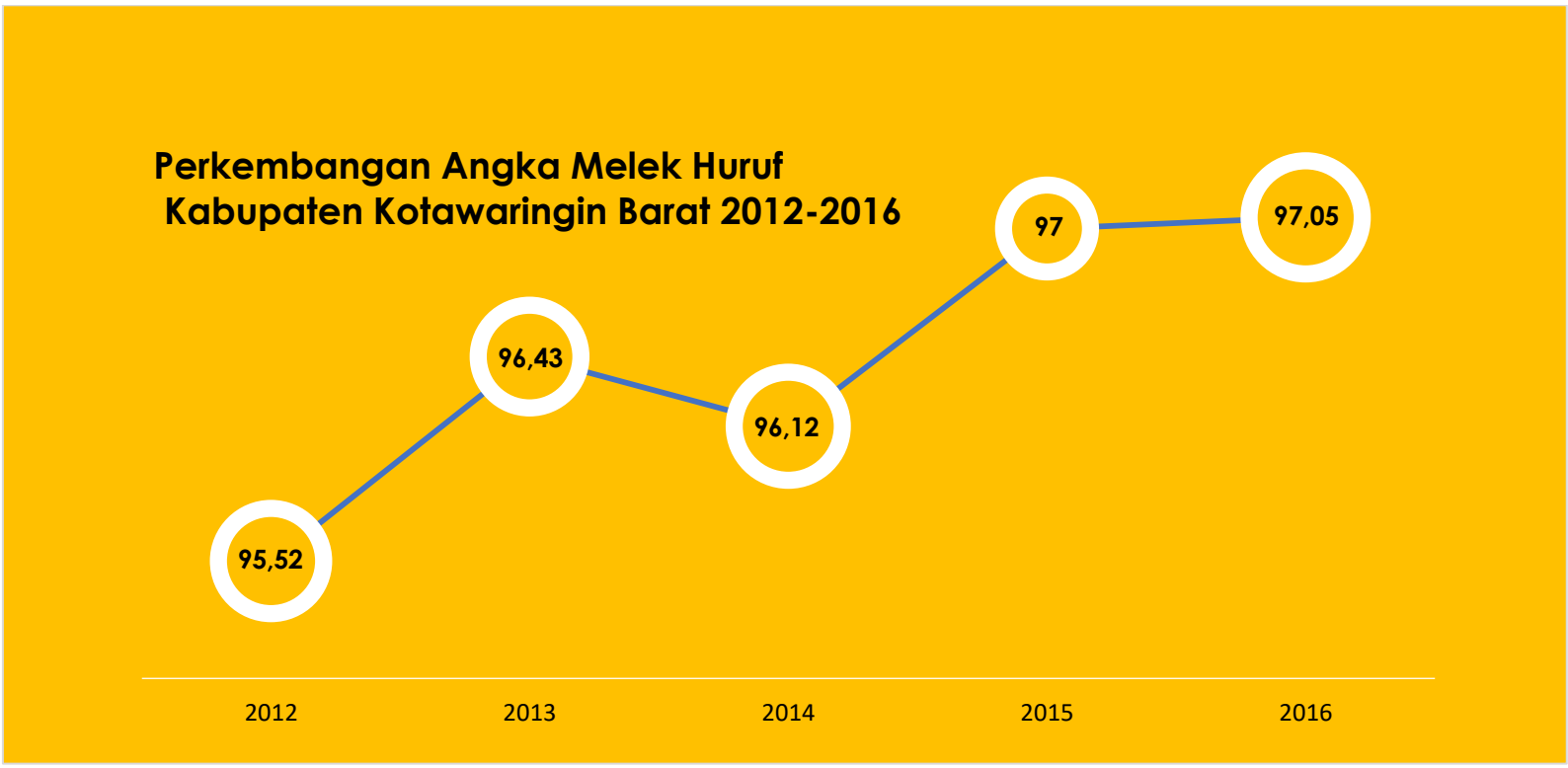
Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat

Memperhatikan data pada Tabel 2.21 tersebut di atas, bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada masih cukup banyak yaitu 143.300 jiwa.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan angka melek huruf penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Gambar 2.8 berikut.

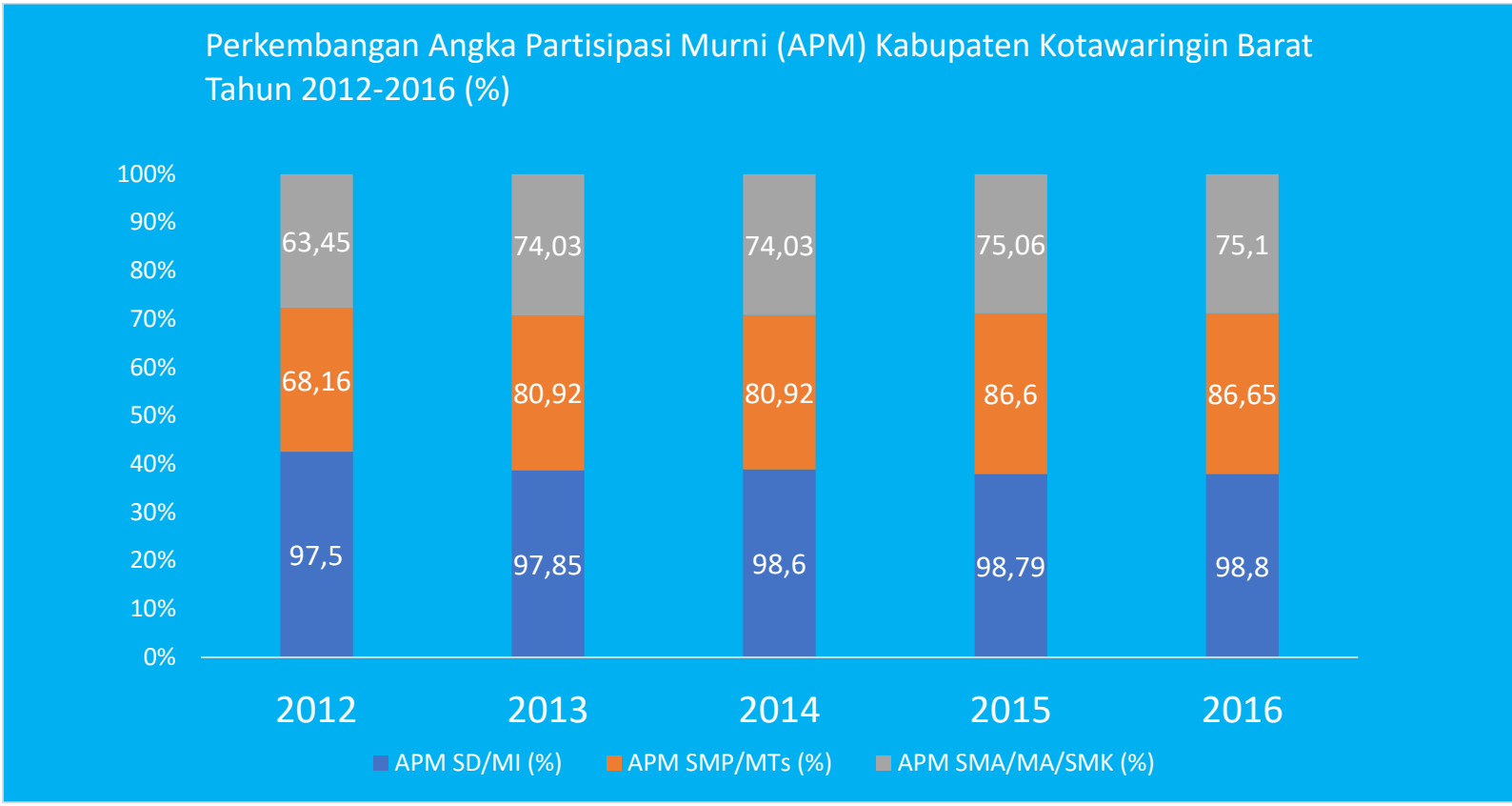


Gambar 2. 8: Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotawaringin Barat

Dari gambar tersebut, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat usia 15 tahun keatas belum seluruhnya mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.9 sebagai berikut:

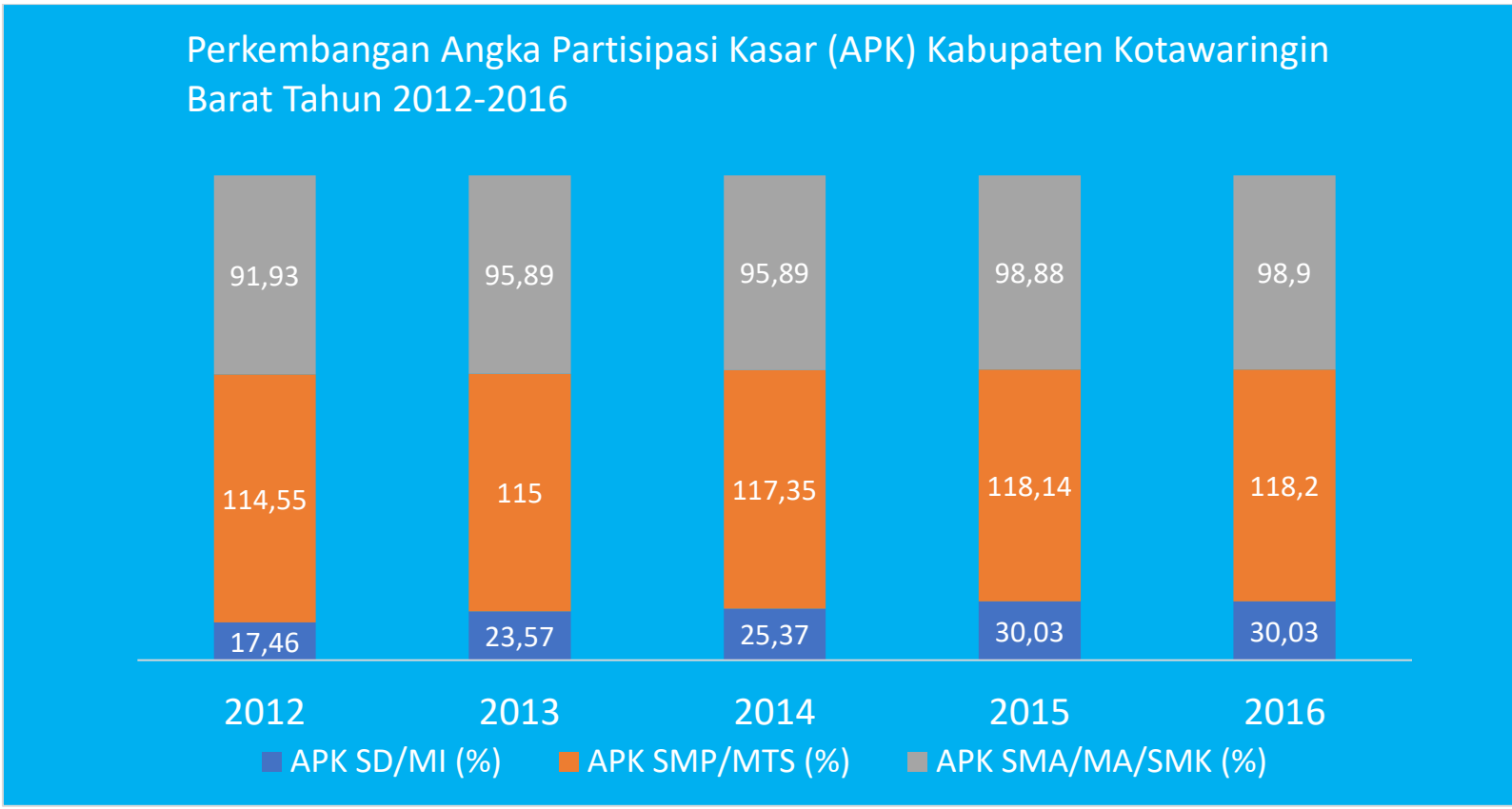


Gambar 2. 9: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%)

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotawaringin Barat

Dari data pada Gambar 2.9 di atas menunjukkan bahwa seluruh APM baik jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami kenaikan. Sedangkan Gambar 2.10 di bawah ini menunjukkan bahwa APK jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami kenaikan.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Rekap data perkembangan APK Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.10 sebagai berikut:

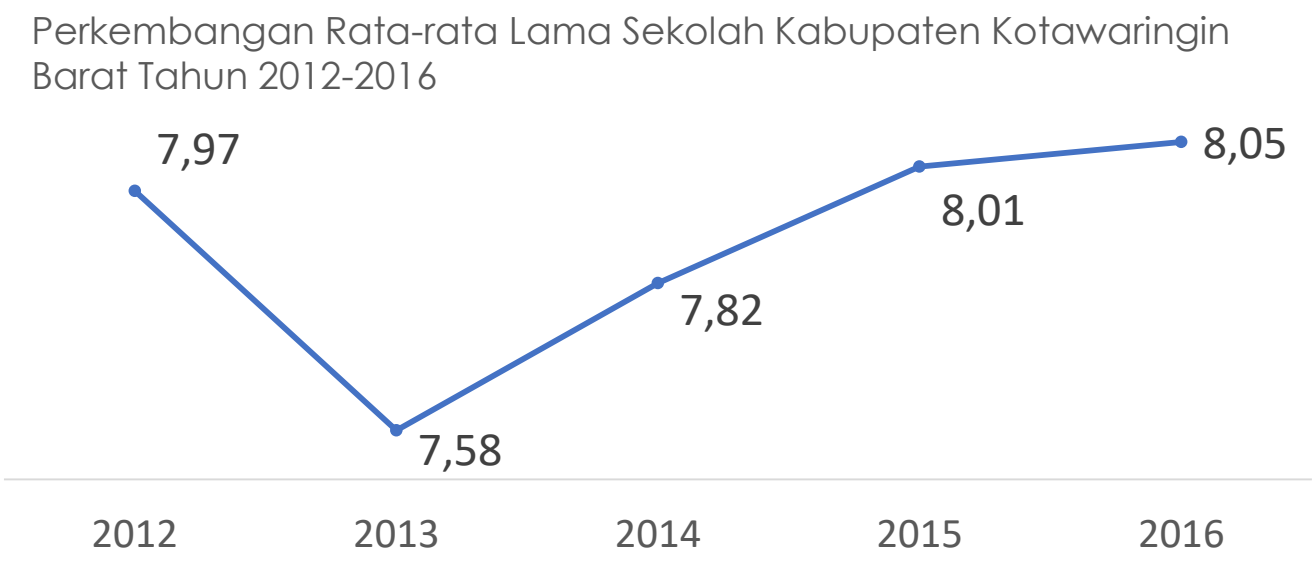


Gambar 2. 10: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotawaringin Barat

Dari data pada Gambar 2.10 di atas menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum mengenyam pendidikan sampai jenjang menengah atau SMA. Kondisi ini terjadi karena masih terbatasnya SMA/SMK/MA yang sebagian besar di ibukota kecamatan belum terjangkau semua lulusan SMP/MTs yang berada jauh dari ibukota kecamatan.

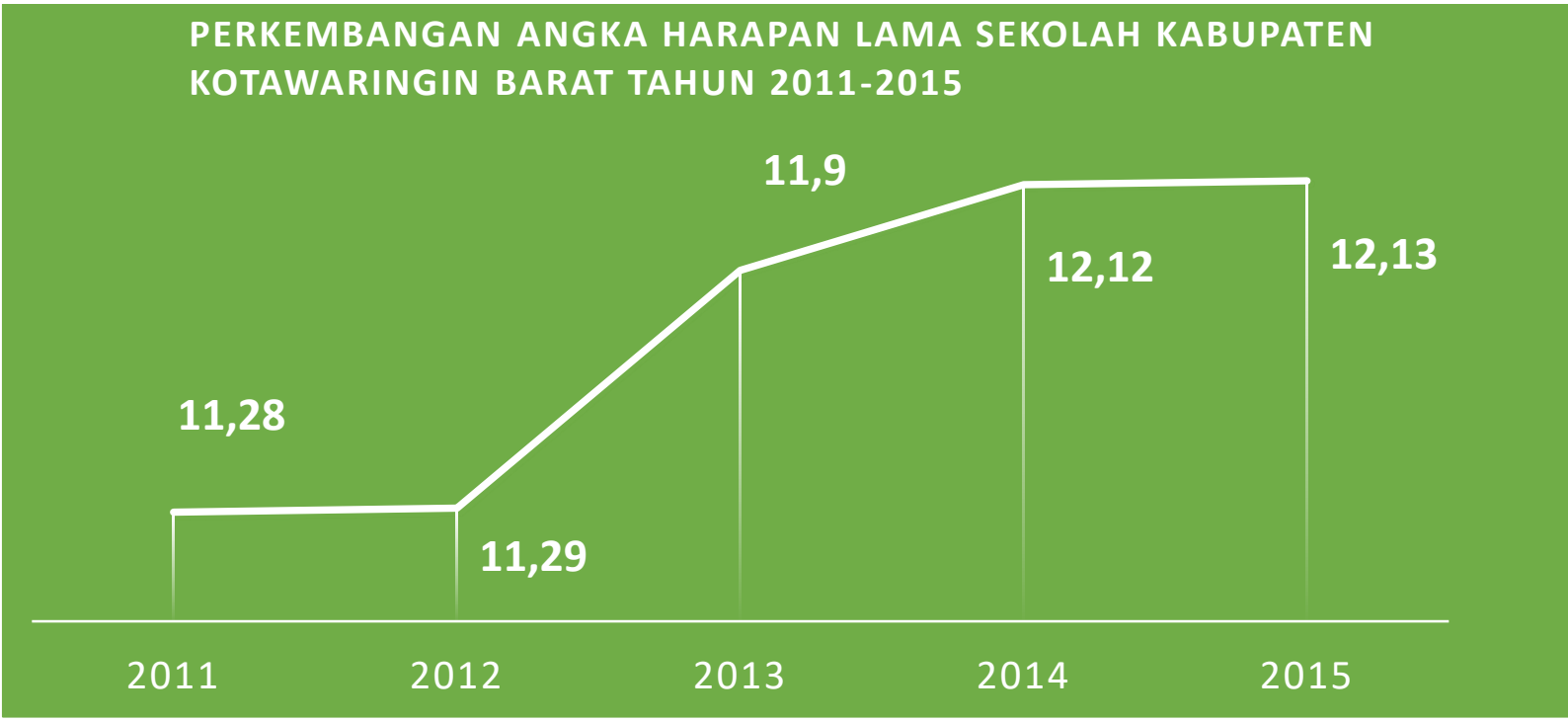
Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 2.11.



Gambar 2. 11: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotawaringin Barat

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 2.12 berikut.

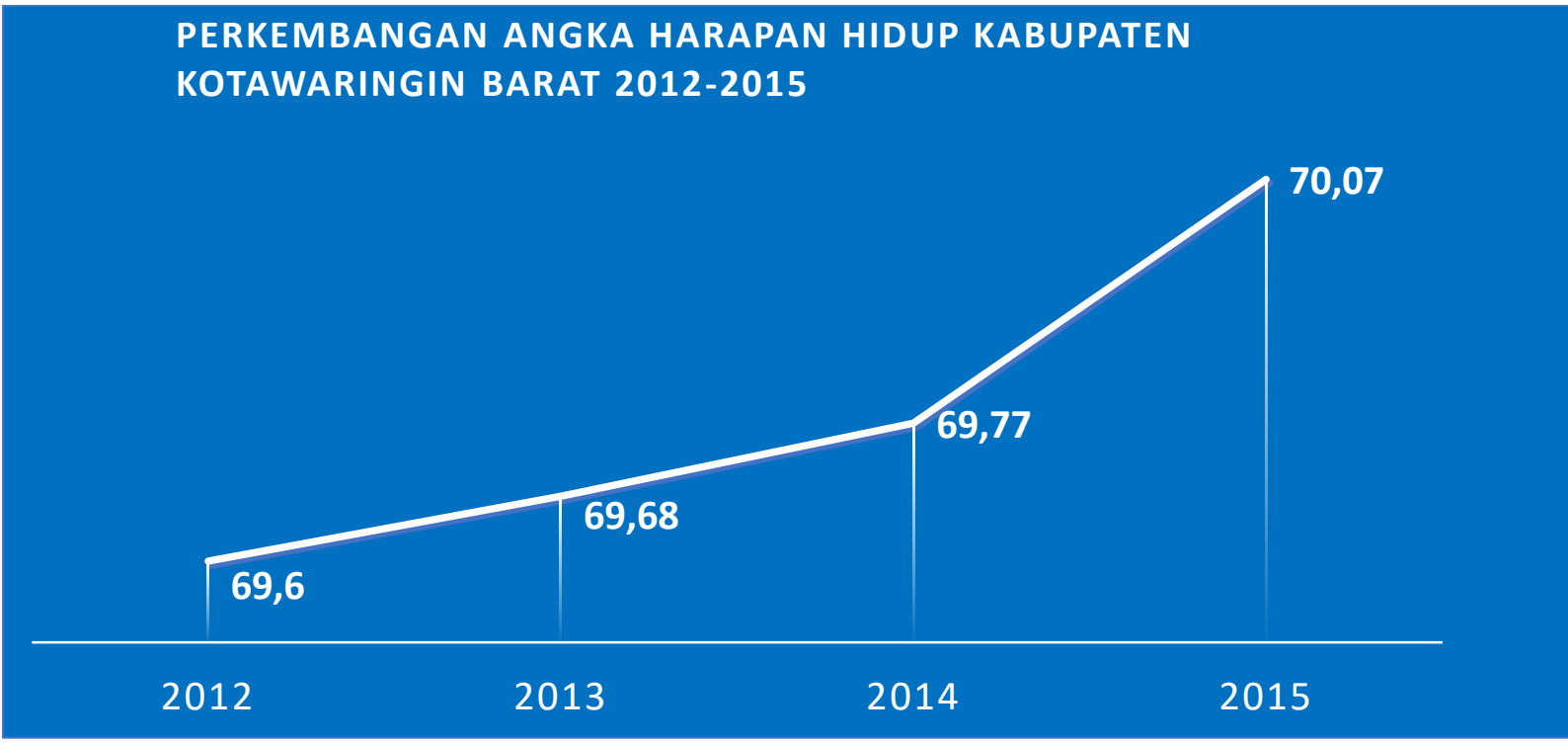


Gambar 2. 12: Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotawaringin Barat

b. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kabupaten Kotawaringin Baratdisajikan pada Gambar 2.13.



Gambar 2. 13: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2015

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotawaringin Barat

AHH penduduk Kabupaten Kotawaringin Baratyang setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti pada Gambar 2.13 di atas menunjukkan program dan kegiatan pada sektor lingkungan, kesehatan, sosial dan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian perlu ditingkatkan dan dikembangkan program-program inovasi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik/lebih tinggi.

Status gizi masyarakat pada balita di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2011-2015.



Tabel 2. 22: Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalensi Balita Gizi Buruk	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%

Sumber : Dinas Kesehatan

c. Ketenagakerjaan

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cukup fluktuatif. Angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,01%. Berikut adalah rekap data tentang tingkat pengangguran terbuka Tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 2.23.

Tabel 2. 23: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	170.468	184.860	195.373	202.545
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	120.613	124.101	136.864	145.749
3.	Bekerja (jiwa)	117.762	119.533	133.222	141.011

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015
4.	Menganggur (jiwa)	2.851	4.568	3.642	4.738
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,75	67,13	70,05	71,96
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,36	3,68	2,66	3,25
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,64	96,32	97,33	96,45
8.	Bukan Angkatan Kerja	49.855	60.759	58.509	56,796
9.	Sekolah	11.158	15.141	17.465	18.956
10.	Mengurus Rumah Tangga	35.276	39.732	35.598	36.698
11.	Lainnya	3.421	5.886	5.446	6.346

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2. 24.

Tabel 2. 24: Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat,

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah grup kesenian	86	86	86	86
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1
3	Jumlah Klub Olah raga	77	96	120	122
4	Jumlah gedung Olah raga	7	7	8	8

Sumber : LKPJ AMJ Bupati



2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

a. Pendidikan

Untuk mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui berbagai Indikator seperti yang tercantum dalam Tabel 2. 25

Tabel 2. 25: Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka melek huruf (%)	95,52	96,43	96,12	97,00	97,05
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,97	7,58	7,82	8,01	8,05

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
3.	Angka Partisipasi Kasar					
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	17,46	23,57	25,37	30,03	30,03
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	114,55	115,00	117,35	118,14	118,20
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	91,93	95,89	95,89	98,88	98,90
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK	76,88	78,92	87,59	87,59	87,60
4.	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD			17,61	27,78	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,50	97,85	98,60	98,79	98,80
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,16	80,92	80,92	86,60	86,65
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C	63,45	74,03	74,03	75,06	75,10
6.	Angka Putus Sekolah					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,40	0,20	0,20	0,20	0,14
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,80	1,19	1,19	0,40	0,70
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,80	1,60	1,60	1,10	0,70
7.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					
	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	43,65	52,94	52,94	97,08	98,00
	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,64	91,34	91,34	95,56	98,50
	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	72,58	77,16	77,16	95,56	99,00
8.	Angka Kelulusan					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	94,80	98,92	98,92	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	57,21	99,58	99,58	100,00	100,00
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	66,86	99,09	99,09	99,09	99,00
9.	Angka Melanjutkan					
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	85,62	89,67	89,67	99,75	99,75
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	95,07	99,64	99,64	99,66	99,66
10.	Fasilitas Pendidikan					
	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	75,85	80,26	89,00	33,05	33,10
	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	86,3	87,75	89,50	52,78	52,80
	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	80,00	82,00	88,00	88,00	88,10
11.	Rasio (perbandingan) jumlah guru/murid					
	a. SD/MI	1:17,77	1:18,07	1:32	1:21	1:21
	b. SLTP/MTs	1:13,73	1:13,32	1:28	1:19	1:14
	c. SMU/MA/SMK	01:12,8	1:14,50	1:28	1:14	1:14
12.	Angka Partisipasi Sekolah					
	a. SD/MI	97,66	97,87	99,82	99,53	94,81
	b. SLTP/MTs	90,18	97,73	100	95,42	99,25
	c. SMU/MA/SMK	66,35	68,28	73,05	73,83	95,37
13.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					
	a. SD/MI	179,99	179,99	185,00	162,09	162,15
	b. SLTP/MTs	300	310,12	310,12	123,00	332,19
	c. SMU/MA/SMK	640,92	660,15	660,15	326,00	743,00

Sumber: Disdikpora, 2016

Menilik pada capaian indikator kinerja kunci urusan pendidikan secara umum terdapat peningkatan kinerja urusan

pendidikan. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada kategori TK/RA dan PAUD Non-Formal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Sejenis PAUD) menunjukkan bahwa semakin banyak orang tua memandang bahwa pendidikan anak usia dini penting untuk proses tumbuh kembang anak sehingga mereka memutuskan untuk mengirimkan anak-anak ke lembaga PAUD.

Tolok ukur dalam keberhasilan pelayanan pendidikan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah adalah tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Capaian APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan meskipun belum dapat mecapai angka absolut. Hal ini didukung pula dengan peningkatan angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/Mts. Namun angka tersebut belum mencapai 100% yang berarti masih terdapat anak-anak usia sekolah yang belum melanjutkan ke jenjang selanjunya. Masih terdapat siswa yang putus sekolah dengan berbagai penyebab, meskipun pada tahun 2014 angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat relatif mengalami penurunan. Penurunan angka putus sekolah ini berkat adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Beasiswa Miskin dari pemerintah pusat sehingga mampu menekan Angka Putus Sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK SD/MI/Paket A melebihi 100% dapat dimaknai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan disertai sukses program Kejar Paket A. Sedangkan capaian APK SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih harus ditingkatkan. Perlu adanya kerjasama lintas pihak dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.

Pelaksanaan ujian sekolah di jenjang SD/MI/Paket A dan ujian nasional jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih merupakan metode untuk mengukur hasil proses pembelajaran. Terjadi peningkatan angka kelulusan di semua jenjang. Namun demikian tetap harus ada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kelulusan peserta didik dalam ujian sekolah maupun ujian nasional. Rasio pendidik dan siswa sudah mendekati tataran yang cukup ideal. Secara kuantitas, jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1 semakin meningkat, namun perlu adanya upaya untuk peningkatan kualitas.

b. Kesehatan

Beberapa indikator capaian kinerja terkait dengan pelaksanaan urusan kesehatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Cakupan dan Mutu Pelayanan Dilihat Melalui Indikator antara lain:

a) Angka Kematian Neto / Net Death Rate (NDR)

Rata-rata NDR di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 sebesar 14,4% berarti sudah sangat baik pelayanan rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b) Angka Kematian Umum / Gross Death Rate (GDR)

Rata-rata GDR di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 sebesar 34,8%, berarti sudah sangat baik pelayanan rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit dapat dilihat dari BOR (*Bed Occupancy Rate*), LOS (*Length of Stay*) rata-rata lama dirawat (dalam satuan hari) seorang pasien dan TOI (*Turn Over Interval*). BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu; LOS adalah rata-rata lama perawatan (dalam satuan hari) seorang pasien; dan TOI adalah lamanya pemakaian tempat tidur oleh pasien (dalam satuan hari). Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

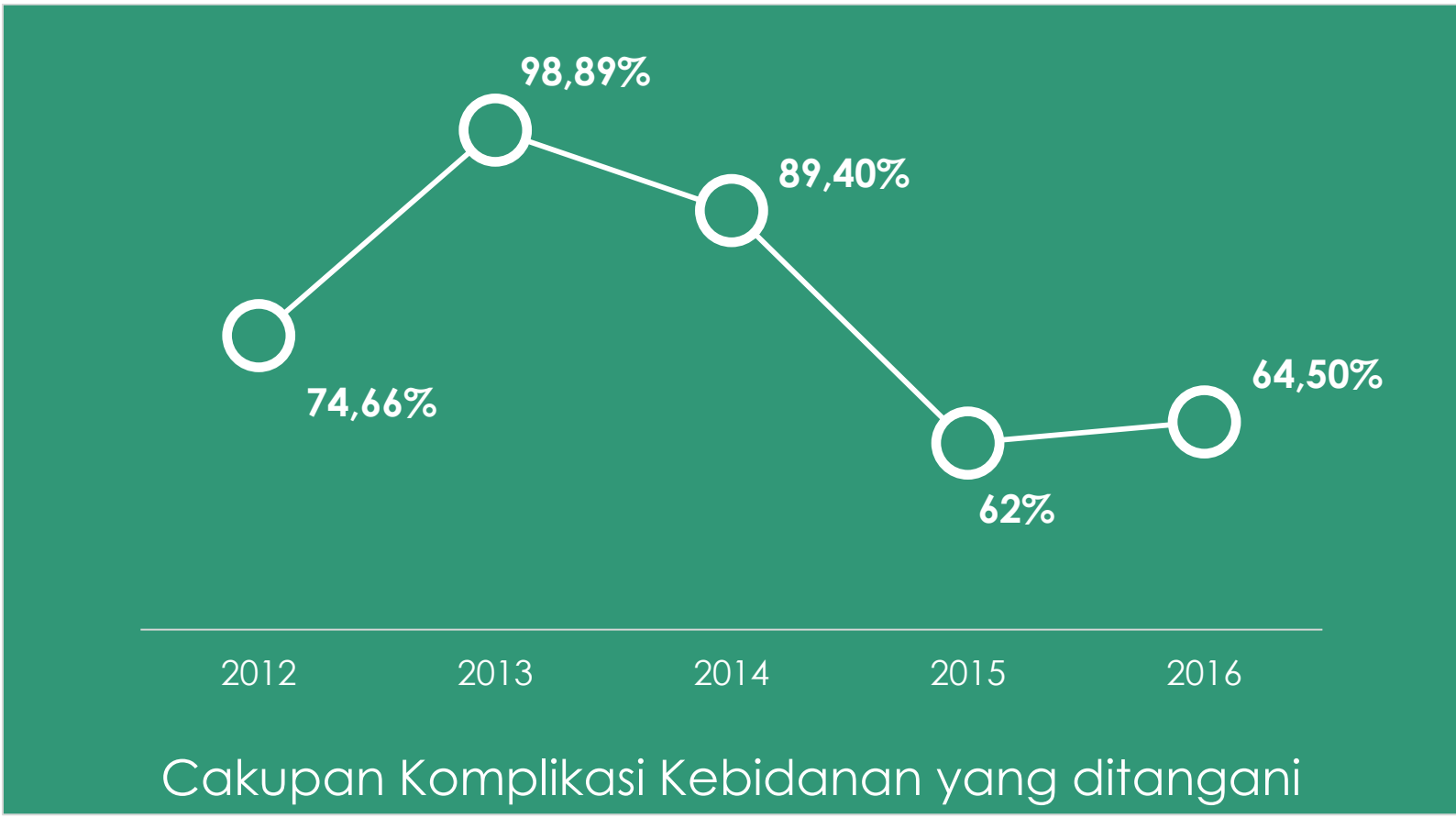
Tabel 2. 26: Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2012-2016

No	Indikator	Tahun					Ideal
		2012	2013	2014	2015	2016	
	BOR	76,36	71,22	72,41	77,00	53,98	60–85%
	LOS (hari)	3,46	3,10	3,19	3,54	2,47	6–9 hari
	TOI (hari)	1,07	1,25	1,22	1,06	2,10	1–3 hari
	BTO (kali)	80,62	83,87	82,74	79,34	69,98	40-50 kali
	GDR (%)	27,5	25,0	31,5	34,8	36,16	< 45%o
	NDR (%)	9,9	10,5	16,5	14,4	12,03	< 25%o

Sumber: RSUD Sultan Imanuddin, 2016 (diolah)

2) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2012 - 2016 mengalami peningkatan namun masih dibawah target yang diharapkan yaitu sebesar 80%. Sejak tahun 2012 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani fluktuatif hingga mencapai 64,5% pada tahun 2016. Sebagai gambaran tentang perkembangan kondisi cakupan komplikasi kebidanan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

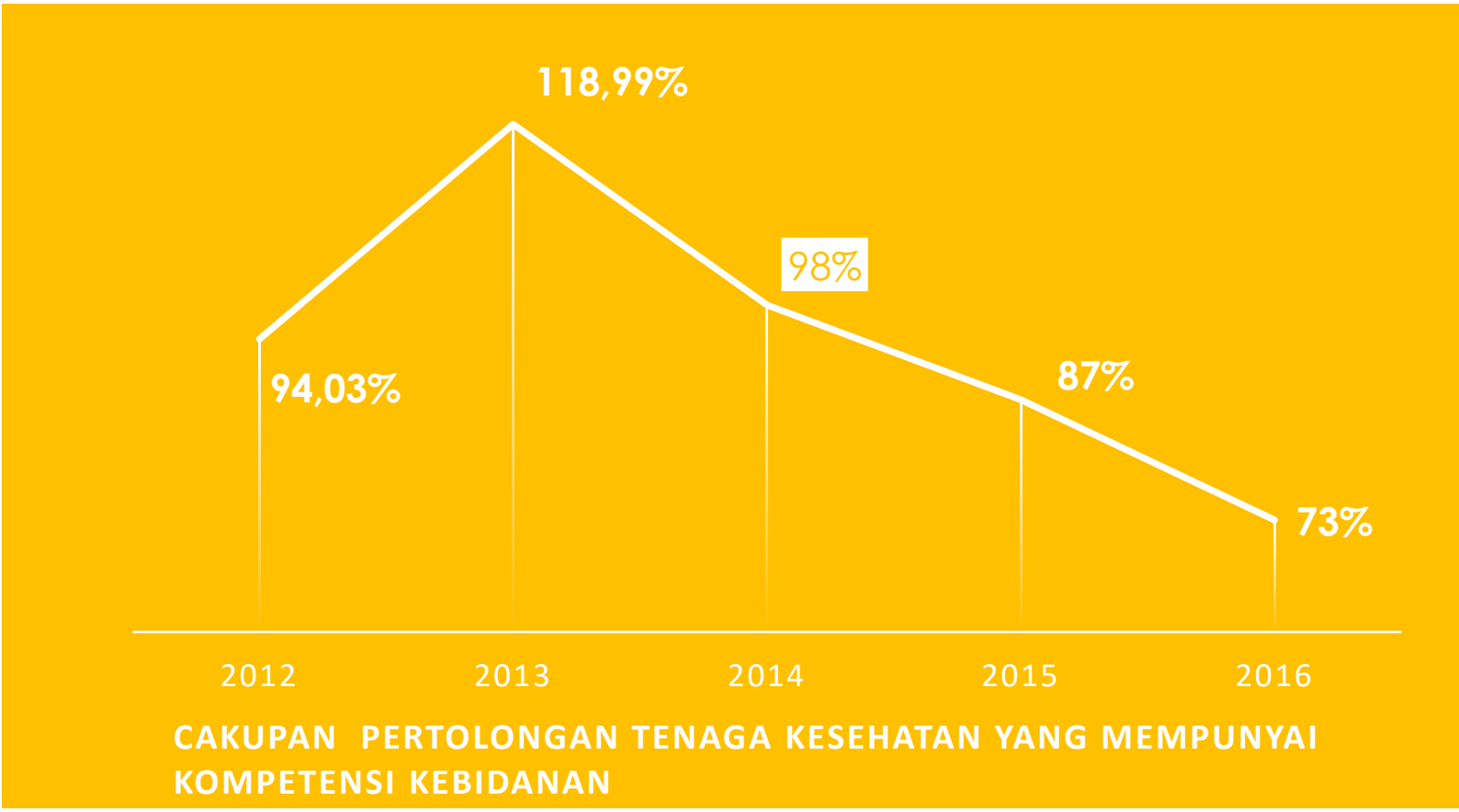


Gambar 2. 14: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Tahun 2012 - 2016

3) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

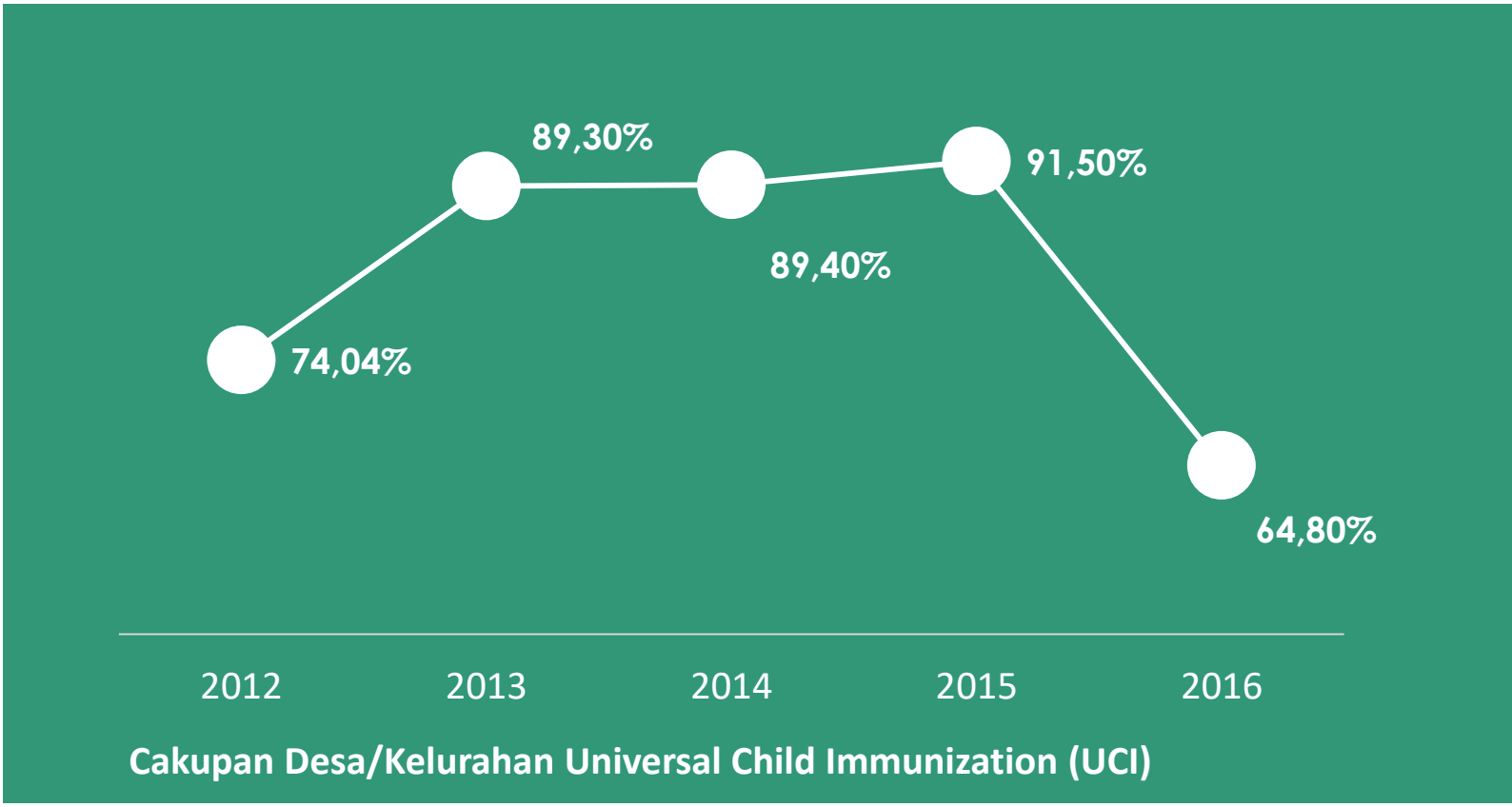
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (nakes) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes tahun 2013 sebesar 118,99% terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 73%. Penurunan capaian persalinan oleh tenaga kesehatan terjadi karena masih banyak sarana kesehatan swasta yang memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat yang belum melaporkan cakupan pelayanannya kepada dinas kesehatan setempat.

Perkembangan kondisi Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2. 15: Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan Tahun 2012- 2016

4) Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Target cakupan UCI menurut indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 95%. Indikator keberhasilan GAIN UCI mengacu pada RPJMN Tahun 2012-2016 dengan target tahun 2016 mencapai UCI 100% dan 100% bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak. Pencapaian UCI desa/kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 16: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa cakupan desa/kelurahan UCI dari tahun 2012-2016 memiliki nilai yang fluktuatif namun masih berada di bawah 95%. Belum tercapainya target cakupan desa/kelurahan UCI dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kesalahan dalam menentukan besaran target sasaran, selain itu adanya mutasi tenaga imunisasi di Kabupaten maupun di Puskesmas.

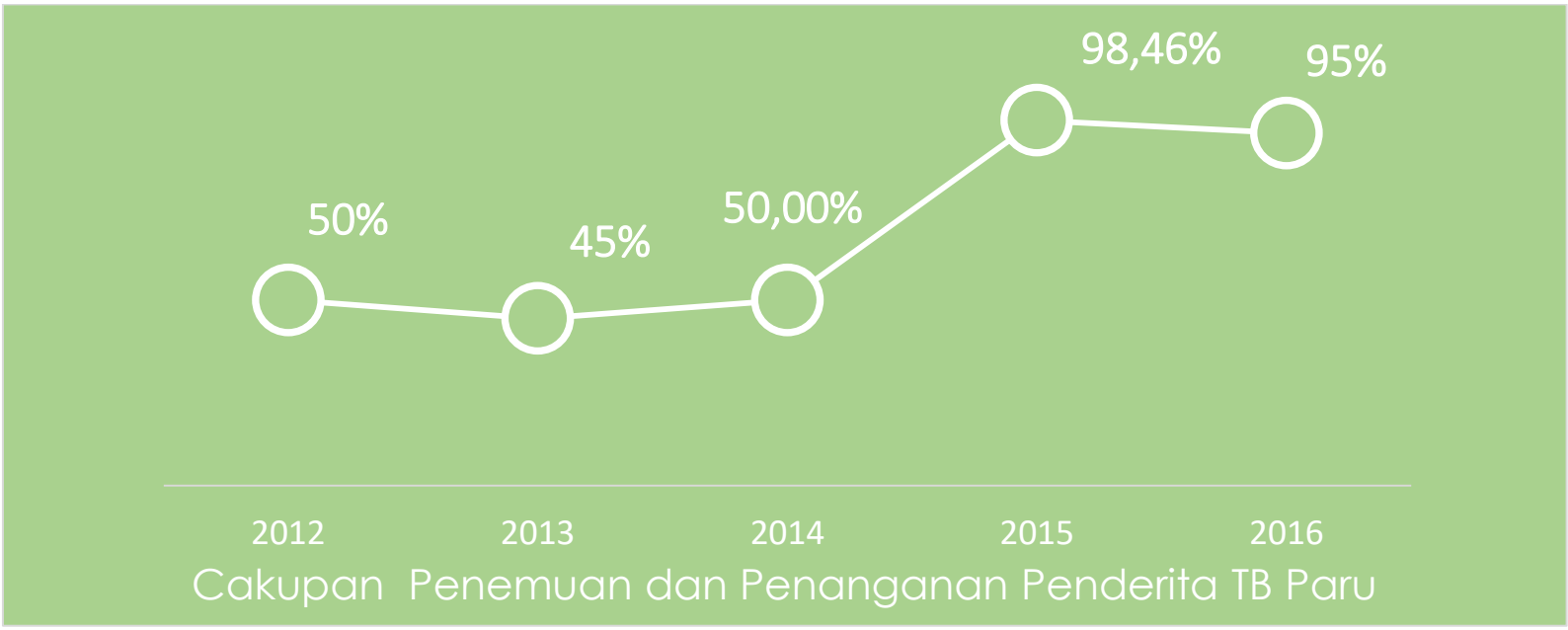
5) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dari tahun 2012-2015 yaitu 100%, dan diprediksikan konsisten hingga tahun 2016. Semua kasus gizi buruk yang terlacak, mendapat perawatan dengan pemberian bantuan MP-ASI selama perawatan/ penanganan. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2. 17: Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan Tahun 2012 - 2016

6) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Paru
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penderita Penyakit TB Paru Kabupaten Kotawaringin dapat dilihat pada gambar berikut ini:

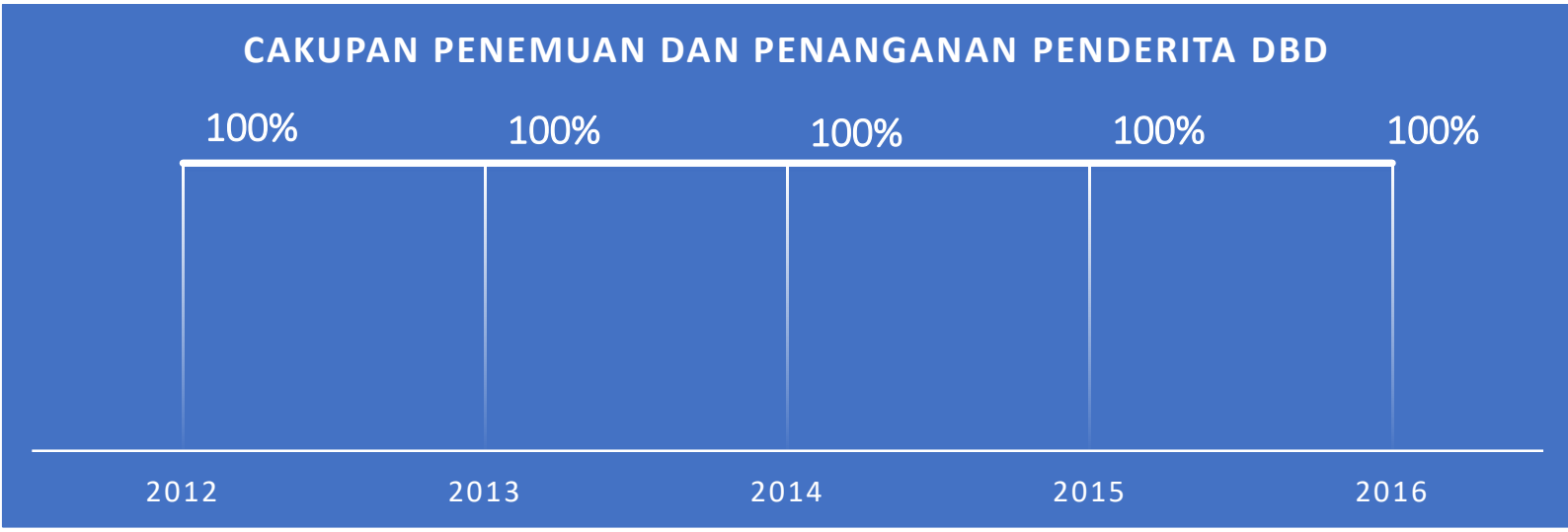


Gambar 2. 18: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB Paru Tahun 2012 - 2016

Dari gambar di atas diketahui bahwa cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita fluktuatif, pada tahun 2012 (50%), tahun 2013 (45%), tahun 2014 (50%), tahun 2015 (98,46%), dan tahun 2016 diprediksi sebesar 95%, diatas target yang telah ditetapkan sebesar 85%.

7) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

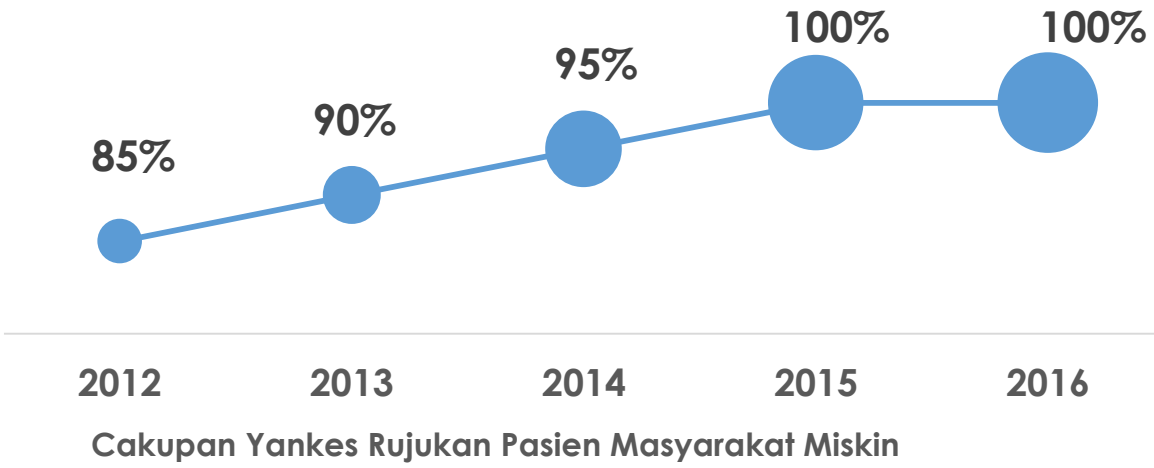
Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, diutamakan pada pelaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan. Angka Bebas Jentik (ABJ) DBD diharapkan dapat mencapai lebih dari 90%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD sejak tahun 2012 hingga 2016 mencapai target 100%. Ilustrasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 19: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2012-2016

8) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.

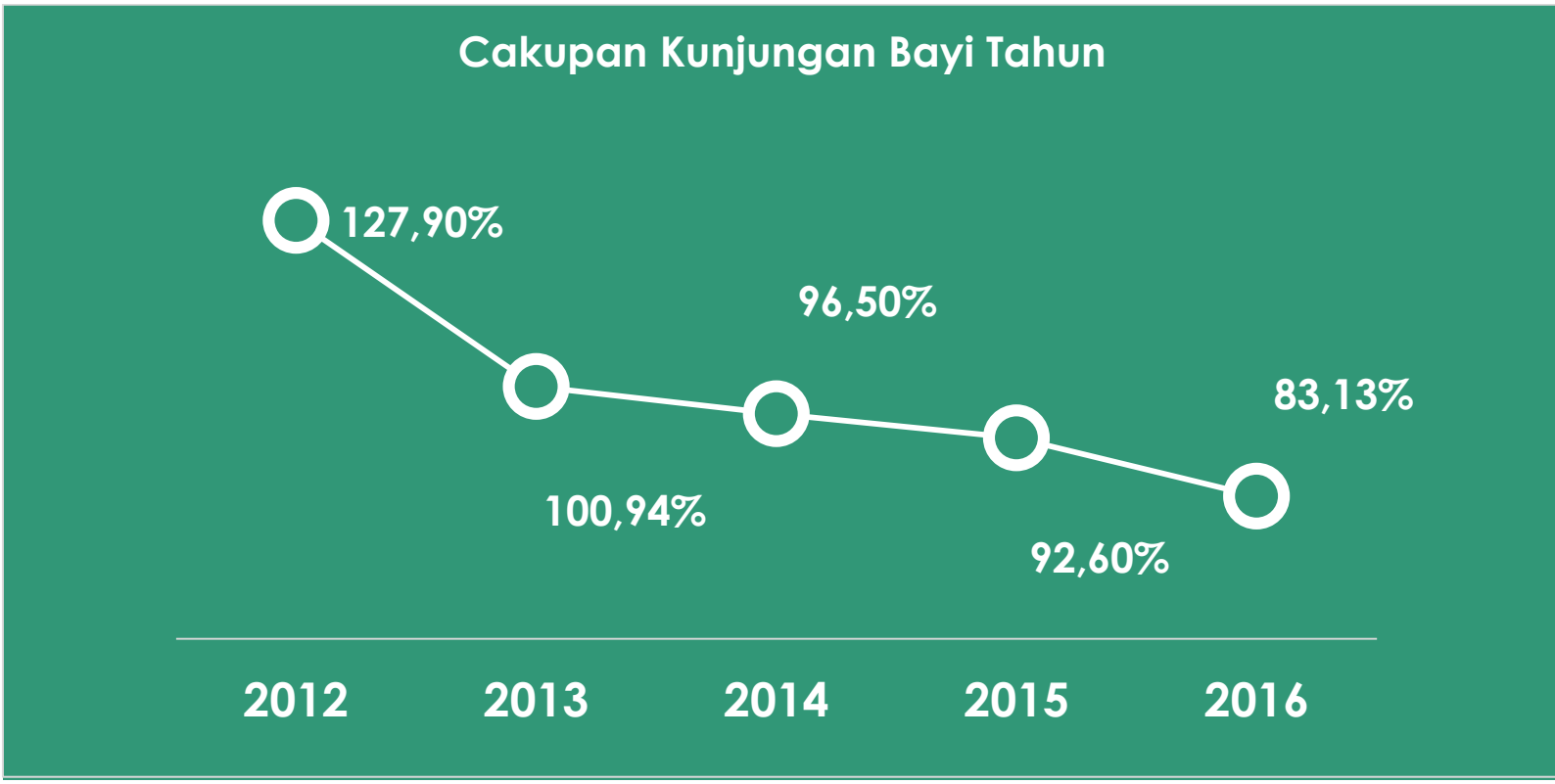
Cakupan pelayanan rawat inap masyarakat miskin (dan hampir miskin) dari tahun ketahun selalu menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 100% hingga tahun 2015. Ilustrasi Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



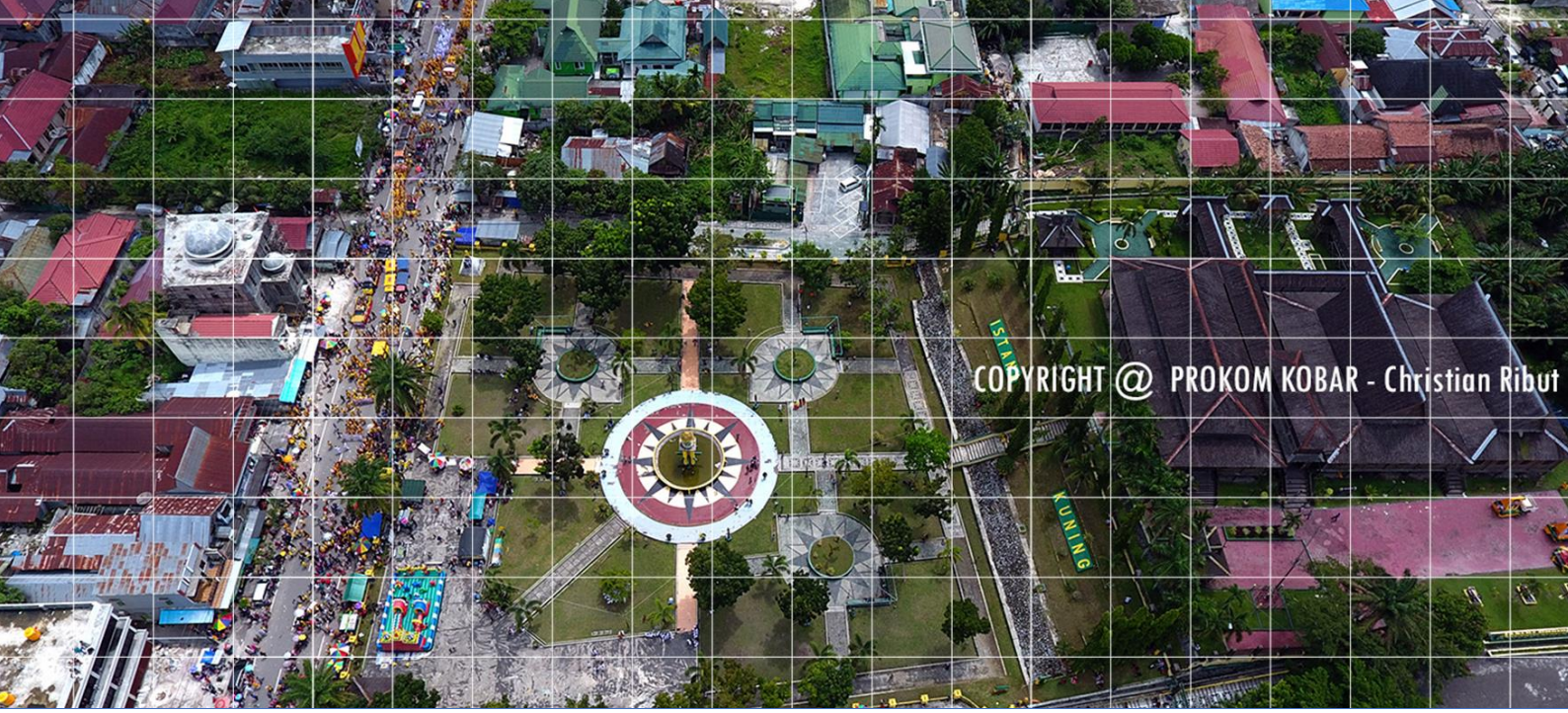
Gambar 2. 20: Cakupan Yankes Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2012-2015

9) Cakupan Kunjungan Bayi

Gambar di bawah ini menampilkan cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2012-2015 berfluktuasi mengalami perubahan yang signifikan dan sudah berada pada target yang diharapkan (90%) pada tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2016 angkanya masih memungkinkan mengalami kenaikan. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2012 sebesar 127,39% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 83,13%.



Gambar 2. 21: Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2012-2015



c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 27: Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 - 2015

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,24	0,27	0,26	0,45
2	Rasio Jaringan Irigasi	0,54	0,85	0,86	0,75
3	Luas Wilayah Kebanjiran	16,00%	15,00%	14,00%	13,80%
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96,99%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Persentase penanganan sampah	66,72%	68,93%	70,45%	51,63%
8	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1,42	1,48	1,57	2,2

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015 (diolah)

Beberapa indikator yang belum mencapai target yaitu rasio jaringan irigasi, luasan wilayah yang mengalami kebanjiran, rasio rumah layak huni. Persentase penanganan sampah dan rasio tempat pembuangan sampah dari tahun 2014 menuju tahun 2015 mengalami penurunan. Selain hal tersebut diatas capaian kinerja urusan pekerjaan umum juga dapat ditunjukkan melalui kondisi infrastruktur yang ada khususnya kondisi jalan dan jembatan. Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 28: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan negara	126,55	5,11	148,56	6,02	148,56	6,02	156,96	6,36	156,96	6,35
2	Jalan provinsi	155	6,26	63,70	2,58	63,70	2,58	55,40	2,24	55,40	2,24
3	Jalan kabupaten	1.185,51	47,87	1.220,95	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.224,37	49,55
4	Jalan desa	1.009,41	40,76	1.033.02	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,09	41,85
Jumlah		2.476,67	100	2.466,23	100	2.469,65	100	2.469,75	100	2.470,82	100

Tabel 2. 29: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan Aspal	663,84	26,81	656,99	26,64	1.018,41	41,24	1.022,37	41,40	1.090,11	44,12
2	Jalan Batu/kerikil	168,66	6,81	137,10	5,56	102,38	4,15	100,65	4,08	70,10	2,84
3	Jalan Tanah	1.276,91	51,56	1.436,85	58,26	1.098,68	44,49	1.082,92	43,85	1.046,79	42,37
4	Tidak dirinci: -Beton -Titian -Lainnya	367,26	14,83	111,54 27,89 95,86	4,52 1,13 3,89	125,00 29,11 96,16	5,06 1,18 3,89	137,81 29,85 96,16	5,58 1,21 3,89	137,81 29,85 96,16	5,58 1,21 3,89
Jumlah		2.476,67	100	2.466,23	100	2.469,65	100	2.469,75	100	2.470,82	100

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 - 2016 adalah 2.470,82 Km, dimana jalan Provinsi berkurang dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan status jalan pada ruas jalan Akses ke Pelabuhan Tanjung Kalap (Bumi Harjo) yang sebelumnya status jalan Provinsi menjadi Status Jalan Negara/nasional. Sementara untuk jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten tidak mengalami perubahan panjang, dimana pada tahun 2015 - 2016 fokus pekerjaan bukan pada penambahan panjang jalan tetapi lebih kepada peningkatan infrastruktur dan kemantapan jalan.

Tabel 2. 30: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang(Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan Baik	484,18	19,55	490,46	19,89	845,98	34,26	890,50	36,06	959,29	38,82
2	Jalan Sedang	1.069,31	43,18	816,60	33,11	784,19	31,75	761,46	30,83	735,56	29,77
3	Jalan Rusak Ringan	661,52	26,71	856,56	34,73	620,51	25,13	608,00	24,62	619	25,09
4	Jalan Rusak Berat	261,66	10,56	302,61	12,27	218,97	8,87	209,79	8,49	156,97	6,35
Jumlah		2.476,67	100	2.466,23	100	2.469,65	100	2.469,75	100	2.470,82	100

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan Tabel 2.30 dapat disampaikan bahwa kinerja proporsi panjang jalan munurut kondisinya dari tahun 2012 -2016 sebagai berikut: Jalan kondisi baik meningkat sebesar 1,98%; jalan kondisi sedang mengalami penurunan sebesar 0,69%, jalan rusak ringan dan mengalami penurunan 0,94%, jalan rusak berat mengalami penurunan 0,60%.

Tabel 2. 31: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kelas III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kelas III A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kelas III B	281,55	11,37	212,26	8,61	212,26	8,60	212,36	8,60	212,36	8,59
	Kelas III C	415,70	16,79	451,14	18,29	456,12	18,47	465,90	18,86	467,43	18,92
	Kelas Tidak dirinci	1.779,92	71,85	1.802,83	73,10	1.801,27	72,93	1.791,49	72,54	1.791,03	72,49
Jumlah		2.477,17	100	2.466,23	100	2.469,65	100	2.469,75	100	2.470,82	100

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 32: Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya

No	Uraian	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Jembatan Baik	22	5,41	24	5,97	141	74,6	148	78,31	149	69,3
2	Jembatan Sedang	371	91,15	378	94,03	30	15,87	26	13,76	23	10,7
3	Jembatan Rusak	14	3,44	-	-	16	8,47	14	7,41	35	16,28
4	Jembatan Rusak Berat	-	-	-	-	2	1,06	1	0,53	8	3,72
Jumlah		407	100	402	100	189	100	189	100	215	100

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

2) Penataan Ruang

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 33: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
2.	Perda RTRW	-	-	-	-
3.	Dokumen RDTR	2	2	-	-
4.	Ketaatan pada RTRW	-	-	-	-

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel di atas terlihat ketersediaan Perda RTRW masih belum ada. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini mekanisme penetapan perda RTRW masih dalam proses. Sedangkan untuk ketaatan terhadap RTRW terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang hingga kini masih belum mengingat Perda tentang Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang dijadikan acuan masih dalam proses.



d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Capaian kinerja pada Urusan Perumahan Tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 34: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2012 - 2015

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1	Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	-	95,75	95,56	96,04
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)		76,29	81,63	86,43
3	Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik		98,12	98,12	98,78
4	Persentase rumah tinggal dengan lantai tanah	-	-	-	2,74
5	Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah		96,66	96,90	97,26
6	Persentase rumah tinggal dengan dinding tembok		47,92	50,19	55,19
7	Rasio rumah layak huni	0,95	0,95	0,95	0,95
8	Rasio permukiman layak huni	0,99	0,99	0,99	0,99
9	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,12	0,06	0,1	0,12

Sumber: Dinas PU dan BPS Kab. Ktw Barat

Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai 2015 antara lain dapat dilihat pada persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih yang menunjukkan adanya peningkatan mencapai 96,04%, Rumah tangga bersanitasi mencapai 86,43%, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mengelola sanitasi sangat baik.

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Penaggulangan Bencana

Adapun Capaian Kinerja yang berhasil dicapai dalam penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 35: Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012 - 2016

No.	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah tenaga/satuan linmas (orang)	-	1226	1226	1226	1226
2	Jumlah pos jaga/ronda (unit)	4	4	8	5	
3	Jumlah tenaga/satuan linmas yang dilatih (orang)	-	400	-	-	-
4	Tingkat gangguan kebisingan lingkungan	-	-	-	-	-
5	Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	-	-
6	Data laporan hasil monitoring	2 kec.	-	-	-	6 buku
7	Kondisi daerah yang kondusif (kec)	6	6	6	6	6
8	Tingkat Kehamonisan umat beragama (org)	90	90	-	-	-
9	Tingkat Kehamonisan antar etnis (org)	-	-	220	300	200
10	Tingkat partisipasi pemuda pemudi pada kegiatan IBAB dan Hari Sumpah Pemuda (org)	-	1000	80	80	40
11	Peningkatan SDM tokoh lintas agama dan forum (forum)	5	4	4	3	3
12	Implementasi SKB 3 Menteri (org)	75	50	200	300	84
13	Tingkat penyalahgunaan miras & narkoba (org)	50	50	400	300	-
14	Tingkat praktek prostitusi (org)	-	200	100	-	230
15	Data laporan hasil monitoring	-	6 Kec.	-	-	10 buku
16	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pendidikan politik (org)	60	360	70	120	150
17	Jumlah parpol dan ormas/LSM (parpol/ormasdan LSM)	38 / 102	20 / 50	12/ 70	12 / 70	12 / 40

No.	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
18	Jumlah data base parpol dan ormas/LSM (buku)	-	10	-	10	-
19	Data laporan hasil monitoring (kec)	6	6	-	6	6
20	Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya bencana	140 org	15 org	100 org	100 org	-

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Kab. Ktw. Barat Tahun 2016

Adapun perkembangan dari hasil pengawasan terhadap Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 36: Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2015

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran (kali)			
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	11	1	3	3
2.	Minuman Keras (Miras)	37	20	50	80
3.	PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum	15	57	20	39
4.	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	1	4	6	6
5.	Premanisme	-	2	-	-
6.	Judi Togel	-	-	-	1
7.	Mucikari	-	-	-	14
8.	KTP	-	-	-	9
9.	Ngelem Fox	-	-	-	1
Jumlah		64	84	79	153

Sumber: PPNS Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

Adapun capaian kinerja penanggulangan bencana, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 37: Capaian Kinerja Penaggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Desa / Kelurahan yang telah mendapat Sosialisasi/ Pelatihan/ Pembinaan	-	-	5	12	23
2	Jumlah Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih	-	-		5	5
3	Prosentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani	-	-	70%	75%	75%

Sumber: Badan Penaggulangan Bencana Daerah

f. Sosial

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 38: Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1.	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	15	15	17	17
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	68,75	68,75	68,75	21,29
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus)	68,42	68,42	33,51	33,51

Sumber: Dinas Sosial, 2015.

Berdasarkan tabel di atas, indikator PMKS yang memperoleh bantuan dan indikator Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terlihat capaian pada tahun 2013 dan 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, hal tersebut dikarenakan perbedaan cara penghitungannya yaitu untuk tahun 2013 dan 2014 didasarkan pada jenis PMKS-nya, sedangkan untuk penghitungan capaian tahun 2015 didasarkan pada jumlah penerima bantuan dan jumlah kasus yang ditangani di tahun tersebut yang mana keseluruhannya berjumlah sebanyak 2.790 orang PMKS, terdapat pula di dalamnya jumlah yang mendapatkan jaminan sosial.



2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Program yang diupayakan pemerintah untuk mengoptimalkan tenaga kerja Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Adapun capaian kinerja pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 39: Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2012-2015

No	Peserta KB Aktif	2012	2013	2014	2015
1	IUD	740	783	943	1015
2	MOP	94	115	119	140
3	MOW	702	697	736	758
4	IMPLANT	2.442	2.436	3.162	3175
5	SUNTIK	20.515	13.482	19.324	19.174
6	PIL	10.542	6.519	8.190	8.610
7	KONDOM	889	727	736	1.044
Jumlah		35.924	24.759	33.375	33.916

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kotawaringin Barat



Selanjutnya capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator	Capaian			
		2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3,8	2,8
2.	Jml peserta KB aktif	35.924	24.759	33.375	33.916
3.	Jml Pasangan Usia Subur (PUS)	45.847	32.154	49.238	49.578
4.	Rasio akseptor KB (%)	80,69	87,9	80,12	69,92
5.	Cakupan peserta KB aktif/ PA (%)	78,36	77	67,78	68,41
6.	Keluarga Pra Sejahtera	2.966	1.474	2.701	2.325
	Keluarga Sejahtera I	10.624	4.197	9.545	

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Ktw. Barat

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami penurunan kualitas. Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus lebih meningkatkan lagi capaian kinerjanya.

c. Pangan

Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 41: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Indikator	Capaian			
		2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita	2.465/ 72,69	2.452/ 72,37	2.576/ 73,38	2.588/ 74,63
2	Penguatan Cadangan Pangan	1 unit	-	57,8%	61,4%
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	12 / Th	12 / Th	12 / Th	12 / Th
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	90	90	90
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,7	83,72	84,56	84,95
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	0	0	10	20
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa

Sumber: Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan Tabel Standar Pelayanan Minimal di atas, dari tujuh indikator dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Sebagian besar indikator telah mencapai SPM bahkan melebihi SPM yang ditetapkan. Namun, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, belum bisa memenuhi target SPM dikarenakan terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana dan kurangnya SDM.

Tabel 2. 42: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersedian Pangan (Beras)

No.	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	253.000	261.000	269.629	278.398
2	Jumlah produksi (Ton)	17.277	18.445	18.573	11.996
3	Jumlah Kebutuhan (Ton)	30.805	30.744	32.830	33.890
4	Jumlah Kekurangan (Ton)	13.527	12.298	14.256	22.099

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dalam sistem ketersediaan pangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 masih mengalami defisit atau tergantung dari luar daerah yang mencapai rata-rata 25% - 30% per tahun.

d. Pertanahan

Perkembangan jumlah tanah bersertifikat dan luas tanah yang bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan tahun 2015, dari 875.871 Hektar tanah yang belum bersertifikat, tanah yang bersertifikat sebanyak 237.347 Hektar.

Tabel 2. 43: Perkembangan Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Dan Luas Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015

No.	Indikator	satuan	Capaian			
			2012	2013	2014	2015
1.	Luas tanah bersertifikat	Hektar	808,88	808,88	808,88	808,88
2.	Luas tanah yang belum bersertifikat	Hektar	-	-	-	-
3.	Jumlah bidang tanah bersertifikat	bidang	103.470	103.470	103.470	103.470
4.	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat	bidang	-	-	-	-
5.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten	bidang	769	769	769	769
6.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan pemkab yang sudah bersertifikat	bidang	401	429	429	429
7.	Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ketiga	bidang	1.254	1.254	1.254	1.254
8.	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa	Ijin	-	-	-	-
9.	Konflik pertanahan yang terjadi	kasus	5	4	3	-
10.	Konflik pertanahan yang terselesaikan	kasus	4	4	3	-

Sumber: Dokumen SIPD Tahun 2015

e. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kinerja urusan lingkungan hidup sesuai indikator kinerja selama tahun 2012 - 2016, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44: Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Penanganan sampah	65	73,5	48,47	51,63	60,75
2.	Jumlah Duta Lingkungan (orang)	-	-	2	-	-
3.	Jumlah Kader lingkungan (orang)	50	39	39	40	-
4.	Jumlah Adhiwiyata (orang)	50	50	50	50	50
5.	Pencemaran status mutu air	2	2	2	2	2
6.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air:					
	Mangrove (bibit)	3.000	3.000	-	-	-
	Ruang Terbuka Hijau (bibit)	600	1.000	678	200	-
	Biopori (Lubang Tanam)	1.000	2.000	32.000	-	-
7.	Penegakan Hukum Lingkungan	1	1	1	4	-

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat

Adapun capaian Indikator kinerja Urusan Kehutanan dari tahun 2012-2015 dituangkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 45: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	-	-	-	3,29
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-
3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,63	0,55	0,57	0,61
4.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	75	34	100	155,25
5.	Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	1.241,50	292	75	1.400

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Rehabilitasi hutan Mangrove) di Desa Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Keraya baru tercapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 10 Ha, atau sebesar 3,29 dari yang ditargetkan. Sedangkan capaian kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkat, pada tahun 2015 PDRB sektor kehutanan sebesar 0,61% (*angka sangat sementara) dari total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, atau meningkat sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0.57%.

Jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 46: Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012-2015

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam M^3)			
	2012	2013	2014	2015
Kayu Meranti	43.775,35	27.689,61	40.219,03	38.608,07
Kayu Rimba Campuran	1.996,07	2.772,03	6.223,98	5.741,29
Kayu Indah	68,87	-	-	-
Jumlah	45.840,29	30.461,64	46.443,01	44.349,36

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015 (diolah)

f. Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2012-2016 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 47: Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional	76,70	32,67	81,30	120,85	97,78

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2012	2013	2014	2015	2016
2	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e_KTP)	30,69	71,56	73,10	54,13	90,00
3	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KK Nasional	52,66	58,64	78,22	76,25	76,6
4	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	18,73	28,09	52,08	58,36	61,26
5	Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan dan Akta lainya	229	163	217	271	167

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kobar 2016

persentase jumlah pemilik KTP berbasis NIK pada tahun 2015 mengalami penurunan hampir 10% apabila dibandingkan perolehan pada tahun 2012. Penurunan jumlah tersebut antara lain disebabkan oleh masih banyaknya penduduk wajib KTP baik itu wajib KTP baru (usia 17 tahun) maupun wajib KTP lama yang belum melaksanakan perekaman KTP-E dan masih kurangnya kuantitas sosialisasi terhadap masyarakat baik dari masyarakat penduduk lokal atau pun penduduk pendatang tentang tata cara prosedur untuk pembuatan dokumen identitas diri berupa KTP-E. Selama kurun waktu empat tahun (2012-2015), persentase jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) juga mengalami penurunan sebesar 2,5%. Hal ini disebabkan oleh masih adanya penduduk yang sudah menikah namun belum memisah KK-nya dan masih menumpang KK pada orang tuanya.

Sedangkan persentase kepemilikan akte kelahiran dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2012 sebesar 18,73% menjadi 61,26%. Meningkatnya persentase kepemilikan akte kelahiran ini disebabkan oleh adanya kebijakan penerbitan akte kelahiran secara gratis atau bebas bea bagi bayi yang berusia kurang dari 60 hari, dan tumbuhnya kesadaran dari orang tua akan pentingya dokumen kependudukan dalam hal ini akte kelahiran sebagai identitas diri pertama dan hak sipil anak paling utama yang dimiliki anak. Selain itu akta kelahiran juga merupakan bukti yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 48: Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 - 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Desa yang Terperbaharui Profil Desanya	-	25	75 Desa	77 Desa
2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	81 Desa	81 Desa	81 Desa	81 Desa
3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih	-	-	188 Orang	-
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	2	1	-	1

Sumber: BPMD Kab. Ktw. Barat, Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada satu target IKK yang belum tercapai 100%, yaitu Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, dari target 94 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan akhir tahun 2015 baru ada 77 Desa yang telah memiliki Profil Desa yang representatif.

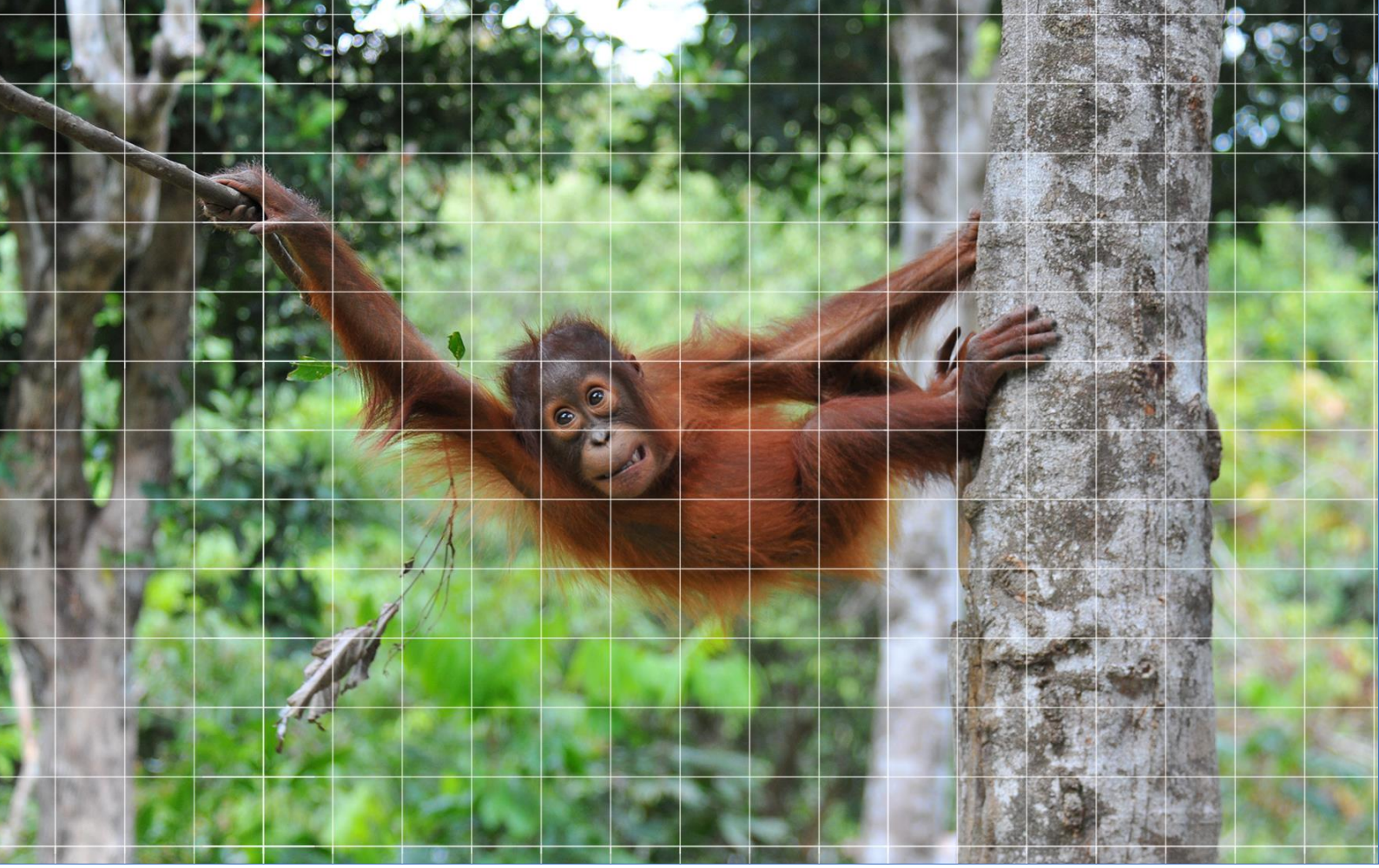
Tabel 2. 49: Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2015 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Aparatur Desa, Anggota BPD Kelembagaan Desa dan SM2L yang mengalami Peningkatan Pemahaman tentang Pembangunan Partisipatif	90	90	90	120
2	Jumlah Siswa/Siswi yang mendapat penyaluran dana PMT-AS untuk anak sekolah di Desa Tertinggal	1.509	1.104	325	276
3	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan Monitoring	94	94	94	94



No.	Indikator	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
4	Jumlah Desa yang dapat difasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	94	94	94	94
5	Jumlah Fasilitasi Pembentukan BUMDes	-	6	25	57
6	Jumlah Perempuan yang terlatih dalam Pelatihan Keterampilan P2W	30	30	30	60
7	Jumlah Profil Desa Yang Terperbahurui	-	25	75	77
8	Jumlah pelaksanaan BBG-RM	1	1	1	1
9	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih	-	-	188	-
10	Jumlah Juara Lomba Desa/Kelurahan	6	6	6	6
11	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	2	1	-	1
12	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	5	5	7	7

Sumber: BPMD Kobar, 2016



h. Perhubungan

Adapun beberapa indikator kinerja dalam usaha pencapaian target kinerja pembangunan dibidang urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 50: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 - 2015

No.	Indikator	Tingkat Capaian			
		2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Bandara	1	1	1	1
2.	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	3
3.	Jumlah Terminal	4	4	4	4
4.	Jumlah Halte	11	11	11	12
5.	Jumlah Jaringan Trayek AKDP	3	3	3	3
6.	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaaan	5	5	5	9
7.	Jumlah Dermaga LLASDP	16	16	17	19
8.	Jumlah Trayek LLASDP	3	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kotawaringin Barat

i. Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja dari tahun 2012-2015 dalam usaha mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 51: Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Tingkat Capaian			
			2012	2013	2014	2015
1.	Ketersediaan web site pemerintah daerah	unit	-	-	16	16
2.	Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital	Keping CD,	400 Majalah Digital, 400 CD kilas Kobar, 100 CD kegiatan	• 100 cd kegiatan • 350 CD kilas kobar • 350 cd majalah digital	• 82 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	• 62 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital
3.	Ketersedian bulletin, buku dan poster pemerintah daerah, foto, spanduk, baliho	Eksemplar, buku, lembar	400 Buletin Marunting Batu Aji, 400 warta bergambar, 350 buku profil pangkalan bun, 300 buku sejarah kerajaan kotawaringin, 150 Buku himpunan pidato,12 album foto	• 50 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 400 Kalender Meja • 350 buletin • 350 warta bergambar • 350 foto bupati/wakil • 10 photo mantann bupati • 100 lembar spanduk • 240 m2 baleho • 13 media langganan koran	• 15 album foto kegiatan • 100 Buku Himpunan Pidato Bupati • 400 buletin • 400 Buku sejarah Kerajaan dan kab. Ktw.barat • 400 Buku Profil Kota P.bun • 400 Kalender Meja • 400 Kalender dinding • 276 m2 baleho kegiatan • 125 lembar spanduk kegiatan • 830 Photo Bupati/Wakil	• 20 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 500 buletin • 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) • 150 Buah Photo Presiden dan Wakil Presiden RI • 500 Kalender Meja • 500 Kalender dinding • 279 m2 baleho kegiatan • 98 lembar spanduk kegiatan

No.	Indikator	Satuan	Tingkat Capaian			
			2012	2013	2014	2015
4.	Terselenggaranya pameran/ ekspo	kali	-	-	1 kali	1 kali
5.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	media	18 Media	6 Media	6 Media	7 media
6.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal/ Media Online	Media	5 Media (2 Radio lokal, radio RRI, SBTV dan TVRI)	5 Media (2 Radio lokal, radio RRI, SBTV dan TVRI)	5 Media (2 Radio lokal, RRI, SBTV dan TVRI)	6 media
7	Jumlah Pemberitaan melalui media cetak	media	-	5 media	5 media	7 media
8	Siaran Keliling /Publikasi Keliling	kali	-	-	46 kali	48 kali

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 52: Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 - 2015

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1.	Prosentase Koperasi aktif (%)	78,08	78,81	80,49	81,10
2.	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-
3.	Jumlah UMKM (Unit)	10.564	10.828	11.245	11.349

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015 (diolah)

Berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah, perkembangan jumlah persentase koperasi yang aktif dan UMKM terus mengalami peningkatan. Jumlah koperasi aktif meningkat dari tahun 2012 sebesar 78,08% menjadi 81,10% pada tahun 2015 dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,87%. Jumlah UMKM juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 10.564 unit menjadi 11.245 unit pada tahun 2015 dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,44%. Namun demikian berbeda dengan jumlah UMKM, peningkatan persentase jumlah usaha mikro, kecil dan menengah melambat terhadap jumlah seluruh UMKM pada tahun 2015.

k. Penanaman Modal

Capaian kinerja utama urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat dilihat dari sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 53: Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 2012-2015

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	42	29	35
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	-
3.	PMDN (Rp)	5.896.800.000.000	6.044.026.347.434	6.518.940.123.391	714.448.540.000
4.	PMA ($)	619.450.000	792.229.370,40	920.119.034	455.203,99
5.	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	879,79	667,86
6.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	3.500,1	2.544,03	474,91	108,81

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015 (diolah)

Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan, namun dilihat dari kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami perlambatan. Pada tahun 2012-2015, nilai realisasi PMDN mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Investor semakin berminat untuk membuka Investasi baru dan sudah mulai melihat prospek dan peluang pasar yang lebih baik. Hal ini didukung pula dengan kemudahan dalam proses pengurusan ijin usaha yang telah menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

I. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian kinerja urusan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 54: capaian Indikator Kepemudan dan Olahraga:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			
			2012	2013	2014	2015
1.	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional					
	a. POPNAS	medali	12	6	9	4
	b. POSPENAS	medali	16	6	5	3
2.	Jumlah organisasi pemuda	buah	61	83	97	105

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			
			2012	2013	2014	2015
3.	Jumlah organisasi (klub) olah raga	buah	77	96	120	122
4.	Gedung olah raga/balai remaja	unit	7	7	8	8
5.	Lapangan olahraga	buah	144	150	150	150

Secara umum kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, namun perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

m. Statistik

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik tahun 2012-2013 Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 55: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2012 - 2015

No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian Kinerja			
				2012	2013	2014	2015
1.	Ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka	Buku	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Ketersediaan buku PDRB Kotawaringin Barat	Buku	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015

n. Kebudayaan

Berdasarkan hasil inventarisasi Benda Cagar Budaya yang telah dilakukan terdapat 33 obyek yang merupakan benda cagar budaya terdiri dari kelompok kawasan, bangunan rumah tradisional, bangunan peribadatan, bangunan makam pendiri Kotawaringin Barat, kelompok gapura, tugu monumen, perabot jalan, dan kelompok ruang terbuka atau taman. Namun karena keterbatasan anggaran, setiap tahunnya baru 3 situs kawasan cagar budaya yang mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah.

Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya daerah telah dilakukan melalui pembinaan grup kesenian di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 86 grup kesenian. Selain itu untuk lebih memperkenalkan kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki, setiap tahunnya diselenggarakan festival seni dan budaya dimana selama tahun 2012 sampai dengan 2015 telah dilaksanakan 23 kali penyelenggaraan.

o. Perpustakaan

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 56: Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2012 - 2015

No.	Indikator	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perpustakaan	228	232	292	403
2.	Jumlah anggota perpustakaan	3.820	4.711	5.621	7.012
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan	13.735	23.469	28.450	62.585
4.	Jumlah peminjam	8.491	6.965	11.017	34.270
5.	Jumlah koleksi bahan pustaka	13.970	15.473	16.645	18.173
6.	Ratio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	228 : 245.143	232 : 261.200	292 : 252.492	403 : 278.141
7.	Ratio jumlah pustakawan terhadap jumlah penduduk	2 : 245.143	2 : 261.200	3 : 252.492	1 : 278.141

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami peningkatan dari 13.970 judul buku menjadi 18.173 judul buku atau meningkat 0,76% pada tahun 2015.

p. Kearsipan

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 57: Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2012 - 2015

No.	Indikator	Capaian			
		2012	2013	2014	2015
1.	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan	2	2	-	-
3.	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	3	3	-	4
4.	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36	4:36	4:36	4:36
5.	Arsip audio visual	265	265	265	-

No.	Indikator	Capaian			
		2012	2013	2014	2015
6.	Arsip Foto/Album	269	0	279	309
7.	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	-	-	-	21
8.	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	-	-	19.462	19.515
9.	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola	-	-	1.001	1.008

Capaian indikator pembangunan daerah urusan kearsipan adalah tersediannya pengelolaan arsip secara baku yang telah diselenggarakan tahun 2012 hingga saat ini dan meningkatnya jumlah Arsip In Aktif yang dikelola tahun 2014 meningkat 50 arsip di tahun 2015 menjadi 19.515 Arsip In Aktif.

2.3.3. Urusan Pemerintahan pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

a. Pertanian dan Peternakan serta Perkebunan

Capaian kinerja urusan Pertanian berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 58: Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
1.	*Luas tanam tanaman pangan*				
	Padi sawah (Ha)	7.403	7.200	6.866	5.412
	Padi ladang (Ha)	3.895	3.104	2.862	1.454
	Jagung (Ha)	814	503	638	1.526
2,	*Luas Panen Tanaman Pangan*				
	Padi sawah (Ha)	6.915	6.823	6.914	4.000
	Padi ladang (Ha)	3.368	2.814	2.674	1.664
	Jagung (Ha)	811	488	616	608
3.	*Produktivitas tanaman pangan*				
	Padi sawah (Ton/Ha)	2,99	3,39	3,42	3,73
	Padi ladang (Ton/Ha)	2,01	2,18	2,18	2,28
	Jagung (Ton/Ha)	3,69	3.69	3,75	3,65
4.	*Produksi tanaman pangan*				
	Padi sawah (Ton)	20.655	23.130	23.646	14.928

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
	Padi ladang (Ton)	6.769	6.148	5.837	3.797
	Jagung (Ton)	2.991	1.799	2.308	2.219

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015

Pada tabel di atas capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari produktivitas padi atau bahan pangan utama, dimana dari tahun ke tahun selama 2012-2015 produktivitasnya semakin menurun. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang juga semakin menurun dari tahun ke tahun.

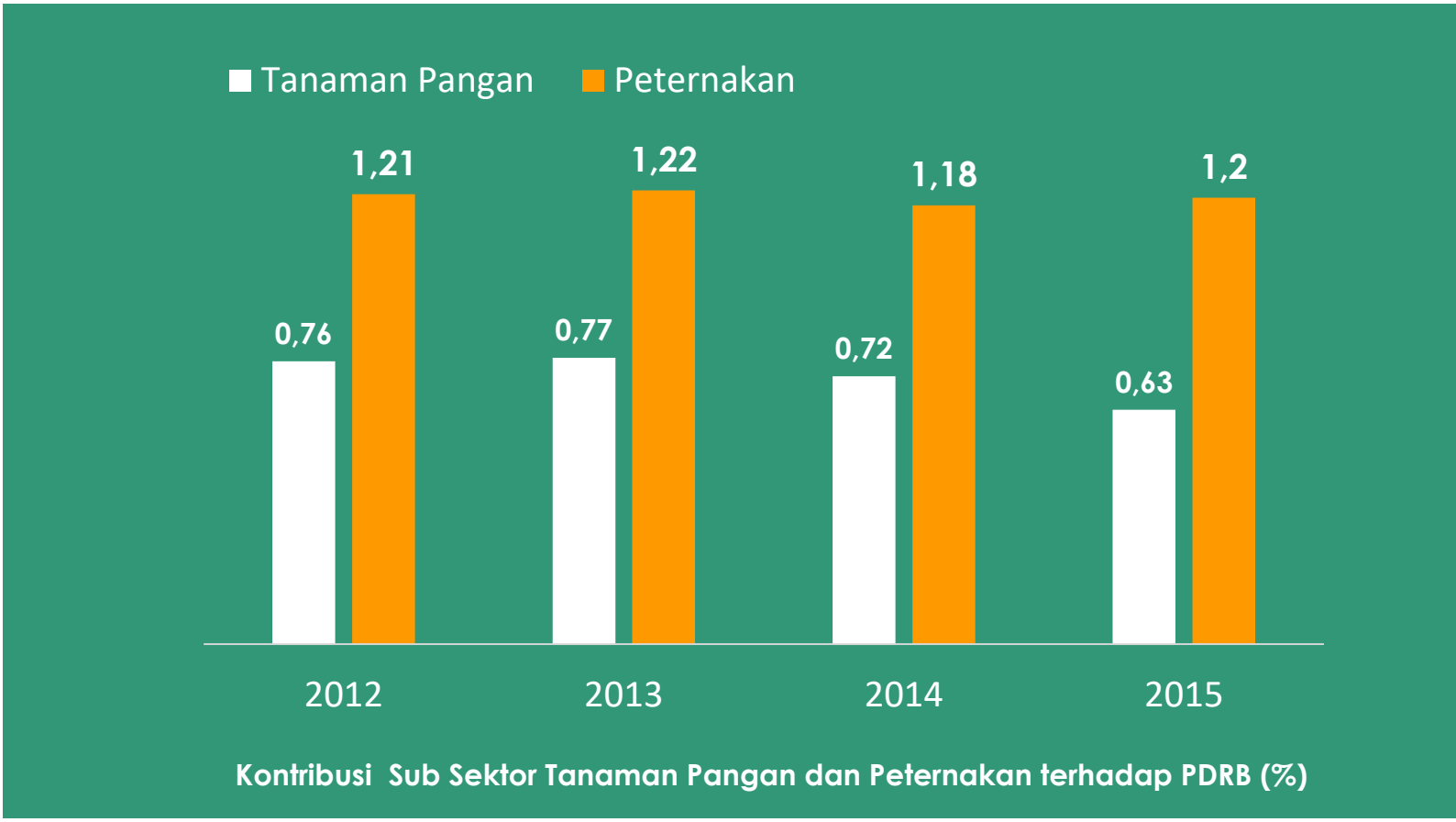
Untuk capaian kinerja sub sektor peternakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59: Capaian Kinerja Sub Sektor Peternakan

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
1.	*Populasi Ternak*				
	Sapi (ekor)	11.797	11.148	13.155	14.397
	Kerbau (ekor)	-	-	-	-
	Kambing /Domba (ekor)	2.097	2.118	2.398	2.764
	Babi (ekor)	5.025	5.327	5.498	5.718
	Ayam buras (ekor)	315.121	342.230	343.941	345.661
	Ayam ras petelur (ekor)	-	-	-	46.500
	Ayam ras pedaging (ekor)	157.466	163.699	166.973	158.253
	Itik (ekor)	38.055	39.708	40.317	41.527
2.	*Produksi Daging Ternak*				
	Sapi (Ton)	565,64	551,99	552,96	572,24
	Kerbau (Ton)	-	-	-	-
	Kambing / Domba (Ton)	49,01	49,43	49,62	58,14
	Babi (Ton)	87,81	94,00	93,25	94,47
	Ayam buras (Ton)	289,47	317,36	388,09	340,50
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	-
	Ayam Ras Pedaging (Ton)	807,73	885,56	886,34	817,78
	Itik (Ton)	14,38	15,77	17,78	14,12
3.	*Produksi Telur*				
	Ayam buras (Ton)	189,45	207,98	208,76	207,98
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	209,25
	Itik (Ton)	124,97	133	133,42	133,19
4.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	0,76	0,77	072	0,63

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
5.	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,21	1,22	1,18	1,20
6.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)	29,80	28,32	27,70	26,38

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015



Gambar 2. 22: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan terhadap PDRB (%)

Berdasarkan Tabel 2.58 di atas terlihat populasi sapi potong dari tahun 2012 - 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 4,70%. Secara umum populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah ternak sapi, kambing, ayam petelur dan ayam ras pedaging.

Populasi ternak kambing/domba dari tahun 2012 - 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 9,83%, Populasi ternak babi dari tahun 2012 - 2015 cenderung

mengalami peningkatan populasi sebesar 4,41%, lokasi pengembangan terbesar berada di Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama. Populasi ternak unggas dari tahun 2012 - 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 3,32%, dan tahun 2015 populasi ayam ras petelur mulai diusahakan dengan sekala ekonomis dengan populasi sebesar 46.500 ekor melampau target populasi sebesar 38.500 ekor atau 122%.

Capaian kinerja sub sektor perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 60: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2015

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
1.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	35,25	35,25	35,25	23,92
2.	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	83,73	83,73	83,73	89,74
3.	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$)	263.608.993,65	263.608.993,65	31.074.462,39	189.439
4.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	50.545	48.018	48.018	65.960
5.	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	1	1	-	-
6.	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	14.152.000.000	14.670.000.000	14.670.000.000	2.709.661.252
7.	Kemitraan/Plasma	23.957,91	28,785,91	32.634.59	28.786,00
8.	Pengembangan/ perluasan areal perkebunan	233.447,42	204.868,62	192.846,56	212.083,00
a.	Karet	17.407	17.451,50	17.907	18.083
b.	Kelapa sawit	213.547,21	184.695,33	173.048,34	192.699
c.	Kelapa	1.181,51	1.176,51	1.069,52	777
d.	Lada	970,20	875,20	578,20	298
e.	Lainnya	341,5	313,50	243,50	227

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
9.	Produksi komoditi perkebunan	3.908.557	3.029.378	3.593.559	1.104.056
a.	Karet (lump)	6.481,13	8.012,06	7.619,19	7.433
b.	Kelapa (kopra)	356,23	358,57	343,83	268
c.	Kelapa Sawit (Tbs)	3.901.270,81	3.020.668,88	3.585.307,15	1.096.178
d.	Lada (putih/hitam)	426,98	316,81	268,95	162
e.	Lainnya	22,30	21,50	20,24	14,59

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015

Produksi perkebunan per komoditi dari 2012 - 2015 mengalami penurunan pada semua komoditi karena pengaruh musim kemarau panjang. Namun pada komoditas karet pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 23,62%, Produksi kelapa sawit mengalami peningkatan tahun 2014 sebesar 18,69%. Penurunan produksi komoditas perkebunan khususnya komoditas kelapa dalam sudah kurang berproduksi karena umur tanaman sudah tua, sehingga perlu peremajaan.

b. Kelautan dan Perikanan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kelautan dan Perikanan dari tahun 2012 sampai 2015 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 61: Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan 2012 - 2015

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
1.	Produksi perikanan (Jumlah Produksi dibagi target daerah dikalikan 100%)	108,23	112,69	129,96	121,57
2.	Komsumsi Ikan (Jumlah komsumsi dibagi target daerah dikalikan 100%)	99,38	99,71	100,05	107,79
3.	Cakupan Bina kelompok Nelayan (Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda dibagi jumlah kelompok nelayan pada tahun n dikalikan 100%)	20,00	22,22	25,00	33,33
4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Jumlah produksi ikan hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi ikan daerah dikalikan 100%)	18,89	20,90	25,57	24,95

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 - tahun 2016 seperti tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 62: Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016*)
1.	Produksi perikanan (TON)	11.537,34	11.985,66	12.577,03	13.207,34	9.051,89
2.	Perikanan tangkap (TON)	9.968,20	10.217,40	10.472,80	10.682,26	7.241,51
3.	Perikanan Budi daya (TON)	1.569,14	1.768,26	2.104,23	2.525,08	1.810,38
4.	Konsumsi ikan (KG/KAPITA)	37,23	37,61	37,98	38,36	42,16
5.	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan (KELOMPOK)	398	451	461	497	698
6.	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang dibina (KELOMPOK)	79	99	115	165	209
7.	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	3.823,00	6.063,00	9.615,00	11.595,69	547,84
8.	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	8.700	8.800	8.900	9.000	1.900
9.	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	10	0,38	0,37	0,38	0,04

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat
*) Capaian semester I

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi produksi perikanan tiap tahunnya sebesar 12.326,84 ton/th dimana peluang pengembangan eksplorasi dan eksploitasi produksi masih sangat besar. Rata-rata realisasi Komsumsi Ikan tiap tahunnya terdapat kecenderungan peningkatan dimana peningkatan tersebut telah melampaui target tingkat komsumsi ikan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 3,5 kg/kapita.

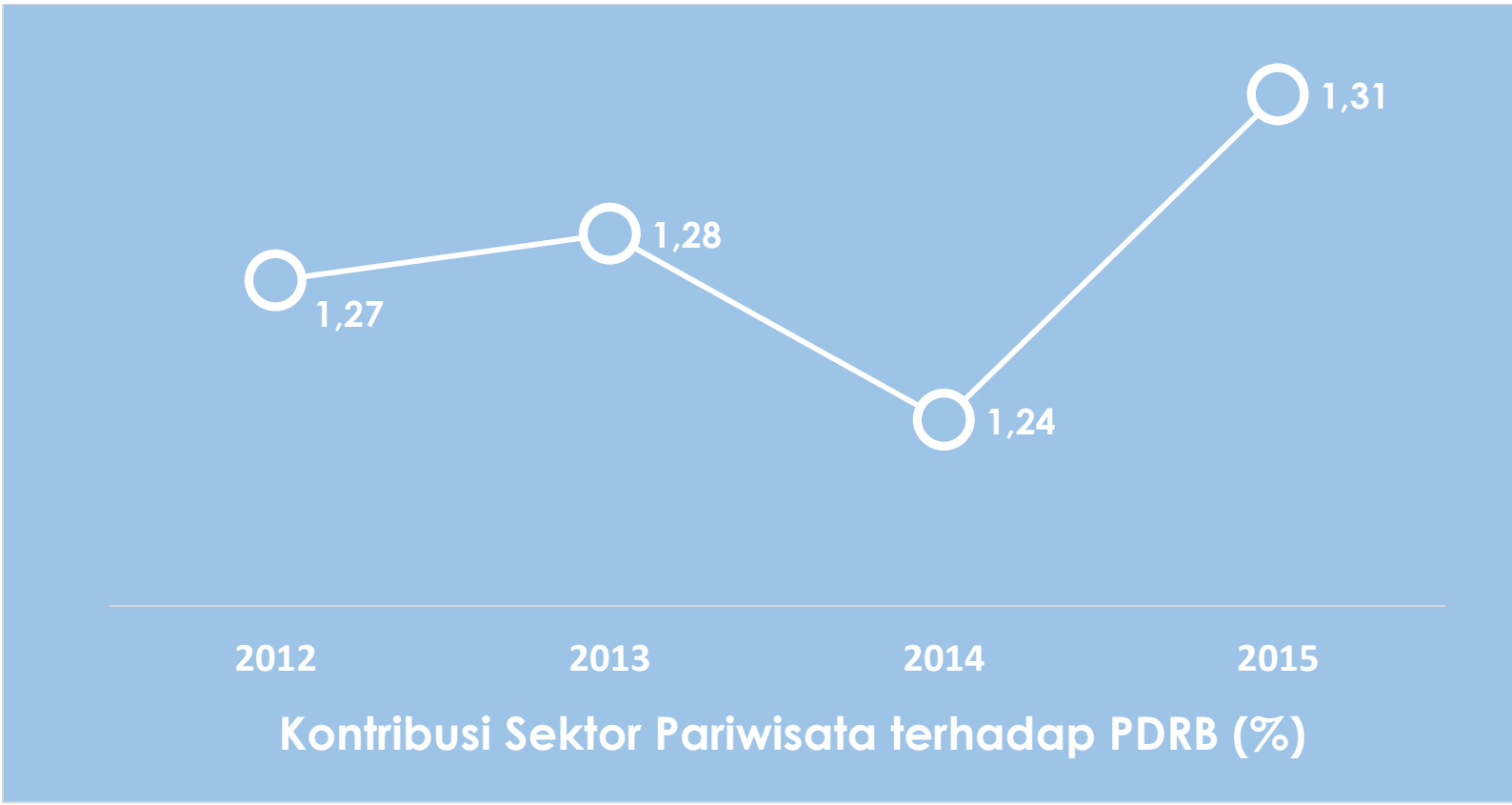
c. Pariwisata

Pencapaian kinerja dari tahun 2012-2015 dalam usaha mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 63: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2015

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	12.286	13.355	16.035	12.564
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. (%)	1,27	1,28	1,24	1,31

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015



Gambar 2. 23: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)

Jumlah kunjungan wisatawan dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan. Penurunan jumlah wisatawan dikarenakan krisis Ekonomi Eropa dan adanya bencana kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatera, walaupun jumlah wisatawan menurun tetapi pendapatan retribusi meningkat terutama TNTP, karena perubahan tarif masuk. Kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2012 sebesar 1,27% dan meningkat di tahun 2015 menjadi 1,31% atau meningkat 0,04% yang berasal dari sub sektor penyediaan akomodasi dan sub sektor penyediaan makan minum.

d. Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2015 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 64: Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,80	1,75	1,44	1,37

Sumber: Kobar dalam angka BPS,2016

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja di atas Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami penurunan sebesar 0,12%. Penurunan tersebut sebagai akibat dari adanya penutupan lokasi atau penertiban penambangan secara berkala di seluruh 6 kecamatan.

Tabel 2. 65: Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan Tahun 2012 - 2015

Uraian	Volume Ekspor (MT)				Nilai Ekspor (dalam Ribuan Rp)			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
• Zircon Sand	18.623	11.642	10.346	13.998	4.270.600	2.328.400	2.069.200	2.779.600
• Lump Ore Zink	-	-	-	-	-	-		-
• Iron Ore	-	-	-	-	-	-		-
• Ilmenite	5.505	4.923	-	-	174.060	123.075		
Jumlah	24.343	16.565	10.346	13.998	4.444.660	2.451.475	2.069.200	2.779.600

Sumber Data: Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kobar

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja diatas, volume dan nilai perdagangan ekspor di Kabupaten Kotawaringin Barat terus berjalan dari tahun 2012-2015 walaupun mengalami fluktuasi.

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja			
		2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor listrik terhadap PDRB	0,03	0,03	0,03	0,04

Sumber: Kobar dalam angka BPS,2016

Kontribusi sektor Ketenagalistrikan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut pada tahun 2015 sebesar 0,04% dikarenakan adanya perubahan tarif dasar listrik (TDL) oleh pemerintah, meningkatnya pemasangan jaringan listrik untuk rumah masyarakat dan adanya perubahan tegangan voltase atau KWH dari 450 ke 900, 1300 atau 2200 yang berdampak kepada meningkatnya penerimaan dari sektor listrik ini untuk daerah.

e. Perindustrian

Capaian Indikator kinerja Urusan Perindustrian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dituangkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 66: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	24.25	24.81	25.72	25.43
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	1,5	6,52	5,22	6,2
3.	Pertumbuhan Industri (unit)	71	28	55	43
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (Kelompok)	3	7	16	19

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015

Sebagian besar target indikator kinerja dapat dicapai bahkan jauh melebihi target, pada indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari 24,25% pada tahun 2012 meningkat menjadi 25,43 % di Tahun 2015. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri meningkat juga nilainya dari 1,5 % di tahun 2012 menjadi 6,2 % di tahun 2015.

Sementara indikator pertumbuhan Industri mengalami penurunan dari 71 unit pada 2012 menjadi 43 unit di tahun 2015, namun angka ini masih melampaui target sedangkan indikator cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2012-2013 yang tidak mencapai target namun pada 2014-2015 angka indikator tersebut telah melampaui target. Untuk indikator pertumbuhan industri, terjadi dinamika yang fluktuatif.

f. Perdagangan

Capaian kinerja urusan perdagangan pada tahun 2012 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 67: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	11,91	11,93	12,02	12,59
2	Ekspor Bersih Perdagangan ($)	547.585.488	215.253.097,17	183.735.699,94	186.428.669,99
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	53.865.000	-	-	-

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015

Capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, yang selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 11,91% meningkat di tahun 2015 menjadi sebesar 12,59% atau meningkat 0,68%. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya volume perdagangan besar dan eceran serta perdagangan ekspor. Sedangkan nilai ekspor bersih dari tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

g. Transmigrasi

Capaian kinerja urusan Transmigrasi berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 68: Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2012 - 2015

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
1.	Jenis sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah transmigrasi	2 unit mesin penggiling padi, 1 unit tambatan klotok berikut selter dan siring batu sepanjang 5 meter serta buku-buku hasil identifikasi	Pembangunan workshop, Pembangunan lantai jemur, Pembangunan kantor koperasi Pembinaan Pembangunan KTM di desa Tanjung Terantang dan	Pembangunan tambatan klotok dan shelter, Sarana TPQ, Badan jalan	Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang, Penimbunan badan jalan dan Pembuatan siring batu

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015
		kawasan transmigrasi.	penyelesaian sengketa lahan transmigrasi		

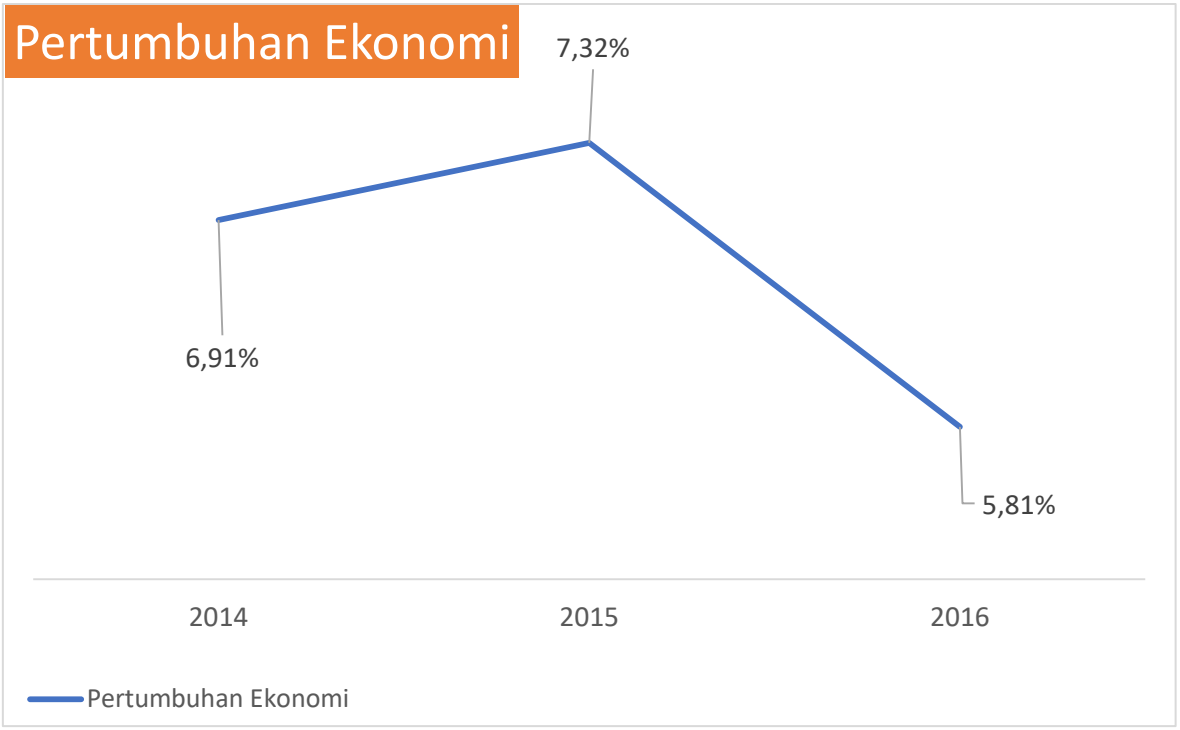
Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 - 2015 meningkat dari 6,91% menjadi 7,32%. Namun pada tahun 2015 - 2016 terjadi penurunan dari 7,32% menjadi 5,81%.



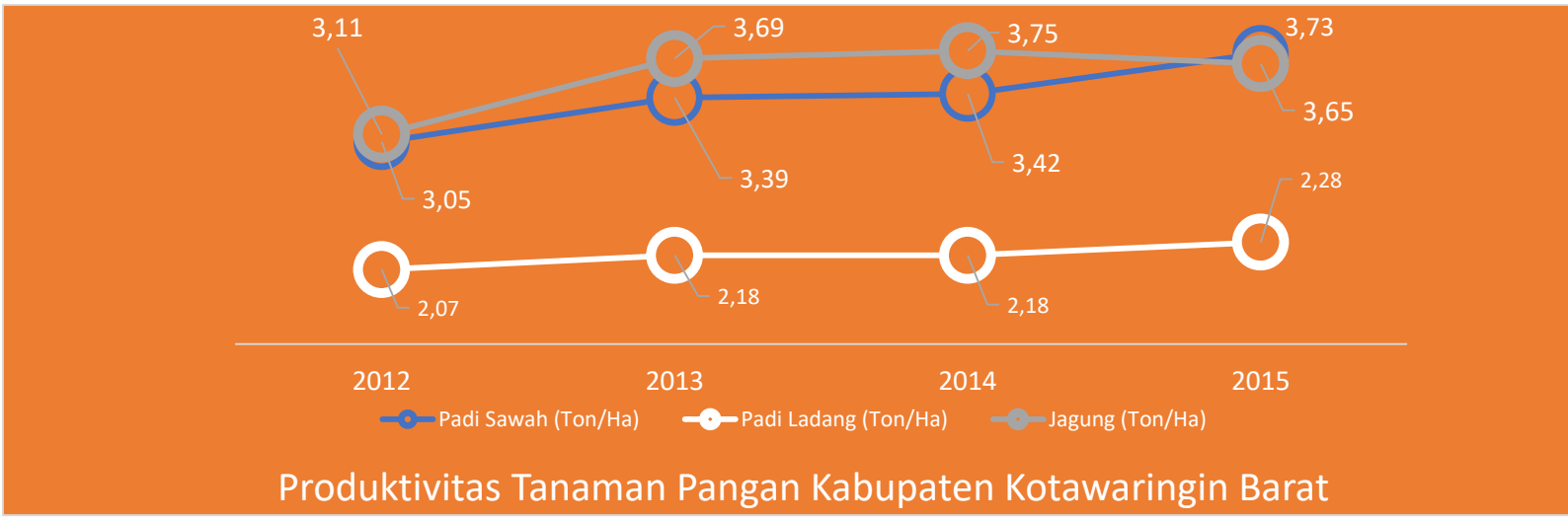
Gambar 2. 24: Pertumbuhan Ekonomi

2.4.1.2 Pertanian, Perkebunan, Peternakan

Tabel 2. 69: Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	*Luas tanam tanaman pangan*								
	Padi sawah (Ha)	7.033	7.403	7.251	7.200	7.848	6.866	8.453	5.412
	Padi ladang (Ha)	3.581	3.895	3.681	3.104	3.781	2.862	3.881	1.454
	Jagung (Ha)	1.272	814	1.336	503	1.402	638	1.472	1.526
2,	*Luas Panen Tanaman Pangan*								
	Padi sawah (Ha)	6.681	6.915	6.889	6.823	7.456	6.914	8.030	4.000
	Padi ladang (Ha)	3.681	3.368	3.497	2.814	3.592	2.674	3.687	1.664
	Jagung (Ha)	1.208	811	1.269	488	1.332	616	1.399	608
3.	*Produktivitas tanaman pangan*								
	Padi sawah (Ton/Ha)	3,05	2,99	3,23	3,39	3,55	3,42	3,79	3,73
	Padi ladang (Ton/Ha)	2,07	2,01	2,10	2,18	2,11	2,18	2,12	2,28
	Jagung (Ton/Ha)	3,11	3,69	3,16	3.69	3.20	3,75	3,25	3,65
4.	*Produksi tanaman pangan*								
	Padi sawah (Ton)	20.385	20.655	22.224	23.130	26.467	23.646	30.435	14.928
	Padi ladang (Ton)	7.052	6.769	7.330	6.148	7.579	5.837	7.816	3.797
	Jagung (Ton)	3.757	2.991	4.010	1.799	4.262	2.308	4.547	2.219

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015



Gambar 2. 25: Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, yaitu "Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup", menyiratkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan adanya upaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian. Capaian produktivitas tanaman pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 produktivitas tanaman padi sawah mencapai 2,99 Ton/Ha, naik menjadi 3,39 Ton/Ha pada tahun 2013, di tahun 2014 naik menjadi 3,42 Ton/Ha dan terus meningkat hingga mencapai 3,73 Ton/Ha pada tahun 2015. Tanaman padi ladang juga mengalami peningkatan capaian produktivitas dari 2,01 Ton/Ha pada tahun 2012, menjadi 2,28 Ton/Ha pada tahun 2015. Capaian prooduktivitas tanaman jagung pada tahun 2012 dan 2013 yaitu 3,69 Ton/Ha, lalu mengalami peningkatan hingga 3,75 Ton/Ha pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 produktivitas tanaman jagung mengalami penurunan menjadi 3,65 Ton/Ha.

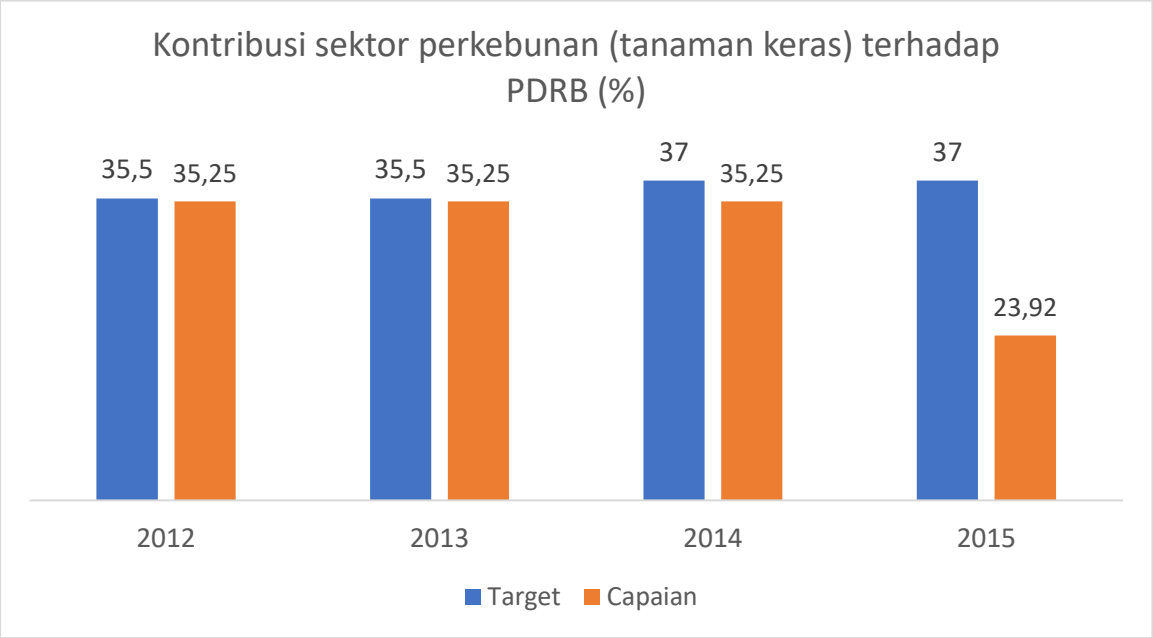
Tabel 2. 70: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2015 Berdasarkan RPJMD 2012- 2016

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	35,50	35,25	35,50	35,25	37,00	35,25	37,00	23,92
2.	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	77,50	83,73	78,50	83,73	78,50	83,73	79,50	89,74
3.	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$)	57.306.735	263.608.993,65	161.306.735,49	263.608.993,65	161.306.735,49	31.074.462,39	199.182	189.439
4.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga	66.320	50.545	67.820	48.018	67.820	48.018	79.820	65.960

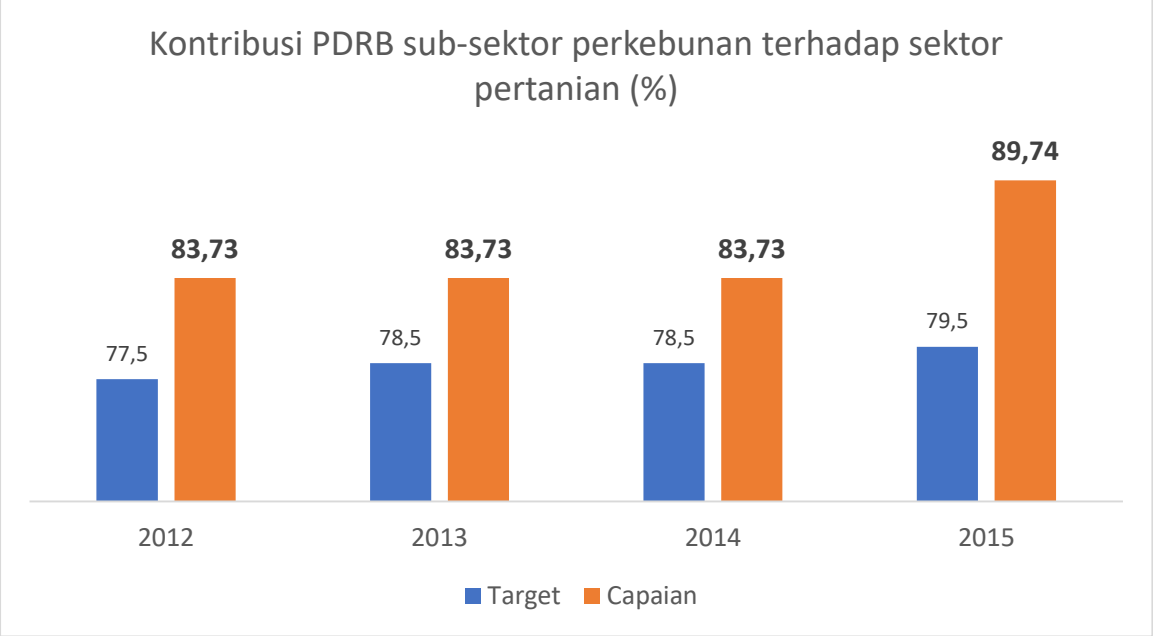
No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	kerja baru/tahun)								
5.	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	1	1	1	1 -	1	-	1	-
6.	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	11.000.000.000	14.152.000.000	12.000.000.000	14.670.000.000	12.000.000.000	14.670.000.000	3.000.000.000	2.709.661.252
7.	Kemitraan/Plasma	20.000	23.957,91	25.958,00	28,785,91	25.957,91	32.634.59	25.958,00	28.786,00
8.	Pengembangan / perluasan areal perkebunan	217.436,00	233.447,42	219.753,00	204.868,62	219.753,29	192.846,56	225.833,00	212.083,00
a.	Karet	17.034	17.407	17.434	17.451,50	17.834	17.907	18.284	18.083
b.	Kelapa sawit	197.909	213.547,21	199.909	184.695,33	199.909	173.048,34	204.909	192.699
c.	Kelapa	1.161	1.181,51	1.177	1.176,51	1.176,51	1.069,52	1.205	777
d.	Lada	1.012	970,20	875	875,20	875,20	578,20	1.042	298
e.	Lainnya	320	341,5	358,58	313,50	358,58	243,50	394	227
9.	Produksi komoditi perkebunan	3.815.537	3.908.557	4.103.985	3.029.378	4.103.985	3.593.559	16.402	1.104.056
a.	Karet (lump)	14.750	6.481,13	6.805,19	8.012,06	6.805,19	7.619,19	15.600	7.433
b.	Kelapa (kopra)	342	356,23	374,04	358,57	374,04	343,83	347	268
c.	Kelapa Sawit (Tbs)	3.800.000	3.901.270,81	4.096.334,35	3.020.668,88	4.096.334,35	3.585.307,15	.550.000	1.096.178

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
d.	Lada (putih/hitam)	425	426,98	448,33	316,81	448,33	268,95	432	162
e.	Lainnya	20,15	22,30	23,40	21,50	23,4	20,24	23,40	14,59

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015



Gambar 2. 26: Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)



Gambar 2. 27: Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)

Produksi perkebunan per komoditi dari 2012 - 2015 terjadi penurunan pada semua komoditi di sebabkan karena pengaruh musim kemarau panjang. Namun pada komoditas karet pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 23,62%, Produksi kelapa sawit mengalami peningkatan tahun 2014 sebesar 18,69%. Penurunan produksi komoditas perkebunan khususnya komoditas kelapa dalam sudah kurang berproduksi karena umur tanaman sudah tua, sehingga perlu peremajaan.

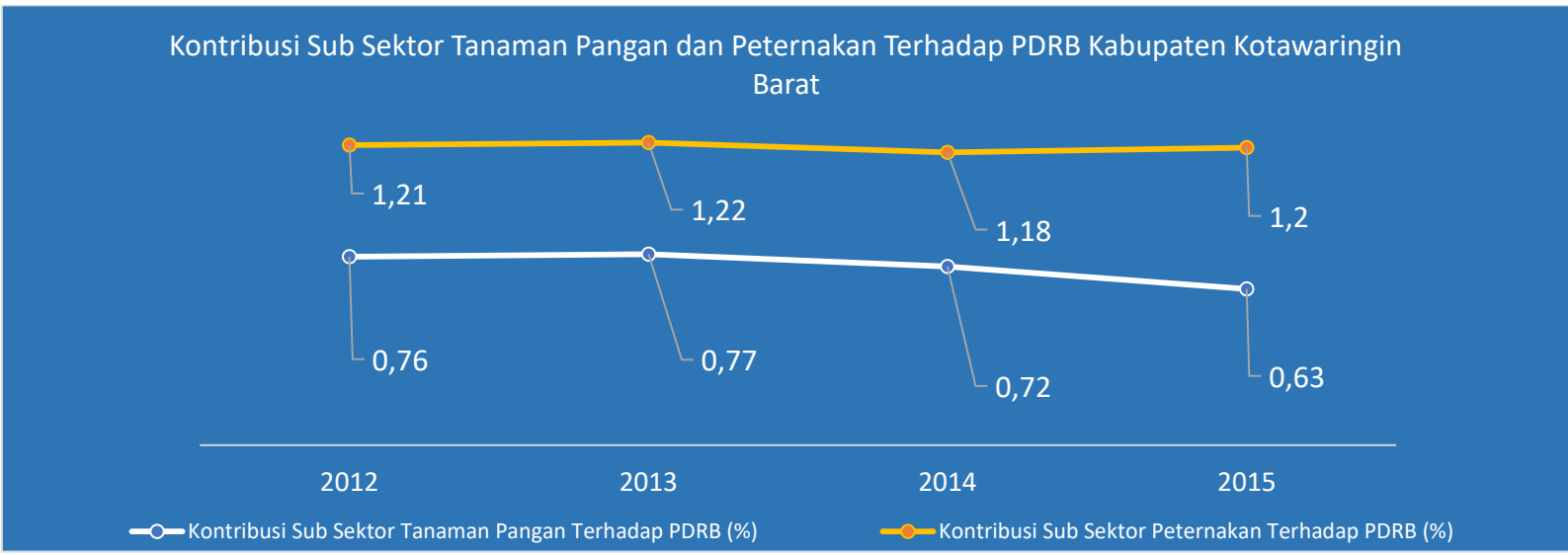
Capaian kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan sebanyak 11,33%. Namun, capaian kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat selalu mengalami peningkatan setia tahunnya dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2012, capaian kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian meningkat 6,23% dari target yang ditetapkan, tahun 2013 dan 2014 sebanyak 5,23% lebih besar dari target, dan tahun 2015 sebanyak 10,24% lebih banyak dari target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 89,74%.

Tabel 2. 71: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2015 Berdasarkan RPJMD 2012- 2016

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	*Populasi Ternak*								
	Sapi (ekor)	12.809	11.797	14.681	11.148	16.777	13.155	18.726	14.397
	Kerbau (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kambing /Domba (ekor)	2.086	2.097	2.225	2.118	2.373	2.398	2.530	2.764
	Babi (ekor)	5.009	5.025	5.371	5.327	5.761	5.498	6.178	5.718
	Ayam buras (ekor)	314.257	315.121	354.482	342.230	399.856	343.941	451.037	345.661
	Ayam ras petelur (ekor)	-	-	-	-	-	-	38.000	46.500
	Ayam ras pedaging (ekor)	165.668	157.466	183.461	163.699	203.164	166.973	224.984	158.253
	Itik (ekor)	37.959	38.055	40.355	39.708	42.901	40.317	45.608	41.527
2.	*Produksi Daging Ternak*								
	Sapi (Ton)	561,30	565,64	591,81	551,99	623,29	552,96	694,99	572,24
	Kerbau (Ton)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kambing / Domba(Ton)	48,76	49,01	51,60	49,43	54,61	49,62	57,79	58,14

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	Babi (Ton)	96,40	87,81	102,28	94,00	108,52	93,25	115,14	94,47
	Ayam buras (Ton)	320,51	289,47	354,48	317,36	393,64	388,09	435,95	340,50
	Ayam Ras Petelur (Ton)		-	-	-	-	-	-	-
	Ayam Ras Pedaging (Ton)	766,60	807,73	839,04	885,56	839,86	886,34	892,1	817,78
	Itik (Ton)	13,05	14,38	13,70	15,77	14,41	17,78	15,14	14,12
3.	*Produksi Telur*								
	Ayam buras (Ton)	199,81	189,45	224,08	207,98	251,31	208,76	281,84	207,98
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	-	-	-	171,00	209,25
	Itik (Ton)	127,87	124,97	138,13	133	149,20	133,42	161,17	133,19
4.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	-	0,76	-	0,77	-	072	-	0,63
5.	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	-	1,21	-	1,22	-	1,18	-	1,20
6.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)	-	29,80	-	28,32	-	27,70	-	26,38

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015



Gambar 2. 28: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

Populasi sapi potong dari tahun 2012-2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 4,70%, meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan jumlah populasi bila dibandingkan pada tahun 2012 yang disebabkan adanya mutasi ternak sapi ke luar daerah.

Populasi ternak kambing/domba dari tahun 2012 - 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 9,83%, Populasi ternak babi dari tahun 2012 - 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 4,41%, lokasi pengembangan terbesar berada di Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama.

Populasi ternak unggas dari tahun 2012 - 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 3,32%, dan tahun 2015 populasi ayam ras petelur mulai diusahakan dengan sekala ekonomis dengan populasi sebesar 46.500 ekor. melampau target populasi sebesar 38.500 ekor atau 122%.

Secara umum populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah ternak sapi, kambing, ayam petelur dan ayam ras pedaging. Peningkatan populasi sapi, kambing/domba dikarenakan jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan jumlah pemotongan. Selain itu minat masyarakat dalam memelihara ternak sapi juga meningkat, terutama pola pengembangan integrasi sawit-sapi. Populasi ayam petelur mulai tahun 2015 mulai meningkat karena banyak masyarakat yang berminat usaha ayam petelur yang lebih menguntungkan.

Selanjutnya dari sisi produksi nampak bahwa produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat terus naik dari tahun ke tahun. Produksi daging mengalami peningkatan disebabkan populasi sapi, kambing/domba, babi, ayam ras pedaging meningkat, sedangkan produksi telur berfluktuasi dalam kurun waktu Tahun 2012-2015. Produksi telur ayam buras sempat mengalami penurunan pada Tahun 2015 karena banyak ayam buras yang tidak sedang dalam masa produksi, namun pada Tahun 2015 produksi telur mengalami peningkatkan dikarenakan populasi ayam petelur meningkat.

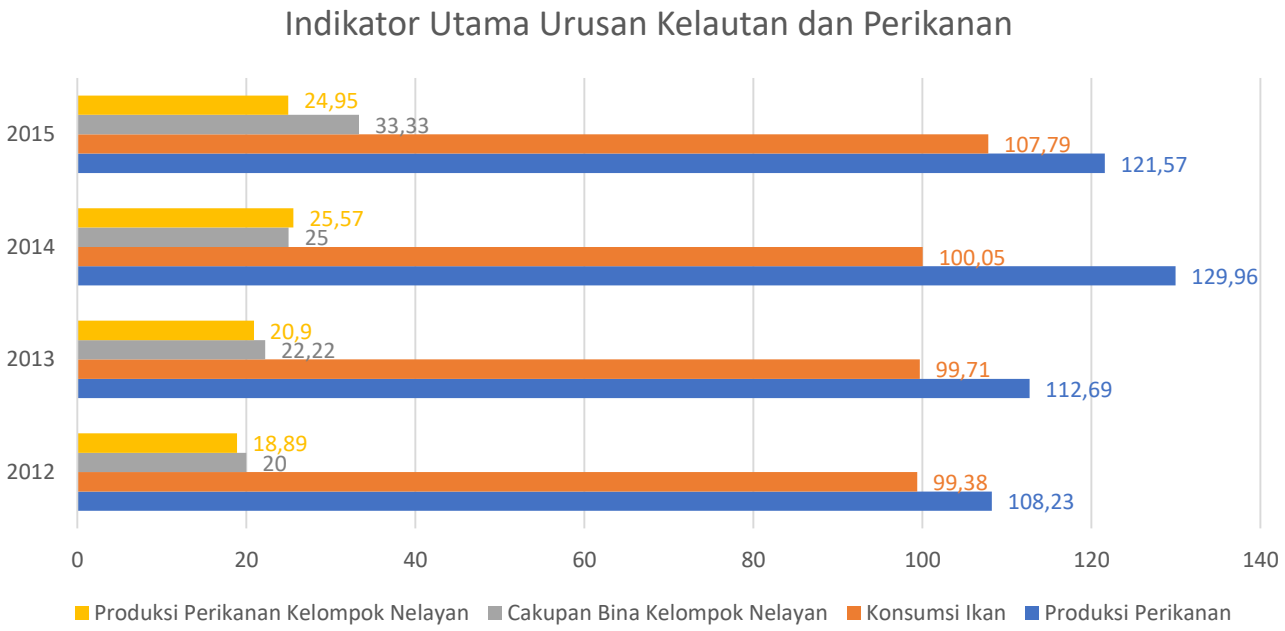
2.4.1.3 PERIKANAN DAN KELAUTAN

Tabel 2. 72: Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Utama Urusan Kelautan dan Perikanan	Capaian Tahun				Capaian Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	
1.	Produksi perikanan (Jumlah Produksi dibagi target daerah dikalikan 100%)	108,23	112,69	129,96	121,57	118,11
2.	Komsumsi Ikan (Jumlah komsumsi dibagi target daerah dikalikan 100%)	99,38	99,71	100,05	107,79	101,73

3.	Cakupan Bina kelompok Nelayan (Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda dibagi jumlah kelompok nelayan pada tahun n dikalikan 100%)	20,00	22,22	25,00	33,33	25,14
4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Jumlah produksi ikan hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi ikan daerah dikalikan 100%)	18,89	20,90	25,57	24,95	22,58

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat



Gambar 2. 29: Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014, kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 8,39. Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 107,79 pada tahun 2015. Pada indikator cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2012 yaitu 20,00%, menjadi 22,22% pada tahun 2013, kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 25,00% dan tahun 2015 mencapai 33,33%. Peningkatan juga terjadi pada Produksi Perikanan Kelompok Nelayan yaitu 18,89% pada tahun 2012, 20,90% pada tahun 2013, sebanyak 25,57% pada tahun 2014, dan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 24,95%.

Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Luas Areal Penangkapan ikan di perairan umum yang mencapai 135.00 Ha, Potensi Perikanan

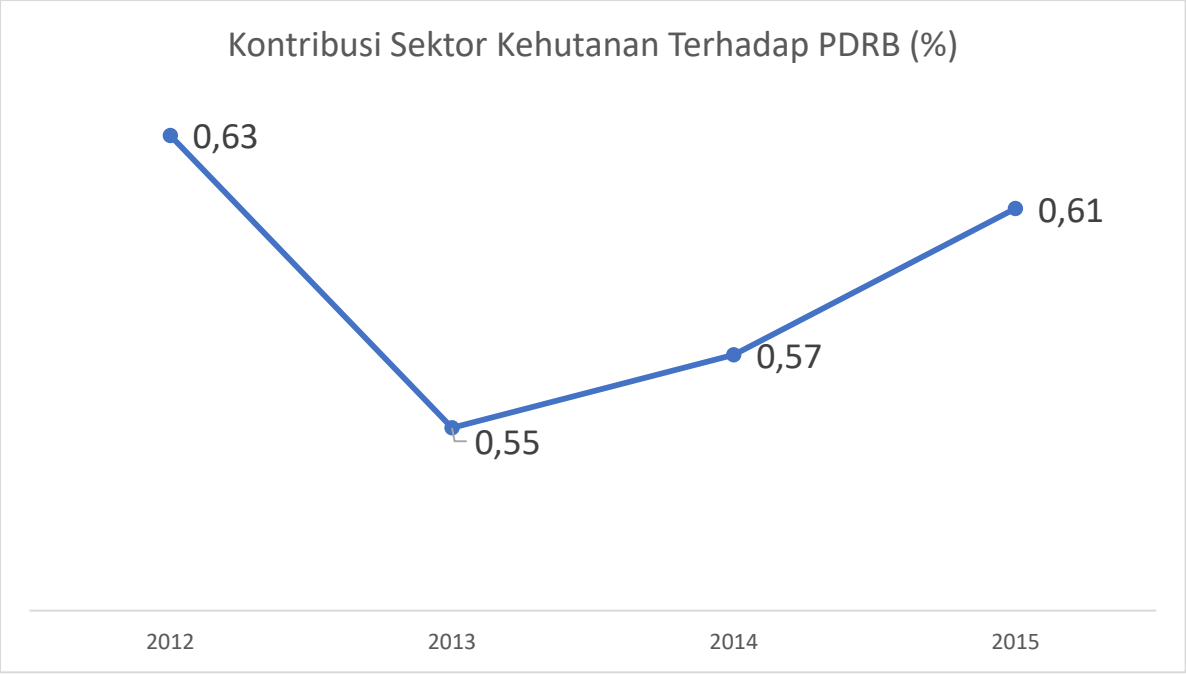
Lestari 50% /tahun : (48.120 ton/th); dengan rincian Perairan Umum 5.400 ton/th dan Perairan laut 42.720 ton/th, dan Lahan pertambakan udang sebesar 766 Ha.

2.4.1.4 KEHUTANAN

Tabel 2. 73: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Di Kabupaten

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	-	-	-	3,29
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-
3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,63	0,55	0,57	0,61
4.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	75	34	100	155,25
5.	Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	1.241,50	292	75	1.400

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015



Gambar 2. 30: Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi kehutanan yang cukup tinggi, dengan luas potensi hutan mencapai 985.437 Ha. Hutan rakyat dan lahan terbuka hijau terus mengalami peningkatan sejak tahun 2013, yaitu sebanyak 100 Ha pada tahun 2014 dan 155,25

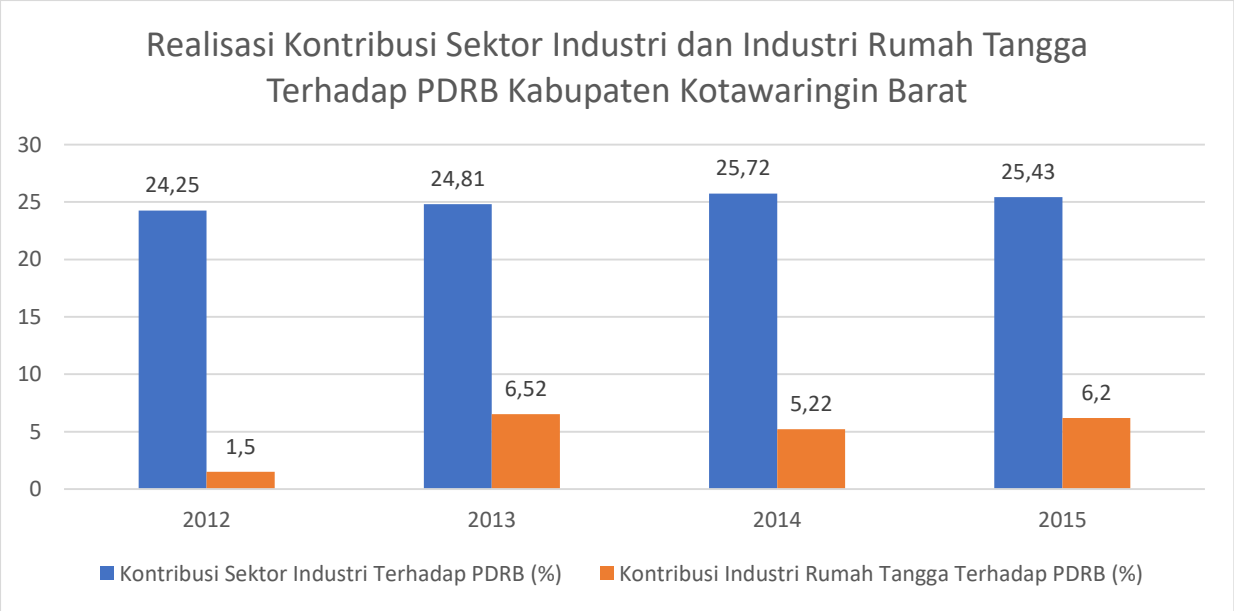
Ha pada tahun 2015. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat juga cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 0,61% pada tahun 2015.

2.4.1.5. INDUSTRI

Tabel 2. 74: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2012		2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	15,25	24.25	15,30	24.81	15,35	25.72	15,40	25.43
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	1,3	1,5	1,35	6,52	1,4	5,22	1,45	6,2
3.	Pertumbuhan Industri (unit)	2,17	71	2,18	28	2,19	55	2,20	43
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (Klpk)	12	3	12	7	12	16	12	19

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015



Gambar 2. 31: Realisasi Kontribusi Sektor Industri dan Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

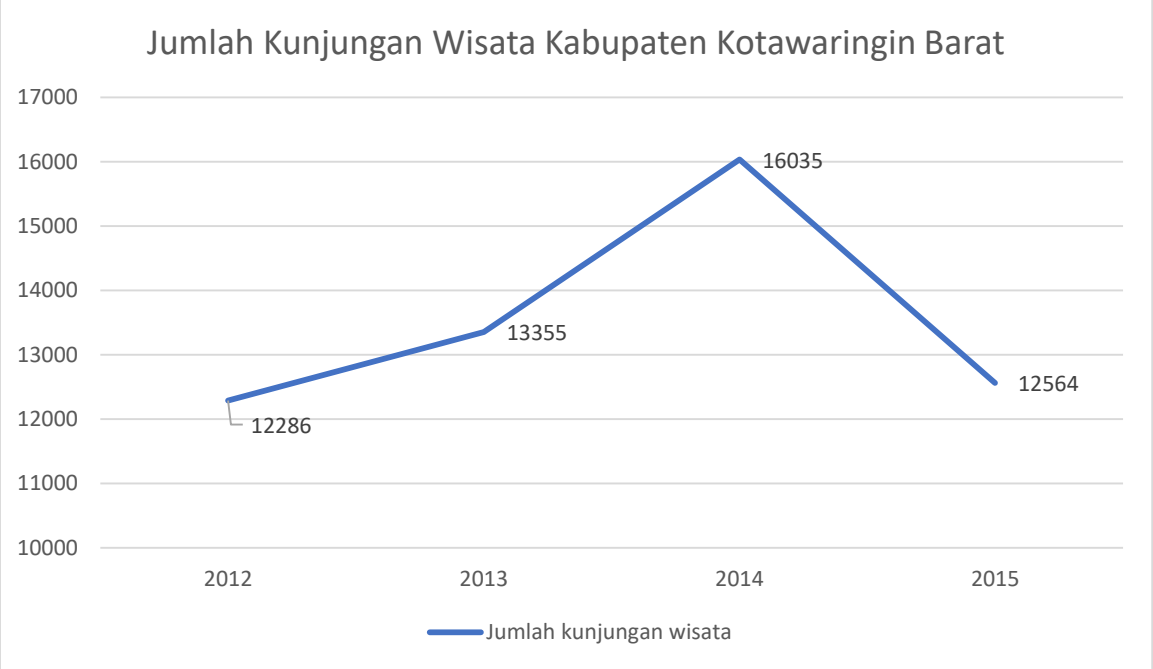
Capaian kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 mencapai 24,25%, meningkat pada tahun 2013 menjadi 24,81%, tahun 2014 mencapai 25,72%, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 25,43%. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri mengalami peningkatan secara drastis dari 1,5% pada tahun 2012 menjadi 6,52% pada tahun 2013. Namun, penurunan terjadi di tahun 2014 menjadi 5,22% dan kembali meningkat menjadi 6,2% di tahun 2015. Pertumbuhan industri bersifat fluktuatif hingga pada 2015 mencapai 43 unit. Sedangkan, cakupan bina kelompok pengrajin terus mengalami peningkatan hingga mencapai 19 kelompok pada tahun 2015.

8. PARIWISATA

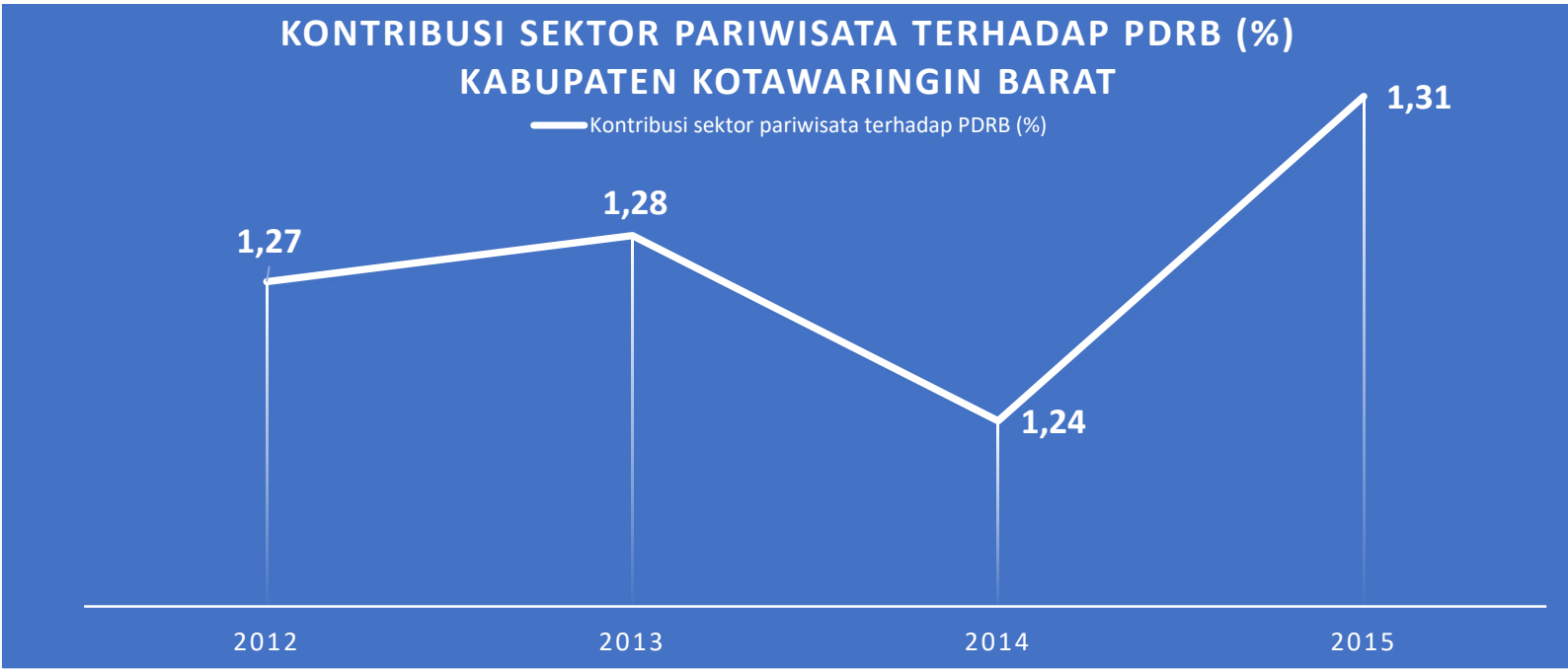
Tabel 2. 75: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target RPJMD	Capaian Kinerja			
			2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	29.400	12.286	13.355	16.035	12.564
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. (%)	-	1,27	1,28	1,24	1,31

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015



Gambar 2. 32: Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 2. 33: Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) kabupaten Kotawaringin Barat

-

Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan jumlah kunjungan mencapai 12.564 orang. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 meningkat sebanyak 0,01% dari tahun sebelumnya, kemudian menurun sebanyak 0,04% di tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan sebanyak 0,07% di tahun 2015 mencapai 1,31%.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

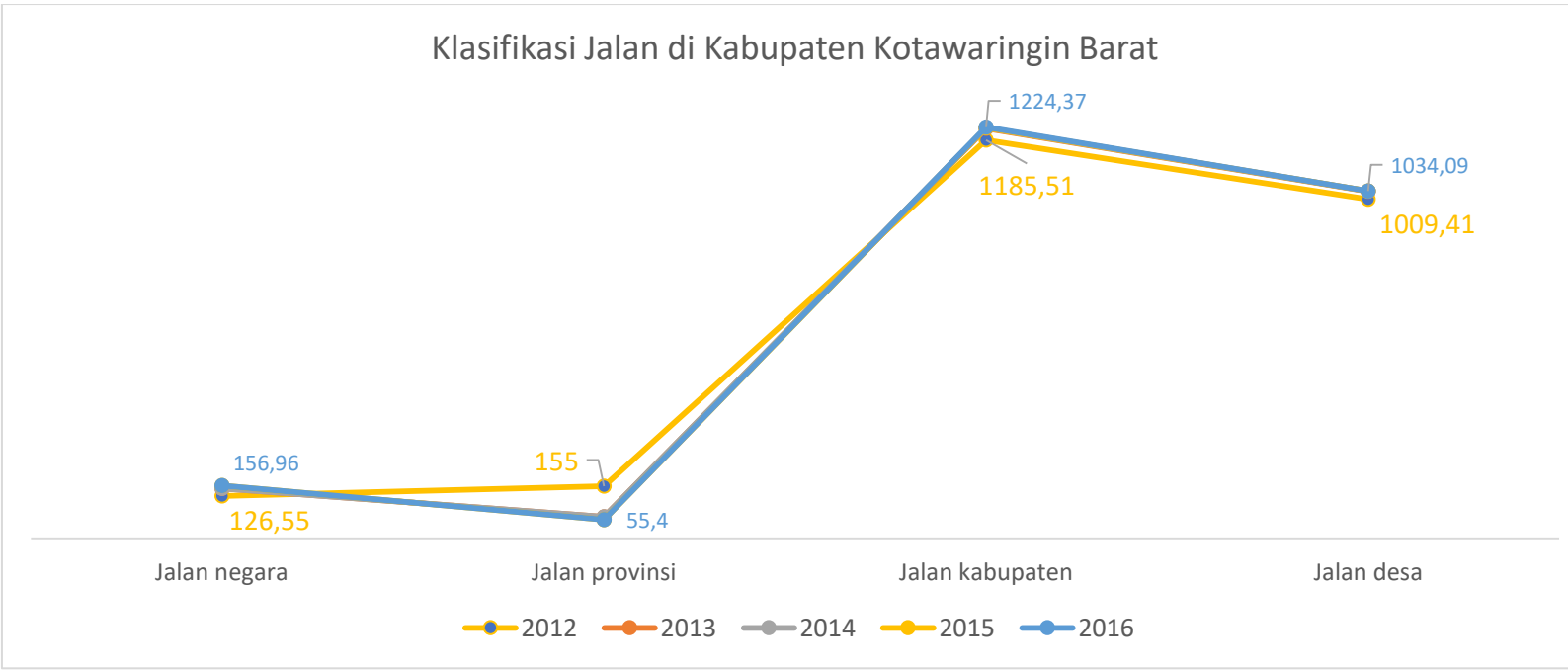
2.4.2.1 Perhubungan

Tabel 2. 76:Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2012 - 2016

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jalan negara	126,55	5,11	148,56	6,02	148,56	6,02	156,96	6,36	156,96	6,35
2	Jalan provinsi	155	6,26	63,70	2,58	63,70	2,58	55,40	2,24	55,40	2,24

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Jalan kabupaten	1.185,51	47,87	1.220,95	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.224,37	49,55
4	Jalan desa	1.009,41	40,76	1.033.02	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,09	41,85
Jumlah		2.476,67	100	2.466,23	100	2.469,65	100	2.469,75	100	2.470,82	100

Sumber: Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat



Gambar 2. 34: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Panjang Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat bersifat fluktuatif, pada tahun 2013 jumlah Panjang jalan menurun sebesar 10,44 km dari tahun sebelumnya, lalu meningkat sebanyak 3,52 km hingga tahun 2015 dan kembali mengalami penurunan sebanyak 1,07 km di tahun 2016 dengan total Panjang jalan sebesar 2.470,82 km.

Tabel 2. 77: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 - 2015

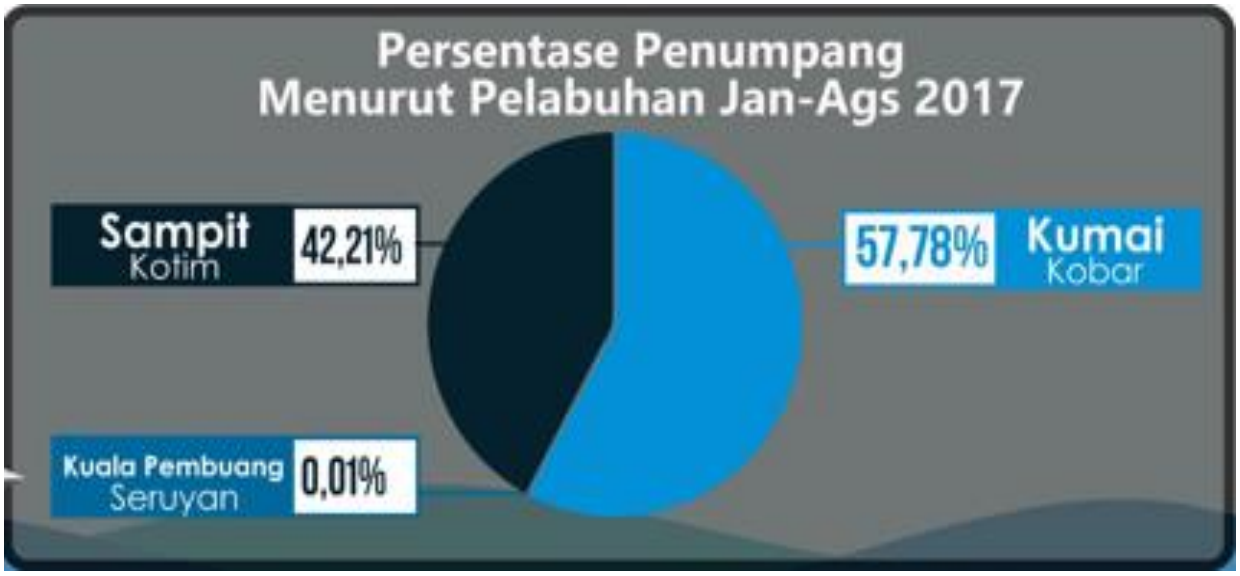
No.	Indikator	Tingkat Capaian			
		2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Bandara	1	1	1	1
2.	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	3
3.	Jumlah Terminal	4	4	4	4
4.	Jumlah Halte	11	11	11	12
5.	Jumlah Jaringan Trayek AKDP	3	3	3	3
6.	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaaan	5	5	5	9
7.	Jumlah Dermaga LLASDP	16	16	17	19
8.	Jumlah Trayek LLASDP	3	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kotawaringin Barat



Gambar. Persentase Penumpang Penerbangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki satu bandara dengan persentase penumpang mencapai 33,61% dari total penumpang di Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar. Persentase Penumpang Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tiga pelabuhan laut, salah satu pelabuhan yaitu Pelabuhan Kumai memiliki persentase penumpang mencapai 57,78% dari total penumpang di Provinsi Kalimantan Tengah.

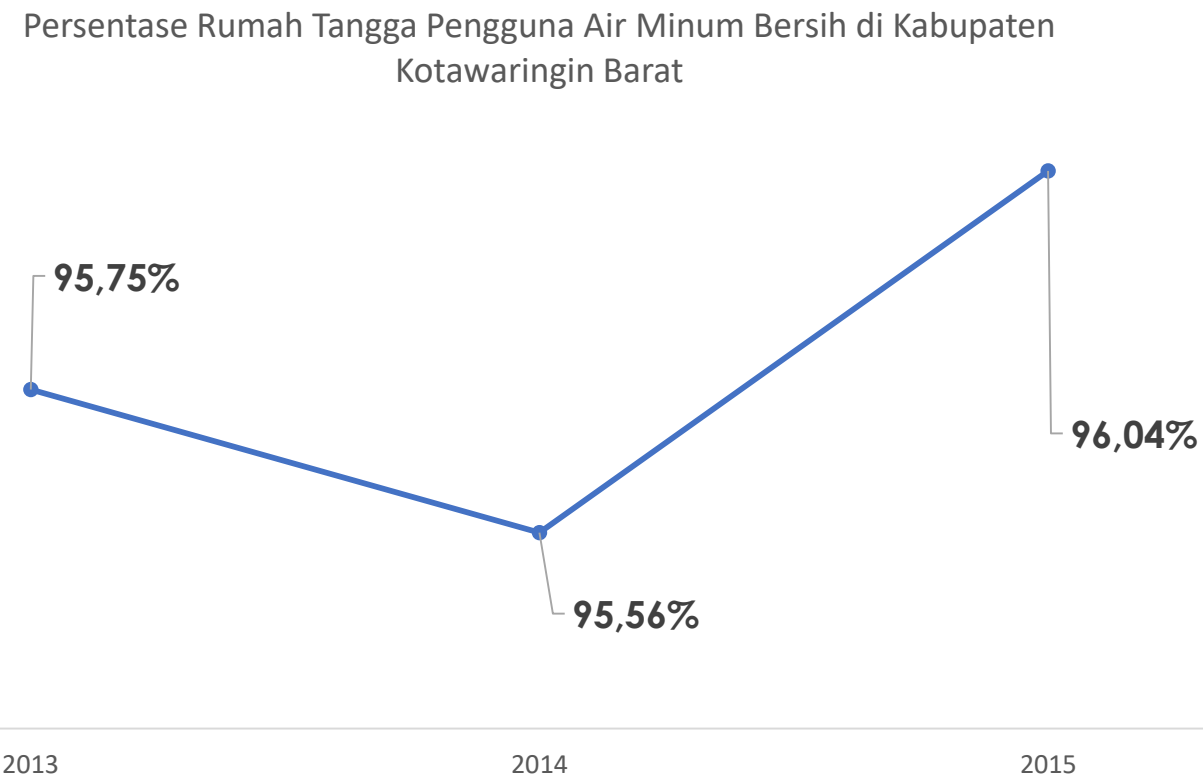
2.4.2.2. Air Bersih Dan Listrik

Tabel 2. 78: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2012 - 2015

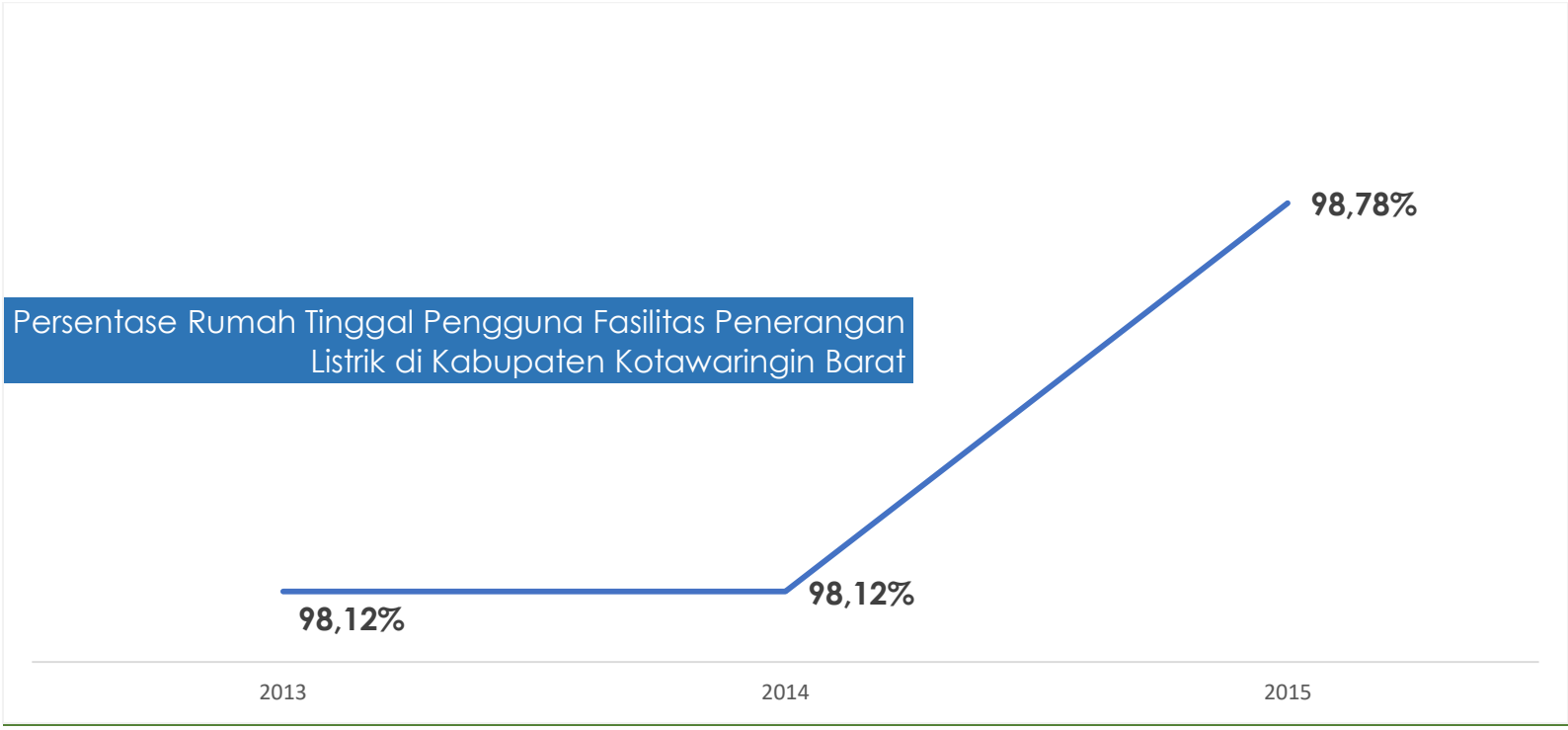
No	Sasaran Strategis	Urusan Pemerintahan/ Indikator kinerja	Capaian Kinerja				Target di akhir tahun RPJMD	Interpretasi
			2012	2013	2014	2015		
1		Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	-	95,75	95,56	96,04	90	Melampaui
2	Terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)		76,29	81,63	86,43	100	Belum tercapai
3		Persentase rumah tinggal pengguna		98,12	98,12	98,78	80	

		fasilitas penerangan listrik						
4		Persentase rumah tinggal dengan lantai tanah	-	-	-	2,74	-	
5		Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah		96,66	96,90	97,26	-	
6		Persentase rumah tinggal dengan dinding tembok		47,92	50,19	55,19	-	
7		Rasio rumah layak huni	0,95	0,95	0,95	0,95	0,65	Melampaui
8		Rasio permukiman layak huni	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	Sesuai
9	Tertatanya tata ruang kota sesuai dengan rencana yang telah ada (RTRW)	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,12	0,06	0,1	0,12	0,14	Belum Tercapai

Sumber : Dinas PU dan BPS Kab. Ktw Barat



Gambar 2. 35: Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 2. 36: Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat diperlukan indikator-indikator kinerja yang mampu mendukung sasaran pembangunan tersebut. Presentase rumah tangga pengguna air minum bersih merupakan salah satu indikatornya. Tahun 2013 - 2015 presentase rumah tangga pengguna air minum bersih Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada angka 95,56 - 96,04 dengan target pada RPJMD di angka 90. Secara interpretasi pencapaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan di RPJMD. Itu artinya standar hidup masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal penggunaan air minum bersih sudah sangat baik dan sadar akan pentingnya mengkonsumsi air bersih. Sementara untuk indikator persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik dari tahun 2013 - 2015 mengalami kenaikan dari 98,12 menjadi 98,78 dan berhasil melampaui target pada RPJMD di angka 80. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapatkan akses listrik.

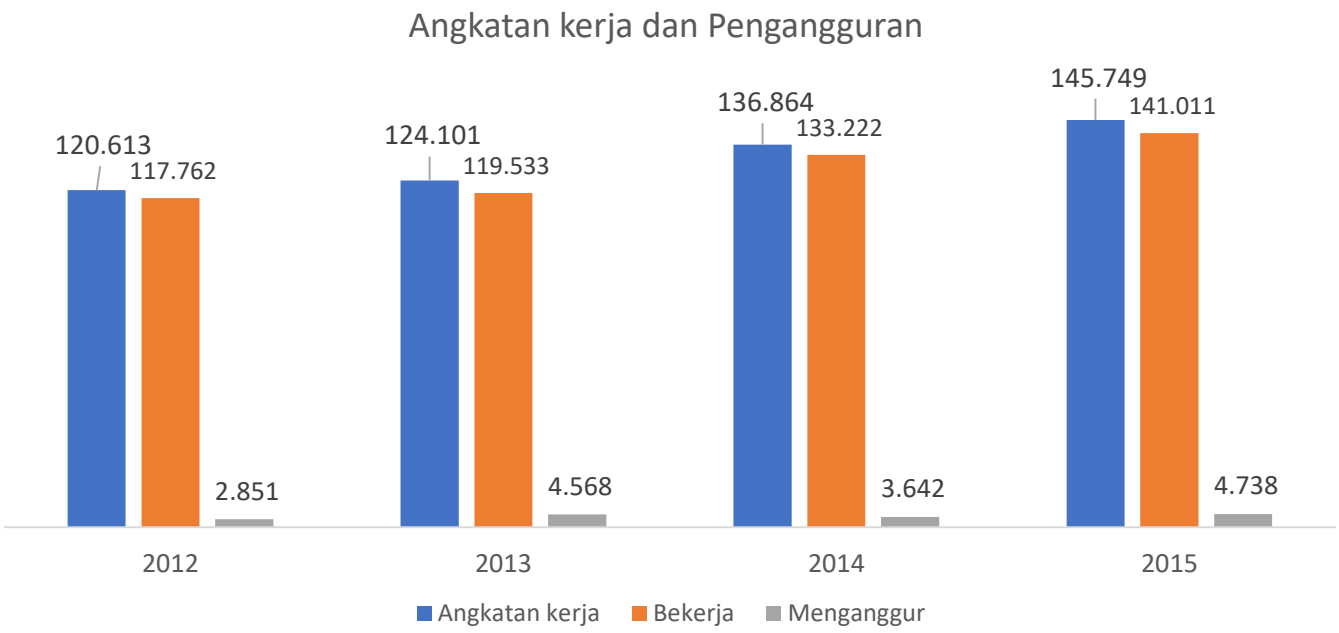
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.3.1. Ketenagakerjaan

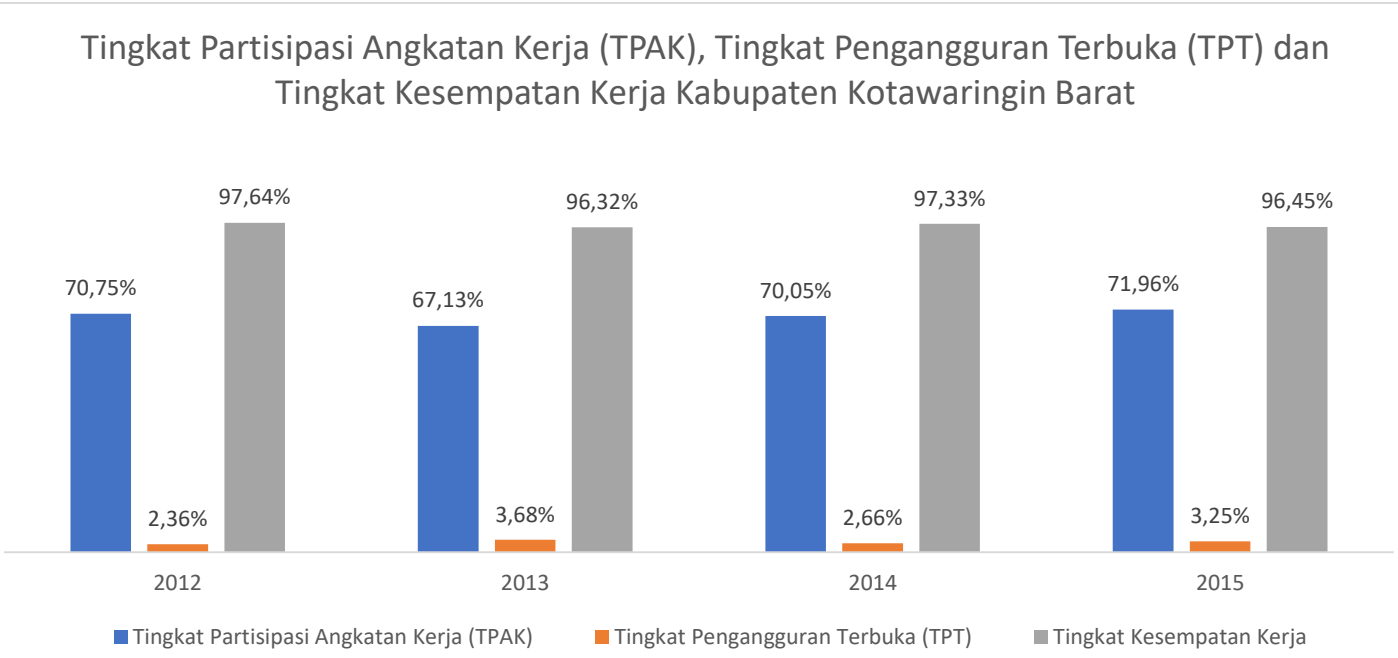
Tabel 2. 79: Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2015 berdasarkan Indikator RPJMD 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	170.468	184.860	195.373	202.545
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	120.613	124.101	136.864	145.749
3.	Bekerja (jiwa)	117.762	119.533	133.222	141.011
4.	Menganggur (jiwa)	2.851	4.568	3.642	4.738
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,75 %	67,13 %	70,05%	71,96 %
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,36	3,68	2,66	3,25
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,64	96,32	97,33	96,45
8.	Bukan Angkatan Kerja	49.855	60.759	58.509	56,796
9.	Sekolah	11.158	15.141	17.465	18.956
10.	Mengurus Rumah Tangga	35.276	39.732	35.598	36.698
11.	Lainnya	3.421	5.886	5.446	6.346

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2015 (diolah)



Gambar 2. 37: Angkatan kerja dan Pengangguran



Gambar 2. 38: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat

Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat dari data pada tahun 2012 - 2015 jumlah daya serap masyarakat yang bekerja dari kategori angkatan kerja Kabupaten Kotawaringin Barat cukup baik. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dari tahun 2012 hingga 2015 yang diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2012 hingga 2015. Meski begitu, angka

pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berhasil ditekan secara signifikan. Terlihat dari tahun 2012 - 2013 jumlah penduduk yang menganggur justru mengalami kenaikan dari 2.851 ke 4.568 kemudian dari tahun 2013 - 2014 mengalami penurunan dari 4.568 ke 3.642 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2014 - 2015 yaitu dari 3.642 ke 4.738. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2014, TPAK Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat 2,92% dari tahun berikutnya dan kembali mengalami peningkatan sebanyak 1,91% di tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014, TPT sempat mengalami penurunan sebanyak 1,02% dari tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan sebanyak 0,59% di tahun 2015. Kondisi yang fluktuatif seperti ini disebabkan penyerapan tenaga kerja penduduk usia kerja belum maksimal.

2.4.3.2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka rasio ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 42,78% pada tahun 2016.

2.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan

Berdasarkan uraian capaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan sebelumnya, secara singkat rekapitulasi capaian kinerja pembangunan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2. 80: Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
2.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat						68,63	69,51	70,14	70,60	-	
2.2	PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2011 - 2015						9.168.960,2	10.306.881,5	11.775.583,2	13.075.238,5	-	
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan						2.732.704,7	2.918.476,2	3.261.355,0	3.449.449,6	-	
	Pertambangan dan Penggalian						165.002,9	180.262,9	169.228,7	179.041,2	-	
	Indsutri pengolahan						2.223.038,1	2.557.543,4	3.028.657,3	3.324.772,6	-	
	Pengadaan Listrik dan Gas						3.453,0	3.545,1	4.204,9	6.322,9	-	
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang						7.574,3	8.350,2	10.009,4	11.492,4	-	
	Konstruksi						748.255,7	853.762,5	971.321,7	1.103.333,4	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor						1.092.119,7	1.229.551,7	1.415.030,0	1.646.500,6	-	
	Transportasi dan Pergudangan						683.899,1	822.714,6	939.272,8	1.096.937,1	-	
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						115.987,7	132.236,8	145.588,9	171.901,2	-	
	Informasi dan Komunikasi						90.458,9	99.599,0	116.329,3	128.076,0	-	
	Jasa Keuangan dan Asuransi						429.195,8	502.906,9	604.010,7	694.010,0	-	
	Real Estate						165.177,5	188.299,8	203.163,3	240.223,9	-	
	Jasa Perusahaan						4.115,3	4.877,2	5.732,5	6.432,2	-	
	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						283.222,5	331.890,5	375.914,0	419.649,9	-	
	Jasa Pendidikan						237.629,6	265.091,5	288.035,6	326.455,8	-	
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						102.504,0	111.058,5	130.909,9	148.270,3	-	
	Jasa Lainnya						84.621,5	96.714,7	106.819,2	122.369,4	-	
2.3	PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2011 - 2015						8.239.294,0	8.815.084,0	9.423.837,8	10.111.884,1	-	
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan						2.355.547,2	2.430.133,1	2.593.036,2	2.745.466,5	-	
	Pertambangan dan Penggalian						140.985,4	151.113,2	131.436,5	133.371,6	-	
	Indsutri pengolahan						2.061.316,3	2.217.996,9	2.391.937,9	2.558.264,8	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Pengadaan Listrik dan Gas						3.894,1	4.239,3	4.673,0	5.447,9	-	
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang						7.152,4	7.505,5	8.221,6	8.896,2	-	
	Konstruksi						697.800,0	763.670,2	815.094,6	885.898,2	-	
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor						1.007.960,6	1.080.903,7	1.132.837,9	1.232.135,6	-	
	Transportasi dan Pergudangan						646.977,0	737.655,2	775.545,3	829.053,3	-	
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						99.906,5	107.934,4	118.108,0	128.555,8	-	
	Informasi dan Komunikasi						88.771,0	94.447,0	102.192,5	110.037,5	-	
	Jasa Keuangan dan Asuransi						367.448,7	404.316,9	468.437,7	515.071,9	-	
	Real Estate						143.252,0	156.668,6	170.990,5	186.011,3	-	
	Jasa Perusahaan						3.672,6	4.036,3	4.357,3	4.666,2	-	
	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						242.866,1	259.908,4	287.129,9	315.723,4	-	
	Jasa Pendidikan						205.619,4	219.004,2	234.213,2	252.615,9	-	
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						91.312,6	96.579,9	101.046,6	110.359,1	-	
	Jasa Lainnya						74.812,1	78.971,2	84.579,1	90.308,9	-	
2.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat						6,70	6,99	6,91	7,30	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 - 2015											
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan						5,03	3,17	6,70	5,88	-	
	Pertambangan dan Penggalian						5,72	7,18	13,02	1,47	-	
	Indsutri pengolahan						6,22	7,60	7,84	6,95	-	
	Pengadaan Listrik dan Gas						9,66	8,87	10,23	16,58	-	
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang						8,56	4,94	9,54	8,21	-	
	Konstruksi						7,97	9,44	6,73	8,69	-	
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor						8,44	7,24	4,80	8,77	-	
	Transportasi dan Pergudangan						8,39	14,02	5,14	6,90	-	
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						8,16	8,04	9,43	8,85	-	
	Informasi dan Komunikasi						10,09	6,39	8,20	7,68	-	
	Jasa Keuangan dan Asuransi						10,19	10,03	15,86	9,96	-	
	Real Estate						9,74	9,37	9,14	8,78	-	
	Jasa Perusahaan						9,48	9,90	7,95	7,09	-	
	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						7,24	7,02	10,47	9,96	-	
	Jasa Pendidikan						2,32	6,51	6,94	7,86	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						7,51	5,77	4,62	9,22	-	
	Jasa Lainnya						6,93	5,56	7,10	6,77	-	
2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Nasional Tahun 2011 - 2015 (%)											
	Kabupaten Kotawaringin Barat						6,70	6,99	6,91	7,30	-	
	Kalimantan Tengah						6,87	7,37	6,21	7,01	-	
	Nasional						6,23	5,78	5,02	4,79	-	
2.6	Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 - 2015						3,99	6,29	7,97	4,08	-	
2.7	PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 - 2015											
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU											
	PDRB (Juta Rp)						9.168.960,2	10.306.881,45	11.775.583,11	13.075.238,45	-	
	PDRB Per Kapita (Juta Rp)						-	40.738.661,86	45.082.630,57	48.493.442,64	-	
	ATAS DASAR HARGA KONSTAN											

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	PDRB (Juta Rp)						8.239.294,0	8.815.083,85	9.423.837,66	10.111.883,82	-	
	PDRB Per Kapita (Juta Rp)							34.842.228,65	36.079.010,96	37.502.953,37	-	
2.8	Indikator Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 - 2015											
	Garis Kemiskinan (Rp)						263.840	273.467	279.080	-	-	
	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)						14,37	14,30	14,33	-	-	
	Angka Kemiskinan (%)						5,63	5,44	5,27	-	-	
2.9	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016						95,52	96,43	96,12	97,00	97,05	
2.10	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 - 2016						95,52	96,43	96,12	97,00	97,05	
	APM SD/MI (%)						97,50	97,85	98,60	98,79	98,80	
	APM SMP/MTs (%)						68,16	80,92	80,92	86,6	86,65	
	APM SMA/MA/SMK (%)						63,45	74,03	74,03	75,06	75,10	
2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 (%)											

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	APK SD/MI (%)						17,46	23,57	25,37	30,03	30,03	
	APK SMP/MTs (%)						114,55	115	117,35	118,14	118,2	
	APK SMA/MA/SMK (%)						91,93	95,89	95,89	98,88	98,9	
2.12	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016						7,97	7,58	7,82	8,01	8,05	
2.13	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016						11,29	11,90	12,12	12,13	-	
2.14	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat 2011 - 2015						69,60	69,68	69,77	70,07	-	
2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat 2011 - 2015											
	Penduduk Usia Kerja (jiwa)						170.468	184.860	195.373	202.545	-	
	Angkatan Kerja (jiwa)						120.613	124.101	136.864	145.749	-	
	Bekerja (jiwa)						117.762	119.533	133.222	141.011	-	
	Menganggur (jiwa)						2.851	4.568	3.642	4.738	-	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)						70,75	67,13	70,05	71,96	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)						2,36	3,68	2,66	3,25	-	
	Tingkat Kesempatan Kerja (%)						97,64	96,32	97,33	96,45	-	
	Bukan Angkatan Kerja						49.855	60.759	58.509	56,796	-	
	Sekolah						11.158	15.141	17.465	18.956	-	
	Mengurus Rumah Tangga						35.276	39.732	35.598	36.698	-	
	Lainnya						3.421	5.886	5.446	6.346	-	
2.16	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat											
	Jumlah Grup Kesenian						86	86	86	86	-	
	Jumlah Gedung Kesenian						1	1	1	1	-	
	Jumlah Klub Olah Raga						77	96	120	122	-	
	Jumlah Gedung Olah Raga						7	7	8	8	-	
	ASPEK PELAYANAN UMUM											
2.17	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2012 - 2016											
	Angka melek huruf (%)						95,52	96,43	96,12	97,00	97,05	
	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)						7,97	7,58	7,82	8,01	8,05	
	Angka Partisipasi Kasar											
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD						17,46	23,57	25,37	30,03	30,03	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI						114,55	115,00	117,35	118,14	118,20	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs						91,93	95,89	95,89	98,88	98,90	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK						76,88	78,92	87,59	87,59	87,60	
	Angka Partisipasi Murni											
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD								17,61	27,78		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A						97,50	97,85	98,60	98,79	98,80	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B						68,16	80,92	80,92	86,60	86,65	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C						63,45	74,03	74,03	75,06	75,10	
	Angka Putus Sekolah											
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI						0,40	0,20	0,20	0,20	0,14	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs						1,80	1,19	1,19	0,40	0,70	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA						1,80	1,60	1,60	1,10	0,70	
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV											

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						43,65	52,94	52,94	97,08	98,00	
	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						89,64	91,34	91,34	95,56	98,50	
	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						72,58	77,16	77,16	95,56	99,00	
	Angka Kelulusan											
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI						94,80	98,92	98,92	100,00	100,00	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs						57,21	99,58	99,58	100,00	100,00	
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA						66,86	99,09	99,09	99,09	99,00	
	Angka Melanjutkan											
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs						85,62	89,67	89,67	99,75	99,75	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA						95,07	99,64	99,64	99,66	99,66	
	Fasilitas Pendidikan											
	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM						75,85	80,26	89,00	33,05	33,10	
	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM						86,3	87,75	89,50	52,78	52,80	
	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM						80,00	82,00	88,00	88,00	88,10	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Rasio (perbandingan) jumlah guru/murid											
	a. SD/MI						1:17,77	1:18,07	1:32	1:21	1:21	
	b. SLTP/MTs						1:13,73	1:13,32	1:28	1:19	1:14	
	c. SMU/MA/SMK						01:12,8	1:14,50	1:28	1:14	1:14	
	Angka Partisipasi Sekolah											
	a. SD/MI						97,66	97,87	99,82	99,53	94,81	
	b. SLTP/MTs						90,18	97,73	100	95,42	99,25	
	c. SMU/MA/SMK						66,35	68,28	73,05	73,83	95,37	
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah											
	a. SD/MI						179,99	179,99	185,00	162,09	162,15	
	b. SLTP/MTs						300	310,12	310,12	123,00	332,19	
	c. SMU/MA/SMK						640,92	660,15	660,15	326,00	743,00	
2.18	Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2012 - 2016											
	BOR						76,36	71,22	72,41	77,00	53,98	
	LOS (hari)						3,46	3,10	3,19	3,54	2,47	
	TOI (hari)						1,07	1,25	1,22	1,06	2,10	
	BTO (kali)						80,62	83,87	82,74	79,34	69,98	
	GDR (%)						27,5	25,0	31,5	34,8	36,16	
	NDR (%)						9,9	10,5	16,5	14,4	12,03	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
2.19	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)						74,66	98,89	89,40	62	64,50	
2.20	Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan						94,03	118,99	98	87	73	
2.21	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2012 - 2016 (%)						74,04	89,30	89,40	91,50	64,80	
2.22	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Tahun 2012 - 2016 (%)						100	100	100	100	100	
2.23	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB Paru Tahun 2012 - 2016 (%)						50	45	50	98,46	95	
2.24	Cakupan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2013 - 2016 (%)						100	100	100	100	100	
2.25	Cakupan Yankes Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2012 - 2016						85	90	95	100	100	
2.26	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2012-2016 (%)						127,90	100,94	96,50	92,60	83,13	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
2.27	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 - 2015											
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik						0,24	0,27	0,26	0,45	-	
	Rasio Jaringan Irigasi						0,54	0,85	0,86	0,75	-	
	Luas Wilayah Kebanjiran						16,00%	15,00%	14,00%	13,80%	-	
	Persentase rumah tinggal bersanitasi						96,99%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
	Persentase penanganan sampah						66,72%	68,93%	70,45%	51,63%	-	
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk						1,42	1,48	1,57	2,2	-	
2.28	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Statusnya (km)											
	Jalan negara						126,55	148,56	148,56	156,96	156,96	
	Jalan provinsi						155	63,70	63,70	55,40	55,40	
	Jalan kabupaten						1.185,51	1.220,95	1.222,84	1.222,84	1.224,37	
	Jalan desa						1.009,41	1.033.02	1.034,55	1.034,55	1.034,09	
2.29	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Jenis Permukaannya (km)						2.476,67	2.466,23	2.469,65	2.469,75	2.470,82	
	Jalan Aspal						663,84	656,99	1.018,41	1.022,37	1.090,11	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Jalan Batu/kerikil						168,66	137,10	102,38	100,65	70,10	
	Jalan Tanah						1.276,91	1.436,85	1.098,68	1.082,92	1.046,79	
	Tidak dirinci: -Beton -Titian -Lainnya						367,26	111,54 27,89 95,86	125,00 29,11 96,16	137,81 29,85 96,16	137,81 29,85 96,16	
2.30	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kondisi Fisiknya (km)						2.476,67	2.466,23	2.469,65	2.469,75	2.470,82	
	Jalan Baik						484,18	490,46	845,98	890,50	959,29	
	Jalan Sedang						1.069,31	816,60	784,19	761,46	735,56	
	Jalan Rusak Ringan						661,52	856,56	620,51	608,00	619	
	Jalan Rusak Berat						261,66	302,61	218,97	209,79	156,97	
2.31	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan (km)						2.477,17	2.466,23	2.469,65	2.469,75	2.470,82	
	Kelas I						-	-	-	-	-	
	Kelas II						-	-	-	-	-	
	Kelas III						-	-	-	-	-	
	Kelas III A						-	-	-	-	-	
	Kelas III B						281,55	212,26	212,26	212,36	212,36	
	Kelas III C						415,70	451,14	456,12	465,90	467,43	
	Kelas Tidak dirinci						1.779,92	1.802,83	1.801,27	1.791,49	1.791,03	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
2.32	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kelas Jalan						407	402	189	189	215	
	Jembatan Baik						22	24	141	148	149	
	Jembatan Sedang						371	378	30	26	23	
	Jembatan Rusak						14	-	16	14	35	
	Jembatan Rusak Berat						-	-	2	1	8	
2.33	Capaian Indikator Kinerja											
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB						0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	
	Perda RTRW						-	-	-	-	-	
	Dokumen RDTR						2	2	-	-	-	
	Ketaatan pada RTRW						-	-	-	-	-	
2.34	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2012 - 2015											
	Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih						-	95,75	95,56	96,04	-	
	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)							76,29	81,63	86,43	-	
	Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik							98,12	98,12	98,78	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Persentase rumah tinggal dengan lantai tanah						-	-	-	2,74	-	
	Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah							96,66	96,90	97,26	-	
	Persentase rumah tinggal dengan dinding tembok							47,92	50,19	55,19	-	
	Rasio rumah layak huni						0,95	0,95	0,95	0,95	-	
	Rasio permukiman layak huni						0,99	0,99	0,99	0,99	-	
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan						0,12	0,06	0,1	0,12	-	
2.35	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012 - 2016											
	Jumlah tenaga/satuan linmas (orang)						-	1226	1226	1226	1226	
	Jumlah pos jaga/ronda (unit)						4	4	8	5		
	Jumlah tenaga/satuan linmas yang dilatih (orang)						-	400	-	-	-	
	Tingkat gangguan kebisingan lingkungan						-	-	-	-	-	
	Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan						-	-	-	-	-	
	Data laporan hasil monitoring						2 kec.	-	-	-	6 buku	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Kondisi daerah yang kondusif (kec)						6	6	6	6	6	
	Tingkat Kehamonisan umat beragama (org)						90	90	-	-	-	
	Tingkat Kehamonisan antar etnis (org)						-	-	220	300	200	
	Tingkat partisipasi pemuda pemudi pada kegiatan IBAB dan Hari Sumpah Pemuda (org)						-	1000	80	80	40	
	Peningkatan SDM tokoh lintas agama dan forum (forum)						5	4	4	3	3	
	Implementasi SKB 3 Menteri (org)						75	50	200	300	84	
	Tingkat penyalahgunaan miras & narkoba (org)						50	50	400	300	-	
	Tingkat praktek prostitusi (org)						-	200	100	-	230	
	Data laporan hasil monitoring						-	6 Kec.	-	-	10 buku	
	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pendidikan politik (org)						60	360	70	120	150	
	Jumlah parpol dan ormas/LSM (parpol/ormasdan LSM)						38 / 102	20 / 50	12/ 70	12 / 70	12 / 40	
	Jumlah data base parpol dan ormas/LSM (buku)						-	10	-	10	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	Data laporan hasil monitoring (kec)						6	6	-	6	6	
	Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya bencana						140 org	15 org	100 org	100 org	-	
2.36	Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2015											
	Pedagang Kaki Lima (PKL)						11	1	3	3	-	
	Minuman Keras (Miras)						37	20	50	80	-	
	PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum						15	57	20	39	-	
	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)						1	4	6	6	-	
	Premanisme						-	2	-	-	-	
	Judi Togel						-	-	-	1	-	
	Mucikari						-	-	-	14	-	
	KTP						-	-	-	9	-	
	Ngelem Fox						-	-	-	1	-	
2.37	Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat											

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Jumlah Desa / Kelurahan yang telah mendapat Sosialisasi/ Pelatihan/ Pembinaan						-	-	5	12	23	
	Jumlah Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih						-	-		5	5	
	Prosentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani						-	-	70%	75%	75%	
2.38	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2015											
	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)						15	15	17	17	-	
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial						68,75	68,75	68,75	21,29	-	
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus)						68,42	68,42	33,51	33,51	-	
2.39	Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2012 - 2015						35.924	24.759	33.375	33.916		
	IUD						740	783	943	1015		
	MOP						94	115	119	140		
	MOW						702	697	736	758		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	IMPLANT						2.442	2.436	3.162	3175		
	SUNTIK						20.515	13.482	19.324	19.174		
	PIL						10.542	6.519	8.190	8.610		
	KONDOM						889	727	736	1.044		
2.40	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
	Rata-rata jumlah anak per keluarga						3	3	3,8	2,8	-	
	Jml peserta KB aktif						35.924	24.759	33.375	33.916	-	
	Jml Pasangan Usia Subur (PUS)						45.847	32.154	49.238	49.578	-	
	Rasio akseptor KB (%)						80,69	87,9	80,12	69,92	-	
	Cakupan peserta KB aktif/ PA (%)						78,36	77	67,78	68,41	-	
	Keluarga Pra Sejahtera						2.966	1.474	2.701	2.325	-	
	Keluarga Sejahtera I						10.624	4.197	9.545		-	
2.41	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan											
	Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita						2.465/ 72,69	2.452/ 72,37	2.576/ 73,38	2.588/ 74,63	-	
	Penguatan Cadangan Pangan						1 unit	-	57,8%	61,4%	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah						12 / Th	12 / Th	12 / Th	12 / Th	-	
	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan						90	90	90	90	-	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)						82,7	83,72	84,56	84,95	-	
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan						0	0	10	20	-	
	Penanganan Daerah Rawan Pangan						12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	-	
2.42	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersediaan Pangan (Beras)											
	Jumlah penduduk (Jiwa)						253.000	261.000	269.629	278.398	-	
	Jumlah produksi (Ton)						17.277	18.445	18.573	11.996	-	
	Jumlah Kebutuhan (Ton)						30.805	30.744	32.830	33.890	-	
	Jumlah Kekurangan (Ton)						13.527	12.298	14.256	22.099	-	
2.43	Perkembangan Jumlah Tanah yang Bersertifikat dan Luas Tanah yang Bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2015											
	Luas tanah bersertifikat						808,88	808,88	808,88	808,88	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	Luas tanah yang belum bersertifikat						-	-	-	-	-	
	Jumlah bidang tanah bersertifikat						103.470	103.470	103.470	103.470	-	
	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat						-	-	-	-	-	
	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten						769	769	769	769	-	
	Jumlah aset tanah dalam penguasaan pemkab yang sudah bersertifikat						401	429	429	429	-	
	Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ketiga						1.254	1.254	1.254	1.254	-	
	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa						-	-	-	-	-	
	Konflik pertanahan yang terjadi						5	4	3	-	-	
	Konflik pertanahan yang terselesaikan						4	4	3	-	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
2.44	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 - 2016											
	Persentase Penanganan sampah						65	73,5	48,47	51,63	60,75	
	Jumlah Duta Lingkungan (orang)						-	-	2	-	-	
	Jumlah Kader lingkungan (orang)						50	39	39	40	-	
	Jumlah Adhiwiyata (orang)						50	50	50	50	50	
	Pencemaran status mutu air						2	2	2	2	2	
	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air:											
	Mangrove (bibit)						3.000	3.000	-	-	-	
	Ruang Terbuka Hijau (bibit)						600	1.000	678	200	-	
	Biopori (Lubang Tanam)						1.000	2.000	32.000	-	-	
	Penegakan Hukum Lingkungan						1	1	1	4	-	
2.45	Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat											
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)						-	-	-	3,29	-	
	Kerusakan Kawasan Hutan						-	-	-	-	-	
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)						0,63	0,55	0,57	0,61	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)						75	34	100	155,25	-	
	Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)						1.241,50	292	75	1.400	-	
2.46	Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012 - 2015											
	Kayu Meranti						43.775,35	27.689,61	40.219,03	38.608,07	-	
	Kayu Rimba Campuran						1.996,07	2.772,03	6.223,98	5.741,29	-	
	Kayu Indah						68,87	-	-	-	-	
2.47	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional						76,70	32,67	81,30	120,85	97,78	
	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e_KTP)						30,69	71,56	73,10	54,13	90,00	
	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KK Nasional						52,66	58,64	78,22	76,25	76,6	
	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran						18,73	28,09	52,08	58,36	61,26	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan dan Akta lainya						229	163	217	271	167	
2.48	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 - 2015 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
	Jumlah Desa yang Terperbaharui Profil Desanya						-	25	75 Desa	77 Desa	-	
	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi						81 Desa	81 Desa	81 Desa	81 Desa	-	
	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat						1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	
	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih						-	-	188 Orang	-	-	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG						2	1	-	1	-	
2.49	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 - 2015 Berdasarkan RPJMD Kabupaten											

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2015 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016											
	Jumlah Aparatur Desa, Anggota BPD Kelembagaan Desa dan SM2L yang mengalami Peningkatan Pemahaman tentang Pembangunan Partisipatif						90	90	90	120	-	
	Jumlah Siswa/Siswi yang mendapat penyaluran dana PMT-AS untuk anak sekolah di Desa Tertinggal						1.509	1.104	325	276	-	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan Monitoring						94	94	94	94	-	
	Jumlah Desa yang dapat difasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes						94	94	94	94	-	
	Jumlah Fasilitasi Pembentukan BUMDes						-	6	25	57	-	
	Jumlah Perempuan yang terlatih dalam Pelatihan Keterampilan P2W						30	30	30	60	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Jumlah Profil Desa Yang Terperbahurui						-	25	75	77	-	
	Jumlah pelaksanaan BBG-RM						1	1	1	1	-	
	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih						-	-	188	-	-	
	Jumlah Juara Lomba Desa/Kelurahan						6	6	6	6	-	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG						2	1	-	1	-	
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/Pelatihan						5	5	7	7	-	
2.50	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 - 2015											
	Jumlah Bandara						1	1	1	1	-	
	Jumlah Pelabuhan Laut						3	3	3	3	-	
	Jumlah Terminal						4	4	4	4	-	
	Jumlah Halte						11	11	11	12	-	
	Jumlah Jaringan Trayek AKDP						3	3	3	3	-	
	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaaan						5	5	5	9	-	
	Jumlah Dermaga LLASDP						16	16	17	19	-	
	Jumlah Trayek LLASDP						3	4	4	4	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
2.51	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika											
	Ketersediaan web site pemerintah daerah						-	-	16	16	-	
	Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital						400 Majalah Digital, 400 CD kilas Kobar, 100 CD kegiatan	• 100 cd kegiatan • 350 CD kilas kobar • 350 cd majalah digital	• 82 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	• 62 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	-	
	Ketersedian bulletin, buku dan poster pemerintah daerah,foto,spanduk, baliho						400 Buletin Marunting Batu Aji, 400 warta bergambar, 350 buku profil pangkalan bun, 300	• 50 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 400 Kalender Meja	• 15 album foto kegiatan • 100 Buku Himpunan Pidato Bupati • 400 buletin	• 20 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 500 buletin	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
							buku sejarah kerajaan kotawaringin, 150 Buku himpunan pidato,12 album foto	• 350 buletin • 350 warta bergambar • 350 photo bupati/wakil • 10 photo mantann bupati • 100 lembar spanduk • 240 m2 baleho • 13 media langganan koran	• 400 Buku sejarah Kerajaan dan kab. Ktw.barat • 400 Buku Profil Kota P.bun • 400 Kalender Meja • 400 Kalender dinding • 276 m2 baleho kegiatan • 125 lembar spanduk kegiatan	• 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) • 150 Buah Photo Presiden dan Wakil Presiden RI • 500 Kalender Meja • 500 Kalender dinding • 279 m2 baleho kegiatan • 98 lembar spanduk kegiatan		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
									• 830 Photo Bupati/Wakil			
	Terselenggaranya pameran/ ekspo						-	-	1 kali	1 kali	-	
	Jumlah surat kabar nasional/ lokal						18 Media	6 Media	6 Media	7 media	-	
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal/ Media Online						5 Media (2 Radio lokal,radio RRI, SBTV dan TVRI)	5 Media (2 Radio lokal,radio RRI, SBTV dan TVRI)	5 Media (2 Radio lokal, RRI, SBTV dan TVRI)	6 media	-	
	Jumlah Pemberitaan melalui media cetak						-	5 media	5 media	7 media	-	
	Siaran Keliling /Publikasi Keliling						-	-	46 kali	48 kali	-	
2.52	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 - 2015											
	Prosentase Koperasi aktif (%)						78,08	78,81	80,49	81,10	-	
	Jumlah BPR/LKM						-	-	-	-	-	
	Jumlah UMKM (Unit)						10.564	10.828	11.245	11.349	-	
2.53	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanman Modal 2012 - 2015											
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)						-	42	29	35	-	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)						-	-	-	-	-	
	PMDN (Rp)						5.896.800.000.000	6.044.026.347.434	6.518.940.123.391	714.448.540.000	-	
	PMA ($)						619.450.000	792.229.370,40	920.119.034	455.203,99	-	
	Rasio daya serap tenaga kerja						-	-	879,79	667,86	-	
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)						3.500,1	2.544,03	474,91	108,81	-	
2.54	Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga											
	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional											
	a. POPNAS						12	6	9	4	-	
	b. POSPENAS						16	6	5	3	-	
	Jumlah organisasi pemuda						61	83	97	105	-	
	Jumlah organisasi (klub) olah raga						77	96	120	122	-	
	Gedung olah raga/balai remaja						7	7	8	8	-	
	Lapangan olahraga						144	150	150	150	-	
2.55	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan											
	Jumlah Perpustakaan						228	232	292	403		
	Jumlah Anggota Perpustakaan						3.820	4.711	5.621	7.012		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan						13.735	23.469	28.450	62.585		
	Jumlah Peminjam						8.491	6.965	11.017	34.270		
	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka						13.970	15.473	16.645	18.173		
	Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk						228 : 245.143	232 : 261.200	292 : 252.492	403 : 278.141		
	Rasio Jumlah Pustakawan terhadap Jumlah Penduduk						2 : 245.143	2 : 261.200	3 : 252.492	1 : 278.141		
2.56	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2012-2015											
	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)						Ada	Ada	Ada	Ada		
	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan						2	2	-	-		
	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis						3	3	-	4		
	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)						4:36	4:36	4:36	4:36		
	Arsip audio visual						265	265	265	-		
	Arsip Foto/Album						269	0	279	309		
	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa						-	-	-	21		
	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola						-	-	19.462	19.515		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola						-	-	1.001	1.008		
2.57	Capaian Kinerja Urusan Pertanian											
	Luas tanam tanaman pangan											
	Padi sawah (Ha)						7.403	7.200	6.866	5.412		
	Padi ladang (Ha)						3.895	3.104	2.862	1.454		
	Jagung (Ha)						814	503	638	1.526		
	Luas Panen Tanaman Pangan											
	Padi sawah (Ha)						6.915	6.823	6.914	4.000		
	Padi ladang (Ha)						3.368	2.814	2.674	1.664		
	Jagung (Ha)						811	488	616	608		
	Produktivitas tanaman pangan											
	Padi sawah (Ton/Ha)						2,99	3,39	3,42	3,73		
	Padi ladang (Ton/Ha)						2,01	2,18	2,18	2,28		
	Jagung (Ton/Ha)						3,69	3.69	3,75	3,65		
	Produksi tanaman pangan											
	Padi sawah (Ton)						20.655	23.130	23.646	14.928		
	Padi ladang (Ton)						6.769	6.148	5.837	3.797		
	Jagung (Ton)						2.991	1.799	2.308	2.219		
2.58	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan											
	Sapi (ekor)						11.797	11.148	13.155	14.397		
	Kerbau (ekor)						-	-	-	-		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Kambing /Domba (ekor)						2.097	2.118	2.398	2.764		
	Babi (ekor)						5.025	5.327	5.498	5.718		
	Ayam buras (ekor)						315.121	342.230	343.941	345.661		
	Ayam ras petelur (ekor)						-	-	-	46.500		
	Ayam ras pedaging (ekor)						157.466	163.699	166.973	158.253		
	Itik (ekor)						38.055	39.708	40.317	41.527		
	Produksi Daging Ternak											
	Sapi (Ton)						565,64	551,99	552,96	572,24		
	Kerbau (Ton)						-	-	-	-		
	Kambing / Domba(Ton)						49,01	49,43	49,62	58,14		
	Babi (Ton)						87,81	94,00	93,25	94,47		
	Ayam buras (Ton)						289,47	317,36	388,09	340,50		
	Ayam Ras Petelur (Ton)						-	-	-	-		
	Ayam Ras Pedaging (Ton)						807,73	885,56	886,34	817,78		
	Itik (Ton)						14,38	15,77	17,78	14,12		
	Produksi Telur											
	Ayam buras (Ton)						189,45	207,98	208,76	207,98		
	Ayam Ras Petelur (Ton)						-	-	-	209,25		
	Itik (Ton)						124,97	133	133,42	133,19		
	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)						0,76	0,77	0,72	0,63		
	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)						1,21	1,22	1,18	1,20		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)						29,80	28,32	27,70	26,38		
2.59	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Perkebunan											
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)						35,25	35,25	35,25	23,92		
	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)						83,73	83,73	83,73	89,74		
	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$)						263.608.993,65	263.608.993,65	31.074.462,39	189.439		
	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)						50.545	48.018	48.018	65.960		
	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO						1	1	-	-		
	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)						14.152.000.000	14.670.000.000	14.670.000.000	2.709.661.252		
	Kemitraan/Plasma						23.957,91	28,785,91	32.634.59	28.786,00		
2.60	Pengembangan/ perluasan areal perkebunan						233.447,42	204.868,62	192.846,56	212.083,00		
	Karet						17.407	17.451,50	17.907	18.083		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	Kelapa sawit						213.547,21	184.695,33	173.048,34	192.699		
	Kelapa						1.181,51	1.176,51	1.069,52	777		
	Lada						970,20	875,20	578,20	298		
	Lainnya						341,5	313,50	243,50	227		
	Produksi komoditi perkebunan						3.908.557	3.029.378	3.593.559	1.104.056		
	Karet (lump)						6.481,13	8.012,06	7.619,19	7.433		
	Kelapa (kopra)						356,23	358,57	343,83	268		
	Kelapa Sawit (Tbs)						3.901.270,81	3.020.668,88	3.585.307,15	1.096.178		
	Lada (putih/hitam)						426,98	316,81	268,95	162		
	Lainnya						22,30	21,50	20,24	14,59		
2.61	Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan											
	Produksi perikanan (Jumlah Produksi dibagi target daerah dikalikan 100%)						108,23	112,69	129,96	121,57		
	Komsumsi Ikan (Jumlah komsumsi dibagi target daerah dikalikan 100%)						99,38	99,71	100,05	107,79		
	Cakupan Bina kelompok Nelayan (Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda						20,00	22,22	25,00	33,33		

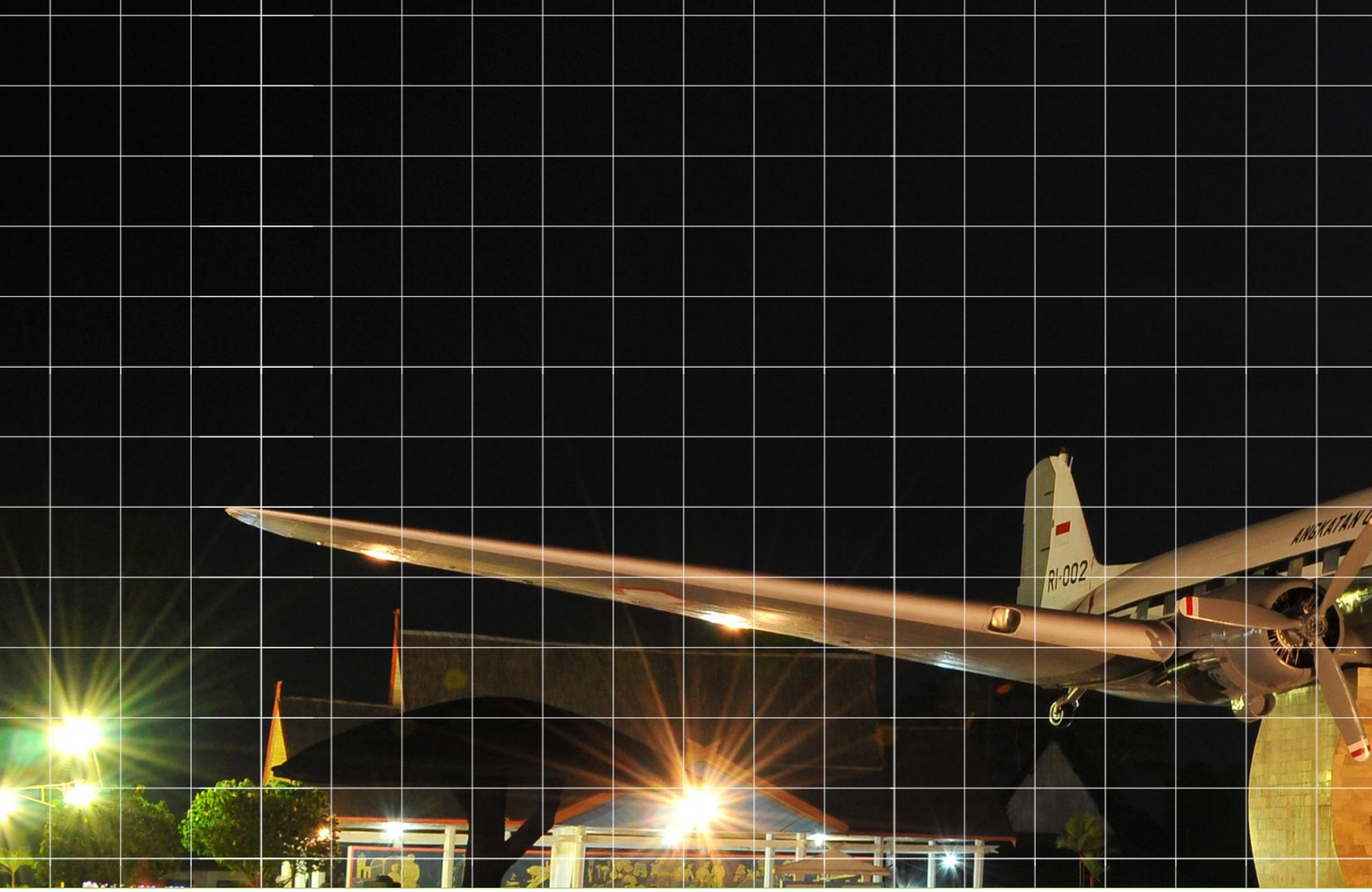
No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	dibagi jumlah kelompok nelayan pada tahun n dikalikan 100%)											
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Jumlah produksi ikan hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi ikan daerah dikalikan 100%)						18,89	20,90	25,57	24,95		
2.62	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan											
	Produksi perikanan (TON)						11.537,34	11.985,66	12.577,03	13.207,34		
	Perikanan tangkap (TON)						9.968,20	10.217,40	10.472,80	10.682,26		
	Perikanan Budi daya (TON)						1.569,14	1.768,26	2.104,23	2.525,08		
	Konsumsi ikan (KG/KAPITA)						37,23	37,61	37,98	38,36		
	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan (KELOMPOK)						398	451	461	497		
	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang dibina (KELOMPOK)						79	99	115	165		
	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)						3.823,00	6.063,00	9.615,00	11.595,69		
	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)						8.700	8.800	8.900	9.000		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)						10	0,38	0,37	0,38		
2.63	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata											
	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)						12.286	13.355	16.035	12.564		
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. (%)						1,27	1,28	1,24	1,31		
2.64	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral											
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB						1,80	1,75	1,44	1,37		
2.65	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan											
	Volume Ekspor (MT)											
	• Zircon Sand						18.623	11.642	10.346	13.998		
	• Lump Ore Zink						-	-	-	-		
	• Iron Ore						-	-	-	-		
	• Ilmenite						5.505	4.923	-	-		
	Nilai Ekspor (dalam Ribuan Rp)											
	• Zircon Sand						4.270.600	2.328.400	2.069.200	2.779.600		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	• Lump Ore Zink						-	-		-		
	• Iron Ore						-	-		-		
	• Ilmenite						174.060	123.075				
2.66	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Kontribusi Sektor Ketenagalistrikan											
	Kontribusi sektor listrik terhadap PDRB						0,03	0,03	0,03	0,04		
2.67	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Rasio Elektrifikasi											
	PLN (%)						47,32	64,69	66,05	87,27		
	Non PLN (%)						52,68	18,51	18,60	12,77		
2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian											
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)						24.25	24.81	25.72	25.43		
	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)						1,5	6,52	5,22	6,2		
	Pertumbuhan Industri (unit)						71	28	55	43		
	Cakupan bina kelompok pengrajin (Kelompok)						3	7	16	19		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
2.69	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan											
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)						11,91	11,93	12,02	12,59		
	Ekspor Bersih Perdagangan ($)						547.585.488	215.253.097,17	183.735.699,94	186.428.669,99		
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal						53.865.000	-	-	-		
2.70	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi											
	Jenis sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah transmigrasi						2 unit mesin penggiling padi, 1 unit tambatan klotok berikut selter dan siring batu sepanjang 5 meter serta buku-	Pembangunan workshop, Pembangunan lantai jemur, Pembangunan kantor koperasi Pembinaan Pembangunan KTM di desa	Pembangunan tambatan klotok dan shelter, Sarana TPQ, Badan jalan	Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang, Penimbunan badan jalan dan Pembuatan siring batu		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpetasi
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
							buku hasil identifikasi kawasan transmigrasi.	Tanjung Terantang dan penyelesaian sengketa lahan transmigrasi				



BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:



a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

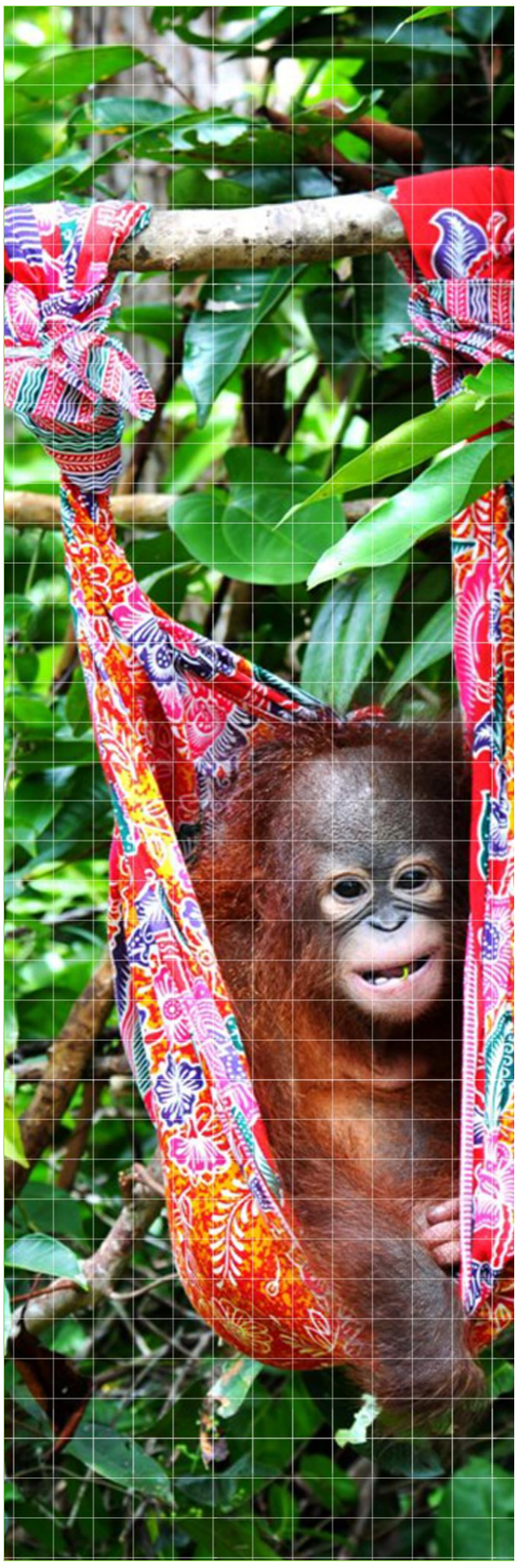
Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara garis besar terdiri dari penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas.

Kebijakan keuangan daerah erat sekali kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan, untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang tinggi daerah terhadap pemerintah pusat, akan menyebabkan kemandirian daerah semakin rendah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, efisiensi alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Arah kebijakan keuangan daerah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi pengembangan PAD secara optimal, sementara di sisi belanja dilakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, baik pada komponen belanja tidak langsung maupun komponen belanja langsung.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang mumpuni akan sangat menentukan kelangsungan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi program-program yang dicanangkan. Pengelolaan ini menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah (pos pendapatan), pengeluaran belanja (pos belanja) dan sumber-sumber pembiayaan (pos biaya). Jika suatu daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan dan meminimalkan sumber pembiayaan, maka daerah tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mencermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu



Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode tahun 2011 hingga tahun 2016. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan trend perkembangan yang positif, khususnya dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Kotawaringin Barat yang semakin baik, namun proporsi dana perimbangan masih menjadi komponen yang dominan dalam Pendapatan Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3. 1: Rata-rata Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Perkembangan %)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	645.687.706.364,35	771.039.121.031,98	875.984.792.231,00	995.973.790.300,39	1.007.379.613.114,98	1.322.594.838.557,43	15,83
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	48.201.992.905,35	65.265.940.703,51	86.595.997.785,86	121.929.676.088,15	123.301.575.004,31	143.330.741.728,12	25,25
1.1.1.	Pajak daerah	9.431.794.163,25	18.163.795.420,40	18.164.283.078,43	24.317.570.203,77	26.679.640.329,53	33.359.659.422,17	32,24
1.1.2.	Retribusi daerah	27.409.641.762,00	33.645.759.866,61	16.256.170.502,25	12.880.041.242,50	13.680.698.798,50	14.203.971.989,00	(7,93)
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.216.918.525,62	4.720.678.017,73	4.352.739.270,83	5.051.549.447,77	6.298.061.741,70	7.050.925.491,34	11,37
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7.143.638.454,48	8.735.707.398,77	47.822.804.934,35	79.680.515.194,11	76.643.174.134,58	88.716.184.825,61	109,66
1.2.	Dana Perimbangan	517.762.011.239,00	583.842.053.425,00	654.073.605.571,00	743.476.846.280,00	710.945.739.168,00	999.504.184.473,00	14,93
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	57.887.933.559,00	68.961.212.425,00	70.498.011.571,00	95.042.382.280,00	61.705.486.168,00	75.757.165.453,00	8,77
1.2.2.	Dana alokasi umum	432.771.977.680,00	486.941.691.000,00	566.405.844.000,00	597.665.464.000,00	614.824.773.000,00	662.249.343.000,00	8,99
1.2.3.	Dana alokasi khusus	27.102.100.000,00	27.939.150.000,00	17.169.750.000,00	50.769.000.000,00	34.415.480.000,00	261.497.676020,00	157,57
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.723.702.220,00	121.931.126.903,47	135.315.188.874,14	130.567.267.932,24	173.132.298.942,67	179.759.912.356,31	19,37
1.3.1	Hibah	15.267.736.276,00	17.257.682.055,00	18.061.618.076,00	3.500.000.000,00	25.784.718.247,00	4.983.000.000,00	98,62

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Perkembangan %)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.2	Dana darurat							
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	38.319.945.444,00	54.918.945.848,47	66.645.438.798,14	67.737.996.932,24	46.020.008.695,67	64.476.297.693,31	14,87
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	25.986.020.500,00	49.754.499.000,00	44.958.532.000,00	52.629.271.000,00	94.067.572.000,00	58.634.768.000,00	27,99
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	150.000.000,00	-	5.649.600.000,00	6.700.000.000,00	7.260.000.000,00	-	6,74
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	36.349.069.541,00	100,00

Sumber : BPKAD, 2011-2016



Berdasarkan pada Tabel 3.1 diatas, rata-rata perkembangan realisasi PAD Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011-2016 sebesar 25,25%, sementara rata-rata perkembangan realisasi Dana Perimbangan sebesar 14,93% dan rata-rata perkembangan realisasi Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,37%. Secara umum, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan trend perkembangan yang positif dengan rata-rata perkembangan sebesar 15,83%. Termasuk perkembangan positif pada pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan 25,25% dan angka pertumbuhan setiap tahun meningkat.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pada periode 2011-2016 realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3. 2: Rata-rata Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Perkembangan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	292.158.512.004,88	334.957.011.670,00	383.270.125.507,80	393.997.082.307,00	489.211.302.621,00	614.487.165.510,00	16,33
1	Belanja Pegawai	257.830.637.847,88	303.461.692.920,00	339.234.052.307,80	350.333.883.370,00	391.985.759.085,00	466.082.652.719,00	12,71
2	Belanja Bunga	151.666.665,00	0	0	0	0	858.680.569,00	100,00
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Belanja Hibah	7.291.976.016,00	6.876.600.000,00	14.588.800.000,00	5.167.862.437,00	4.701.953.000,00	19.840.520.000,00	70,97
5	Belanja Bantuan Sosial	5.414.870.300,00	0	1.592.500.000,00	2.934.400.000,00	843.350.000,00	354.550.000,00	-36,24
6	Belanja Bagi Hasil	21.199.677.176,00	24.616.707.000,00	1.925.188.350,00	2.576.672.200,00	2.942.068.700,00	1.980.543.000,00	-12,14
7	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	25.544.084.850,00	32.890.044.300,00	86.903.487.836,00	125.252.605.309,00	79,04
8	Belanja Tidak Terduga	269.684.000,00	2.011.750,00	385.500.000,00	94.220.000,00	1.834.684.000,00	117.613.913,00	4.128,25
B	Belanja Langsung	290.563.727.080,23	338.822.549.492,65	535.617.981.566,70	660.044.030.287,30	550.536.360.774,22	666.461.609.806,64	20,48
1	Belanja Pegawai	22.264.839.300,00	19.254.521.800,00	25.202.095.629,00	48.537.215.797,00	52.749.489.049,00	50.370.524.366,00	22,83
2	Belanja Barang dan Jasa	107.326.169.420,23	107.108.070.246,25	152.188.265.476,42	218.602.174.503,43	206.834.420.562,59	233.452.739.255,56	18,60
3	Belanja Modal	160.972.718.360,00	212.459.957.446,40	358.227.620.461,28	392.904.639.986,87	290.952.451.162,63	382.638.346.185,08	23,17
	Jumlah	582.722.239.085,11	673.779.561.162,65	918.888.107.074,50	1.054.041.112.594,30	1.039.747.663.395,22	1.280.948.775.316,64	17,71

Sumber : BPKAD, 2017

Kondisi belanja daerah mengalami perkembangan sebagaimana pendapatan daerah. Pada tahun 2011, total belanja sebesar Rp 582.722.339.085,11 dan pada tahun 2012 sebesar Rp 673.779.561.162,65. Pada tahun 2013 total belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai Rp 918.888.107.074,50 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 1.054.041.112.594,30. Pada tahun 2015 total belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp 1.039.747.663.395,22 dan pada Tahun 2016 total belanja daerah adalah sebesar Rp. 1.280.948.775.316,64. Rata-rata perkembangan total belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode tahun 2011-2016 mencapai 17,71 %, dengan rata-rata perkembangan Belanja Tidak Langsung sebesar 16,33% dan rata-rata perkembangan Belanja Langsung sebesar 20,48%.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD.

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan dana cadangan; dan/atau
d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Pinjaman daerah; dan
e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 6 tahun terakhir (2011-2016) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 3: Rata-Rata perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata perkembangan (%)
1.	Penerimaan Pembiayaan							
	a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) & SILPA BLUD	60.410.241.046,00	116.547.722.985,24	212.479.089.224,41	159.677.576.906,91	111.374.403.817,27	99.100.732.450,03	21,82
	b Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0,00
	c Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0,00
	d Penerimaan pinjaman daerah & obligasi	0	0	0	0	30.000.000.000,00	0	0,00
	e Penerimaan kembali pemberian pinjaman	671.994.660,00	131.271.100,00	209.243.285,00	423.552.200,00	265.728.800,00	283.578.076,00	10,16
	F Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0	0,00

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata perkembangan (%)
Jumlah penerimaan pembiayaan		61.082.235.706,00	116.678.994.085,24	212.688.332.509,41	160.101.129.106,91	141.640.132.617,27	99.156.971.964,41	21,41
2	Pengeluaran pembiayaan							
	a Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0,00
	b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	0	2.000.000.000,00	10.100.000.000,00	6.499.557.768,00	11.500.000.000,00	10.498.000.000,00	109,39
	c Pembayaran pokok utang	7.500.000.000,00	668.900.000,00				30.000.000.000,00	
	d Pemberian pinjaman daerah	0						0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan		7.500.000.000,00	2.668.900.000,00	10.100.000.000,00	6.499.557.768,0	11.500.000.000,00	40.498.000.000,00	437,24
Pembiayaan netto		53.582.235.706,00	114.010.094.085,24	202.588.332.509,41	153.601.571.338,91	130.140.132.617,27	58.305.035.205,20	19,16

Sumber : BPKAD, 2017



Berdasarkan Tabel 3.3 di atas tampak bahwa rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan netto Kabupaten Kotawaringin Barat mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 sebesar 19,16% dengan rata-rata perkembangan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 21,41 %. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata perkembangan sebesar 21,81%. Pembayaran pokok utang Tahun 2011 merupakan pembayaran pokok utang pada perbankan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah Tahun 2010, sedangkan pembayaran pokok utang Tahun 2012 merupakan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya kepada pihak ketiga.

3.1.2 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan Daerah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2015 tampak pada tabel berikut.

Tabel 3. 4: Neraca Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015

URAIAN		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	Rata-Rata perkembangan (%)
ASSET						
Asset Lancar						
1.	Kas dan setara kas	212.718.183.385,41	159.677.915.444,91	111.423.452.118,27	99.147.300.758,03	(22,06)
2.	Piutang	139.873.419,57	1.002.917.328,47	11.489.341.639,47	22.841.163.618,16	587,14
	- Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	-	-	-	-	
	- Piutang Pajak Netto	*139.873.419,57*	*1.002.917.328,47*	11.489.341.639,47	22.841.163.618,16	587,14
3.	Piutang Retribusi	937.352.511,00	39.145.000,00	233.802.066,00	460.274.852,00	166,10
	- Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	-	-	-	-	
	- Piutang Retribusi Netto	*937.352.511,00*	*39.145.000,00*	*233.802.066,00*	460.274.852,00	166,10
4.	Penyisihan Piutang	-	-	-	(12.877.680.140,10)	0
5.	Piutang lainnya	18.315.902,80	10.709.020.249,90	24.779.769.955,03	28.098.741.679,06	19.504,40
	- Penyisihan Piutang Lainnya Tidak Tertagih	-	-	-	(4.133.291.783,74)	0
	- Piutang Lainnya Netto	*18.315.902,80*	*10.709.020.249,90*	*24.779.769.955,03*	32.232.033.462,80	19.509,96
6.	Beban Dibayar dimuka	-	-	-	225.874.146,00	0
7.	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	*16.800.000,00*	*5.200.000,00*	*13.770.000,00*	27.226.100,00	64,49
8.	Persediaan	7.267.784.751,00	10.953.515.577,47	21.297.142.949,96	27.036.344.493,84	57,36
	Jumlah Asset Lancar	221.098.309.969,78	182.387.713.600,75	169.237.278.728,73	164.959.245.506,99	(9,08)

URAIAN		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	Rata-Rata perkembangan (%)
Investasi Jangka Panjang						
1.	Investasi Non Permanen	10.078.365.362,00	8.959.287.462,00	6.005.708.679,00	5.605.021.223,00	(6,91)
2.	Investasi Permanen	40.564.241.218,00	51.478.498.165,42	69.228.964.508,00	80.870.973.277,00	26,07
Jumlah Investasi jangka Panjang		50.642.606.580,00	60.437.785.627,42	75.234.673.187,00	86.475.994.500,00	19,59
Asset tetap						
1.	Tanah	201.190.404.960,00	462.106.845.923,00	464.486.992.929,07	466.338.554.709,07	43,53
2.	Peralatan dan Mesin	174.432.368.485,52	210.457.366.631,52	238.084.699.189,52	276.666.907.235,52	16,66
3.	Gedung dan Bangunan	445.798.473.560,87	523.131.341.713,04	604.426.579.301,21	646.446.562.171,21	13,28
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.054.242.500.524,84	1.290.320.146.787,99	1.475.909.067.860,99	1.756.839.402.506,38	18,60
5.	Aset Tetap Lainnya	16.050.889.363,00	16.891.477.389,00	14.259.349.271,00	16.315.317.288,00	1,36
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	75.684.687.788,91	106.606.472.000,15	203.491.415.038,76	125.327.735.248,00	31,11
7.	Akumulasi penyusutan	-	-	-	(1.205.426.852.205,77)	0
	Jumlah Aset Tetap	1.967.399.324.683,14	2.609.513.650.444,70	3.000.658.103.590,55	2.082.507.626.952,41	5,68
Asset Lainnya						
1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	0
2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	79.296.022,56	6.208.515,00	-	-	(64,06)
3.	Tagihan lainnya	380.680.692,00	339.380.677,00	223.904.391,00	197.721.231,00	(18,86)
4.	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	0
5.	Asset tak berwujud	8.350.180.033,00	15.431.854.585,00	19.902.533.985,00	26.164.248.185,00	(48,41)

URAIAN		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	Rata-Rata perkembangan (%)
6.	Amortisasi	0	0	0	(10.774.182.477,60)	0
7.	Aset Lain-lain	18.413.617.812,00	8.771.030.600,00	17.567.801.177,00	13.511.737.161,00	8,28
	Jumlah Aset Lainnya	27.223.774.559,56	24.548.474.377,00	37.694.239.553,00	29.099.524.099,40	6,97
	JUMLAH ASSET	2.266.364.015.792,48	2.876.887.624.049,87	3.282.824.295.059,28	2.363.042.391.058,80	4,34
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	333.538,00	49.048.301,00	6.283.102,00	7.259,14
2.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	565.011.302,31	0
3.	Utang belanja	-	-		3.904.176.614	0
4.	Utang jangka Pendek Lainnya	11.073.380.526,00	15.751.585.486,68	18.650.431.037,40	47.810.774.101,02	72,33
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.073.380.526,00	15.751.919.024,68	18.699.479.338,40	52.286.245.119,33	80,19
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
1.	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	11.073.380.526,00	15.751.919.024,68	18.699.479.338,40	52.286.245.119,33	80,19

URAIAN			Tahun				
			2012	2013	2014	2015	Rata-Rata perkembangan (%)
EKUITAS DANA							
1.	Ekuitas Dana Lancar						
	-	Sisa Lebih Pebiayaan anggaran (SiLPA)	212.479.089.224,41	159.677.576.906,91	111.374.403.817,27	-	(51,70)
	-	Pendapatan yang ditangguhkan	239.094.161,00	5.000,00	-	-	(66,67)
	-	Cadangan Piutang	1.112.341.833,37	11.756.282.578,00	36.516.683.660,50	-	355,84
	-	Cadangan Persediaan	7.267.784.751,00	10.953.515.577,47	21.297.142.949,96	-	15,05
	-	Dana yang disediakan untuk Utang Jangka Pendek	(11.073.380.526,00)	(15.751.585.486,68)	(18.650.431.037,40)	-	(13,12)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar			210.024.929.443,78	166.635.794.575,70	150.537.799.390,33	-	(43,44)
2.	Ekuitas Dana Investasi						
	-	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	50.642.606.580,00	60.437.785.627,42	75.234.673.187,00	-	(18,73)
	-	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.967.399.324.683,14	2.609.513.650.444,70	3.000.658.103.590,55	-	(17,46)
	-	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	27.223.774.559,56	24.548.474.377,00	37.694.239.553,00	-	(18,76)
	-	Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang	-			-	

URAIAN	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata perkembangan (%)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2.045.265.705.822,70	2.694.499.910.449,12	3.113.587.016.330,55	-	(17,57)
JUMLAH EKUITAS DANA	2.255.290.635.266,48	2.861.135.705.024,82	3.264.124.815.720,88	2.310.756.145.939,47	3,91
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.266.364.015.792,48	2.876.887.624.049,50	3.282.824.295.059,28	2.363.042.391.058,80	4,34

Sumber : DPKD, 2016

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio).

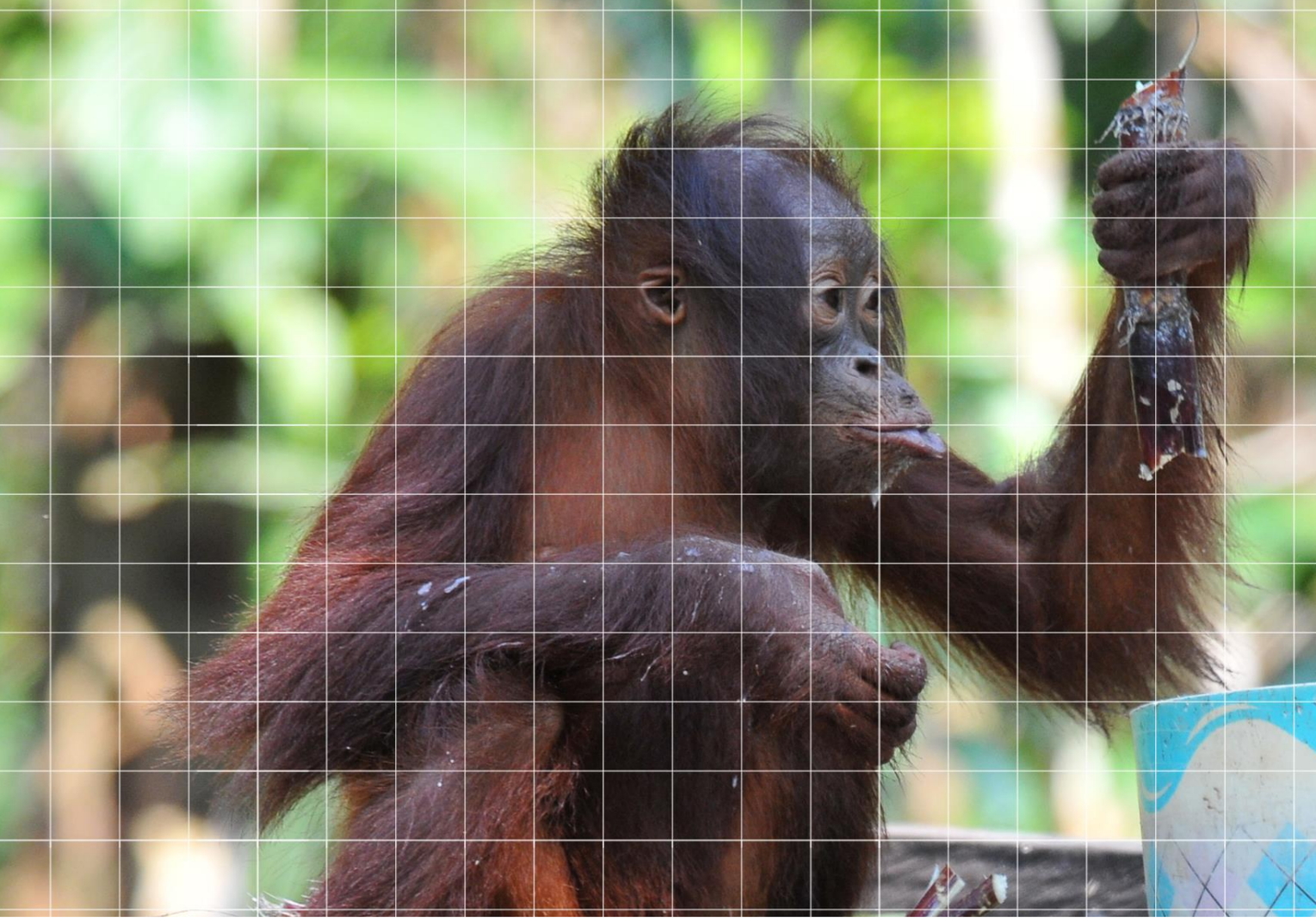
Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5: Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1	Rasio Likuiditas					
1.1	Rasio lancar (*current ratio*)	19,97	11,58	9,05	3,15	10,94
1.2	Rasio quick (*quick ratio*)	19,31	10,88	7,91	2,64	10,19
2.	Rasio Solvabilitas					
2.1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,0049	0,0055	0,0057	0,0221	0,01
2.2	Rasio hutang terhadap modal	0,0049	0,0055	0,0057	0,0226	0,01
3	Rasio Aktivitas					
3.1	Rata-rata umur piutang	-	27,07	72,22	111,05	70,11

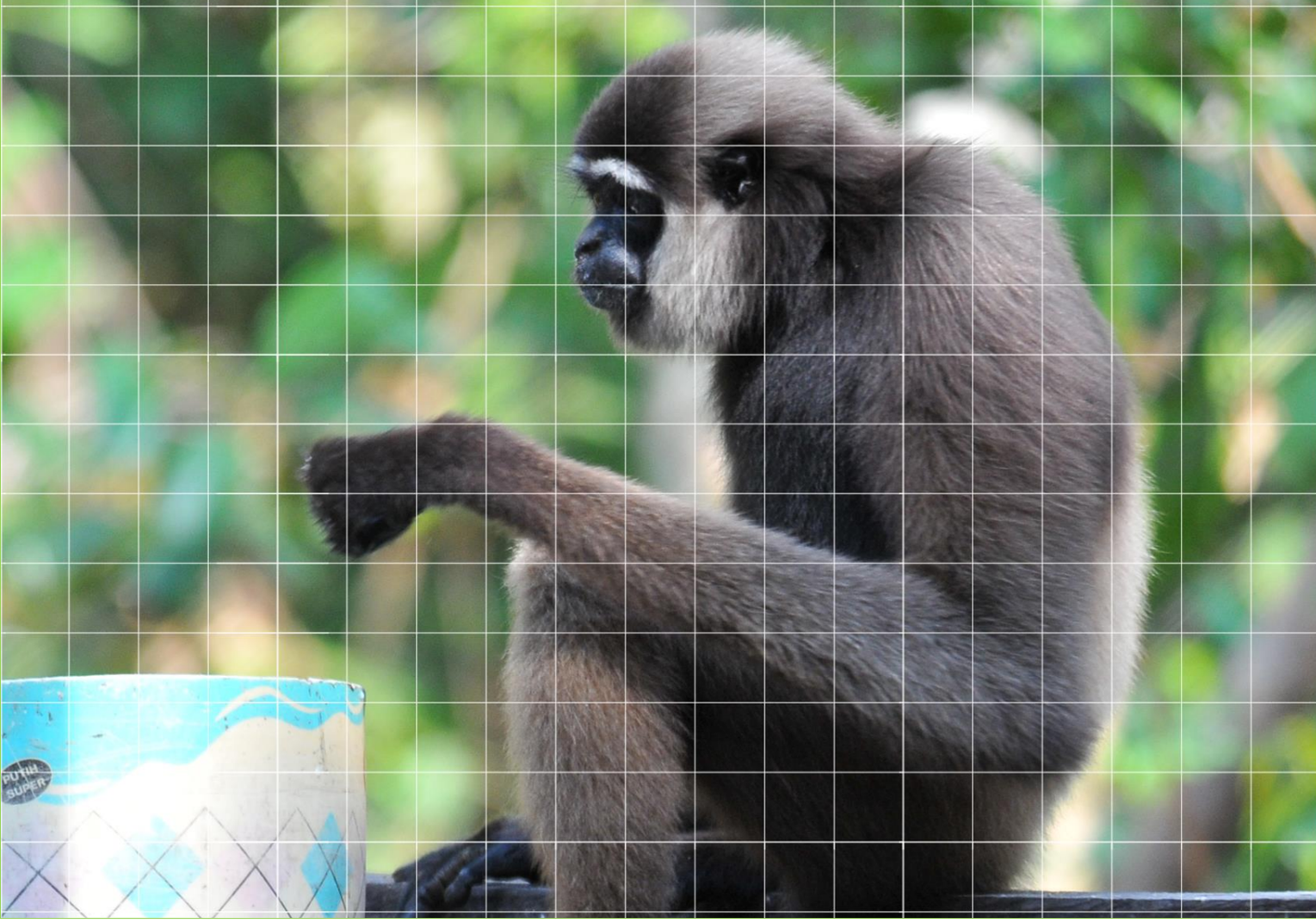
Sumber: DPKAD 2016, data diolah

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu tahun 2012-2015 rendah, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kurang dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2012 mencapai 19,97 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 19,97 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.



Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayarkewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (total debt to total asset ratio) dan rasio hutang terhadap ekuitas *(total debt to equity ratio)*. Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

Dari tabel 3.5, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012, 2013 2014, dan tahun 2015 berturut-turut adalah sebesar berkisar 0,0049; 0,0055; 0,0057 dan 0,0221. Pada tahun 2012 rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 0,0049 artinya sebesar Rp 0,0049 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang didanai oleh hutang sebesar 0,0049, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Dari tahun 2012-2015, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang cenderung meningkat.



Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya.

Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi 2. Dari tabel 3.5 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 70,11 hari, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo 27,07; 72,22 dan 111,05 hari berturut-turut pada tahun 2013, 2014, dan tahun 2015.

3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada

kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.1.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

1) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.2, gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun (2011-2015) tampak pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3. 6: Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Proporsi
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Rata-rata (%)
1	Belanja Tidak Langsung	48,32	49,71	41,71	37,38	47,05	47,97	44,84
1.1	Belanja Pegawai	42,20	45,04	36,92	33,24	37,70	36,39	39,02
1.2	Belanja Bunga	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	Belanja Hibah	1,17	1,02	1,59	0,49	0,45	1,55	0,94
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,21	0,00	0,17	0,28	0,08	0,03	0,35
1.6	Belanja Bagi Hasil	3,56	3,65	0,21	0,24	0,28	0,15	1,59
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	2,78	3,12	8,36	9,78	2,85
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,16	0,00	0,04	0,01	0,18	0,01	0,08
2	Belanja Langsung	51,68	50,29	58,29	62,62	52,95	52.03	55,16
2.1	Belanja Pegawai	3,97	2,86	2,74	4,60	5,07	3,93	3,85
2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,57	15,90	16,56	20,74	19,89	18,22	18,53
2.3	Belanja Modal	28,13	31,53	38,98	37,28	27,98	29,87	32,78
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00

Sumber: DPKAD 2017

Dari data Tabel 3.6 di atas, menunjukkan bahwa selama 6 tahun terakhir (tahun 2011-2016) proporsi belanja langsung meningkat terus, dan di dalam belanja langsung tersebut proporsi belanja pegawainya cenderung meningkat dan belanja modalnya berfluktuasi.

2) Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.2, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2011-2015 dirinci pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 7: Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2011	303.022.690.595,88	590.222.239.085,11	51,34
2	Tahun anggaran 2012	348.383.519.649,31	676.448.461.162,65	51,50
3	Tahun anggaran 2013	406.331.183.450,18	928.988.107.074,50	43,74
4	Tahun anggaran 2014	436.082.983.350,00	1.060.540.670.362,30	41,12
5	Tahun anggaran 2015	464.670.214.141,32	1.051.247.663.395,22	44,20
6	Tahun anggaran 2016	466.082.652.719,00	1.280.948.775.316,64	36,39

Sumber: DPKAD 2016 dan Analisa Data

Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011-2016 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 46,38%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Kotawaringin Barat relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD.

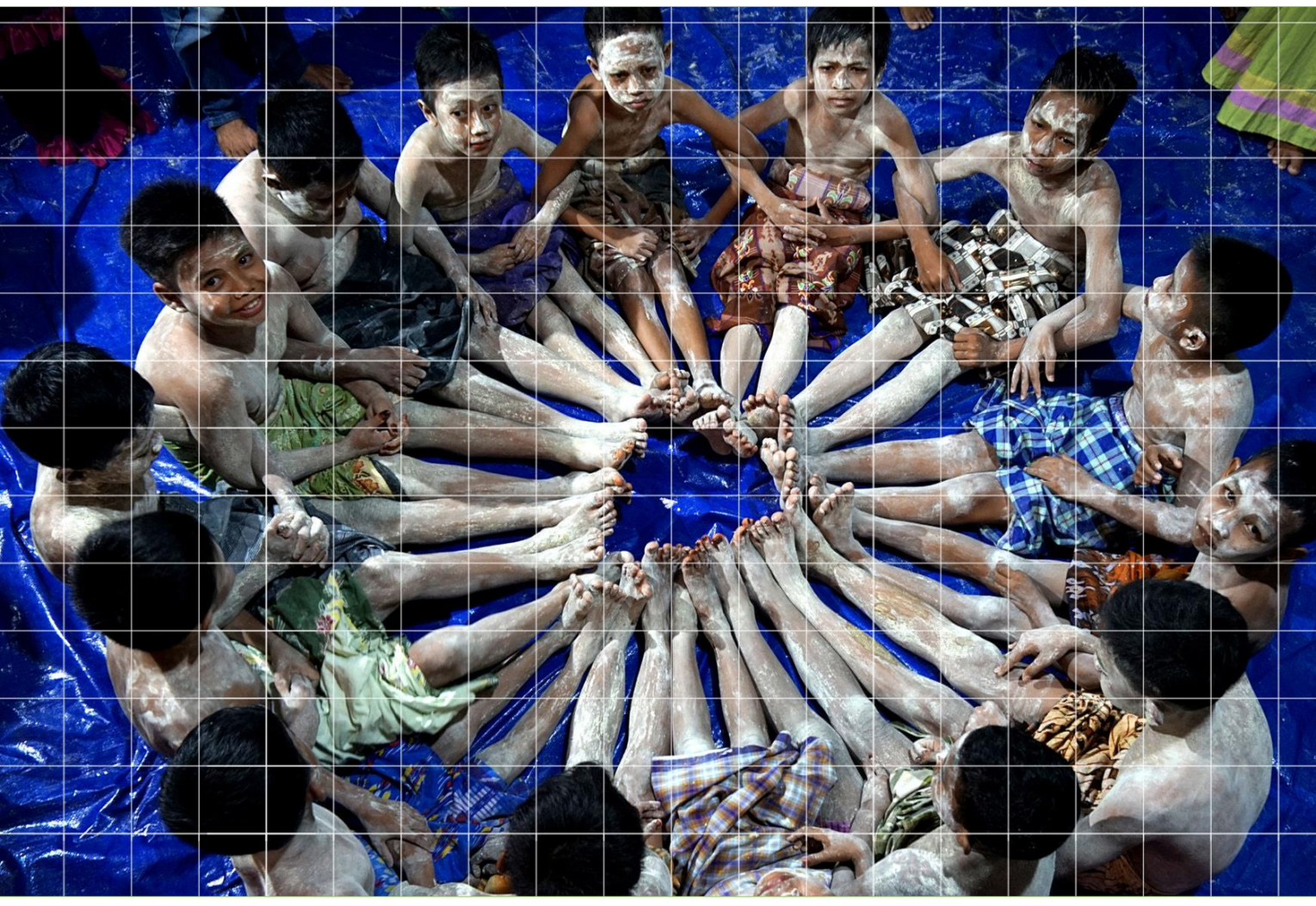
3.1.3.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan

daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan / pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Guna menutup defisit dan surplus tersebut diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Pada tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukan bahwa realisasi belanja Kabupaten Kotawaringin Barat masih di bawah (lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan sehingga pada periode tersebut Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami surplus realisasi, sebagaimana tampak pada Tabel 3.8 berikut:



Tabel 3. 8: Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	645.668.401.364,35	772.238.241.694,49	875.984.792.231,00	1.011.571.513.402,66	1.041.107.473.802,98	1.322.594.838.557,43
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	582.722.239.085,11	673.769.246.555,32	918.895.547.833,50	1.053.798.680.924,30	1.039.534.340.193,22	1.280.948.775.316,64
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.500.000.000,00	2.668.900.000,00	10.100.000.000,00	6.499.557.768,00	11.500.000.000,00	40.498.000.000,00
A	Defisit riil	55.446.162.279,24	95.800.095.139,17	-53.010.755.602,50	-48.726.725.289,64	-9.926.866.390,24	41.646.063.240,79
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	60.410.241.046,00	116.547.722.985,24	212.479.089.224,41	159.677.576.906,91	111.374.403.817,27	99.100.732.450,03
5.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	30.000.000.000,00	0

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	671.994.660,00	131.271.100,00	209.243.285,00	423.552.200,00	265.728.800,00	283.578.076,00
9.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	61.082.235.706,00	116.678.994.085,24	212.688.332.509,41	160.101.129.106,91	141.640.132.617,27	99.156.971.964,41
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	116.528.397.985,24	212.479.089.224,41	159.677.576.906,91	111.374.403.817,27	131.713.266.227,03	100.305.035.205,20

Sumber: BPKAD 2017



Dari Tabel 3.8 diatas tampak bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada periode 2011 sampai 2016 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2011-2016) terlihat pada Tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3. 9: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	112,74	102,23	104,88	103,96	85,58	237,96
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	23,05	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,25	0,12	0,10	0	0,20	0,34
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0	0	0	0	0	240,85

Sumber: BPKAD 2017

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2011-2016 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 6 tahun terakhir (2011-2016) tampak pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3. 10: Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	60.410.241.046,00	100,00	116.547.722.985,24	100,00	212.479.089.224,41	100,00	159.677.576.906,91	100,00	111.374.403.817,27	100,00		
2.	Pelampauan penerimaan PAD	3.182.687.905,35	5,27	10.466.128.910,13	8,98	-2.247.663.214,14	-1,06	12.631.422.600,09	7,91	-1.849.371.051,69	-1,66		
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	16.034.675.239,00	26,54	28.702.540.405,00	24,63	10.763.060.571,00	5,07	3.317.382.280,00	2,08	-6.512.924.332,00	-5,85		
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	16.298.647.220,00	26,98	28.557.569.379,36	24,50	-6.383.503.868,56	-3,00	-14.449.705.877,43	-9,05	9.269.668.586,67	8,32		
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	42.745.896.914,89	-70,76	-45.696.265.544,67	-39,21	-88.682.535.166,50	-41,74	1.499.099.002,66	0,94	-72.165.295.314,78	-64,80		
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0,00	0	0,00	333.538,00	0,00	49.048.301,00	0,03	6.283.102,00	0,01		
7.	Kegiatan lanjutan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Di tengah tingginya kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan terbatasnya sumber dana, maka pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang cukup potensial. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman daerah yang bersumber dari Masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

3,1,4 Proyeksi Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak posistif dan daya ungkit yang siginifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan hal terebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak daerah tersebut dipungut

- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan
- Penerimaan dana bagi hasi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil diperoleh

Untuk tujuan tersebut maka perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap kemampuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

3.1.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan belanja

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan di atas adalah:

1) Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
    - Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;
    - Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB
2) Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
    - peningkatan DAU cukup kecil dikarenakan adanya pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mempertimbangkan pendapatan negara;
    - Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.
3) Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.
4) Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun.

Guna mendukung arah kebijakan pengelolaan keuangan dengan tetap mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2017-2022 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1) Belanja Rutin diorientasikan pada peningkatan efektifitas Kinerja Aparatur; (2) Lebih berorientasi pada belanja Modal-Produktif; (3) Pemanfaatan berpihakan pembiayaan pembangunan melalui kemitraan.; (4) Memaksimalkan Integrasi potensi unggulan (pertanian

arti luas dan pariwisata); dan (5) Mensinergikan fokus pembangunan dengan pemanfaatan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.

Sebagai upaya untuk mensinergikan dengan proses pencapaian visi dan 5 (lima) misi Kabupaten Kotawaringin Barat yang berlandaskan strategi dan arah kebijakan ekonomi daera yang isinya sebagai berikut

1. Menciptakan klaster perekonomian cepat tumbuh berbasis potensi Unggulan
2. Kebijakan yang afirmatif terhadap sektor unggulan (pupuk, bibit, harga jual, modal, perijinan
3. Menjaga dan menumbuhkan iklim Investasi perdagangan yang kondusif dan kompetitif.
4. Membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDA) melalui pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (prukab).
5. Berorientasi pada strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penguatan kapasitas fiscal daerah.

Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 11: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Rupiah)

No.	Uraian	2017 (APBD)	2018	2019	2020	2021	2022
1	PENDAPATAN	1,362,315,607,000	1,547,903,037,000	1,797,141,073,000	2,033,262,447,000	2,269,383,268,000	2,505,504,070,000
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	193,536,661,500	182,772,784,000	212,902,300,000	241,782,894,000	271,063,488,000	300,744,082,000
1.1.1.	Pajak daerah	45,496,793,000	53,076,400,000	61,622,600,000	71,418,999,500	77,815,400,000	90,811,799,100
1.1.2.	Retribusi daerah	15,526,206,000	18,344,523,000	21,298,302,220	24,096,619,300	26,894,936,380	29,693,253,460
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yg dipisahkan	8,110,574,000	8,572,700,000	9,953,050,000	11,260,750,000	12,568,450,000	13,876,150,000
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	124,403,088,500	102,779,161,000	120,028,347,780	135,006,525,200	153,784,701,620	166,362,879,440
1.2.	Dana Perimbangan	964,557,943,000	1,124,857,471,000	1,305,978,000,000	1,477,567,000,000	1,649,155,446,000	1,820,743,874,000
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak / bukan pajak	68,558,763,000	80,331,263,560	93,265,958,540	105,519,880,100	117,773,801,540	130,027,723,220
1.2.2.	Dana alokasi umum	652,906,913,000	781,454,224,440	907,281,009,630	1,026,486,463,450	1,145,691,363,390	1,264,896,245,130
1.2.3.	Dana alokasi khusus	243,092,267,000	263,071,983,000	305,431,031,830	345,560,656,450	385,690,281,070	425,819,905,650
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	204,221,002,500	240,272,782,000	278,960,773,000	313,912,553,000	349,164,334,000	384,016,114,000

No.	Uraian	2017 (APBD)	2018	2019	2020	2021	2022
1.3.1	Hibah	3,600,000,000	3,540,000,000	4,110,000,000	4,650,000,000	5,190,000,000	5,730,000,000
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya ***)	65,452,716,500	77,234,205,470	89,670,221,180	99,751,709,700	110,133,199,220	125,014,688,515
1.3.4	Dana penyesuaian dan otsus****)	121,363,286,000	159,498,576,530	166,267,701,820	188,113,093,300	209,958,484,780	226,903,875,485
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	13,805,000,000	16,289,900,000,00	18,912,850,000	21,397,750,000	23,882,650,000	26,367,550,000

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:

a. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
b. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022.
c. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
d. Mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum terlaksana pada RPJMD tahun 2012-2016

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara membuat proyeksi untuk belanja daerah sama dengan cara seperti yang digunakan untuk proyeksi pendapatan.

Sementara itu, dari total proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun anggaran sebagaimana telah disajikan pada tabel diatas, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama 5 (lima) tahun kedepan baik untuk belanja tidak langsung, maupun belanja langsung. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai.
b. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022
c. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.
d. Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. 12: Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (milyar rupiah)

No	Uraian	2017 (APBD)	2018	2019	2020	2021	2022
A	Belanja Tidak Langsung	616.998.598.000,00	793.903.039.070	939.141.664.005	1.045.262.466.575	1.089.303.969.190	1.202.641.954.423
1	Belanja Pegawai	431.635.541.000,00	512.371.331.704	569.561.440.957	633.135.023.277	703.804.592.226	782.362.191.045
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	26.936.865.000,00	27.240.462.757	29.478.470.188	31.900.346.641	34.521.198.330	37.357.372.556
5	Belanja Bantuan Sosial	2.448.000.000,00	1.915.583.583	1.498.962.608	1.172.952.682	917.846.773	718.223.942
6	Belanja Bagi Hasil	8.701.168.700,00	5.628.331.062	5.233.783.932	4.866.894.636	4.525.724.352	4.208.470.173
7	Belanja Bantuan Keuangan	145.277.023.300,00	211.348.448.284	313.314.702.503	464.475.152.772	688.563.817.206	1.020.765.325.198
8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.757.310.742	1.552.276.000	873.880.750	491.966.355
B	Belanja Langsung	776.342.304.000,00	754.000.000.000	858.000.000.000	988.000.000.000	1.180.079.299.955	1.302.862.117.292
1	Belanja Pegawai	104.185.864.791,00	119.363.216.703	154.766.094.770	200.669.391.729	260.187.509.651	337.358.575.691
2	Belanja Barang dan Jasa	262.323.797.674,00	285.417.687.746	342.602.141.932	411.243.705.962	493.637.852.759	592.539.961.447
3	Belanja Modal	409.832.641.535,00	414.567.914.159	501.965.444.665	607.787.768.980	735.919.127.598	891.062.620.878
	Jumlah	1.393.340.902.000,00	1.547.903.039.070	1.797.141.664.005	2.033.262.466.575	2.269.383.269.145	2.505.504.071.715

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk::

a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu,
b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis;
c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (silpa) dan berasal dari penerimaan piutang daerah dan pinjaman daerah.

Adapun pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain pembayaran utang pokok, dan penyertaan modal pada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. 13: Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

No.	Uraian	2017 APBD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerimaan Pembiayaan						
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100.305.035.000,00	119.333.493.422,72	105.111.252.759,63	92.584.027.667,41	81.549.805.126,22	71.830.648.154,71
b	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
d	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
e	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	142.045.866,61	76.268.842,93	40.951.113,48	21.987.926,27	11.806.001,37
f	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		100.305.035.000,00	119.475.539.289,33	105.187.521.602,56	92.624.978.780,89	81.571.793.052,48	71.842.454.156,08
2	Pengeluaran Pembiayaan						
a	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
b	Penyertaan Modal(investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	19.689.421.914,98	17.977.298.270,20	16.414.054.942,36	14.986.745.816,94	13.683.550.528,51
c	Pembiayaan Pokok Utang	0	-	-	-	-	-
d	Pemberiaan Pinjaman Daerah	0					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000.000,00	19.689.421.914,98	17.977.298.270,20	16.414.054.942,36	14.986.745.816,94	13.683.550.528,51
Pembiayaan Netto		90.305.035.000,00	99.786.117.374,34	87.210.223.332,36	76.210.923.838,53	66.585.047.235,55	58.158.903.627,57

3.1.4.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan Kerangka Pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, guna pembiayaan belanja langsung / program. Berikut ini merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3. 14: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Proyeksi					
		APBD Th 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	1,362,315,607,000.00	1,547,903,037,000	1,797,141,073,000	2,033,262,447,000	2,269,383,268,000	2,505,504,070,000
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	100,305,035,000.00	119,333,493,422.72	105,111,252,759.63	92,584,027,667.41	81,549,805,126.22	71,830,648,154.71
	Total Penerimaan	1,462,620,642,000.00	1,667,236,530,422.72	1,902,252,325,759.63	2,125,846,474,667.41	2,350,933,073,126.22	2,577,334,718,154.71
	Dikurangi:						
4	Belanja Tidak Langsung	616,998,598,000.00	793,903,039,070	939,141,664,005	1,045,262,466,575	1,089,303,969,190	1,202,641,954,423
5	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000.00	19,689,421,914.98	17,977,298,270.20	16,414,054,942.36	14,986,745,816.94	13,683,550,528.51
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	835,622,044,000.00	853,644,069,437.74	945,133,363,484.43	1,064,169,953,150.05	1,246,642,358,119.28	1,361,009,213,203.20

Pendapatan pada proyeksinya mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga diproyeksikan di akhir tahun mencapai Rp 2,505,504,071,715, Sissa Lebih Riil Perhitungan anggaran menurun setiap tahunnya. Jika di total antara komponen pendapatan dan sisa lebih rill perhitungan anggaran menjadi total penerimaan,untuk mengetahui sisa lebih riil penghitungan anggaran maka penerimaan dikurangi belanja tidak langsung ditambah pengeluaran pembiayaan. Proyeksi menunjukka kapasitas riil kemampuan meningkat secara signifikan, harapannya kapasitas rill anggaran dapat optimal untuk alokasi program-program yang dicanangkan pada program prioritas II, III dan I..

Tabel 3. 15: Anggaran berdasarkan prioritas pembangunan

Uraian	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Prio 1	Rp 101,772,898,701	15	Rp 110,545,317,726	15	Rp 164,907,173,357	17.66	Rp 166,314,040,409	17	Rp 152,267,962,699	15	Rp 152,500,411,481	14
Prio 2	Rp 556,383,113,461	81	Rp 601,836,187,995	80	Rp 717,123,351,572	76.78	Rp 751,215,886,968	77	Rp 792,788,423,191	78	Rp 834,273,067,973	79
Prio 3	Rp 29,216,865,688	4	Rp 39,579,136,600	5	Rp 51,955,237,706	5.56	Rp 57,522,721,505	6	Rp 68,252,152,562	7	Rp 73,911,852,465	7

Data menunjukkan Kerangka Pendanaan Kabupaten Kotawaringin Barat mayoritas mengarah terhadap prioritas II, yakni adalah prioritas yang langsung mengacu terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah. Makna dari prioritas diatas adalah merujuk terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tepatnya pasal 158, yakni.

a. Prioritas Pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
b. Prioritas Kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
c. Prioritas ketiga sebagaimana dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemererintahan lainnya.



BAB 4: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Analisis Tahapan RPJP Berjalan

Visi pembangunan daerah RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025 adalah:

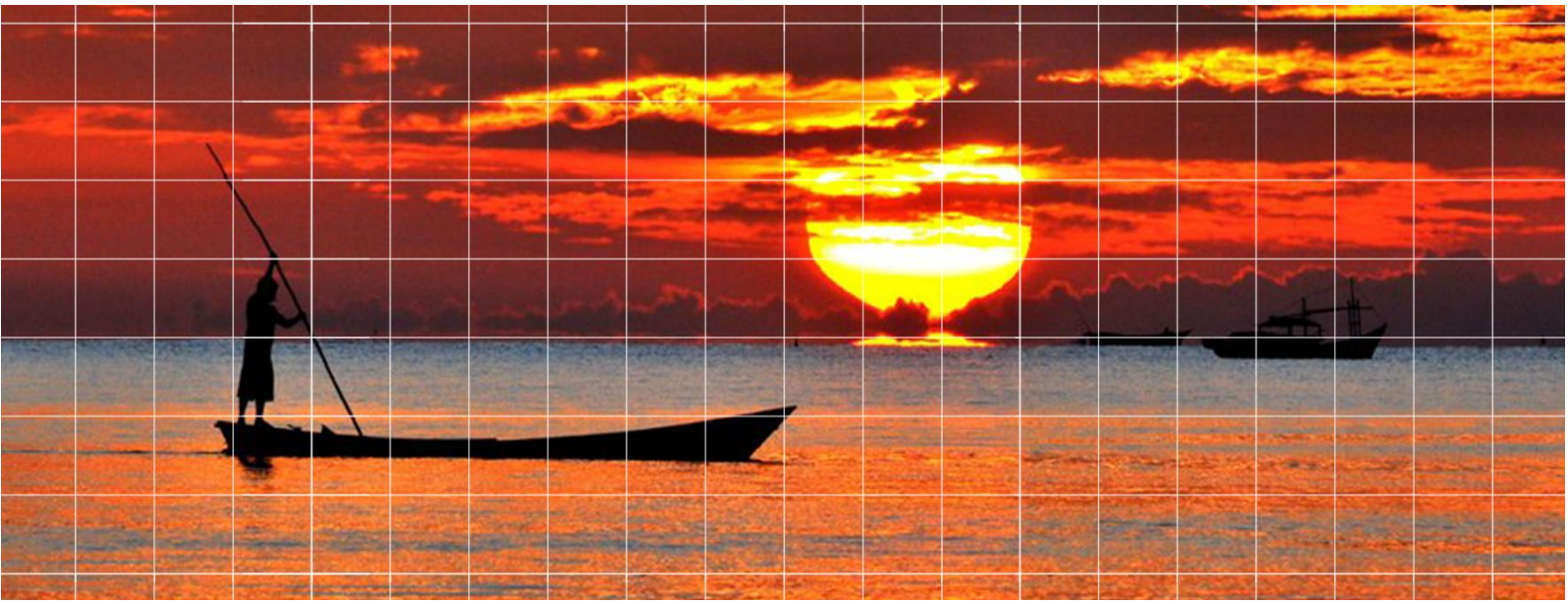
"Terwujudnya Masyarakat Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju Dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis Dan Berkeadilan"

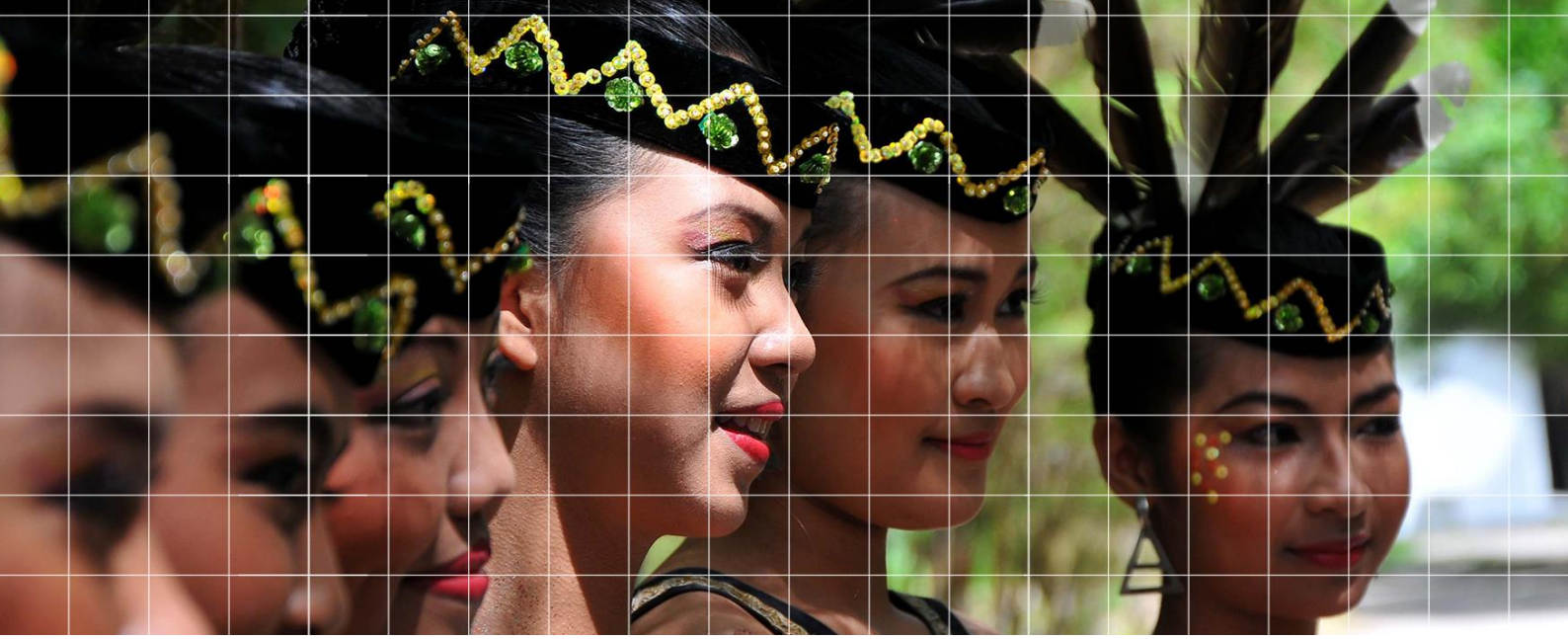
Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan pada 12 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.
4. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukungn terhadap pembangunan daerah.
5. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustry dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan system berjaringan antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan.

7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif dan
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan msyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah social kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan.
   dan olah raga di seluruh wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dasar penentuan arahan strategi pembangunan di tahap ke III (2017-2022) berlandaskan dari pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2 (2012-2016). Terdapat 9 kata kunci pembangunan yang perlu difokuskan penataannya dan nantinya akan dijadikan dasar dari tahapan RPJM yang akan dilakukan ke depan. Adapun ke-9 kata kunci pembangunan yang perlu menjadi fokus antara lain adalah:





1. Penyelenggaraan pendidikan.
2. Perbaikan tingkat kesehatan.
3. Dampak aktivitas pertambangan dan kehutanan terhadap lingkungan hidup.
4. Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial.
5. Optimalisasi potensi sumber daya unggulan.
6. Kebutuhan infrastruktur penunjang investasi.
7. Kapasitas aparatur pemerintah.
8. Pemerataan struktur ekonomi dan peningkatan PAD.
9. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti dan menjadi fokus pembangunan tahap ke-3 (2017-2022) adalah:

1. Aspek pendidikan.
2. Aspek kesehatan.
3. Aspek keamanan dan ketertiban.
4. Aspek pengelolaan sumber daya alam.
5. Aspek aparatur pemerintahan.

4.2. RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2015-2019, memiliki visi "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG". Misi yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, adalah sebagai berikut:

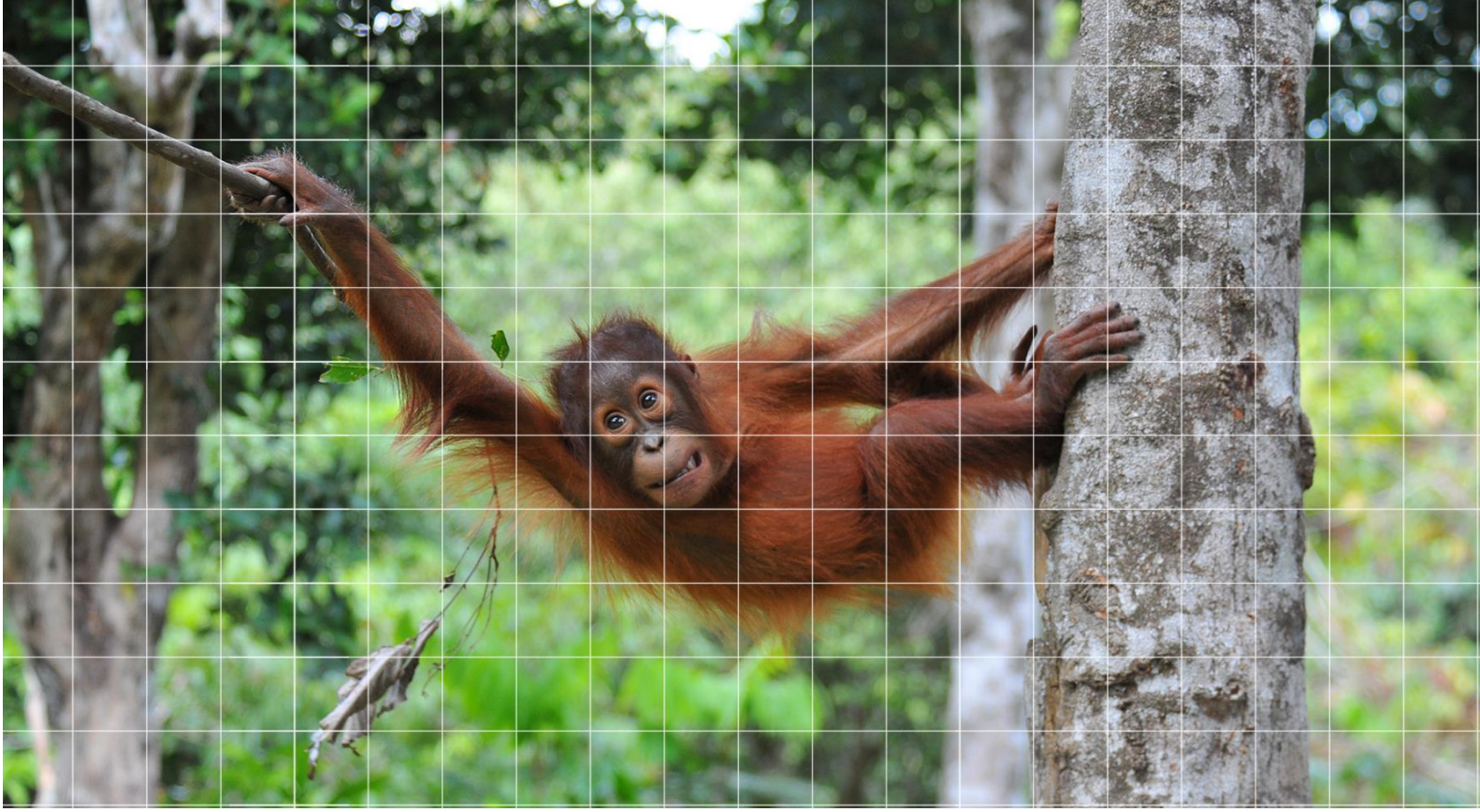
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

Berlandaskan pada misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

4.3. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 adalah "Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yaitu:



1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Misi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi 10 Tujuan pembangunan yang tertuang dalam dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, meliputi:

1. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas
2. Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, daerah Pesisir dan Pantai
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara konsisten
6. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
8. Meningkatkan peran Sektor Pariwisata
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

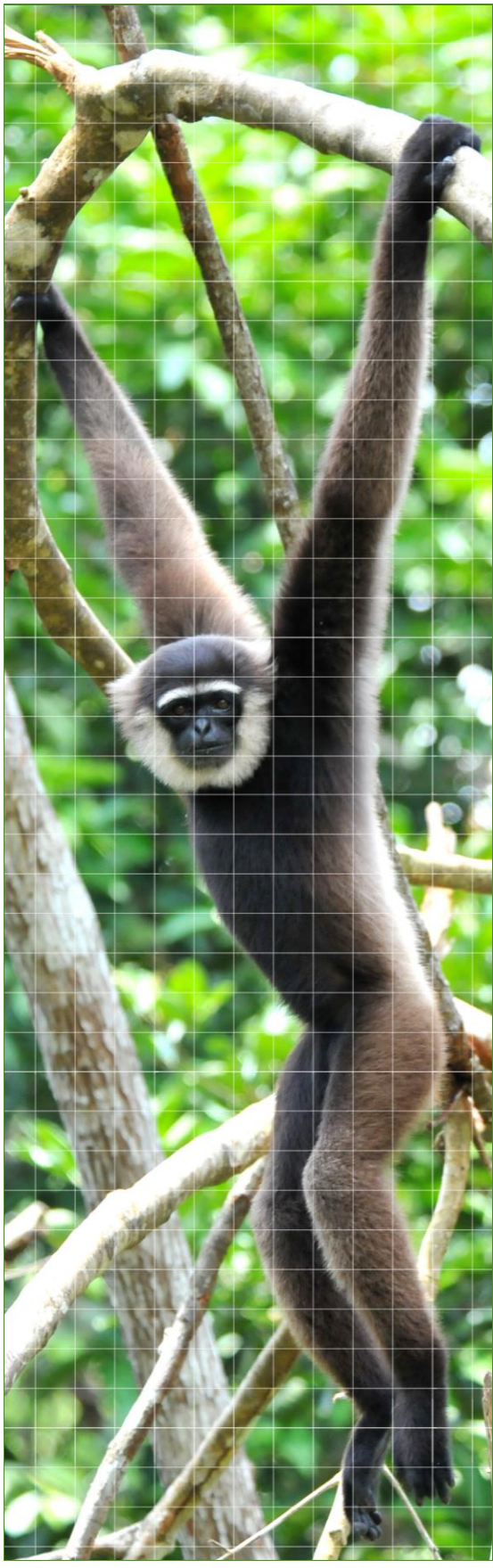
4.3.1. Isu-isu strategis Provinsi

1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun

   Sumber daya hutan yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan Kalimantan Tengah perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kalimantan Tengah sendiri, khususnya Kota Palangka Raya pada tahun 2015 yang lalu mengalami bencana asap akibat kebakaran lahan, hutan dan kebun yang berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan perlu dilanjutkan.

2. Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing

   Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pentingnya menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial maupun ekonomi. Realisasi potensi SDM yang telah menjadi tenaga kerja di Kalimantan Tengah masih jauh dari harapan pemerintah daerah. Sebanyak 46,92% penduduk yang bekerja di Kalimantan Tengah adalah penduduk dengan pendidikan SD ke bawah sementara penduduk yang bekerja dengan pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebesar 11,42%. Peningkatan tenaga kerja dari segi



Isu Strategis

pendidikan dapat menjadi awal jawaban bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga otomatis akan meningkatkan daya saing tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah.

3. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah

Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan merupakan pelaksanaan pembangunan dan upaya mempertahankan kelestarian kualitas lingkungan hidup dengan tetap menggerakkan roda pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa mengurangi prinsip etika lingkungan. Provinsi Kalimantan Tengah telah berinisiatif menjadi anggota dan terlibat secara aktif dalam forum pertemuan tahunan *Governors Climate and Forest (GCF) Taskforce* sejak tahun 2009. Melalui GCF ini telah lahir berbagai kerjasama terkait penyelamatan lingkungan hidup, terutama wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki fungsi sebagai salah satu paru-paru dunia.

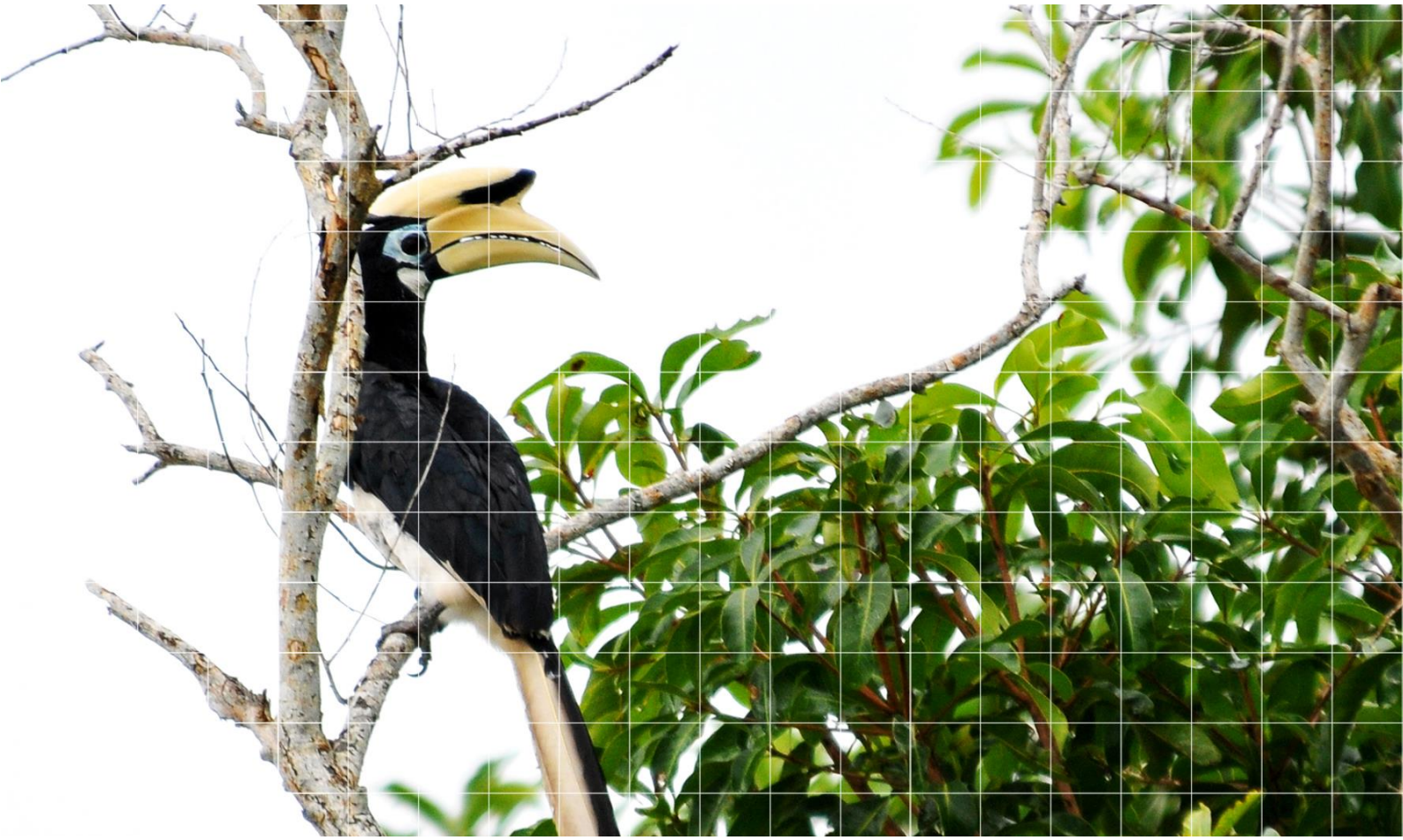


4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat inilah menjadikan segala aspek pembangunan dapat terdongkrak dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan

yang telah dilaksanakan pemerintah melalui optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah. Namun adanya keterbatasan aksesibilitas di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan aksesibilitas wilayah baik di internal maupun eksternal Provvinsi Kalimantan Tengah.

5. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan
   Ketahanan pangan merupakan salah satu ancaman Provinsi Kalimantan Tengah yang dikarenakan berkurangnya lahan pertanian akibat pengalihan fungsi lahan, keterjangkauan dan kesinambungan penyediaan pangan. Peningkatan produktivitas sektor pertanian merupakan salah satu prioritas bagi pemerintah daerah Kalimantan Tengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penggunaan teknologi tepat guna bagi pengembangan sektor pertanian menjadi basis peningkatan produktivitas sektor saat ini. Peran aktif pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara sinergi.



6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.

   Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait aksesibilitas wilayah sangat diperlukan guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya.

   Belum terpenuhinya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang harus diutamakan pencapaiannya sebagai penyokong pembangunan di bidang lain.

7. Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi

   Eksploitasi setiap sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan masyarakat serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

   Optimalisasi investasi memiliki tujuan utama yakni mengembangkan perekonomian daerah dengan berimbas positif pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas wilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur melalui CSR serta tetap memperhatikan lingkungan hidup untuk menghindari degradasi lingkungan

8. Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh

   Sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diperlukan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan berlandaskan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

4.4. Telaah Dokumen RPJMD Daerah Lainnya

Dalam rangka menjaga sinkronisasi pembangunan dengan daerah lainnya, amka perlu dilihat kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah sekitar kabupaten Kotawaringin Barat. Daerah yang berbatasan denga Kotawaringin Barat adalah kabupaten Lamandau dengan periode pembangunan tahun 2014-2018 dan Kabupaten Sukamara dengan periode pembangunan tahun 2013-2018. Telaah

Tabel 4. 1: Telaah Dokumen RPJMD Daerah Lainnya

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Lamandau	2014-2018	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata (lanjutan) (2017) 2. Peningkatan jumlah wisatawan (lanjutan (2017) 3. Pengembangan sarana infrastuktur transportasi (lanjutan) (2017) 4. Pengembangan sarana infrastuktur transportasi (lanjutan) 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata (lanjutan) (2018) 6. Peningkatan jumlah wisatawan (lanjutan) (2019)	1. Perkembangan pariwisata di kabupaten lamandau dapat menjadi potensi yang sangat besar bagi Kotawaringin Barat, mengingat salah satu akses masuk (jalur udara) kabupaten tersebut masih berada di kabupaten Kotawaringin Barat 2. Selain untuk mendukung pariwisata, kerjasama antar daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan juga dapat meningkatkan efisiensi pembangunan termasuk mengantisipasi kemacetan dimasa yang akan datang
2	Kabupaten Sukamara	2013-2018	1. Meningkatnya kerjasama dengan daerah lainnya dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan	1. Proses Pembangunan di berbagai sektor akan lebih efektif jika bekerjasama dengan daerah lainnya. Khususnya dengan focus pembangunan yang sama, dalam hal ini sektor pariwisata dan pertanian. 2. Seperti halnya kabupaten lamandau, Kabupaten

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			pembangunan secara, proporsional. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. 3. Menghapus keterisolasian intra/inter wilayah. 4. Tersedianya dan meningkatnya kualitas infrastruktur dasar irigasi. 5. Berkembangnya usaha ekonomi produktif bagi masyarakat dan perempuan dengan pengembangan UKM UMKM, dan Koperasi. 6. Berkembangnya kebudayaan yang berdasarkan kepada nilainilai luhur masyarakat melalui peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam pelestariannya untuk memperkuat promosi pariwisata daerah. 7. Meningkatnya daya tarik dan kemitraan kepariwisataan. 8. Meningkatnya mitigasi bencana dan penanggulangan korban bencana.	Sukamara juga mengembangkan sektor kepariwisataannya melalui keunggulan budaya lokal. Hal tersebut dapat menjadi potensi yang baik untuk melaksanakan pengembangan pariwisata. 3. Dari segi infrastruktur untuk membantu percepatan pembangunan dan konektifitas antar daerah dapat dilaksanakan kerjasama dalam membangun konektifitas antar kabupaten serta daerah-daerah terpencil

4.5. Platform Bupati Terpilih

Penyusunan RPJM ini memuat VISI, MISI dan PROGRAM KERJA Bupati Hj. NURHIDAYAH, SH, MH dan Wakil Bupati AHMADI RIANSYAH. Sebagai tindak lanjut dari janji politik yang telah dikampanyekan oleh Bupati dan wakil Bupati Terpilih, berikut merupakan VISI (rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir pemerintahan):

"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"

Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu: I=IPTEK DAN INFRASTRUKTUR, K=KETAKWAAN, H=HARMONIS, L=LANGGENG, A=AMAN, S=SEJAHTERA.
Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI, yaitu: N=NASIONALIS, U=UNGGUL, R=RELIGIUS, A=AMANAH, N=NYATA, I=INSPIRATIF.

MISI (rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan VISI) adalah:

1) Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2) Meningkatkan kwalitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3) Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6) Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

Visi dan Misi tersebut diterjemahkan dalam beberapa program pembangunan bupati terpilih sebagai berikut:

Sekertariat Daerah

- Meningkatkan pengawasan di setiap bagian;
- Mensinergikan kinerja intra dan atau antar bagian;
- Tertib administrasi dan pelayanan publik dengan mengikuti kemajuan iptek;
- Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan memperhatikan kwalitas dan kwantitas yang baik dan seimbang;
- Pembangunan rumah jabatan Bupati;
- Revitalisasi rumah jabatan Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
- Pemindahan Base Camp Mobil Pemadam Kebakaran;
- Pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati

BAGIAN-BAGIAN:

1. Pemerintahan dan Otonomi Daerah
   - Membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

integritas, konsisten, transparansi, akuntabel;

- Penguatan sistem pelaporan dan kinerja instansi;
- Penerapan e-government mewujudkan manajemen birokrasi modern;
- Peningkatan akses publik dan implementasi open government di seluruh instansi;
- Pemantapan kerja sama dan harmonisasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Instansi lainnya;
- Peningkatan sinergisitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- Ada Coffe Break di SKPD;
- Menciptakan standar pelayanan masyarakat yang prima dengan motto Melayani dengan IKHLAS, RAMAH, SENYUM, dan TEPAT WAKTU;
- Penyelesaian Tata Batas antara Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

2. Hukum
   - Sosialisasi hukum dan perundang-undangan ke setiap Desa/Kelurahan;
   - Aktualisasi peraturan perundang-undangan dan menegakkan supremasi hukum;
   - Pembuatan peraturan/petunjuk teknis dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   - Evaluasi peraturan dengan pembaharuan/revisi mengikuti keadaan kekinian;
   - Sebagai advokasi atas permasalahan hukum yang ada dan penegakan hak azasi manusia (HAM);

3. Adm. Perekonomian, Infrastruktur dan SDA
   - Peningkatan pengembangan kawasan ekonomi baru;
   - Pemberdayaan ekonomi pedesaan dan rakyat melalui suprastruktur dan revitalisasi infrastruktur;
   - Penataan dan pemberdayaan perekonomian pada sektor informal;
   - Percepatan infrastruktur pedesaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi desa,
   - Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan sarana dan prasarana umum, pemukiman dan ekonomi secara efisiensi, mudah dan murah;
   - Peningkatan pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan perekonomian daerah;
   - Pemetaan sumber daya alam yang layak untuk diexplorasi dan diexploitasi yang ramah lingkungan;
   - Pemberdayaan dan mengikut sertakan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengolahan SDA;
   - Pembuatan suprastruktur pengelolaan sumber daya alam yang terarah berwawasan lingkungan, kelestarian dan konservatif;
   - Melakukan promosi tentang SDA yang potensial untuk peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
   - Target pertumbuhan ekonomi diatas 7% dengan tingkat inflasi dibawah 5%;

4. Adm. Pembangunan
   - Pembuatan regulasi dalam penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah;

- Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- Peningkatan pelayanan dan pelaksanaan dengan sistem modernisasi yaitu mengikuti perkembangan iptek;

5. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
   - Meningkatkan pembinaan mentalitas masyarakat, menciptakan kondisi aman, tentram dan dinamis;
   - Meningkatkan jaminan perlindungan bagi masyarkat kurang mampu;
   - Memberi bimbingan partisipatif dan penumbuhan etos kerja masyarakat;
   - Meningkatkan kerukunan umat dan antar umat dalam kehidupan bergama;
   - Memberdayakan peranan lembaga keagamaan dalam pembangunan;
   - Meningkatkan harmonisasi antara agama;
   - Bantuan sarana dan prasarana ibadah secara seimbang dan merata serta perayaan hari-hari besar keagamaan;
   - Bantuan sosial secara efektif dan tepat guna dan peralatan untuk rukun kematian;
   - Pemberian insentif bagi guru-guru informal dan pemuka agama;

6. Umum
   - Melakukan urusan rumah tangga dengan proporsional, tertib dan efisien dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal;
   - Inventarisasi, pengurusan dokumen serta pengarsipan atas aset pemerintah;
   - Pendataan pemakaian asset dan penertiban pemakaian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
   - Penerapan hak dan kewajiban atas pemakaian asset sesuai ketentuan dengan standar biaya umum;
   - Revisi standar biaya umum dengan penyesuaian kekinian dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan perekonomian;
   - Bantuan hibah sarana keamanan untuk POLRI dan TNI;

7. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
   - Memperhatikan keseimbangan kwalitas dengan kwantitas;
   - Mengutamakan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi;
   - Melakukan standarisasi dan spek sesuai dengan kebutuhan, fungsi dan manfaat;
   - Menetapkan harga sesuai kewajaran (tidak melakukan Mark Up);
   - Pengadaan tepat waktu dan adanya garansi;
   - Kelengkapan dokumen dan surat lainnya serta taat pajak;

8. Protokol Komunikasi
   - Tertib jadwal Bupati dan Wakil Bupati;
   - Kesiapan alat kelengkapan keprotokolan;
   - Peningkatan keterbukaan informasi publik dan komunikasi;

- Melakukan peliputan setiap kejadian dan publikasi secara rutinitas;
- Peningkatan Sosialisasi/penyebaran berita terhadap suatu kejadian luar biasa;
- Gerakan Jumat bersih dan Program Sambung Rasa dan Aspirasi;

9. Organisasi
    - Peningkatan manajemen dalam reformai birokrasi, melakukan revitalisasi dan restrukturisasi dengan prinsif efektif, efisien, kompetensi dan profesionalis;
    - Monitoring dan evaluasi kinerja ASN dengan berpedoman pada azass-azas umum pemerintahan yang baik;
    - Penempatan dan mutasi ASN pada jabatan dan eselon dengan Sistem Merit dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - Penegakan displin ASN sesuai sumpah jabatan, memiliki nilai dasar, taat etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN;

Dinas dan Badan

1. Pendidikan dan Kebudayaan
    - Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas;
    - Peningkatan efisiensi, efektifitas, rotasi dan pemerataaan penempatan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
    - Meningkatkan manejerial sistem pendidikan secara profesional dengan implementasi ikulum nasional dengan muatan lokal;
    - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan sesuai perkembangan teknologi;
    - Pakaian gratis bagi siswa baru di tingkat SD dan SMP yang terdiri seragam merah-putih/biru-putih, seragam pramuka, seragam batik dan sepatu;
    - Memberikan insentif pada PAUD;
    - Meningkatkan status guru honor sekolah menjadi honor daerah dengan syarat dan ketentuan, serta pemberian insentif yang layak bagi guru honor dan kontrak;
    - Pemberian bea siswa bagi murid berprestasi, bantuan bagi murid yang kurang mampu, penyaluran BOS tepat waktu dan sasaran penggunaannya;
    - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan;
    - Peningkatan tertib administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dengan memperhatikan hal-hal yang khusus dan luar biasa;
    - Perbaikan asrama mahasiswa daerah;
    - Pemberian insentif untuk guru PAUD/TK;
    - Tambahan extra kurikuler pendidikan keagamaan dan moral (nilai afektif);
    - Meningkatkan pelestarian budaya daerah lokal dan dan daerah lainnya dalam rangka keberagaman dengan melibatkan elemen masyarakat;

- Bantuan alat kesenian dan budaya daerah yang ada untuk pelestarian;
- Menjadikan Budaya sebagai alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, penyangga budaya nasional yang dinamis;
- Mengadakan Festival Budaya Nusantara dan Karnaval Budaya Nusantara;
- Pelestarian cagar budaya dan situs-situs bersejarah;
- Penggalian dan pengembangan budaya lokal yang menunjukkan jati diri Kotawaringin Barat (Marunting Batu Aji);

2. Kesehatan
   - Peningkatan pelayanan dokter dan kesehatan yang profesional teristimewa kepada warga miskin dan penyandang disabilitas;
   - Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
   - Menyiapkan dan rekrutmen tenaga para medis dan medis yang profesional dan spesialis;
   - Peningkatan sarana dan prasarana yang baik dan mudah diakses oleh masyarakat, secara khusus pengadaan rumah dinas untuk personil Polindes;
   - Motivasi dan penyuluhan untuk peningkatan kesadaran dan perilaku hidup sehat;
   - Peningkatan layanan kesehatan siaga (on call) di tingkat desa;
   - Peningkatan kelas Rumah Sakit Semanggang menjadi RS tipe D Pratama;
   - Revitalisasi fungsi Puskesmas dan peningkatan status Puskesmas Kumai dan Kotawaringin Lama dan menjadi Rumah Sakit Rakyat;
   - Pemberantasan dan konservasi daerah-daerah endemik;
   - RSUD Menjadi Rujukan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu dari desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;
   - Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi untuk pemenuhan sembilan bahan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;
   - Pembangunan jalan lingkar luar kabupaten;
   - Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama;
   - Pembukaan jalan kecamatan Arut Utara ke Kabupaten; ' Pembangunan Water Front City;
   - Pembangunan Jembatan penghubung antar desa dengan kecamatan yang melalui sungai;
   - Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;
   - Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;

- Pelaksanaan pembangunan dengan prioritas, merata, seimbang dan tepat guna;
- Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai lagi peruntukannya;
- Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;
- Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;
- Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;
- Penyiapan Konservasi Air dan penyedian air baku;
- Pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang komprehensif untuk antisipasi banjir dan kekeringan;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
   - Relokasi pemukiman warga yang rawan banjir dan bencana lainnya;
   - Pembangunan jalan lingkungan dan drainase untuk terciptanya pemukiman asri dan sehat;
   - Pembuatan saranan dan prasarana MCK dan lainnya, khususnya didaerah padat penduduk dan pinggiran sungai;
   - Penyediaan kecukupan air bersih yang hy genis;
   - Kontrol dan pendataan pemanfaatan air bawah tanah;
   - Program bedah rumah dan atau layak huni bagi masyarakat tidak mampu;
   - Pembuatan regulasi perizinan dan alih fungsi dan pelayanan yang prima;
   - Pengawasan terhadap pengembang property dan menjadikannya sebagai mitra;
   - Kecukupan ketersedian energi dan penerangan jalan;
   - Pengendalian sampah dengan partsipasi dan swadaya masyarakat sekitar;

5. Sosial
   - Jaminan Perlindungan dan peningkatan pelayanan serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin/kurang mampu;
   - Bantuan/pemberian iuran BPJS bagi seluruh warga miskin/tidak mampu;
   - Tanggap dalam mengantisipasi, memberi pertolongan dan bantuan bagi warga yang kena musibah dan bencana alam;
   - Meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi warga disabilitas;
   - Kanalisasi kegiatan masyarakat yang positif serta membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi, LSM, ORMAS, OKP, Pemerhati Sosial dan lembaga lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam menangani masalah-masalah sosial;
   - Mengadakan pelatihan dan pembinaan serta pendampingan bagi penyandang masalah sosial;
   - Penghapusan dan pemberantasan prostitusi, gelandangan dan pengemis;
   - Pembinaan mentalitas dan penumbuhan etos kerja melalui bimbingan partisipatif dan penyelenggaraan kursus keterampilan;

- Pemberian bantuan modal usaha dan mengandeng para pengusaha sebagai mitra;

6. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
   - Meningkatkan peranan perempuan dalam pemerintahan, politik, ekonomi dan pembangunan;
   - Pemberdayaan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mandiri dan partisipatif dalam urusan rumah tangga, kesehatan, perbaikan gizi dan perlindungan anak;
   - Perlindungan anak dengan memberikan jaminan hak-haknya tanpa diskriminasi;
   - Penyuluhan antisipasi terhadap kejahatan seksual pada anak;
   - Membuat proteksi dan langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak akibat KDRT dan kejahatan seksual;
   - Sosialisasi tanggung jawab Negara/Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua atau Wali dalam perlindungan anak;
   - Mengadakan perlindungan hukum kepada anak-anak disabilitas yaitu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam interaksinya dan partisipasi dalam masyarakat secara penuh dan efektif;
   - Penghapusan KDRT dan kejahatan pada anak;
   - Penyuluhan tentang kewajaran batas umur untuk nikah dan program KB;
   - Terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, sehat, pintar dan berkwalitas;

7. Lingkungan Hidup
   - Menjaga ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup berpedoman pada RTRW Daerah;
   - Menjaga konsistensi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah disektor perkebunan, industi maupun pertambangan;
   - Mengawasi, melakukan perbaikan dan proteksi kerusakan lingkungan, serta membangun lingkungan hidup yang produktif;
   - Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
   - Mempertahankan status Adipura;
   - Membuat program tempat terbuka hijau (RTH) didaerah perkotaan dan padat penduduk;
   - Penataan Taman agar kota lebih cantik, indah dan asri;
   - Pemeriksaan secara periodik pencemaran lingkungan;
   - Pemberian izin/regulasi AMDAL secara cermat dan selektif;
   - Melakukan penindakan terhadap pelaku pengerusakan lingkungan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
   - Pemetaan dan pengawasan Sumber Daya Alam yang berpotensi diexplorasi dan exploitasi;
   - Pendataan dan penataan usaha Pertambangan Rakyat;

8. Kepemudaan dan Olah Raga
   - Pembinaan dan pemberdayaan OKP/Karang Taruna dan Ikatan

Komunitas untuk menciptakan lapangan kerja khususnya di Desa dan Kelurahan;

- Pelatihan pemuda sebagai ujung tombak pembangunan di Desa;
- Memberdayakan OKP sebagai sosial kontrol di Pedesaan;
- Pembinaan kepemudaan sebagai generasi penerus bangsa dan negara;
- Penyuluhan tentang pengaruh negatif NAPZA/ Narkoba dan perilaku seks bebas;
- Kerjasama dengan BNN Kabupaten dalam pemberantasan Narkoba;
- Mengadakan event/turnament dari berbagai cabang olahraga;
- Melengkapi sarana dan prasarana olah raga yang reprensentatif, sebagai langkah awal untuk pelaksanaan PORDA Provinsi Kalimantan Tengah;
- Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Sport Center Pangkalan Bun;
- Perbaikan dan peningkatan kualitas Lapangan Sepak Bola Senggora Kumai;
- Pemberian insentif bagi pengurus organisasi Cabang-cabang Olahraga;
- Memberikan insentif bagi pelatih yang sudah bersertiiikat serta pemberiaan award kepada juara-juara baik ditingkat Daerah, Nasional dan Internasional;

9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - Program yustisia kependudukan;
    - Seluruh penduduk mempunyai E-KTP, dan masyarakat yang berdomisili wajib memiliki KTP Kab. Kotawaringin Barat;
    - Penyuluhan tentang pentingnya catatan sipil dan UU tentang Kependudukan;
    - Validasi Data Kependudukan/Pendataan faktual penduduk Kotawaringin Barat;
    - Seluruh masyarakat memiliki akte lahir, yang menikah memiliki akte pernikahan, dan yang meninggal dunia, keluarganya mengurus akte kematian;

10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan;
    - Pendampingan didalam pembuatan Peraturan Desa dan Penyusunan APBDesa;
    - Penyuluhan dan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa;
    - Memberdayakan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Desa;
    - Mengadakan pelatihan dan pembinaan peningkatan ekonomi warga desa;
    - Pemberian tambahan insentif bagi perangkat desa dan Ketua RW/RT;
    - Perekrutan tenaga pendamping di desa;
    - Fasilitator dalam Pilkades dan pemilihan BPD, Tata ruang Desa, Tugas dan fungsi Kepala Desa dan perangkatnya serta BPD;
    - Program pengadaan listrik tenaga surya (solar power);

11. Perhubungan
    - Memaksimalkan fungsi terminal bus umum, angkot dan truk pengangkut barang;
    - Pembangunan terminal barang di Batu Belaman;
    - Penataan jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta keamanan;
    - Penataan angkutan perkotaan dan pedesaan serta kelayakan kendaraan;
    - Pengadaan sarana dan prasarana transportasi;
    - Pengadaan jembatan timbang untuk penggunaan jalan sesuai kelasnya;
    - Pembangunan dermaga ferry penyeberangan Sei Kapitan-Kumai seberang dan Kumai seberang-Pangkalan Banteng;
    - Sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan pihak otoritas dalam penggunaan dan peningkatan fungsi Bandara dan Pelabuhan;
    - Perencanaan pemindahan pelabuhan laut dalam Pangkalan Bun;
    - Penataan Master plan Bandara Internasional;

12. Komunikasi, Imformatika, Statistik dan Persandian
    - Bantuan sarana dan prasaranan jaringan internet hingga kepedesaan;
    - Peningkatan komunikasi dua arah antara stake holder;
    - Keterbukaan informasi publik dan kemudahan mendapatkan informasi;
    - Pembuatan data stastitik yang akurat dan up to date (kekinian);
    - Optimalisasi Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH);

13. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
    - Pelayanan segala bentuk perizinan dengan mudah, cepat dan murah;
    - Pemetaan potensi dan kawasan ekonomi untuk. peningkatan investasi;
    - Sosialisasi potensi daerah dan SDA upaya mengandeng para investor;
    - Pembuatan regulasi dan fasilitas yang saling menguntungkan;
    - Mendorong para Investor untuk penyediaan sumber energi;

14. Perpustakaan dan Kearsipan
    - Mengoptimalkan arti dan pentingnya perpustakaan ke setiap desa;
    - Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dan modern;
    - Kecukupan dan ketersedian bulat-buku sesuai dengan kemajuan teknologi;
    - Optimalisasi pengarsipan/dokumentasi dengan kecanggihan teknologi;
    - Kemudahan akses secara IT dalam program keterbukaan infomasi publik;

15. Pariwisata
    - Penataan Pangkalan Park dan menggandeng mitra usaha untuk pengelolaan dan pengadaan panggung hiburan dan ajang penampilan minat dan bakat menampilkan kesenian dan budaya

lokal maupun daerah lain dalam bingkai keanekaragaman budaya;

- Pelestarian situs-situs sejarah;
- Memperbaiki sarana dan prasarana obyek wisata alam dan religi;
- Peningkatan Promosi destinasi wisata yang ada ke tingkat Nasional dan Manca Negara dan mengadakan event yang berskala Nasional dan Internasional;
- Penggalian daerah wisata yang baru dan berpotensi untuk dijual;
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan kepariwisataan;
- Pengadan fasilitas WIFI gratis ditempat rekreasi umum (Bundaran Pancasila dan Pangkalan Bun);
- Mengadakan pelayanan prima untuk peningkatan sumber PAD;
- Peningkatan kerja sama dengan Perhotelan, Biro Perjalanan, Biro Wisata dan Para Guide (penuntun atau penterjemah);

16. Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Meningkatkan budidaya peternakan dengan memberi bantuan kepada kelompok usaha bersama;
- Mengadakan diversifikasi ternak yang berpotensi dikembang biakkan;
- Vaksinasi ternak peliharaan masyarakat;
- Mengadakan pelatihan pengembangbiakan ternak secara teknologi;
- Pengadaan benih ternak dan bantuan untuk pegolahan pakan ternak;
- Optimalisasi Pengembangan program integrasi Sawit-Sapi

17. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

- Optimalisasi/Target pencetakan persawahan seluas 27.000 HA;
- Mensinergikan program dengan pihak TNI dalam pembukaan dan pengolahan lahan pertanian;
- Tahun pertama panen raya padi seluas 200 HA;
- Untuk Swasembada pangan, mengoptimalkan penanaman padi 4000 s/d 12.000 HA;
- Budidaya pola terpadu tanaman hortikultura dan pengembangan tanaman organik yang merupakan komoditas unggulan, alternatif dan tanaman khas daerah;
- Pengembangan sistem budi daya produksi dari hulu ke hilir yang tersistematis untuk mendapat nilai tambah;
- Budidaya jagung oleh masyarakat untuk konsumsi sendiri dan kebutuhan ternak;
- Penguatan pendampingan, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani dipedesaan; Pembinaan perkebunan inti dan plasma serta perkebunan rakyat;
- Pengadaan peralatan pertanian dan mekanisasi, ketersedian bibit unggul yang tahan hama dan penyakit;
- Menjaga ketersedian bibit/benih, pupuk dan racun;
- Mendatangkan tenaga ahli dan profesional dalam mengolah lahan pertanian;

18. Ketahanan Pangan
    - Meningkatkan swasembada beras dan diversifikasi pangan menuju ketahanan pangan;
    - Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan dalam antisipasi kerawanan pangan;
    - Ketersediaan pangan untuk daerah bencana dan daerah paceklik;
    - Melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi rawan pangan;
    - Pengembangan produk pertanian dalam bentuk home industri untuk persedian;
    - Mensosialisasikan fungsi lahan pertanian untuk terciptanya ketahan pangan;
    - Mengawasi pengalihan fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lainnya;
    - Menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan ketersediaan sewaktu-waktu;
    - Mendirikan usaha penampungan atas over produksi pangan;

19. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah
    - Peningkatan peran dan fungsi Koperasi sebagai soko guru perekonomian, dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
    - Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha disetiap Desa/Kelurahan ditargetkan 100 kelompok binaan;
    - Pembinaan home industri dengan pemberian bantuan peralatan seperti usaha pembuatan batu bata, batako, kerajian meubel, rotan dan anyam-anyaman, aksesoris dan batu mulia serta usaha makanan ringan;
    - Pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga ringan;
    - Mengadakan kerja sama dengan korporasi besar sebagai bina mitra untuk Koperasi dan UKM;
    - Meningkatkan manajemen promosi ditingkat daerah, nasional dan internasional;
    - Mengoptimalkan fungsi pasar untuk transaksi yang aman dan nyaman dan revitalisasi pasar tradisional untuk pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
    - Menjalin kerjasama dengan para Distributor untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan sembilan bahan pokok;
    - Mengarahkan pihak perusahaan untuk transaksi jual-beli di pasar terdekat;
    - Pembangunan pasar modern terintegrasi sebagai pusat grosir;
    - Pemberdayaan dan penguatan partisipasi perusahaan/korporasi ikut membangun perekonomian masyarakat (CSR=Corporate Social Responsibility);
    - Merencanakan kawasan terpadu untuk usaha industri, hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan dan hasil peternakan;
    - Optimalisasi Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber PAD;
    - Pendirian perusahaan daerah untuk promosi dan menampung over produk hasil-hasil home industri,

kelompok usaha bersama dan UKM yang khas, layak dan punya nilai jual, yang berbahan dasar dari hasil daerah;

20. Perikanan
    - Pengadaan benih ikan sebagai stimulans dan peralatan bagi usaha tambak dan keramba ikan;
    - Pengadaan bantuan kapal nelayan/kelotok dan mesin untuk kelompok nelayan;
    - Pengadaan bantuan net/ alat tangkap ikan dan cold storage;
    - Pendataan dan pembinaan bagi kelompok usaha keramba (budidaya ikan air tawar) serta pemberian bantuan benih ikan;
    - Mengoptimalkan fungsi Tempat Pelelangan Ikan dan stabilisasi harga;
    - Membina pelaku industri UKM dengan bahan dasar ikan agar berdaya saing;
    - Promosi hasil produk unggulan dan khas ke luar daerah;
    - Membangun pabrik es untuk kebutuhan masyarakat dan nelayan dan pedagang;
    - Menjaga ketersedian BBM untuk para nelayan;

21. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    - Terciptanya lapangan kerja sebanyak 15.000 TK;
    - Membuka lapangan kerja baik sektor formal dan maupun informal;
    - Mengadakan pelatihan kerja berbagai keterampilan yang potensial bagi anak putus sekolah dan lulusan SLTA untuk siap sebagai tenaga kerja terampil di sektor formal dan informal;
    - Melatih tenaga kerja bersertifikat dalam berbagai bidang sebanyak 1500 orang;
    - Memberi bantuan modal dan peralatan usaha bagi peserta pelatihan dengan bentuk KUBE;
    - Membina peserta transmigrasi untuk pengolahan lahan dengan komoditas unggulan dan yang sesuai struktur dan kontur tanahnya;
    - Program transmigrasi lokal untuk pengentasan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah;

22. SatPol Pamong Praja dan Dam-Kar
    - Optimalisasi Satpol PP dalam pelaksanaan dan pengamanan Perda;
    - Peningkatan kekondusifan masyarakat dan bersinergi dengan POLRI dan TNI;
    - Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih;
    - Pelatihan dan Peningkatan kesiap-siagaan personil dan penambahan insentif;
    - Penambahan personil dengan status honor daerah dengan honor yang layak sesuai dengan beban kerja;

23. Perencanaan Pembangun Daerah
    - Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan Progran Jangka Panjang Pembangunan Nasional sesuai dengan keadaan dan potensi daerah;

- Merumuskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan skala prioritas sesuai kebutuhan dan urgensinya;
- Merencanakan/membuat program pembangunan (master plan) Kotawaringin Barat dalam Program Jangka Panjang berikutnya;
- Pemekaran Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

24. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
    - Inventarisasi, pengurusan dokumen serta pengarsipan atas asset;
    - Pendataan pemakaian asset dengan penertiban pemakaian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
    - Revisi standar biaya umum dengan penyesuaian kekinian dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan perekonomian dan inflasi;
    - Memaksimalkan pendayagunaan asset untuk meningkatkan PAD;
    - Pengadaan asset yang urgen dan dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha;
    - Penyesuaian anggaran dengan skala prioritas, seimbang dan proporsional;
    - Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi, tranparan, akuntabel dan bebas korupsi;
    - Pengawasan, tertib anggaran, evaluasi, pelaporan secara periodik dan tepat waktu;

25. Pendapatan Daerah
    - Target PAD pada medio pertama sebesar Rp. 250 Miliar, dan Medio kedua diatas Rp. 250 Miliar;
    - Pembuatan/revisi regulasi sesuai keadaan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi;
    - Target APBD yang progressif, pencapaian kisaran sebesar RP.2,5 Triliun;
    - Penentuan NJOP Bumi dan Bangunan sesuai klasifikasi tanah, peruntukan dan kemajuan wilayah secara proporsional;
    - Sosialisasi kepada masyarakat untuk taat bayar paj ak dan retribusi;
    - Peningkatan mutu pelayanan publik serta tertib pemungutan uang;
    - Inventarisasi potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah;
    - Melakukan upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang sah;

26. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
    - Melakukan manejemen ASN agar profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN;
    - Mengadakan Lelang Jabatan dan Penempatan dan pengangkatan (promosi jabatan) harus dengan sistem Merit yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar;
    - Penerapan ASN melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada Azas-azas umum penyelenggaraan negara;
    - Penegakan displin ASN dengan memberikan penghargaan (award) atas prestasi dan kinerja baiknya, pemberian hukuman (punishment)

atas pelanggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Memfaslitasi ASN dalam peningkatan pendidikannya sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- Memberikan pelatihan manajerial untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK;
- Mengadakan pendidikan dan pelatihan pimpinan sesuai dengan jabatan;
- Pelaksanaan penerimaan calon PNS yang transparan dan bebas KKN;

27. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Pemberian bantuan pembinan untuk Partai Politik yang mempunyai fraksi di DPRD; 0 Pembinaan dan dukungan serta pemberian bantuan untuk ormas-ormas terdaftar; 0 Melakukan pendidikan politik tentang Empat Pilar berbangsa dan bernegara;
- Melakukan pembangunan karakter bangsa dengan ajaran TRISAKTI, yaitu : Berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;
- Membudayakan jiwa gotong royong sebagai tanggung jawab bersama membangun daerah dengan prinsip hidup bersama dalam keberagaman sosial (living together in plural society);
- Meningkatkan kerja sama, menjalin komunikasi dan hamonisasi setiap elemen masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;

28. Sekertariat DPRD

- Peningkatan sarana dan prasarana DPRD yang memadai dan representatif;
- Peningkatan sinergi DPRD dengan Pemerintah Kabupaten sebagai unsur dari Pemerintahan Daerah;
- Peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat dan solusi penyelesaian secara cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pengadaan fasilitas pendukung untuk optimalisasi tugas dan fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat;
- Memberikan penghargaan bagi Anggota DPRD yang purna tugas;

29. Inspektorat

- Meningkatkan fungsi pengawasan menjaga kebocoran anggaran;
- Memberikan bimbingan penggunaan anggaran dan monitoring berkala;
- Peningkatan evaluasi dan pelaporan yang akurat untuk predikat WTP;
- Melakukan tindakan pengembalian dana ke kas daerah bagi temuan;
- Maturitas SPIP

30. Penanggulangan Bencana Daerah

- Melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana, membuat prediksi dan pencegahan dini;

- Pengadan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi daerah prioritas pencegahan Karhutla;
- Penambahan personil yang terlatih dan tanggap darurat dalam antisipasi dan mengatasi bencana;
- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan potensi bencana dan cara penanggulangan serta kerja sama dalam mengantisipasi;
- Pengalokasian dana tanggap darurat, melakukan tindakan preventif terhadap potensi bencana, melakukan tindakan repressif serta proteksi yang bersifat konservatif paska kejadian luar biasa KLB);

31. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddim
    - Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
    - Peningkatan pelayan yang prima, sistematis dan modern;
    - Ketercukupan obat-obatan;
    - Perekrutan tenaga para medis, dokter umum dan spesialis yang memadai;
    - Upaya peningkatan Type/kelas Rumah Sakit;
    - Mewujudkan menjadi Rumah Sakit rujukan;

Kecamatan, Kelurahan dan Desa

1. Kecamatan
    - Meningkatkan pelaksanaan tupoksinya sebagai pemerintah wilayah;
    - Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah;
    - Pendampingan kepada Kelurahan dan Desa didalam menerbitkan Peraturan dan Penggunaan Dana serta pertanggung jawabannya;
    - Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah;
    - Penyelesaian dan penentuan tata batas antar kelurahan dan desa;
    - Mengadakan kerja sama atau menjalin komunikasi aktif dengan korporasi di wilayahnya untuk pengadaan/perbaikan infra struktur serta tanggap bencana;

2. Kelurahan
    - Peningkatan pembinaan warga menuju kehidupan perkotaan dan pendataan serta pengawasan bagi warga pendatang baru;
    - Meningkatkan pelaksanaan tupoksinya sebagai Perangkat Kelurahan;
    - Pelayanan masyarakat yang prima dan mengoptimalkan kinerja sebagai Ujung tombak pemerintahan;
    - Penyaluran insentif kepada Ketua RW/RT tepat waktu;

3. Desa
    - Meningkatkan kemampuan Kepala Desa dan Perangkatnya serta BPD akan tugas dan tanggung jawabnya;
    - Pelaksanaan administrasi desa secara sistematis sesuai perkembangan iptek;
    - Pembuatan Peraturan Desa tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya serta memperhatikan kearifan lokal;

- Penerbitan surat-surat harus terinventaris dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Penggunaan Dana Desa sesuai APBDes yang telah dibuat serta pertanggung jawaban sesuai pedoman/petimjuk teknisnya;
- Penggalian sumber-sumber dana desa yang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat hukum desa;
- Pembentukan dan pembinaan usaha-usaha masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan;
- Pemberian insentif kepada Ketua RW/RT tepat waktu;
- Melakukan kerja sama yang baik dengan tenaga pendamping desa;
- Terciptanya Desa Mandiri, aman, tentram dan sejahtera;

4.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis.. untuk mencapai penataan ruang tersebut telah ditetapkan 6 kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
b. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
c. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
d. pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
f. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Enam kebijakan penataan ruang tersebut dilakukan melalui 9 strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. 9 strategi tersebut adalah:

a. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap dapat menjamin berlangsungnya konservasi hutan, tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan

mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;

b. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
c. memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
d. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan lindung Taman Nasional Tanjung Puting,Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau ;
e. mewujudkan Kota Pangkalan Bun sebagai pusat pelayanan regional;
f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
g. mempertahankan fungsi kawasan hutan dan non hutan;
h. membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas guna membuka keterisolasian kawasan tertinggal; dan
i. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan berbasis keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2037 dibagi menjadi 5 tahapan. Yaitu tahun 2017 -2022, tahun 2022 -2027, tahun 2027 -2032, tahun 2032 -2037. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat perode jangka menengah pertama (2017-2022) adalah sebagai berikut

1. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

a. PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN
   1) Pengembangan Struktur Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
   2) Pemantapan fungsi Pusat dan Sub Pusat kegiatan

b. PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA
   1) Peningkatan Jalan Negara Pangkalan Bun ke Amin jaya - kabupaten Seruyan
   2) Peningkatan Jalan Negara Pangkalan Bun ke Nangabulik
   3) Program pembangunan kawasan perumahan baru
   4) Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perkotaan
   5) Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perdesaan
   6) Penyediaan lisiba dan kasiba
   7) Perbaikan kualitas sarana pendidikan
   8) Perbaikan kualitas sarana kesehatan
   9) Perbaikan kualitas sarana
   10) Program pengaturan, pembinaan kegiatan perdagangan di kawasan perdesaan
   11) Penyediaan jaringan transmisi
   12) Mencari sumber energi baru (mikro hidro, angin)
   13) Penyediaan jaringan transmisi
   14) Penyediaan TPS
   15) Penyediaan TPA
   16) Pengolahan Sampah

2. PERWUJUDAN POLA RUANG

a. PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG
   1) Penataan ulang batas Kawasan Taman Nasional
   2) Penataan ulang batas kawasan, penetapan kawasan dan pengelolaan kawasan.
   3) Inventarisasi penggunaan kawasan
   4) Reboisasi kawasan yang telah rusak terbakar
   5) Inventarisasi penggunaan sempadan pantai, sungai, danau
   6) Sosialisasi kepada masyarakat
   7) Identifikasi kawasan rawan kebakaran hutan
   8) Pengendalian dan pencegahan bahaya kebakaran hutan (kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan pemadaman api)
   9) Program pengembangan dan pelestarian mangrove

b. PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA
   1) Penataan kawasan hutan produksi
   2) Pengembangan hutan rakyat pada kawasan hutan dan tanah milik masyarakat
   3) Pengembangan dan intensifikasi basah
   4) Pengembangan dan intensifikasi kering untuk tanaman pangan
   5) Intensifikasi hortikultura
   6) Pengembangan budidaya perikanan darat
   7) Pengembangan budidaya laut
   8) Pengelolaan limbah industri terpadu
   9) Perencanaan obyek-obyek wisata
   10) Pengembangan obyek-obyek wisata
   11) Promosi objek wisata
   12) Promosi objek wisata
   13) Perencanaan obyek-obyek wisata
   14) Pengembangan obyek-obyek wisata
   15) Promosi objek wisata
   16) Perencanaan obyek-obyek wisata
   17) Pengembangan obyek-obyek wisata
   18) Promosi objek wisata

3. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

a. KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI
   1) Pemantauan Pengendalian perpindahan penduduk antar wilayah sebagai upaya untuk mengatur penyebaran penduduk
   2) Pengembangan fasilitas angkutan udara dan pelabuhan
   3) Peningkatan penyediaan fasilitas prasarana kota
   4) Pengendalian pusat-pusat pelayanan pengarahan pengembangan pada area perkotaan di luar
   5) Pengembangan prasarana kota terpadu
   6) Pengembangan sistem angkutan perkotaan terpadu dengan sistem regional
   7) Pemantauan perkembangan kegitatan dalam kawasan

b. KAWASAN TERTINGGAL
   1) Pengarahan alokasi pusat-pusat pelayanan dan permukiman
   2) Peningkatan dan penyediaan fasilitas prasarana

c. KAWASAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
   1) Pengendalian dan pengawasan terhadap semua bentuk kegiatan yang berpotensi untuk

mengurangi kapasitas dan kualitas sumber daya air
2) Pengembangan objek wisata alam dan pendidikan
3) Pemantauan perkembangan kegiatan dalam kawasan

4.7.Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

4.6.1 Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan. Makna pendekatan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau sekedar mengkritisi kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah strategi yang cenderung bersifat persuasif, dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup pada Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, memiliki 6 (enam) prinsip KLHS yang seyogyanya dianut sebagai berikut ini:

Prinsip 1: Penilaian Diri (*Self Assessment*)

Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang diharapkan muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan secara apriori mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan.

Prinsip 2: Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (*Improvement of the Policy, Plan, and/or Program*)

Prinsip ini menekankan pada upaya untuk penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS tidak menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan menjadi media atau katalisator untuk memperbaiki proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program.

Prinsip 3: Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial (*Social Learning and Capacity Building*)

Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program harus menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi

masyarakat umum dan khususnya bagi para birokrat dan pengambil keputusan. KLHS harus memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya.

Prinsip 4: Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan (*Influencing Decision Making*)

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus memberikan pengaruh yang positif pada pengambilan keputusan. KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip 5: Akuntabel (*Accountable*)

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan pada publik secara luas. Azas akuntabilitas KLHS sejalan dengan semangat akuntabilitas dari kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri, sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana dan/atau program bagi seluruh pihak.

Prinsip 6: Partisipatif

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini telah menjadi amanat dalam Undnag-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan harus diwadahi dalam penyelenggaraan KLHS.

4.6.2. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap program prioritas pembangunan, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan supaya implementasi program pembangunan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Rekomendasi tersebut adalah:

1. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, sarana pendidikan, tenaga pendidik.
2. Peningktan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi tepat guna.
3. Peningkatan mutu dan kualitas sarana kesehatan.
4. Pendampingan oleh tenaga-tenaga professional dalam pengenalan dan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan bagi masyrakat.
5. Pengawasan dalam pembangunan sarana-prasarana.
6. Pendampingan terhadap masyarakat untuk mengetahui prioritas kebutuhan sarana-prasarana masyrakat.
7. Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur alih fungsi lahan sesuai Undang-Undang 41 tahun 2009;
8. Penyesuaian antara RTRW dangan moratorium kehutanan
9. Pelaksanaan dan pengawasan regulasi secara tegas untuk

aktivitas penjarahan dan pembakaran hutan
10. Pembentukan kelompok masyarakat siaga kebakaran hutan secara mandiri yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah
11. Pelaku industri/investor yang akan membangun usahanya harus memiliki IPAL dan pembangunannya harus sesuai tata ruang dan kaidah pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
12. Peningkatan fasilitas dan komponen pendukung penegak hukum.
13. Meningkatkan penyuluhan kepada aparat hukum dan masyarakat untuk menjaga keamanan, kejujuran dan keadailan.
14. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka turut serta menjaga keamanan, kejujuran dan keadilan.

4.8.Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawarigin Barat adalah sebagai berikut ini:

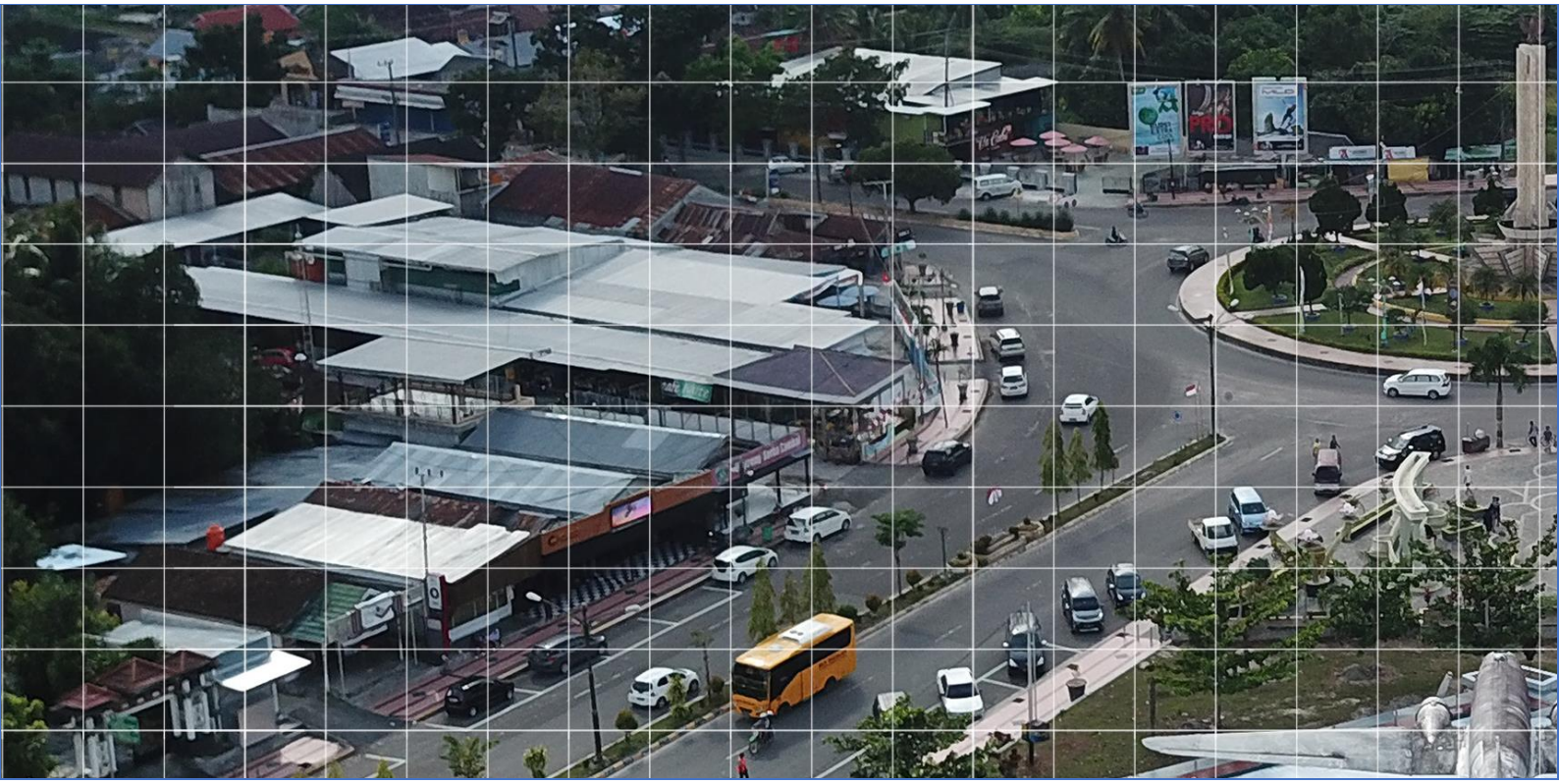
1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Keuangan Daerah.
2. Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Nilai akuntabilitas kinerja masih rendah
4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan e-government.
5. belum tersedianya data, informasi sektoral untuk menunjang pemerintahan yang bersih dan efektif dan transparan
6. Belum optimalnya pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil karena terbatasnya SDM, sarana dan prasarana
7. Belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah.
8. Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah
9. Penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata belum terwujud sepenuhnya.

10. Sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
11. Belum semua sekolah yang berada di pedesaan dilengkapi dengan Rumah Dinas Guru.
12. Masih adanya anak putus sekolah.
13. Belum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan standar.
14. APK PAUD rendah (rata2 30,03%)
15. Rata2 lama sekolah rendah (8,05 th)
16. Masih kurangnya minat baca masyarakat.
17. Belum semua puskesmas terakreditasi.
18. Belum terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sesuai standar.
19. Sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Rumah Sakit Sultan Imanuddin belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional.
20. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir.
21. Masih adanya balita gizi buruk.
22. Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai
23. Belum optimalnya pembinaan dan sinkronisasi kegiatan kepemudaan
24. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olah raga dan atlit berprestasi
25. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik pemerintah
26. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi serta bahasa daerah
27. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal
28. Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten.
29. Belum berkembangnya industri kecil/ industri rumah tangga.
30. Belum berkembangnya sektor industri hilir.
31. Keterbatasan dukungan infrastruktur
32. Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang.
33. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional.
34. Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global
35. Masih tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok
36. Belum optimalnya peran daerah dalam perlindungan dunia usaha
37. Pengembangan kawasan pertanian terkendala oleh status kawasan hutan.
38. Masih rendahnya cakupan pelayanan irigasi.
39. Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP).
40. Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian (Alsintan)
41. Ancaman penyakit reproduksi dan penyakit menular ternak cukup tinggi
42. Basis populasi induk (akseptor) masih rendah;
43. Kurangnya pemahaman petani tentang pentingnya penggunaan benih/ bibit yang unggul
44. Belum tersedianya peta dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan perkebunan
45. Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditi kelapa sawit rakyat
46. Belum tersedianya informasi pasar produk perkebunan

47. Masih rendahnya SDM petani dalam penguasan teknologi budidaya perkebunan
48. Kurangnya pengawasan perlindungan lahan pertanian
49. Belum adanya pemetaan ulang terhadap alih fungsi lahan pertanian
50. minimnya pengeolaan agribisnis usaha pertanian
51. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian
52. Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)
53. Ketergantungan produk hortikultura dari luar darah
54. Hasil Produksi Tanaman Pangan belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, sehingga mempengaruhi kondisi ketahanan pangan daerah
55. Rendahnya peranserta Kelompok Pengawas Masyarakat.
56. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya.
57. Kurangnya budidaya jenis ikan lokal seperti Haruan, Papuyu, Baung dll.
58. Kurangnya teknologi pengolahan hasil perikanan
59. Masih bayak kelompok yang belum terdaptar/berbadan hukum
60. Kurang terwujudnya pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan
61. Tingginya konsumsi beras perkapita.
62. Rendahnya konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan.
63. Rendahnya Keragaman Pangan Masyarakat (Pola Harapan Pangan rendah)
64. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tidak optimal
65. Kemampuan kelompok tani masih rendah
66. Rendahnya peran serta Badan Pengawas Koperasi.
67. Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha.
68. Kurangnya peran serta Investor dalam pembangunan.
69. Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM
70. Penggalian pendapatan asli daerah belum didasarkan pada data potensi daerah.
71. Pengelolaan pendapatan belum berbasis teknologi informasi.
72. Belum adanya tatakelola pembinaan dan pengawasan BUMD
73. Target PAD selama 4 th tidak tercapai
74. Belum semua desa terhubung akses jalan darat.
75. Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik.
76. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota.
77. Belum semua masyarakat terlayani air bersih.
78. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat
79. Kurangnya Informasi tentang penataan ruang
80. Masih terjadinya erosi pada tebing sungai
81. Banyak desa yang belum sepakat tentang batas desa karena persoalan di desa yang kompleks
82. Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan.
83. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman.
84. Masih tingginya angka backlog
85. Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB

86. Masih banyaknya lahan tidur (belum dimanfaatkan)
87. Kurangnya penguasaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan.
88. Masih belum optimalnya koordinasi pengelolaan pertanahan.
89. Meningkatnya konflik pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat
90. Belum tersedia angkutan dalam kota.
91. Belum terkelolanya angkutan umum ke Ibukota Kecamatan.
92. Masih terbatasnya pelayanan angkutan udara.
93. Masih kurangnya fasilitas kesehatan dan keamanan trasnportasi darat, laut/ sungai dan udara.
94. Ketersediaan area parkir belum memadai
95. Study perencanaan perhubungan belum lengkap
96. Kurangnya kesadaran perusahaan dalam mengelola air tanah dan air permukaan sesuai aturan perundang-undangan
97. Belum terkelolanya Tempat Pemakaman Umum.
98. Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan.
99. Masih rendahnya kewaspadaan menghadapi ancaman bencana.
100. Adanya intrusi air laut akibat kemarau panjang.
101. Adanya kawasan rawan bencana gelombang pasang dan banjir.
102. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup.
103. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan.
104. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau perkotaan.
105. Kurang tersedianya data dan informasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup
106. Masih banyak kawasan yang masuk dalam moratorium gambut
107. Kurangnya sosialisasi desa siaga bencana
108. Belum terfasilitasi mitigasi bencana
109. Kurangnya jumlah personil PB
110. Meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam
111. Belum optimalnya ketahanan ideologi berbangsa
112. Belum optimalnya kewaspadaan masyarakat
113. Pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal belum terlembagakan secara baik
114. Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah
115. Pengelolaan dana bergulir belum terlembagakan secara baik
116. Peran Perempuan dalam Bidang Pembangunan terutama di struktur Pemerintahan dan organisasi politik belum optimal.
117. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai.
118. Pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan masih kurang.
119. Masih terdapatnya anak yang berhadapan hukum.
120. Masih belum tersedianya fasilitas umum yang layak untuk anak-anak.
121. Kasus KDRT pada anak meningkat (0,3%)

122. Sistem Pencatatan KDRT bagi Petugas PUSK, Satgas desa, Petugas UPPA, Polres/Polsek belum berjalan.
123. Masih tingginya tingkat kemiskinan.
124. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama.
125. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas.
126. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum optimal.
127. Masih belum optimalnya pengembangan Loka Latihan Kerja (LLK) milik pemerintah sesuai pasar kerja.
128. Masih tingginya kasus perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja.
129. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.
130. Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.
131. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Kotawaringin Barat.
132. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata.
133. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata.
134. Belum berkembangnya ekonomi kreatif berbasis pariwisata.
135. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat lokal sekitar obyek wisata (sadar wisata).
136. Belum optimalnya promosi wisata.
137. Belum adanya sistem terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi.



4.9.Isu Strategis

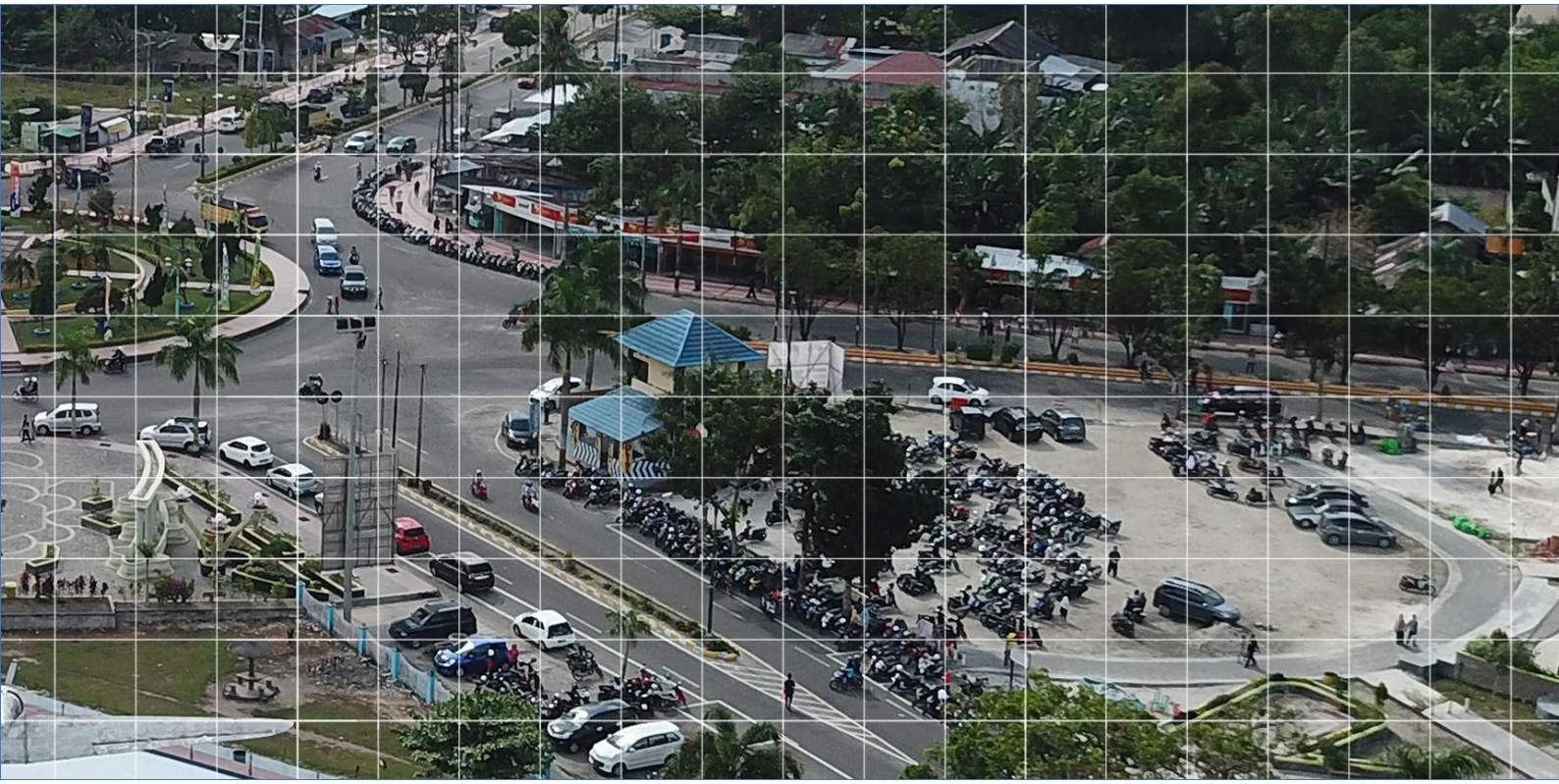
Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki daya ungkit besar dalam memberikan dampak pada pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kemiskinan

   Kemiskinan sudah mejadi permasalahan yang umum dihadapi ketika melaksanakan pembangunan. Namun meskipun sangat umum dihadapi, isu kemiskinan masih menjadi perhatian yang sangat penting untuk sesegera mungkin ditanggulangi. Hal tersebut dikarenakan karena factor kemiskinan jika dibiarkan dapat dapat menyebabkan permasalahan lainnya. Sepertihalnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, isu kemiskinan masih menjadi isu yang sangat serius untuk segera diselesaikan karena angka kemiskinan di kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup tinggi.

2. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan Kinerja

   Kualitas dan kuantitas ASN dalam akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mash rendah ditunjukkan dengan nilai akuntabilitas kinerja yang masih rendah. hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan daerah serta masih terbatasnya kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



3. Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik.

   Penguasaan ASN dalam penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan secara Elektronik masih terbatas. Hal ersebut ditunjukkan dengan masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan *e-government* serta belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah.

4. Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

   Tata kelola pemerintahan desa merupakan hal yang harus menjadi konsentrasi pemerintah dikarenakan posisi desa yang sekarang ini menjadi konsentrasi pembangunan nasional. Untuk membantu memajukan pembangunan melalui desa, maka pemerintah wajib untuk memberikan pendampingan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penggunaan anggaran desa yang bersumber dari ADD diakrenakan jumlahnya yang cukup besar, sehingga nantinya ADD dapat dimanfaatan secara efektif dan efisien.

5. Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan

   Pendidikan merupakan pintu yang digunakan untuk menngkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun jika dilihat dari angka APK PAUD dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat, nilainya masih cukup rendah. Hal itu didukung dengan fakta bahwa nilai APK PAUD yang masih diangka 30,03% dan masih terdapat anak usia sekolah yang terpaksa berhenti sekolah karena berbagai permasalahan. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan..

6. Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Selain akses terhadap pendidikan, sarana-prasarana penunjang pelayanan pendidikan juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan kelayakannya. Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan minat dan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa. Sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun jika mengacu pada SNP masih terdapat sarana-prasarana pendidikan yang masih belum sesuai dengan SNP

7. Kurangnya dukungan akomodasi/Insentif terhadap tenaga pengajar

Tenaga pengajar merupakan aktor yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan terhadap siswa didiknya. Oleh karena itu Kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar. Memperhatikan hal tersebut maka sudah selayaknya kualitas tenaga pengajar harus diperhatikan baik dari segi kapasitas keilmuan dan kebutuhan hidupnya. Namun jika melihat kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih terdapat sekolah yang tidak dilengkapi dengan rumah dinas, serta masih elum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pelayanan pendidikan pada masyarakat.

8. Kurangnya minat baca masyarakat

Membaca merupakan salah satu cara untuk belajar dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tingginya minat baca juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam menilai kualitas sumberdaya manusia. Jika dilihat dari kondisi empiris di Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi minat baca masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup rendah.

9. Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar

Selain akses terhadap layanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Melihat kondisi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat beberapa fasilitas layanan kesehatan yang belum optimal seperti belum semuanya puskesmas yang ada mendapat akreditasi, belum terpenuhinya kebuthan obat-obatan sesuai standar, serta masih belum sesuainya RSUD dengan kualifikasi standar rumah sakit rujukan regional.

10. Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum untuk mengukur tingkat kesehatan dapat dilihat dari nilai angka harapan hidup termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. AHH di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu ditingkatkan lagi, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya balita gizi buruk, masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya akses

masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai. Akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat tidak mampu sangatlah penting untuk diupayakan, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

11. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda

Pemuda sebagai penerus bangsa merupakan asset yang sangat berharga. Keaktifan pemuda dalam mengikuti atau melakukan hal-hal positif merupakan salah satu kontribusi yang daik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas social ekonomi di masyarakat. Oleh karena hal tersebut sangat penting untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi pemuda sehingga organisasi tersebut dapat menjadi wadah bagi pengembangan potensi-potensi dan bakat yang dimiliki oleh pemuda di kabupaten Kotawaringin Barat. Namun kondisi yang ada sekarang, pembinaan terhadap organisasi kepemudaan masih belum berjalan optimal.

12. Belum optimalnya pengelolaan sarana-prasarana olahraga

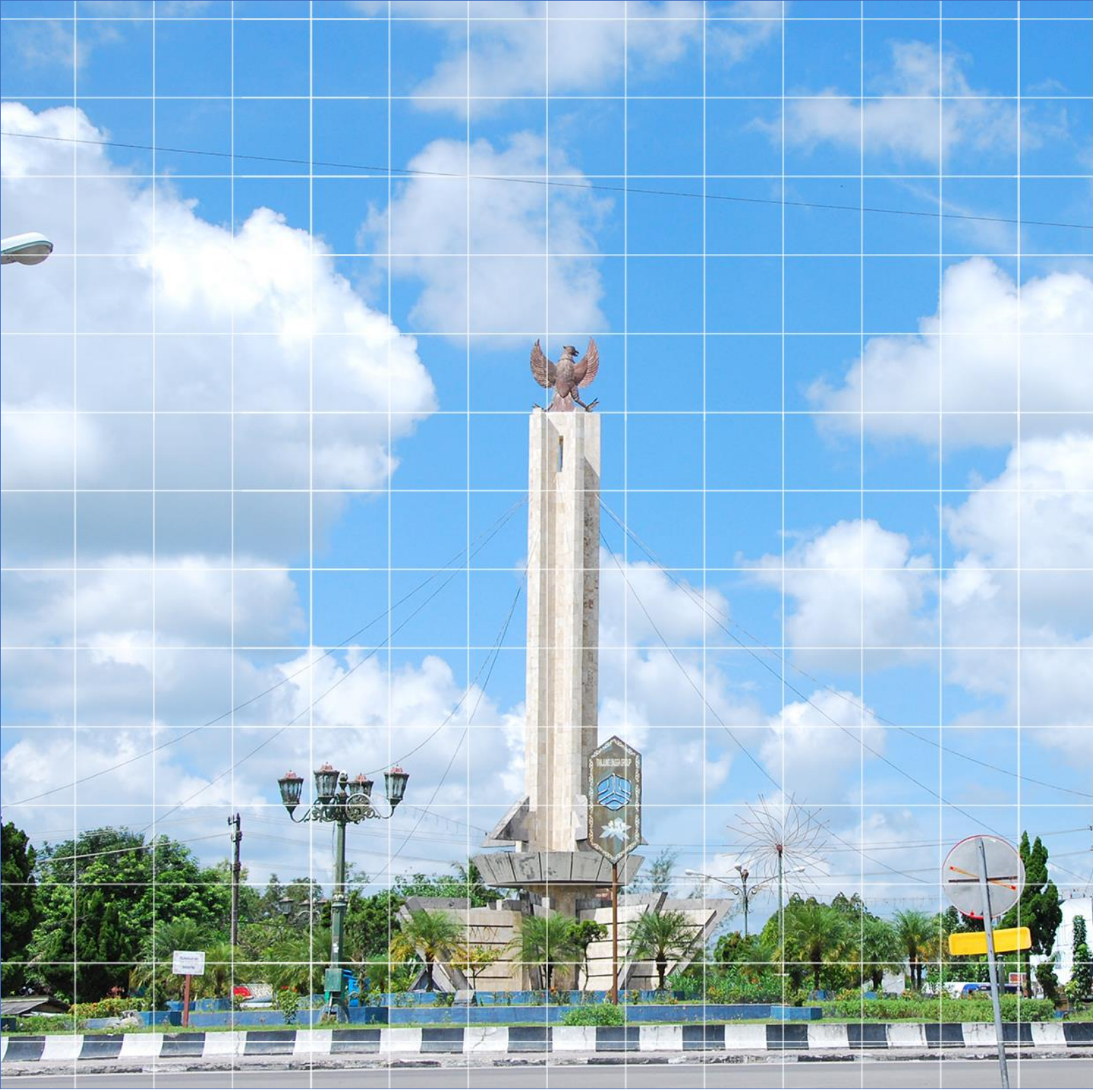
Salah satu pengembangan terhadap bakat-bakat pemuda adalah melalui berbagai cabang olahraga. Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan sarana-prasarana yang layak pakai. Namun jika dilihat kondisi yang ada saat ini, pengelolaan sarana-prasarana olah raga masih belum dilakukan secara optimal.

13. Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri

Infrastruktur sebagai pengungkit pembangunan di berbagai sektor menjadikan permasalahan dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan. Kondisi dukungan infrastruktur di sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya Rencana Induk pembangunan industry kabupaten. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan sektor industry khususnya sektor industri kecil/rumah tangga maupun perkembangan di sektor industry hilir.

14. Rendahnya Kondusifitas Aktifitas Perdagangan Barang dan Jasa

Kondusifitas aktifitas perdagangan barang dan jasa masih rendah, salah satu penyebabnya adalah peran daerah dalam melakukan perlindungan dunia usaha yang masih belum optimal. Hal tersebut berdampah pada tingginya fluktuasi harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pengelolaan dan penataan pasar tradisional yang masih belum optimal juga semakin menurunkan kondusifitas aktifitas perdagangan khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil.



15. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan Pertaninan, Perikanan dan Peternakan

    Kuantitas dan kulitas infrastruktur penunjang pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan masih rendah. Hal tersebut terlihat dari tingkat produktifitas komoditas di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan peternakan) masih tergolong rendah. Selain itu pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan ketiga sektor tersebut juga masih cukup rendah

16. Belum Optimalnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan yang masih rendah tercermin dari tingkat konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan. Serta rendahnya keragaman pangan masyarakat (Pola Harapan Pangan) yang masih rendah.

17. Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan UMKM (Rendahnya Minat Kewirausahaan Masyarakat)

Minat masyarakat untuk berwirausaha masih tergolong rendah, hal itu ditunjukkan dengan belum optimalnya produktifitas Koperasi dan UMKM, selain itu kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha juga ikut mempengaruhi perkembangan usaha UMKM

18. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan PAD

Sistem pengelolaan PAD masih belum optimal, sehigga mengakibatkan target PAD selama 4 tahun tidak tercapai. Kurang optimalnya pengelolaan PAD dapat dikarenakan belum adanya tata kelola pembinaan dan pengawasan BUMD serta pengelolaan yang masih belum berbasis teknologi informasi. Selain itu penggalian PAD yang ada selama ini masih belum didasarkan pada data potensi daerah.

19. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik maupun Ekonomi

Kualitas dan kuantitas infrastruktur dan transportasi penunjang kebutuhan public dan ekonomi masih rendah. Rendahnya infrastruktur tersebut terlihat dari kondisi jalan dan jembatan yang belum semuanya dalam kondisi baik selain itu untuk daerah perkotaan masih memiliki masalah terkait drainase yang masih belum optimal. Dari segi akses, belum semua desa terhubung dengan akses jalan darat. Dari sisi sanitasi hidup masyarakat juga masih tergolong rendah. Masih terdapatnya kawasan kumuh di perkotaan. Dari segi Transportasi, masih belum adanya angkutan dalam kota dan masih terbatasnya angkutan udara. Angkutan kota yang menghubungkan antar ibukota kecamatan juga masih belum terkelola dengan baik.

20. Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dari segi kebencanaan, Kabupaten Kotawaringin Barat jga masih belum optimal. Masih banyak kawasan yang masuk dalam moratorium gambut serta masih kurangnya sosialisasi tentang Desa Siaga Bencana dan fasilitasi tentang tanggap bencana. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam.

21. Lemahnya Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama

Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya ketahanan ideology berbangsa serta kewaspadaan masyarakat yang masih lemah.

22. Masih Rendahnya Profesionalitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan ADD, DD, Dan Intervensi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir

    Masih rendahnya profesionalitas Aparatur Desa khususnya dalam hal pengelolaan ADD, DD, dan Intervensi Dalam Pengawasan pengelolaan dana Bergulir yang tercermin dari belum terkelolanya dana bergulir serta pengelolaan keuangan lainnya dengan baik. Selain itu pengelolaan pembangunan secara partisipatif juga masih belum belum optimal.

23. Masih tingginya tingkat kekerasan Terhadap perempuan dan anak

    Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat juga masih menjadi perhatian serius dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kasus KDRT pada anak meningkat hingga (0,3%) dan masih adanya anak-anak yang berhadapan dengan hokum. Selain itu pemenuhan akan hak-hak bagi perempuan dalam bidang pembangunan terutama di struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.

24. Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda Dikarenakan Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.

    Keterlibatan masyarakat mutlak dilakukan supaya pembangunan dapat dilaksanakan secara partisipatif. Selain itu tingkat perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja juga masih tinggi.

25. Belum Optimalnya Pemenuhan Aspek Attraction, Accessibility, Ammenity, dan Ancillary Service Destinasi Wisata

    Untuk mendukung dan mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, seharusnya 4 aspek pembangunan pariwisata dipenuhi. 4 aspek tersebut adalah Aspek Attraction, Accessibility, Ammenity, dan Ancillary Service Destinasi Wisata. Namun kondisi saat ini 4 aspek tersebut masih belum tercukupi. Selain itu pengelolaan pariwisata yang ada sekarang masih belum optimal. Dari segi kesadar masyarakat sekitar obyek pariwisata juga masih rendah. Sedangkan dari segi perkembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai dampak lain dari pembangunan sektor pariwisata juga masih belum signifikan.

26. Lemahnya Branding Wisata Kotawaringin Barat

    Untuk meningkatkan popularitas pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan melalui pembuatan branding sebagai salah satu identitas pariwisata. Namun, saat ini branding yang dibuat masih belum optimal. Selain itu promosi wisata sebagai ujung tombak dalam pemasaran pariwisata di Kabupaten Kotawaringin barat juga masih belum optimal. Selain itu hingga saat ini asih belum ada system yang terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi.



BAB V: PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 VISI

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktorstrategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, sertaPemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

" GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"

Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu :

I : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR
K : KETAKWAAN
H : HARMONIS
L : LANGGENG
A : AMAN
S : SEJAHTERA

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI,yaitu :

N : NASIONALIS
U : UNGGUL
R : RELIGIUS
A : AMANAH
N : NYATA
I : INSPIRATIF

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI " GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Gerakan Membangun	Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun kabupaten kotawaringin barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan membangun kabupaten kotawaringin barat
Kejayaan	Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inpiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten.
Kerja nyata	Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif, dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif dan berdampak nyata pada kemajuan daerah.

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI " GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Iptek dan Infrastruktur	Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem infrastruktur antar wilayah guna membuka peluang Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya
Ketakwaan	Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang agamis, tentram dan damai
Harmonis	Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak menyebar fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat
Langgeng	Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kotawaringin Barat
Aman	Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan, mengenali kerentanan Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat perlindungan masyarakat
Sejahtera	Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan

5.2 MISI

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu " GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS", maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi di*breakdown* ke dalam tiap misi.



Misi 1 Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan

Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

Misi 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup

Misi 4 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat

Misi 5 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Misi 6 Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata

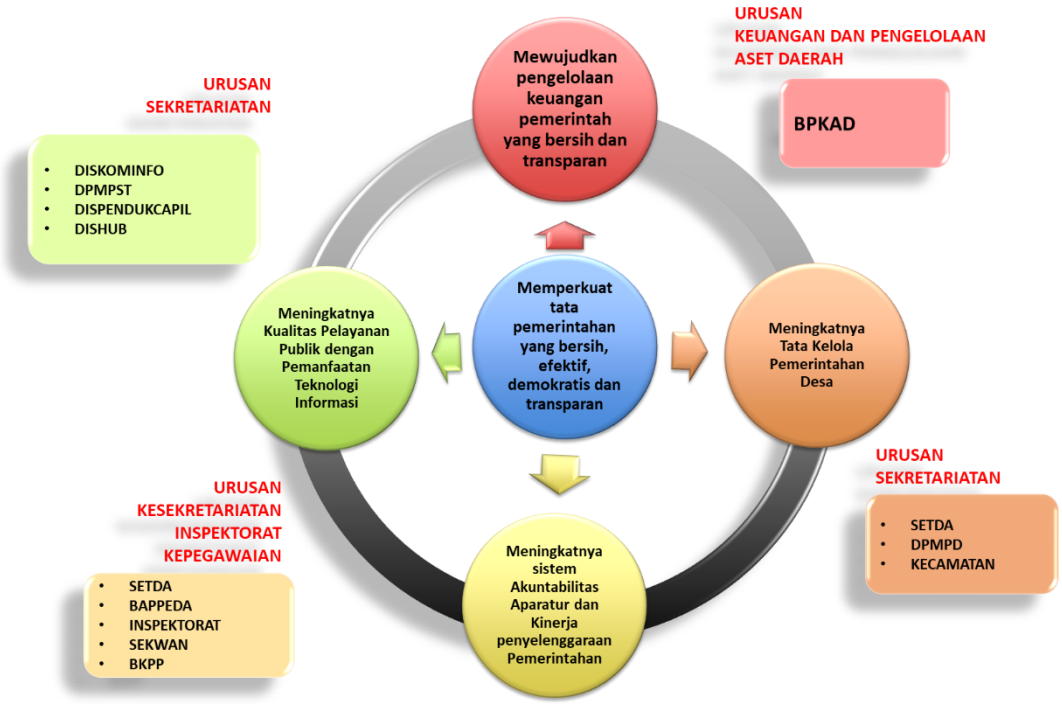
Enam butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi Pembangunan Daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat diperjelas sebagai berikut.



Misi I "Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan"

Salah satu tolok ukur pemerintah yang bersih dan akuntabel adalah Indeks *Good Governance*. Misi I Kabupaten Kotawaringin Barat terfokus terhadap tujuan diatas, dengan menetapkan 4 sasaran yakni 1) Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan; 2) Meningkatnya sistem Akuntabilitas Aparatur dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan; 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi; dan 4) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1 sebagai berikut:

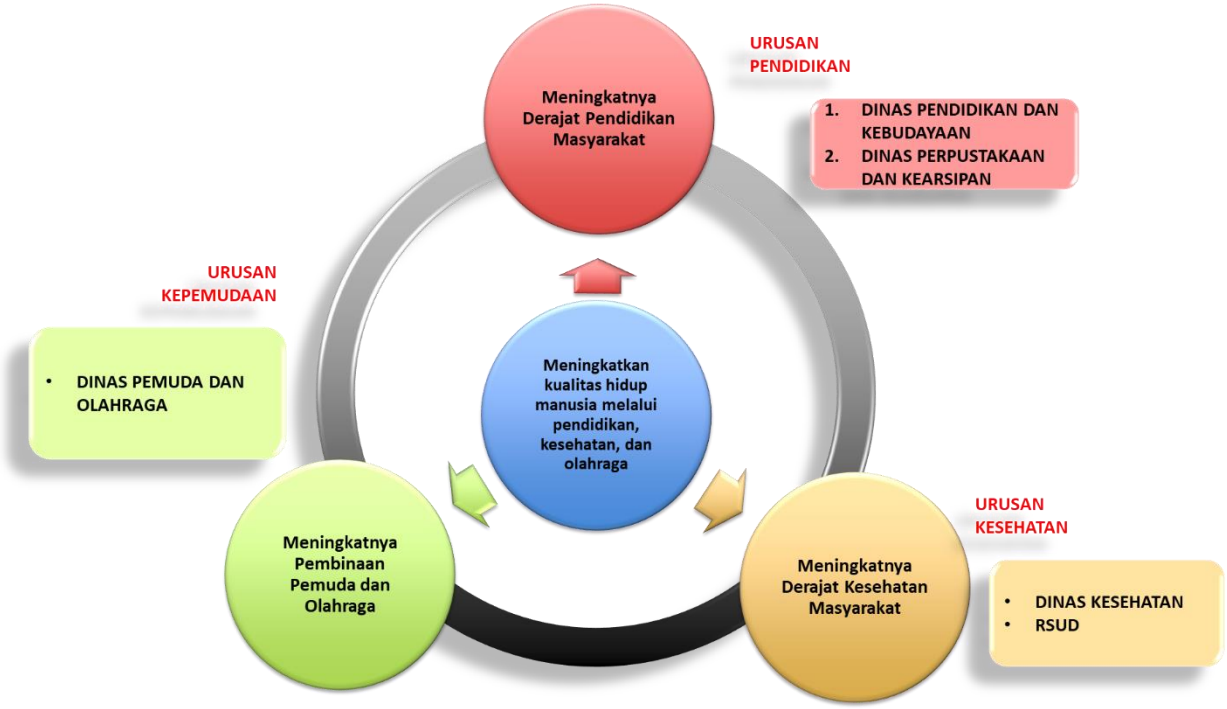


Gambar 5. 1: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1

Misi II "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Olahraga."

Ditetapkan 1 Tujuan dan 3 Sasaran untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan Misi III. Berdasarkan 3 indeks pembentuk IPM, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan secara representatif menggambarkan pencapaian IPM pada Misi II. Untuk mencapai hal tersebut dapat dicapai melalui 3 sasaran yang meliputi 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan 3) Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.;.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-2 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 sebagai berikut:



Gambar 5. 2: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2

MISI III "Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Sumber Energi Melalui Infrastruktur dan Memperhatikan Lingkungan Hidup"

Misi III Kabupaten Kotawaringin Barat terfokus terhadap peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan lingkungan hidup. Kemudian kaidah misi tersebut diinterpretasikan terhadap 4 sasaran yang meliputi 1) Pertumbuhan ekonomi sektor primer; 2) Pengembangan potensi daerah; 3) Pemerataan aksesibilitas; dan 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-3 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 sebagai berikut:

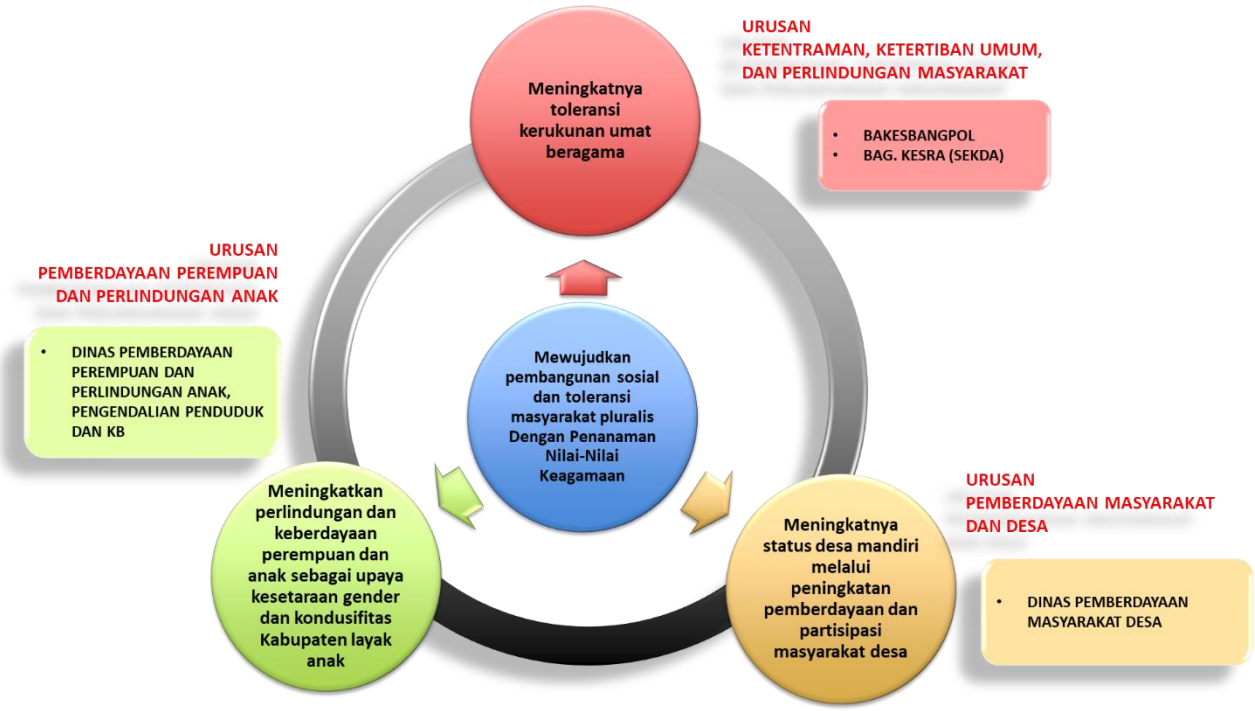


Gambar 5. 3: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3

MISI IV "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat"

Perspektif Misi IV lebih diarahkan terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat, yang menggunakan tolok ukur capaian dengan menggunakan Indeks Pembangunan Masyarakat. Misi IV dapat dicapai dengan meningkatkan meningkatkan toleransi antar umat beragama, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dan perelindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-4 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4 sebagai berikut:

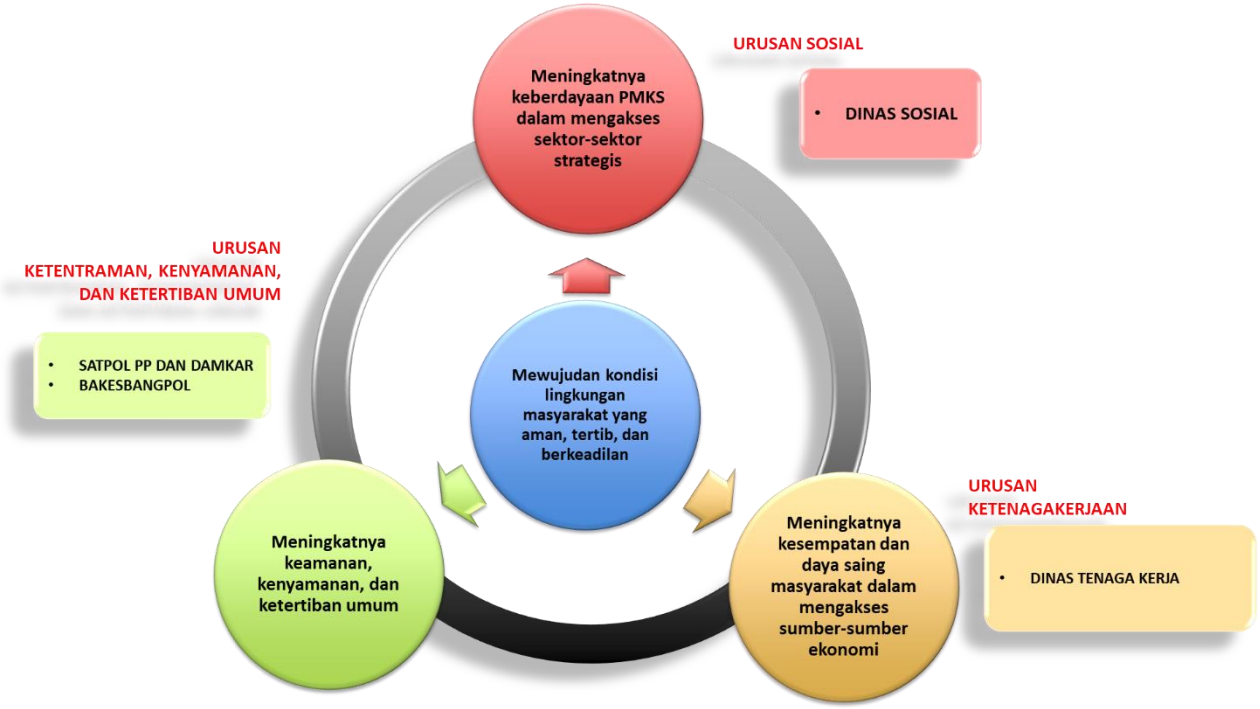


Gambar 5. 4: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4

MISI V "Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis."

Misi kelima adalah terfokus terhadap mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. Indikator tujuan yang merupakan fokus capaian yakni Angka Kemiskinan dengan sasaran dari Misi V adalah 1) Pemberdayaan PMKS; 2) Menekan pengangguran; dan 3) Meningkatkan ketertiban dan keamanan.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 sebagai berikut:



Gambar 5. 5: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5

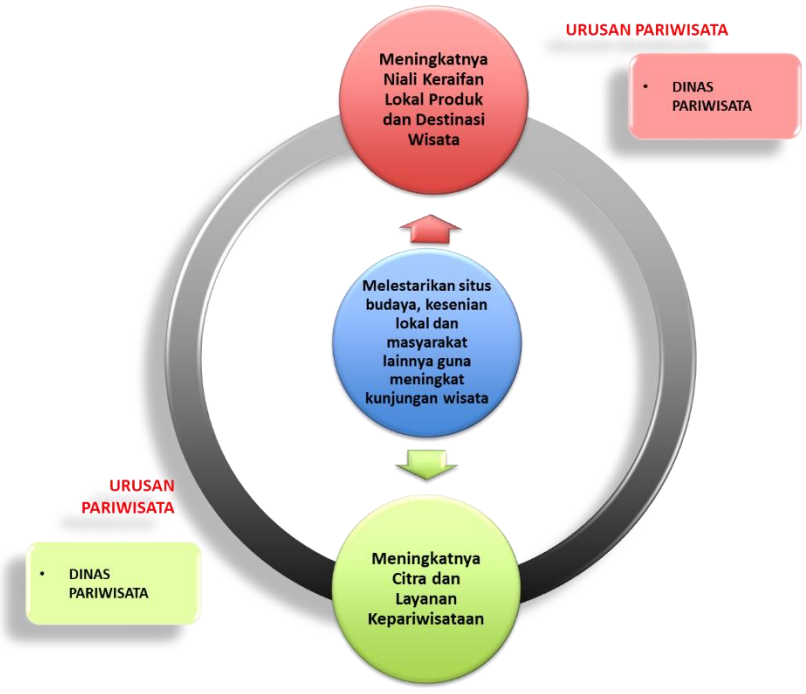
Menindak lanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2021, maka berikut ini merupakan kerangka arsitektur Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2021 sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar misi dalam pencapaian visi, yang dapat digambarkan sebagai berikut.

MISI VI "Melestarikan Situs Budaya, Kesenian Lokal Dan Masyarakat Lainnya Guna Meningkat Kunjungan Wisata"

Perspektif Misi VI lebih diarahkan terhadap pembangunan pariwisata. Misi VI dapat dicapai dengan meningkatkan nilai kearifan lokal dan meningkatkan citra layanan kepariwisataan.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-6 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-6 sebagai berikut:

Gambar 5. 6: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-6





5.3 Tujuan Dan Sasaran

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Transparan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan Sasaran Pembangunan:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.
2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.



Gambar 5. 7: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 1

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas kualitas sumberdaya manusia, dengan Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
2. M eningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-II Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut



Gambar 5. 8: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan, dengan Sasaran Pembangunan:
   1) Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan
   2) Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah
   3) Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi
   4) Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-III Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut



Gambar 5. 9: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 3

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat., maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis dengan penanaman nilai-nilai keagamaan, dengan Sasaran Pembangunan:
   1) Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama.
   2) Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.
   3) Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layakk anak.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-IV Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut



Gambar 5. 10: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 4

5.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi V

Sebagai upaya untuk mencapai Misi V yakni Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis., maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan dengan Sasaran Pembangunan:
   1) Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis.
   2) Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi
   3) Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-V Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut



Gambar 5. 11: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 5

5.3.6 Tujuan dan Sasaran Misi VI

Sebagai upaya untuk mencapai Misi VI yakni Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Pariwisata Daerah dengan Sasaran Pembangunan:
   1) Meningkatnya Niali Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata
   2) Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-VI Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut



Gambar 5. 12: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 6

5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

Tabel 5. 1: Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	T.1 Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	IKD 1. Indeks Good Governance	S1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
				S2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	C	CC	B	A	A	A	A	Setda Bappeda
					Indeks Profesionalitas Aparatur	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	BKD
					Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
				S.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	% PD yang menerapkan E-Gov	NA	40%	50%	60%	75%	80%	85%	Setda Diskominfo DPK
					rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	NA	85	87	90	95	96	99	Dispendukcapil DPMPST Setda Sekwan Kecamatan
				S.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	% Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran,	NA	0,65	0,7	0,8	0,85	0,9	0,9	Setda DPMD

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
					dan pelaporan, yang benar dan tepat waktu								Kecamatan
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.	T.2 Meningkatkan kualitas kualitas sumberdaya manusia	IKD 2. Indeks Pembangunan Manusia	S.5 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,42	12,61	12,8	13	13,19	13,38	13,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rata-Rata Lama Sekolah	70,21	70,4	70,59	70,79	70,98	71,17	71,36	
					Indeks Minat Baca	NA	NA	10%	20%	30%	40%	60%	
				S.6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,21	70,4	70,59	70,79	70,98	71,17	71,36	Dinas Kesehatan
					Prosentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	90%	RSUD
				S.7 Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	Prosentase peningkatan peraihan Prestasi Pemuda	NA	20%	25%	30%	30%	40%	60%	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup	T.3 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	IKD 3. Pertumbuhan Ekonomi	S.8 Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-2.22%	N/A	5%	10%	15%	20%	25%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	18.33%	N/A	5%	8%	11%	14%	20%	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	-23.30%	N/A	10%	12%	13%	15%	15%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
													Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
													Dinas Perikanan
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,95	N/A	92,9	93,1	93,4	93,8	94,2	Dinas Ketahanan Pangan
					Persentase Koperasi dan Udaha Mikro yang berkualitas	N/A	N/A	5,5	6,5	7,5	9,5	10	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
					Persentase pertumbuhan wirausaha baru	N/A	N/A	13,04	34,78	56,52	78,26	100	
				S.9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Peretumbuhan nilai PMA dan PMDN	N/A	N/A	8%	12%	16%	20%	24%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	N/A	14,21	11,81	11,86	11,91	11,96	12	Badan Pendapatan Daerah
				S.10 Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Indeks Williamson	N/A	N/A	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Dinas PUPR
													Dinas Perhubungan
													Dinas Perkim
			IKD 4. Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	S.11 Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan	1. Indeks Kualitas Air	N/A	50%	53%	56%	59%	62%	65%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
					2. Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	60%	63%	66%	69%	72%	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Tanggap Bencana	3. Indeks Tutupan Hutan	N/A	56,83%	59%	61%	63%	65%	67%	
					Indeks Resiko Bencana	N/A	115	108	101	94	87	80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.	T.4 Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis	IKD 5. Indeks Pembangunan Masyarakat	S.12 Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	N/A	0,65	0,68	0,7	0,72	0,74	0,76	Badan Kesatuan Bangsa Politik
													Setda
				S.13 Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri	NA	0	5%	5%	6%	6%	12%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				S.14 Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layakk anak	Indeks Pemberdayaan Gender	NA	92,69	94,01	95,33	96,65	97,98	99,3	DP3AP2KB
					Kategori Kabuipaten Layak Anak	NA	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	
5	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.	T.5 Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman,	IKD 6. Angka Kemiskinan	S.15 Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	20%	18,50%	17,00%	15,50%	14,00%	12,50%	10,00%	Dinas Sosial

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		tertib, dan berkeadilan		S.16 Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,15	3,04	2,93	2,82	2,71	2,61	2,5	Dinas Tenaga Kerja
				S.17 Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	NA	10%	10%	15%	18%	20%	23%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 2. Bakesbangpol
6	Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata	T.6 Peningkatan Pariwisata Daerah	IKD 7. Tourism Intencity Index	S.18 Meningkatnya Niali Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata	Persentase Destinasi Wisata Khas Daerah Terkelola	NA	70%	75%	78%	80%	83%	85%	Dinas Pariwisata
					Persentase Jenis Produk Lokal Kepariwisataan	NA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
				S.19 Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan	Persentase Peningkatan Wisman dan Wisnus	20,11%	20%	20%	25%	30%	35%	40%	
					Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	NA	10%	15%	15%	20%	25%	30%	



BAB VI: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.



Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan proses *consecutive* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternative strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternative tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktifitas FGD, *scoring*, analisis *balanced scorecard*. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran srategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan ekternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)	
1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Meningkat 2. Persentase rumah tinggal bersanitasi meningkat 3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk meningkat 4. Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik Meningkat 5. Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah Meningkat 6. Prosentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani meningkat 7. Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan Meningkat 8. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 – 2015 Meningkat 9. Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kab. Kotawaringin Barat Meningkat 10. Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Meningkat 11. Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan Meningkat 12. Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan Meningkat 13. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Kontribusi Sektor Ketenagalistrikan Meningkat 14. Cakupan bina kelompok pengrajin (Kelompok Meningkat 15. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) Meningkat 16. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Rasio Elektrifikasi Meningkat 17. IPM kabupaten Kotawaringin Barat Meningkat 18. PDRB Harga Konstan, Harga Berlaku dan Perkapita Meningkat 19. Angka Partisipasi Murni dan Kasar Meningkat 20. Angka Harapan Lama Sekolah Meningkat 21. Angka Harapan Lama Sekolah	1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Keuangan Daerah. 2. Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3. Nilai akuntabilitas kinerja masih rendah 4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan e-government. 5. belum tersedianya data, informasi sektoral untuk menunjang pemerintahan yang bersih dan efektif dan transparan 6. Belum optimalnya pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil karena terbatasnya SDM, sarana dan prasarana 7. Belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah. 8. Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah 9. Penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata belum terwujud sepenuhnya. 10. Sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). 11. Belum semua sekolah yang berada di pedesaan dilengkapi dengan Rumah Dinas Guru. 12. Belum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan standar. 13. Belum semua puskesmas terakreditasi. 14. Belum terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sesuai standar. 15. Sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Rumah Sakit Sultan Imanuddin belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional. 16. Kurangnya pengawasan perlindungan lahan pertanian 17. Belum adanya pemetaan ulang terhadap alih fungsi lahan pertanian 18. minimnya pengeolaan agribisnis usaha pertanian 19. Rendahnya peranserta Kelompok Pengawas Masyarakat. 20. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya. 21. Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai 22. Belum optimalnya pembinaan dan sinkronisasi kegiatan kepemudaan 23. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olah raga dan atlit berprestasi 24. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik pemerintah 25. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi serta bahasa daerah 26. Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten. 27. Belum berkembangnya industri kecil/ industri rumah tangga. 28. Belum berkembangnya sektor industri hilir. 29. Keterbatasan dukungan infrastruktur 30. Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang. 31. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional. 32. Belum optimalnya peran daerah dalam perlindungan dunia usaha 33. Masih rendahnya cakupan pelayanan irigasi. 34. Kurangnya pemahaman petani tentang pentingnya penggunaan benih/ bibit yang unggul 35. Belum tersedianya peta dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan perkebunan	36. Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditi kelapa sawit rakyat 37. Belum tersedianya informasi pasar produk perkebunan 38. Masih rendahnya SDM petani dalam penguasan teknologi budidaya perkebunan 39. Kurangnya budidaya jenis ikan lokal seperti Haruan, Papuyu, Baung dll. 40. Kurangnya teknologi pengolahan hasil perikanan 41. Kurang terwujudnya pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan 42. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tidak optimal 43. Kemampuan kelompok tani masih rendah 44. Rendahnya peran serta Badan Pengawas Koperasi. 45. Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM 46. Penggalian pendapatan asli daerah belum didasarkan pada data potensi daerah. 47. Pengelolaan pendapatan belum berbasis teknologi informasi. 48. Belum adanya tatakelola pembinaan dan pengawasan BUMD 49. Target PAD selama 4 th tidak tercapai 50. Belum semua desa terhubung akses jalan darat. 51. Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik. 52. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota. 53. Belum semua masyarakat terlayani air bersih. 54. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat 55. Kurangnya Informasi tentang penataan ruang 56. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman. 57. Masih tingginya angka backlog 58. Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB 59. Kurangnya penguasaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan. 60. Masih belum optimalnya koordinasi pengelolaan pertanahan. 61. Belum tersedia angkutan dalam kota. 62. Belum terkelolanya angkutan umum ke Ibukota Kecamatan. 63. Ketersediaan area parkir belum memadai 64. Study perencanaan perhubungan belum lengkap 65. Masih rendahnya kewaspadaan menghadapi ancaman bencana. 66. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup. 67. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan. 68. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau perkotaan. 69. Kurang tersedianya data dan informasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup 70. Kurangnya sosialisasi desa siaga bencana 71. Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. 72. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Kotawaringin Barat. 73. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata. 74. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata. 75. Belum berkembangnya ekonomi kreatif berbasis pariwisata.
OPPORTUNITY (PELUANG)	**THREAT (ANCAMAN)**	
1. Jumlah penduduk produktif meningkat 2. Masih banyaknya lahan tidur (belum dimanfaatkan) 3. Masuk Kawasan Strategis Nasional Pariwisata 4. Potensi Ekowisata Besar 5. Produktivitas Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat Meningkat 6. Potensi Komoditas Kelapa Sawit dan Karet Baik 7. Potensi Komoditas Ayam Buras, Udang Putih dan Ikan Lais Baik 8. Sektor pertanian dan Industri Pengolahan menguat	1. Masih adanya anak putus sekolah. 2. APK PAUD rendah (rata2 30,03%) 3. Rata2 lama sekolah rendah (8,05 th) 4. Masih kurangnya minat baca masyarakat. 5. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. 6. Masih adanya balita gizi buruk. 7. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal 8. Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global 9. Masih tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok 10. Pengembangan kawasan pertanian terkendala oleh status kawasan hutan. 11. Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP). 12. Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian (Alsintan) 13. Ancaman penyakit reproduksi dan penyakit menular ternak cukup tinggi 14. Basis populasi induk (akseptor) masih rendah; 15. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian 16. Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) 17. Ketergantungan produk hortikultura dari luar darah 18. Hasil Produksi Tanaman Pangan belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, sehingga mempengaruhi kondisi ketahanan pangan daerah 19. Masih bayak kelompok yang belum terdaptar/berbadan hukum 20. Tingginya konsumsi beras perkapita. 21. Rendahnya konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan. 22. Rendahnya Keragaman Pangan Masyarakat (Pola Harapan Pangan rendah) 23. Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha. 24. Kurangnya peran serta Investor dalam pembangunan. 25. Jumlah penduduk dan rata-rata pertumbuhan penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Meningkat	

Gambar 6. 1: Pemetaan Isu-Isu Sektoral Berdasarkan 4 Kuadran SWOT

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Kotawaringin Barat. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang "membumi" dan benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

S - O	W - O
Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep *Green Economy.*	Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan Yang Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-governance) Dan Reformasi Birokrasi. Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang Dengan Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dasar Dan Sarana Prasarana Penunjang Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan Antar Daerah.
S - T	**W - T**
Membangun Generasi Muda Berkualitas Dan Dinamis Melalui Komitmen Afirmasi Terhadap Akses Pendidikan Dan Media Pembelajaran Lainnya Yang Berorientasi Pada Kreatifitas Pengelolaan Potensi Lokal.	Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Pengelolaan Even Kepariwisataan Dan Penguatan Modal Sosial Yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan Dan Berbudaya.

Gambar 6. 2: Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2017-2022

Strategi S-O jika merujuk pada pendapat Kearns (1992) merupakan strategi yang mengupayakan pengambil kebijakan untuk mengambil sikap strategis atas segala keunggulan dan *bargaining* yang dimiliki. Kearns menyebutkan interaksi ini dengan label *comparative advantage*. Dengan demikian, tindakan strategis yang diambil sebagai strategi untuk keunggulan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

"Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep Green Economy".

Penciptaan ekonomi mandiri merupakan upaya mewujudkan daya dan kemampuan diri untuk dapat membangun dan mengelola perekonomian daerah sendiri tanpa bergantung dengan pihak manapun. Sedangkan optimalisasi pada strategi ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sektor unggulan di Kotawaringin Barat. Berdasarkan pada analisis data capaian bab dua, terlihat bahwa sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian dalam arti luas, energi dan bahkan sektor UMKM dan organisasi kepemudaan mengalami peningkatan yang konsisten. Hal ini sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 7,3% pada tahun 2015. Angka tersebut bahkan berada di atas provinsi dan nasional. Meskipun tren peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, capaian tersebut merupakan sinyal positif bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami progress. Namun perlu diberikan catatan bahwa belum sepenuhnya sektor-sektor potensial tersebut terkelola secara maksimal. Padahal, asset alam Kotawaringin Barat sangat besar, dan IPM Kotawaringin Barat juga relative baik karena meningkat sebesar 2.07% sejak tahun 2011 - 2015.

Sektor prioritas seperti Pertanian dalam arti luas dan Industri Pengolahan sampai saat ini masih mendominasi kontribusi perolehan PDRB.

Kabupaten Kotawaringin Barat sangat berpotensi untuk dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi sampai dengan 7.5%, langkah strategisnya dengan memaksimalkan pengelolaan pertanian dan industri pengolahan secara optimal. Hasil pertanian dalam arti luas seperti kebun sawit, peternakan sapi dan bahkan ikan kedepannya akan dikelola secara mandiri sehingga gairah industri pengolahan Kotawaringin Barat akan semakin besar. Dengan demiikian, ada interaksi kausalitas antara pertanian dalam arti luas dengan industri pengolahan, oleh karena itu, langkah yang diambil terhadap kedua sektor tersebut harus bersifat simultan sehingga impact positif seperti penurunan TPT, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan kesejahteraan dapat dicapai dengan maksimal. Melalui pengelolaan yang optimal, memperhatikan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan, sangat mungkin kemandirian pertumbuhhan ekonomi Kotawaringin Barat dapat secara akseleratif meningkat pada akhir periode RPJMD ini. Perlu diperhatikan pula, dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor tersebut, pemerintah akan memberdayakan BUMD dan BUMDes sebagai garda terdepan sebagai kendaraan utama peningkatan tersebut.

Strategi S-T mengupayakan Kotawaringin Barat semaksimal mungkin untuk dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan menekan sekecil mungkin potensi ancaman yang beresiko terjadi. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Pada strategi S-T ini, pemerintah menetapkan strategi yang berbunyi

"Membangun Generasi Muda Berkualitas Dan Dinamis Melalui Komitmen Afirmasi Terhadap Akses Pendidikan Dan Media Pembelajaran Lainnya Yang Berorientasi Pada Kreatifitas Pengelolaan Potensi Lokal".

Ketetapan strategi tersebut merupakan respon atas hasil identifikasi kekuatan dimana kualitas pembangunan manusia di Kotawaringin Barat telah baik, disaat yang sama pemerintah dihadapkan dengan beragam ancaman mulai dari aspek budaya, demografi dan sektor unggulan pemerintah seperti penerapan teknologi pertanian, perikanan, perkebunan dan sejenisnya. Melalui setrategi ini diharapkan Kotawaringin Barat memiliki generasi yang siap dan berkualitas untuk berkontribusi membangun Kotawaringin Barat sesuai dengan potensi lokalitas Kotawaringin Barat. Membangun generasi yang handal ini sejalan dengan concern Presiden dalam RPJMN dengan serius menaruh perhatian kepada anak.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat investment dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Mengisi, mengadakan dan bahkan

menambah asset tertentu untuk mengatasi kelemahan. Kedua, jika tidak memungkinkan untuk melakukan investasi karena keterbatasan jangkauan finansial atau sejenisnya yang memberatkan upaya investas, maka diperlukan upaya divestasi. Pada sektor bisnis umum dikenal istilah divestasi sebagai upaya pelepasan asset atau dengan kata lain menjual asset. Namun pada sektor public, istilah divestasi tidak seekstrim itu, pasalnya upaya divestasi sebenarnya lebih kepada meminjamkan asset daerah untuk dikelola pihak lain yang keuntungannya tetap diutamakan kepada daerah seperti melalui pajak, retribusi atau penyerapan tenaga kerja. Skenario terbaik adalah bagaimana Kabupaten Kotawaringin Barat bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing.

Terdapat dua strategi yang muncul atas interaksi kelemahan dan peluang yang ada di Kotawaringin Barat. Strategi W-O *pertama* yaitu
"Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan Yang Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-Governance) Dan Reformasi Birokrasi"

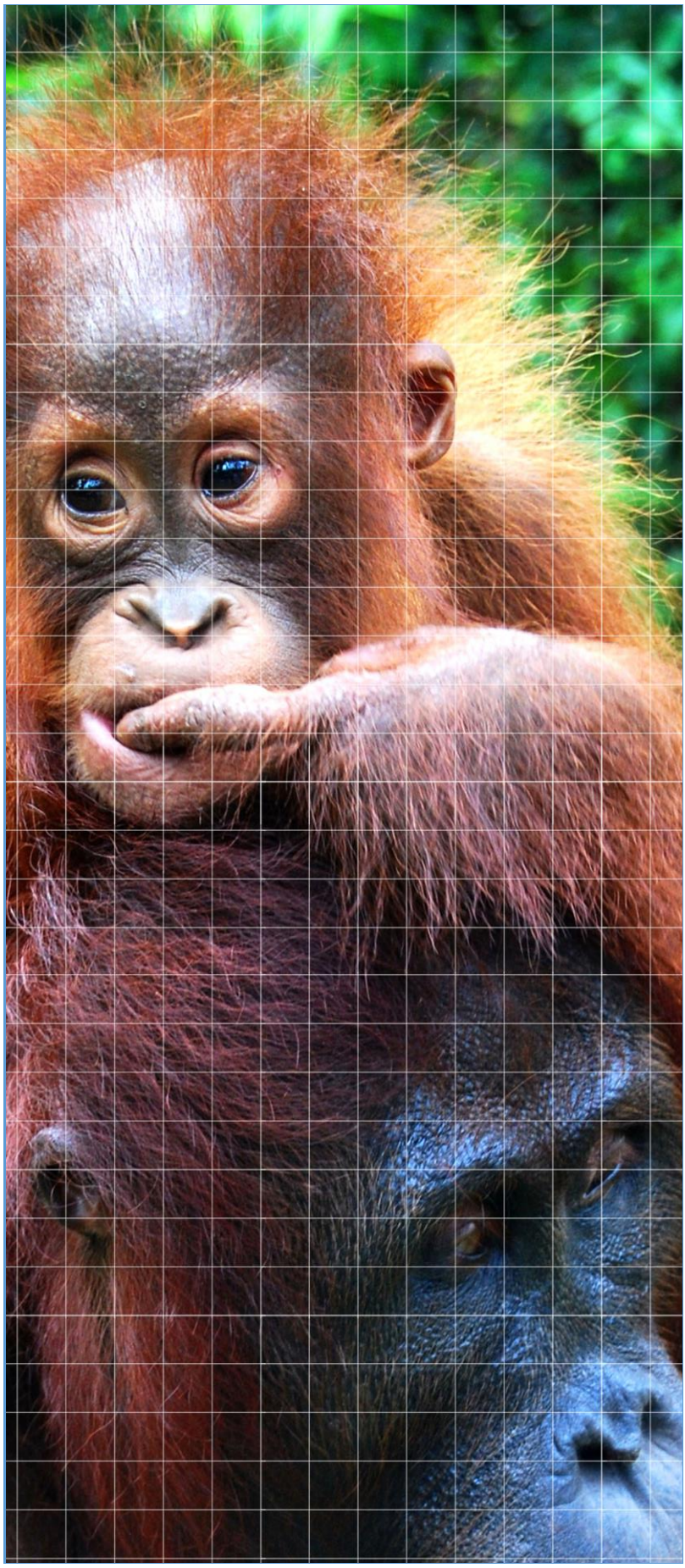
Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategi*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Berdasarkan data yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara teknis belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menghadapi tantangan administrasi pengelolaan daerah saat ini. Pada saat yang sama, begitu banyak peluang potensial yang jika dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat untuk Kotawaringin. Sehingga melalui strategi ini, diharapkan kecakapan pemerintah daerah dalam mengoperasikan teknologi informasi meningkat dan mampu menciptakan inovasi yang pada akhirnya dapat menggiring pada optimalisasi reformasi birokrasi.

Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertangungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan.

Strategi W-O *kedua* yaitu "Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang Dengan Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dasar Dan Sarana Prasarana Penunjang

Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan Antar Daerah". Strategi tersebut menekankan agenda pembangunan pada pemerataan dimana aksessibilitas dan infrastruktur berasas waterfront city sebagai instrument utama perwujudan pemerataan tersebut. Pada dasarnya pemerataan didefinisikan sebagai sebuah upaya pembangunan berkeadilan yang merata sehingga ketimpangan pembangunan antara daerah satu dengan lainnya rendah atau bahkan tidak ada. Sasaran pemerataan pembangunan dapat diarahkan kepada beberapa sektor seperti pemerataan pembangunan fisik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi. Pada strategi ini, *leverage point* yang ingin disasar adalah pembangunan fisik dengan harapan dapat mengoptimalkan pembangunan sektor lain.

Aksessibilitas sebagai instrumen pemerataan didasarkan pada temuan lapangan dimana akses jalan belum sepenuhnya melayani wilayah yang ada di Kotawaringin Barat. Artinya, akses antar ruang di Kotawaringin Barat belum begitu baik. Bahkan, ditemukan pula bahwa akses darat dari desa ke kota belum tersedia. Hal ini tentu menghambat proses pembangunan. Tidak hanya itu, arus hulu-hilir ekonomi tidak akan berjalan optimal, sehingga masyarakat pedesaan akan mendapatkan hambatan dalam memasarkan produk mereka. Peningkatan aksessibilitas *out-in* juga perlu untuk diperhatikan. Sarana seperti Bandara dan Pelabuhan dan prasarananya yang memadai dapat sangat akseleratif meningkatkan perekonomian. Disamping itu, aksesibilitas terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga belum optimal. Meskipun perolehan IPM meningkat, dengan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar yang tidak segera di sempurnakan, maka tidak menutup kemungkinan IPM akan mengalami penurunan. Melalui penguatan aksessibilitas ini, diharapkan sektor potensial seperti pariwisata dapat terbangun dengan baik. Seperti diketahui, status Kotawaringin Barat masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Pariwisata serta memiliki cagar alam. Merujuk pada konseptual teori pembangunan ekowisata terdapat 5 hal utama, salah satunya adalah aksessibilitas.



Selanjutnya, modernitas infrastruktur sebagai instrument pemerataan. Hal ini sebenarnya dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih modern dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Seperti misalnya infrstruktur pelayanan dasar

pendidikan dan kesehatan, pusat perekonomian, ruang public, kawasan ruang terbuka hijau dan sejenisnya. Infrastruktur modern ini sebenarnya merupakan pendukung optimalisasi pembangunan aksesibilitas. Sebagaimana aksessibilitas, modernitas infrastruktur juga dapat membantu mengoptimalkan 5 hal utama pembangunan pariwisata yaitu utamanya amenitas.Perlu digaris-bawahi bahwa konsep dasar yang melatarbelakangi pembangunan aksessiblitas antar ruang dan modernitas infrastruktur di Kotawaringin Barat tersebut tersebut adalah konsep *waterfront city.* Konsep ini pertamakali dikenalkan di Amerika pada tahun 1970an oleh James Rouse sebagai upaya melepaskan wilayah bantaran sungai di Kota Baltimore dari kelumpuhan ekonomi karena kekumuhan yang parah. Dari pemikiran *urban designer* Amerika ini lah mulai ramai diperdengarkan kosep *Waterfront City.* Dalam perancangannya perlu ada arah yang jelas dari pembangunan *waterfront city* ini, missal diarahkan untuk pariwisata, atau perekonomian atau mungkin pemukiman.
Terakhir yaitu strategi W-T. Strategi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *demage control,* yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Dengan demikian, strategi yang ditetapkan yaitu "Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Pengelolaan Even Kepariwisataan Dan Penguatan Modal Sosial Yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan Dan Berbudaya". Salah satu opsi upaya yang dapat dilakukan diantaranya Melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) dan pengarusutamaan budaya dengan membentuk kelompok-kelompok penggerak sosial berbasis pemberdayaan yang mampu mempertahankan nilai lokalitas. Upaya ini diiharapkan mampu menjaga stabilitas sosial, pencegahan pelanggaran hukum dan menjaga kondusifitas pembangunan, serta mewujudkan kesadaran hidup berkeragaman yang tentram.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan "St"):

St 1. Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan yang Integratif Dan Inovatif melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-Governance) Dan Reformasi Birokrasi.
St 2. Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi Unggulan Lainnya dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep *Green Economy.*
St 3. Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal.

St 4. Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang dengan konsep Waterfront City yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan kerjasama dengan swasta dan antar daerah.

St 5. Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.



Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Tabel 6. 1: Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Strategi

Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Misi I "Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"			
Tujuan I. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)	Sasaran 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini atas audit BPK	Strategi 1: Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan yang Integratif dan Inovatif melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-Governance) Dan Reformasi Birokrasi.
	Sasaran 2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan aparatur	• Nilai SAKIP Kabupaten • Indeks Profesionalitas Aparatur • Maturitas SPIP	
	Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	• Persentase PD yang menerapkan E-Gov • Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik	
	Sasaran 4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran,	

Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
		dan pelaporan yang benar dan tepat waktu.	
Misi II "Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga"			
Tujuan II. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Sasaran 5. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	• Angka Harapan Lama Sekolah • Rata-Rata Lama Sekolah • Indeks Minat Baca	Strategi 2: Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal.
	Sasaran 6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Angka Harapan Hidup • Prosentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	
	Sasaran 7. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	Prosentase peningkatan peraihan Prestasi Pemuda	
Misi III "Misi 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup"			
Tujuan III. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Sasaran.8 Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	• Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan • Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan • Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,	Strategi 3: Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi Unggulan Lainnya dengan

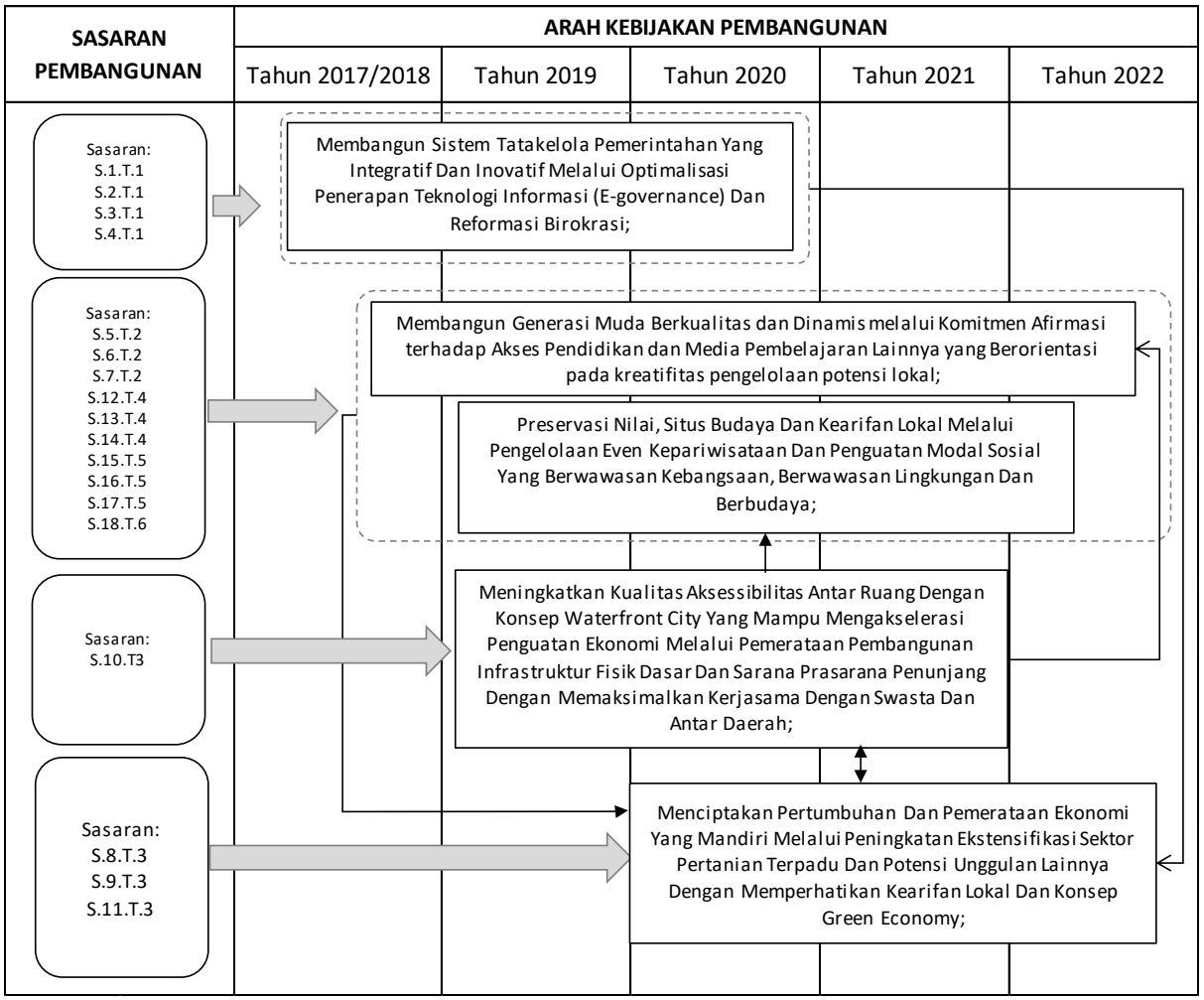
Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
		Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) • Persentase Koperasi Usaha Mikro yang berkualitas • Persentase pertumbuhan wirausaha baru	memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep Green Economy
	Sasaran.9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	• Persentase Peretumbuhan nilai PMA dan PMDN • Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	
	Sasaran.11 Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana	• Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara • Indeks Tutupan Hutan • Indeks Resiko Bencana	

Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
	Sasaran.10 Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Indeks Williamson	Strategi 4: Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang dengan konsep Waterfront City yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan kerjasama dengan swasta dan antar daerah.
Misi IV Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat			
Tujuan IV. Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis	Sasaran.12 Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	Strategi 5: Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya
	Sasaran 13. Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri	
	Sasaran 14. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kabupaten layak anak	• Indeks Pemberdayaan Gender • Kategori Kabupaten Layak Anak	
Misi V "Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis"			

Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Tujuan V Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan dengan penerapan nilai-niali keagamaan	Sasaran 15. Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	Strategi 5: Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya.
	Sasaran 16. Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	
	Sasaran 17. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	
Misi VI "Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata"			
Tujuan VI Peningkatan Pariwisata Daerah	Sasaran 18. Meningkatnya Nilai Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata	• Persentase Destinasi Wisata Khas Daerah Terkelola • Persentase Jenis Produk Lokal Kepariwisataan	Strategi 5: Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya.
	Sasaran 19. Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan	• Persentase Peningkatan Wisman dan Wisnus • Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Gambar berikut ini adalah strategi pelaksanaan arah kebijakan:



Gambar 6. 3: Arah Kebijakan Pembangunan

Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

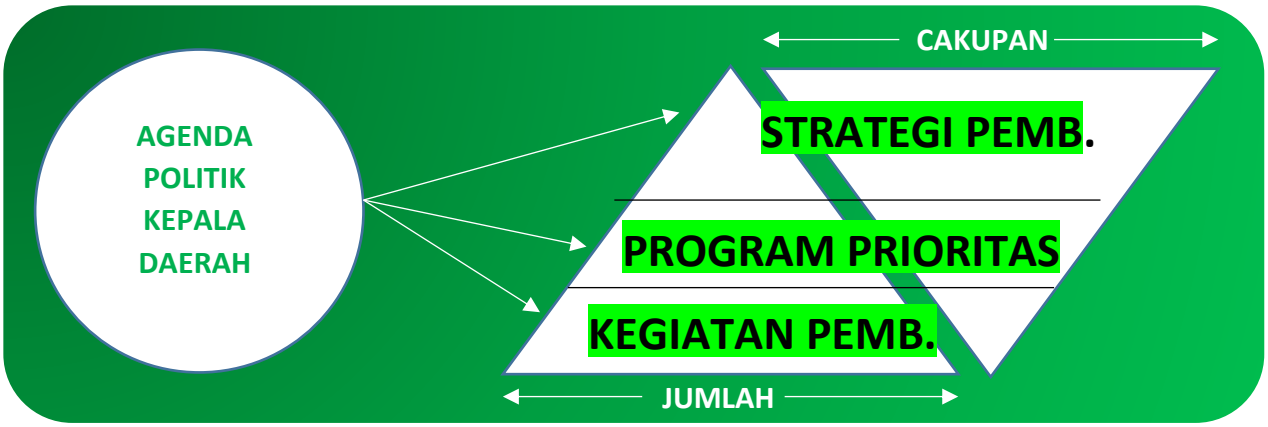
Tabel 6. 2: Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD tahun 2017-2022

TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Menciptakan Kondisi Aman Guna Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Menuju Kotawaringin Barat yang Maju.	Pemantapan Infrastruktur untuk Mengurangi Disparitas Antar Wilayah di Kotawaringin Barat	Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kulitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah	Ekstensivikasi Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam Arti Luas, Industri Pengolahan serta Kepariwisataan Daerah melalui Investasi, Divestasi (*Public Private Partnership,* Kerjasama Antar Daerah) dan Penguatan *Local Participation* khususnya di tingkat Desa	Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisataan terhadap Pendapatan Daerah	Stabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah disertai dengan Penurunan Kesenjangan dan Peningkatan IPM Kotawarngin Barat



6.3. Program Pembangunan Daerah

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioirtas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Permen 13 Tahun 2006, atau kedalam Strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 6. 4: Ilustrasi Transformasi agenda Politik kepala daerah

Berdasarkan kepada keterangan yang disebutkan diatas, beserta ilustrasi yang digambarkan diatas, maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji politik agenda pembangunan Bupati Terpilih. Berikut pendefinisian agenda politik Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat:

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
1	Pembuatan regulasi dalam penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah;	Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah
2	Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan;	
3	Peningkatan manajemen dalam reformai birokrasi, melakukan revitalisasi dan restrukturisasi dengan prinsif efektif, efisien, kompetensi dan profesionalis;	Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian
4	Monitoring dan evaluasi kinerja ASN dengan berpedoman pada azass-azas umum pemerintahan yang baik;	
5	Penegakan displin ASN sesuai sumpah jabatan, memiliki nilai dasar, taat etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN;	
6	Program yustisia kependudukan;	Program Penataan Administrasi Kependudukan
7	Seluruh penduduk mempunyai E-KTP, dan masyarakat yang berdomisili wajib memiliki KTP Kab. Kotawaringin Barat;	Program Penataan Administrasi Kependudukan
8	Penyuluhan tentang pentingnya catatan sipil dan UU tentang Kependudukan;	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan
9	Validasi Data Kependudukan/Pendataan faktual penduduk Kotawaringin Barat;	Program Pendataan dan Informasi Kependudukan
10	Seluruh masyarakat memiliki akte lahir, yang menikah memiliki akte pernikahan, dan yang meninggal dunia, keluarganya mengurus akte kematian;	Program Pelayanan Pencatatan Sipil
11	Pendampingan didalam pembuatan Peraturan Desa dan Penyusunan APBDesa	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12	Penyuluhan dan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa	

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
13	Bantuan sarana dan prasaranan jaringan internet hingga kepedesaan;	Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
14	Keterbukaan informasi publik dan kemudahan mendapatkan informasi;	Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah
15	Pembuatan data stastitik yang akurat dan up to date (kekinian);	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
16	Optimalisasi Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH);	
17	Pelayanan segala bentuk perizinan dengan mudah, cepat dan murah;	Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan
18	Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan Progran Jangka Panjang Pembangunan Nasional sesuai dengan keadaan dan potensi daerah;	Program Penelitian & Perencanaan Pembangunan daerah
19	Merencanakan/membuat program pembangunan (master plan) Kotawaringin Barat dalam Program Jangka Panjang berikutnya;	
20	Merumuskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan skala prioritas sesuai kebutuhan dan urgensinya;	Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah
21	Penyesuaian anggaran dengan skala prioritas, seimbang dan proporsional;	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
22	Pengawasan, tertib anggaran, evaluasi, pelaporan secara periodik dan tepat waktu;	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
23	Mengadakan Lelang Jabatan dan Penempatan dan pengangkatan (promosi jabatan) harus dengan sistem Merit yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar;	Program Pengembangan karir
24	Penerapan ASN melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada Azas-azas umum penyelenggaraan negara;	
25	Penegakan displin ASN dengan memberikan penghargaan (award) atas prestasi dan kinerja baiknya, pemberian hukuman (punishment) atas pelanggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Program Pembinaan Aparatur
26	Memberikan pelatihan manajerial untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK;	
27	Mengadakan pendidikan dan pelatihan pimpinan sesuai dengan jabatan;	Program Pendidikan kedinasan
28	Pengadaan fasilitas pendukung untuk optimalisasi tugas dan fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat;	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
29	Meningkatkan fungsi pengawasan menjaga kebocoran anggaran;	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
30	Memberikan bimbingan penggunaan anggaran dan monitoring berkala;	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
31	Peningkatan evaluasi dan pelaporan yang akurat untuk predikat WTP;	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
32	Melakukan tindakan pengembalian dana ke kas daerah bagi temuan;	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
33	Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah;	Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
34	Penggunaan Dana Desa sesuai APBDes yang telah dibuat serta pertanggung jawaban sesuai pedoman/petunjuk teknisnya;	
35	Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan
36	Meningkatkan status guru honor sekolah menjadi honor daerah dengan syarat dan ketentuan , serta pemberian insentif yang loayak bagi guru honor dan kontrak	
37	Memberikan insentif untuk guru PAUD/TK	
38	Peningkatan efisiensi, efektifitas, rotasi dan pemerataan penempatan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal	Program manajemen pelayanan pendidikan
39	Meningkatkan manajerial sistem pendidikan secara profesional dengan implementasi kurikulum nasional dengan muatan lokal	
40	Peningkatan sarana dan prasrana pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan sesuai perkembangan teknologi	
41	Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi, bantuan bagi murid yang kurang mampu, penyaluran bos tepat waktu dan sasaran penggunanya	
42	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan	
43	Peningkatan tertib administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dengan mempertimbangkan hal-hal khusus dan luar biasa	
44	Memberikan insentif pada PAUD	Program pendidikan anak usia dini (PAUD)
45	Pakaian gratis bagi siswa baru di tingkat SD dan SMP yang terdiri seragam merah-putih/biru putih, seragam pramuka, seragam batik dan sepatu	Program Pendidikan Sekolah Dasar
46	Pakaian gratis bagi siswa baru di tingkat SD dan SMP yang terdiri seragam merah-putih/biru putih, seragam pramuka, seragam batik dan sepatu	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
47	Peningkatan sarana dan prasarana yang baik dan mudah diakses oleh masyarakat, secara khusus pengadaan rumah dinas untuk personil polindes	Program Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan
48	Revitalisasi fungsi puskesmas dan perubahan status Puskesmas Kumai dan Kotawaringin Lama menjadi Rumah Sakit Rakyat	
49	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
50	Peningkatan layanan kesehatan siaga (on Call) di Tingkat Desa	
51	Peningkatan pelayanan dokter dan kesehatan yang profesional teristimewa kepada warga miskin dan penyandang disabilitas	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
52	Motivasi dan penyuuhan untuk peningkatan kesadaran dan perilaku hidup sehat	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
53	Peningkatan Kelas rumah sakit Semanggang menjadi RS Tipe B Pratama	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
54	Mengadakan Event/turnamen dari berbagai cabang olahraga	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
55	Pemberian Insentif bagi pengurus organisasi Cabang-Cabang olah raga	
56	Memnerikan insentif bagi pelatih yang sudah bersertifikat serta pemberian award kepada juara-juara baik ditingkat daerah, Nasional, dan Internasional	
57	Melengkapi sarana prasarana olah raga yang representatif, sebagai langkah awal untuk pelaksanaan PORDA provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
58	Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Sport Center Pangkalan Bun	
59	Pembinaan dan pemberdayaan OKP/Karang Taruna dan Ikatan Komunitas untuk menciptakan lapangan kerja khususnya di Desa dan kelurahan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
60	Pelatihan Pemuda sebagai ujung tombak pembangunan di desa	
61	Memberdayakan OKP sebagai sosial kontrol di pedesaan	
62	Pembinaan kepemudaan sebagai generasi penerus bangsa dan negara	
63	Penyuluh tentang pengaruh negatif NAPZA/Narkoba dan perilaku sex bebas	
64	Kerjasama dengan BNN Kabupaten dalam pemberantasan narkoba	
65	Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi untuk pemenuhan sembilan bahan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
66	Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu dari desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
67	Pembangunan jalan lingkar luar kabupaten;	
68	Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama;	
69	Pembangunan Jembatan penghubung antar desa dengan kecamatan yang melalui sungai;	
70	Pembukaan jalan kecamatan Arut Utara ke Kabupaten; '	
71	Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
72	Pembangunan Water Front City;	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
73	Pelaksanaan pembangunan dengan prioritas, merata, seimbang dan tepat guna;	Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang
74	Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai lagi peruntukannya;	Program pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman
75	Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;	
76	Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;	
77	Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;	
78	Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;	Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
79	Penyiapan Konservasi Air dan penyedian air baku;	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
80	Penyediaan kecukupan air bersih yang hygenis;	
81	Pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang komprehensif untuk antisipasi banjir dan kekeringan;	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
82	Kontrol dan pendataan pemanfaatan air bawah tanah;	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
83	Relokasi pemukiman warga yang rawan banjir dan bencana lainnya;	Program pengendalian banjir
84	Pembangunan jalan lingkungan dan drainase untuk terciptanya pemukiman asri dan sehat;	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
85	Pembuatan saranan dan prasarana MCK dan lainnya, khususnya didaerah padat penduduk dan pinggiran sungai;	
86	Program bedah rumah dan atau layak huni bagi masyarakat tidak mampu;	
87	Kecukupan ketersedian energi dan penerangan jalan;	
88	Pengendalian sampah dengan partsipasi dan swadaya masyarakat sekitar;	
89	Pembuatan regulasi perizinan dan alih fungsi dan pelayanan yang prima;	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
90	Pengawasan terhadap pengembang property dan menjadikannya sebagai mitra;	
91	Memaksimalkan fungsi terminal bus umum, angkot dan truk pengangkut barang;	Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
92	Pembangunan terminal barang di Batu Belaman;	
93	Penataan jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta keamanan;	
94	Sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan pihak otoritas dalam penggunaan dan peningkatan fungsi Bandara dan Pelabuhan;	
95	Penataan Master plan Bandara Internasional;	Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan
96	Penataan angkutan perkotaan dan pedesaan serta kelayakan kendaraan;	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
97	Pengadaan sarana dan prasarana transportasi;	

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
98	Pengadaan jembatan timbang untuk penggunaan jalan sesuai kelasnya;	
99	Pembangunan dermaga ferry penyeberangan Sei Kapitan-Kumai seberang dan Kumai seberang-Pangkalan Banteng;	Pembangunan dermaga dan Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana/ fasilitas ASDP
100	Perencanaan pemindahan pelabuhan laut dalam Pangkalan Bun;	
101	Menjaga ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup berpedoman pada RTRW Daerah;	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
102	Pemetaan dan pengawasan Sumber Daya Alam yang berpotensi diexplorasi dan exploitasi;	
103	Menjaga konsistensi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah disektor perkebunan, industi maupun pertambangan;	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
104	Mengawasi, melakukan perbaikan dan proteksi kerusakan lingkungan, serta membangun lingkungan hidup yang produktif;	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
105	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;	Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
106	Mempertahankan status Adipura;	
107	Membuat program tempat terbuka hijau (RTH) didaerah perkotaan dan padat penduduk;	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
108	Penataan Taman agar kota lebih cantik, indah dan asri;	
109	Pemeriksaan secara periodik pencemaran lingkungan;	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
110	Pemberian izin/regulasi AMDAL secara cermat dan selektif;	Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan lingkungan hidup
111	Melakukan penindakan terhadap pelaku pengerusakan lingkungan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku;	
112	Pendataan dan penataan usaha Pertambangan Rakyat	Program penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
113	Melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana, membuat prediksi dan pencegahan dini;	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
114	Pengadan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi daerah prioritas pencegahan Karhutla;	
115	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan potensi bencana dan cara penanggulangan serta kerja sama dalam mengantisipasi;	
116	Pengalokasian dana tanggap darurat, melakukan tindakan preventif terhadap potensi bencana, melakukan tindakan repressif serta proteksi yang bersifat konservatif paska kejadian luar biasa KLB);	Program Tanggap Darurat
117	Penambahan personil yang terlatih dan tanggap darurat dalam antisipasi dan mengatasi bencana;	
118	Pelayanan segala bentuk perizinan dengan mudah, cepat dan murah;	Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan
119	Pemetaan potensi dan kawasan ekonomi untuk. peningkatan investasi;	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
120	Mendorong para Investor untuk penyediaan sumber energi;	
121	Sosialisasi potensi daerah dan SDA upaya mengandeng para investor;	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
122	Pembuatan regulasi dan fasilitas yang saling menguntungkan;	Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal
123	Peningkatan peran dan fungsi Koperasi sebagai soko guru perekonomian, dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Pengembangan Usaha Koperasi
124	Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha disetiap Desa/Kelurahan ditargetkan 100 kelompok binaan;	Program Penumbuhan Wirausaha Baru
125	Pembinaan home industri dengan pemberian bantuan peralatan seperti usaha pembuatan batu bata, batako, kerajian meubel, rotan dan anyam-anyaman, aksesoris dan batu mulia serta usaha makanan ringan;	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
126	Pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga ringan;	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
127	Mengadakan kerja sama dengan korporasi besar sebagai bina mitra untuk Koperasi dan UKM;	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
128	Meningkatkan manajemen promosi ditingkat daerah, nasional dan internasional;	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
129	Mengoptimalkan fungsi pasar untuk transaksi yang aman dan nyaman dan revitalisasi pasar tradisional untuk pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi;	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
130	Menjalin kerjasama dengan para Distributor untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan sembilan bahan pokok;	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan
131	Mengarahkan pihak perusahaan untuk transaksi jual-beli di pasar terdekat;	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
132	Pembangunan pasar modern terintegrasi sebagai pusat grosir;	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
133	Pemberdayaan dan penguatan partisipasi perusahaan/korporasi ikut membangun perekonomian masyarakat (CSR= Corporate Social Responsibility);	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
134	Merencanakan kawasan terpadu untuk usaha industri, hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan dan hasil peternakan;	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri
135	Optimalisasi Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber PAD;	Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah
136	Pendirian perusahaan daerah untuk promosi dan menampung over produk hasil-hasil home industri, kelompok usaha bersama dan UKM yang khas, layak dan punya nilai jual, yang berbahan dasar dari hasil daerah;	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
137	Target PAD pada medio pertama sebesar Rp. 250 Miliar, dan Medio kedua diatas Rp. 250 Miliar;	Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah
138	Target APBD yang progressif, pencapaian kisaran sebesar RP.2,5 Triliun;	Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
139	Penentuan NJOP Bumi dan Bangunan sesuai klasifikasi tanah, peruntukan dan kemajuan wilayah secara proporsional;	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
140	Sosialisasi kepada masyarakat untuk taat bayar pajak dan retribusi;	Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat
	Peningkatan mutu pelayanan publik serta tertib pemungutan uang;	Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat
141	Inventarisasi potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah;	Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
142	Melakukan upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang sah;	Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
143	Meningkatkan budidaya peternakan dengan memberi bantuan kepada kelompok usaha bersama;	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
144	Mengadakan diversifikasi ternak yang berpotensi dikembang biakkan;	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
145	Vaksinasi ternak peliharaan masyarakat;	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
146	Mengadakan pelatihan pengembangbiakan ternak secara teknologi;	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
147	Pengadaan benih ternak dan bantuan untuk pegolahan pakan ternak;	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
148	Optimalisasi Pengembangan program integrasi Sawit-Sapi	Program Peningkatan Agribisnis Peternakan
149	Optimalisasi/ Target pencetakan persawahan seluas 27.000 HA;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
150	Mensinergikan program dengan pihak TNI dalam pembukaan dan pengolahan lahan pertanian;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
151	Tahun pertama panen raya padi seluas 200 HA;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
152	Untuk Swasembada pangan, mengoptimalkan penanaman padi 4000 s/d 12.000 HA;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
153	Budidaya pola terpadu tanaman hortikultura dan pengembangan tanaman organik yang merupakan komoditas unggulan, alternatif dan tanaman khas daerah;	Program Peningkatan Produksi Hortikultura
154	Budidaya jagung oleh masyarakat untuk konsumsi sendiri dan kebutuhan ternak;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
155	Penguatan pendampingan, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani dipedesaan; Pembinaan perkebunan inti dan plasma serta perkebunan rakyat;	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
156	Pengadaan peralatan pertanian dan mekanisasi, ketersedian bibit unggul yang tahan hama dan penyakit;	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
157	Menjaga ketersedian bibit/benih, pupuk dan racun;	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
158	Mendatangkan tenaga ahli dan profesional dalam mengolah lahan pertanian;	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
159	Meningkatkan swasembada beras dan diversifikasi pangan menuju ketahanan pangan;	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
160	Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan dalam antisipasi kerawanan pangan;	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
161	Ketersediaan pangan untuk daerah bencana dan daerah paceklik;	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
162	Melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi rawan pangan;	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
163	Pengembangan produk pertanian dalam bentuk home industri untuk persedian;	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
164	Mensosialisasikan fungsi lahan pertanian untuk terciptanya ketahan pangan;	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
165	Mengawasi pengalihan fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lainnya;	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
166	Menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan ketersediaan sewaktu-waktu;	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
167	Mendirikan usaha penampungan atas over produksi pangan;	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
168	Pengadaan benih ikan sebagai stimulans dan peralatan bagi usaha tambak dan keramba ikan;	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
169	Pengadaan bantuan kapal nelayan/kelotok dan mesin untuk kelompok nelayan;	Program Pengembangan Perikanan
170	Pengadaan bantuan net/ alat tangkap ikan dan cold storage;	Program Pengembangan Perikanan
171	Pendataan dan pembinaan bagi kelompok usaha keramba (budidaya ikan air tawar) serta pemberian bantuan benih ikan;	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
172	Mengoptimalkan fungsi Tempat Pelelangan Ikan dan stabilisasi harga;	Program Pengembangan Perikanan
173	Membina pelaku industri UKM dengan bahan dasar ikan agar berdaya saing;	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan
174	Promosi hasil produk unggulan dan khas ke luar daerah;	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan
175	Membangun pabrik es untuk kebutuhan masyarakat dan nelayan dan pedagang;	Program Pengembangan Perikanan
176	Menjaga ketersedian BBM untuk para nelayan;	Program Pengembangan Perikanan
177	Meningkatkan pembinaan mentalitas masyarakat, menciptakan kondisi aman, tentram dan dinamis	Program Pembinaan Kemasyarakatan
178	Meningkatkan jaminan perlindungan bagi masyarkat kurang mampu	(*Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat*)
179	Memberi bimbingan partisipatif dan penumbuhan etos kerja masyarakat;	Program Pembinaan Kemasyarakatan
180	Meningkatkan kerukunan umat dan antar umat dalam kehidupan bergama;	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
181	Memberdayakan peranan lembaga keagamaan dalam pembangunan;	*(Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatan)*
182	Meningkatkan harmonisasi antara agama;	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
184	Bantuan sarana dan prasarana ibadah secara seimbang dan merata serta perayaan hari-hari besar keagamaan;	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
185	Bantuan sosial secara efektif dan tepat guna dan peralatan untuk rukun kematian;	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
186	Pemberian insentif bagi guru-guru informal dan pemuka agama	*(Kegiatan Pemberdayaan Tokoh Agama)*
187	Jaminan Perlindungan dan peningkatan pelayanan serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin/kurang mampu	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINNAN SOSIAL
188	Bantuan/pemberian iuran BPJS bagi seluruh warga miskin/tidak mampu;	*(Kegiatan Pengelolaan Bantuan Kebutuhan Dasar dan Rekomendasi jaminan sosial serta penataan lingkungan bagi Fakir Miskin)*
189	Tanggap dalam mengantisipasi, memberi pertolongan dan bantuan bagi warga yang kena musibah dan bencana alam;	*(Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa bencana Alam)*
190	Meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi warga disabilitas;	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
191	Kanalisasi kegiatan masyarakat yang positif serta membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi, LSM, ORMAS, OKP, Pemerhati Sosial dan lembaga lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam menangani masalah-masalah sosial;	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
192	Mengadakan pelatihan dan pembinaan serta pendampingan bagi penyandang masalah sosial;	*(Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)*
193	Penghapusan dan pemberantasan prostitusi, gelandangan dan pengemis;	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
194	Pembinaan mentalitas dan penumbuhan etos kerja melalui bimbingan partisipatif dan penyelenggaraan kursus keterampilan;	*(Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)*
195	Pemberian bantuan modal usaha dan mengandeng para pengusaha sebagai mitra	*(Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin)*
		(Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin)
196	Meningkatkan peranan perempuan dalam pemerintahan, politik, ekonomi dan pembangunan;	*(Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender)*
197	Pemberdayaan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mandiri dan partisipatif dalam urusan rumah tangga, kesehatan, perbaikan gizi dan perlindungan anak;	*(Kegiatan Pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan)*
198	Perlindungan anak dengan memberikan jaminan hak-haknya tanpa diskriminasi;	Program pengembangan Kabupaten Layak Anak
199	Penyuluhan antisipasi terhadap kejahatan seksual pada anak;	Program Peningkatan Perlindungan Anak
200	Membuat proteksi dan langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak akibat KDRT dan kejahatan seksual;	Program Peningkatan Perlindungan Anak
201	Sosialisasi tanggung jawab Negara/Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua atau Wali dalam perlindungan anak;	*(Kegiatan Partisipasi Anak dan Hak Anak, Persentase Forum Anakk Tingkat Desa yang Terbentuk)*
202	Mengadakan perlindungan hukum kepada anak-anak disabilitas yaitu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam interaksinya dan partisipasi dalam masyarakat secara penuh dan efektif;	Program Peningkatan Perlindungan Anak
203	Penghapusan KDRT dan kejahatan pada anak;	Program Peningkatan Perlindungan Anak
204	Penyuluhan tentang kewajaran batas umur untuk nikah dan program KB;	Kegiatan Advokasi, penggerakan dan penyuluhan KB

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
205	Terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, sehat, pintar dan berkwalitas	Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga
206	Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan;	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
207	Pendampingan didalam pembuatan Peraturan Desa dan Penyusunan APBDesa;	*(Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Desa)*
208	Penyuluhan dan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa;	*(Kegiatan Monitoring & Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa)*
209	Memberdayakan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Desa;	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
210	Mengadakan pelatihan dan pembinaan peningkatan ekonomi warga desa;	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa ,UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertingga
211	Pemberian tambahan insentif bagi perangkat desa dan Ketua RW/RT;	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
212	Perekrutan tenaga pendamping di desa;	*(Kegiatan Peningkatan kapasitas pendampingan Desa)*
213	Fasilitator dalam Pilkades dan pemilihan BPD, Tata ruang Desa, Tugas dan fungsi Kepala Desa dan perangkatnya serta BPD;	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
214	Program pengadaan listrik tenaga surya (solar power);	Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
215	Terciptanya lapangan kerja sebanyak 15.000 TK;	Peningkatan Kesempatan Kerja
216	Membuka lapangan kerja baik sektor formal dan maupun informal;	
217	Mengadakan pelatihan kerja berbagai keterampilan yang potensial bagi anak putus sekolah dan lulusan SLTA untuk siap sebagai tenaga kerja terampil di sektor formal dan informal;	*(Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja)*
218	Melatih tenaga kerja bersertifikat dalam berbagai bidang sebanyak 1500 orang;	*(Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja)*
219	Memberi bantuan modal dan peralatan usaha bagi peserta pelatihan dengan bentuk KUBE;	Peningkatan Kesempatan Kerja
220	Membina peserta transmigrasi untuk pengolahan lahan dengan komoditas unggulan dan yang sesuai struktur dan kontur tanahnya;	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
221	Program transmigrasi lokal untuk pengentasan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
222	Optimalisasi Satpol PP dalam pelaksanaan dan pengamanan Perda;	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
223	Peningkatan kekondusifan masyarakat dan bersinergi dengan POLRI dan TNI;	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
224	Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih;	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
225	Pelatihan dan Peningkatan kesiap-siagaan personil dan penambahan insentif;	Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan
226	Penambahan personil dengan status honor daerah dengan honor yang layak sesuai dengan beban kerja	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
227	Pemberian bantuan pembinan untuk Partai Politik yang mempunyai fraksi di DPRD; 0 Pembinaan dan dukungan serta pemberian	Pendidikan politik masyarakat

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
	bantuan untuk ormas-ormas terdaftar; 0 Melakukan pendidikan politik tentang Empat Pilar berbangsa dan bernegara;	
228	Melakukan pembangunan karakter bangsa dengan ajaran TRISAKTI, yaitu : Berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;	Pengembangan wawasan kebangsaan
229	Membudayakan jiwa gotong royong sebagai tanggung jawab bersama membangun daerah dengan prinsip hidup bersama dalam keberagaman sosial (living together in plural society);	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
230	Meningkatkan kerja sama, menjalin komunikasi dan hamonisasi setiap elemen masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
231	Penataan Pangkalan Park dan menggandeng mitra usaha untuk pengelolaan dan pengadaan panggung hiburan dan ajang penampilan minat dan bakat menampilkan kesenian dan budaya lokal maupun daerah lain dalam bingkai keanekaragaman budaya;	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
232	Memperbaiki sarana dan prasarana obyek wisata alam dan religi;	
233	Penggalian daerah wisata yang baru dan berpotensi untuk dijual;	
234	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan kepariwisataan;	
235	Pengadan fasilitas WIFI gratis ditempat rekreasi umum (Bundaran Pancasila dan Pangkalan Bun);	
236	Mengadakan pelayanan prima untuk peningkatan sumber PAD;	
237	Pelestarian situs-situs sejarah;	Program Pengembangan Nilai Budaya
238	Meningkatkan pelestarian budaya daerah lokal dan dan daerah lainnya dalam rangka keberagaman dengan melibatkan elemen masyarakat;	
239	Bantuan alat kesenian dan budaya daerah yang ada untuk pelestarian;	
240	Menjadikan Budaya sebagai alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, penyangga budaya nasional yang dinamis;	
241	Mengadakan Festival Budaya Nusantara dan Karnaval Budaya Nusantara;	
242	Pelestarian cagar budaya dan situs-situs bersejarah;	
243	Penggalian dan pengembangan budaya lokal yang menunjukkan jati diri Kotawaringin Barat (Marunting Batu Aji);	
244	Peningkatan Promosi destinasi wisata yang ada ke tingkat Nasional dan Manca Negara dan mengadakan event yang berskala Nasional dan Internasional;	Program pengembangan pemasaran pariwisata

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
245	Peningkatan kerja sama dengan Perhotelan, Biro Perjalanan, Biro Wisata dan Para Guide (penuntun atau penterjemah);	Program pengembangan kemitraan

Berdasarkan amanat Permendagri No 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif *balanced scorecard*. Keempat persepektif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perspektif masyarakat/layanan (P1) adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Perspektif proses internal (P2) adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Perspektif kelembagaan (P3) yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Perspektif keuangan yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Dalam rangka melihat keterkaitan antara strategi dengan program prioritas daerah, maka berikut klasifikasi program terhadap strategi pembangunan daerah Kotawaringin Barat

Tabel 6. 3: Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan yang Integratif Dan Inovatif melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (*E-Governance*) Dan Reformasi Birokrasi.	P1	• Program Pelayanan Pencatatan Sipil • Program Peningaktan Pelayanan Angkutan • Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan
		P2	• Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			• Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH • Program litren pemb. daerah • Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup • Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi • Program Perencanaan Sosial dan Pmerintahan • Program Penataan Administrasi Kependudukan • Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah • Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		P3	• Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah • Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur • Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas an • Program peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi • Program Pengembangan Data/ Informasi Bidang Pengadaan • Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa • Program implementasi dan pengembangan e-government • Program pengembangan data/informasi/statistik daerah • Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika • Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan • Prog. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa • Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
		P4	• Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2	Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal.	P1	• Program pendidikan anak usia dini (PAUD) • Pogram pendidikan Nonformal • Program Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit • Program Upaya kesehatan Masyarakat • Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan • Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat • Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan • Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
		P2	• Program manajemen pelayanan pendidikan • Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
		P3	• Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan • Program Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan • Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan • Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		P4	
3	Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi Unggulan Lainnya dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep Green Economy	P1	• Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri • Program Pengembangan IKM • Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri • Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri • Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan • Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar • Program Peningkatan Produksi Hortikultura

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			• Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan • Program Peningkatan Produksi Perkebunan • Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak • Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan • Program Peningkatan Agribisnis Peternakan • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengembangan Perikanan • Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan • Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan • Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan • Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan • Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan • Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi • Program Pengembangan Usaha Koperasi • Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro • Program Penumbuhan Wirausaha Baru
		P2	
		P3	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan
		P4	• Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi • Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi • Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal • Program Ekstensifikasi Pajak Daerah • Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat • Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			• Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
4	Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang dengan konsep *Waterfront City* yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan kerjasama dengan swasta dan antar daerah	P1	• Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Program pembangunan infrastruktur perdesaan • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh • Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ • Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan • Program Pembangunan dan rehabilitasi /pemelihraaan Prasarana dan fasilitas ASDP • Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Areal Pemakaman • Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya • Program pengendalian banjir • Program Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup Dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup • Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		P2	• Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan • Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah • Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang • Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam • Program Peningkatan Pengendalian Polusi • Program Pengendalian kebakaran hutan

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			• Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan lingkungan hidup • Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup • Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan • Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah • Program Kesadaran Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan • Program Tanggap Darurat
		P3	
		P4	
5	Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya	P1	• Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama • Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan • Program Pembinaan Kemasyarakatan • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan" • Program peningkatan kualitas Hidup perempuan • Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan • Program Peningkatan Perlindungan Anak • Proram Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Program perlindungan dan jaminan sosial • Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya" • Program Pngembangan Ekonomi Kreatif

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
		P2	• Program pengembangan Kabupaten Layak Anak
		P3	• Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina • Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah • Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal Program pengembangan pemasaran pariwisata • Program pengembangan kemitraan • Program Pengembangan Nilai Budaya • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		P4	

Tabel 6. 4: Program Pembangunan Daerah dan kerangka Pendanaan tahun 2017

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Good Governance	S1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini atas audit BPK	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					Rp 2,070,386,600.00	BPKAD
				S2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi					Rp 150,040,912.00	Sekda
						Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					Rp 1,338,999,500.00	Inspektorat

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Pengembangan data/informasi					Rp 47,007,500.00	
						Program perencanaan pembangunan daerah					Rp 1,439,103,700.00	
						Program perencanaan pembangunan ekonomi					Rp 117,362,500.00	
						Program perencanaan sosial budaya					Rp 178,930,500.00	
						Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam					Rp 357,185,000.00	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
					Indeks Proffesionalisme ASN	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					Rp 2,498,868,500.00	BKPP
						Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur					Rp 1,637,599,000.00	
					Maturitas SPIP	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					Rp 317,000,000.00	Inspektorat
						Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					Rp 45,189,300.00	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
				S.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase PD yang menerapkan E-Gov	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					Rp 307,812,500.00	DISKOMINFO
						Program kerjasama informsi dan media massa					Rp 964,531,500.00	DISKOMINFO
					Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan					Rp 874,955,900.00	Dispendukcapil
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					Rp 480,425,000.00	DISHUB
						Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					Rp 5,242,622,050.00	Sekwan DPRD

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa mandiri	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					Rp 44,000,000.00	Sekda
						Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					Rp 188,984,500.00	DPMD
						Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					Rp 131,530,000.00	Kecamatan
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia	Meningkatkan kualitas sumberda	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Rp 1,879,555,500.00	Dinas Pendidikan

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
	melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.	ya manusia				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					Rp 414,690,000.00	
					Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini					Rp 3,456,653,500.00	
						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					Rp 29,503,897,300.00	
						Program Pendidikan Non Formal					Rp 759,290,000.00	
					Indeks Minat Baca	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					Rp 687,362,250.00	DPK

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					Rp 5,739,702,000.00	DINKES
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat					Rp 19,737,017,760.00	
						Program Pengawasan Obat dan Makanan					Rp 783,485,000.00	
						Program Pengembangan Obat Asli Indonesia					Rp 39,215,000.00	
						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					Rp 667,029,500.00	
						Program Perbaikan Gizi Masyarakat					Rp 255,200,000.00	
						Program Pengembangan					Rp 732,366,800.00	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Lingkungan Sehat						
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					Rp 1,175,039,750.00	
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					Rp 1,275,328,250.00	
						Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya					Rp 6,197,500,000.00	
						Program Kemitraan					Rp 18,793,998,000.00	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						peningkatan pelayanan kesehatan						
						Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita					Rp 84,254,800.00	
						Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia					Rp 76,460,000.00	
						Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					Rp 2,648,389,000.00	
					Mutu Layanan Rumah Sakit	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah					Rp 51,013,946,250.00	RSUD

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata						
						Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					Rp 436,000,000.00	
						Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat					Rp 75,900,000,000.00	
				Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	Prosentase peningkatan peraihan Prestasi Pemuda	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Tersediannya pembinaan olahraga	Keg		12 bulan	Rp 2,523,813,217.00	DISPORA
						Program Peningkatan sarana dan	Tersediannya sarana dan	Paket		12 bulan	Rp 11,750,000,000.00	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						prasarana olahraga	prasarana olahraga					
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Tersediaya peran serta kepemudaan	Paket		12 bulan	Rp 1,000,000,000.00	
3	"Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas,	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi					Rp 158,403,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					Rp 130,750,000	
						Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial					Rp 39,475,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
	kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup”				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					Rp 194,584,000	
						Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					Rp 149,160,000	
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					Rp 17,549,901,100	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan					Rp 5,683,096,150	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
						Program Peningkatan					Rp 877,625,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
					dan Perikanan	Kesejahteraan Petani						
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi					Rp 133,475,000	
						Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					Rp 1,823,376,800	
						Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					Rp 1,953,786,250	
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					Rp 1,523,844,250	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					Rp 2,926,776,450	
						Program Pengembangan Budidaya Perikanan					Rp 4,480,489,000	Dinas Perikanan
						Program Pengembangan Perikanan Tangkap					Rp 6,311,206,500	
						Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan					Rp 746,869,500	
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan					Rp 430,998,000	Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					Rp 132,200,000	
						Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					Rp 387,375,200	
					Persentase Koperasi yang berkualitas	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					Rp 1,420,350,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
					Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					Rp 892,540,000	
						Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan					Rp 281,030,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					Rp 186,777,500	
						Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM					Rp 186,042,500	
				Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					Rp 156,390,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Program Mengintensifkan penanganan					Rp 221,948,800	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						pengaduan masyarakat						
					Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp 1,773,809,900	Badan Pendapatan Daerah
				Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Indeks Williamson	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Brojong					Rp 1,636,303,400	Dinas PUPR
						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					Rp 145,848,309,600	
						Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong					Rp 11,344,000,000	
						Program Rehabilitasi/					Rp 3,722,642,800	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Pemeliharaan Jalan dan Jembatan						
						Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan					Rp 200,000,000	
						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					Rp 26,411,485,200	
						Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber					Rp 1,865,475,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Daya Air Lainnya						
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					Rp 10,366,688,800	
						Program Pengendalian Banjir					Rp 5,629,048,400	
						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					Rp 7,615,560,000	
						Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan					Rp 10,298,901,500	
						Program Pembangunan dan					Rp 929,982,000	Dinas Perhubungan

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						
						Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					Rp 2,555,800,000	
						Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLASDP					Rp 858,100,000	
						Program Pengembangan Perumahan					Rp 320,000,000	Dinas Perkim
						Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,					Rp 150,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						
			Indeks IKLH	Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					Rp 7,740,586,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					Rp 870,582,800	
						Program Perlindungam dan Konservasi Sumber Daya Alam					Rp 27,000,000	
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi					Rp 460,875,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
						Program Peningkatan Pengendalian Polusi					Rp 20,000,000	
						Program Pengendalian Kebakaran Hutan					Rp 73,547,000	
						Program Pengelompokan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Rp 1,662,864,000	
					Indeks Resiko Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					Rp 616,627,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Tanggap Darurat					Rp 68,250,000	
4	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.	Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis dengan penanaman nilai-nilai keagamaan	Indeks Pembangunan Masyarakat	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Persentase penurunan konflik antar umat beragama	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana				Rp 286,705,000	Bakesbangpol
						Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan				Rp 270,000,000	Sekda
						Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan,	Persentase pelaksanaan				Rp 136,050,000	Sekda

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	kegiatan dakwah dan syiar agama					
				Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Peningkatan jumlah Desa Mandiri	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa					Rp 239,700,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					Rp 1,346,997,000	
						Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					Rp 484,607,300	
				Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan	Indeks Pemberdayaan Gender	Program peningkatan kualitas Hidup					Rp 125,251,500	DP3AP2KB

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
				perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layakk anak		dan Perlindungan perempuan						
						Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					Rp 614,849,800	
						Program Pembinaan Keluarga Berencana					Rp 34,800,000	
					Kategori Kabupaten Layak Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					Rp 221,175,000	
5	Mewujudkan kondisi masyarakat yang	Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang	Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi				Rp 389,995,500	Dinas Sosial

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
	aman, tenteram dan dinamis.	aman, tertib, dan berkeadilan			Jumlah Penduduk		dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (orang)					
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnnya.					Rp 474,175,000	
						PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI	Jumlah Capaian Pelayanan dan				Rp 373,220,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (orang)					
						PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan				Rp 113,500,000	
				Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Persentase Penurunan jumlah Penganggur an Terebuka Terehadap Jumlah Penduduk	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					Rp 1,912,284,300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Peningkatan Kesempatan Kerja					Rp 272,708,542	
						Program Perlindungan Pengembangan Lembaga					Rp 267,078,250	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Ketenagakerjaan						
				Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan					Rp 2,484,277,500	Satpol PP
						Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)					Rp 210,758,397	
						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					Rp 13,625,000	
6	Melestarikan situs budaya, kesenian	Peningkatan Pariwisata Daerah	Tourism Intensity	Meningkatnya Nilai Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata	Persentase Destinasi Wisata Khas	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					Rp 5,167,782,500	Dinas Pariwisata

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
	lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata				Daerah Terkelola	Program Pengembangan Nilai Budaya						
					Persentase Jenis Produk Lokal Kepariwisataan	Program Pengembangan Ekonomi kreatif						
				Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan	Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus	Program pengembangan pemasaran pariwisata					Rp 679,033,000	
					Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	Program pengembangan kemitraan					Rp 50,000,000	

Tabel 6. 5: Justifikasi empat perspektif balanced Sore Card Strategi, terhadap program pembangunan daerah

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan**	**Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**	**Indeks Good Governance**	**S1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan**	**Opini atas audit BPK**	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					Rp 3,527,600,000		Rp 2,101,994,462		Rp 3,028,254,230		Rp 3,755,967,261		Rp 3,938,250,000		Rp 3,938,250,000	BPKAD
				S2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	**Nilai SAKIP Kabupaten**	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi			60	Rp 150,000,000	60	Rp 200,000,000	63	Rp 200,000,000	63	Rp 250,000,000	65	Rp 275,000,000	65	Rp 275,000,000	Sekda
						Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat tercapainya proses pengawasan internal dan pembinaan terhadap obyek pemeriksaan				Rp 3,149,515,025		Rp 3,719,538,673		Rp 3,996,836,292		Rp 4,352,371,370		Rp 4,823,381,193		Rp 4,823,381,193	Inspektorat
						Program Penelitian & Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD				Rp 511,683,000		Rp 838,000,000		Rp 1,174,000,000		Rp 1,562,000,000		Rp 1,053,000,000		Rp 1,053,000,000	Bappeda
						Program Pengendalian dan Evaluasi	Persentase pelaksanaan pembangun				Rp 500,000,000		Rp 793,496,000		Rp 659,476,000		Rp 706,393,500		Rp 753,311,000		Rp 753,311,000	Bappeda

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pemb. Daerah	an yang sesuai dengan rencana															
						Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan				Rp 145,000,000		Rp 1,510,000,000		Rp 1,035,000,000		Rp 635,000,000		Rp 160,000,000		Rp 160,000,000	Bappeda
						Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan				Rp 300,000,000		Rp 1,277,400,000		Rp 945,145,000		Rp 864,964,800		Rp 957,757,600		Rp 957,757,600	Bappeda
						Program Perencanaan Sos. dan Pmerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan				Rp 745,000,000		Rp 1,803,500,000		Rp 2,718,345,000		Rp 902,600,000		Rp 983,750,000		Rp 983,750,000	Bappeda

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Maturitas SPIP	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terlaksananya penyusunan dokumen kebijakan sistem, prosedur pengawasan dan peningkatan kapabilitas APIP				Rp 105,000,000		Rp 140,250,000		Rp 115,762,500		Rp 160,305,675		Rp 176,301,514		Rp 176,301,514	Inspektorat
						Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tercapainya peningkatan kapasitas SDM APIP				Rp 379,250,000		Rp 395,212,500		Rp 441,973,125		Rp 519,571,781		Rp 588,050,370		Rp 588,050,370	Inspektorat
					Indeks Profesionalitas ASN	Program Pengembangan karir					Rp 661,489,000		Rp 702,250,000		Rp 1,056,116,009		Rp 1,673,813,600		Rp 1,809,570,500		Rp 1,809,570,500	BKPP
						Program Pendidikan kedinasan					Rp 2,490,527,000		Rp 2,874,000,000		Rp 3,399,469,200		Rp 3,477,727,608		Rp 3,860,000,000		Rp 3,860,000,000	BKPP
						Program Pembinaan Aparatur					Rp 258,322,500		Rp 270,000,000		Rp 340,750,200		Rp 379,221,250		Rp 420,000,000		Rp 420,000,000	BKPP
						Program Pembinaan dan pengemban	Persentase SKPD yang tepat fungsi				Rp 350,000,000		Rp 500,000,000		Rp 505,000,000		Rp 1,025,000,000					Sekda

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						gan organisasi dan kepegawaian																
						Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					Rp 10,485,244,100		Rp 10,730,719,982		Rp 11,038,289,581		Rp 11,355,086,269		Rp 11,681,386,857		Rp 11,681,386,857	Sekwan
				S.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	**% PD yang menerapkan E-Gov**	Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan desiminasi informasi dan komunikasi				Rp 1,189,500,000		Rp 1,520,000,000		Rp 1,570,000,000		Rp 1,620,000,000		Rp 1,670,000,000		Rp 1,670,000,000	Diskominfo
						Program layanan penyediaan informasi publik pemerintah daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan desiminasi informasi dan komunikasi				Rp 1,189,500,000		Rp 1,520,000,000		Rp 1,570,000,000		Rp 1,620,000,000		Rp 1,670,000,000		Rp 1,670,000,000	Diskominfo
						Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase akses informasi publik melalui saluran komunikasi yang disediakan				Rp 2,185,000,000		Rp 2,332,000,000		Rp 2,489,000,000		Rp 2,726,000,000		Rp 2,873,000,000		Rp 2,873,000,000	Diskominfo
						Program kerjasama informasi dengan media massa	Rasio berita positif dan berita negatif mengenai pemerintah				Rp 2,500,000,000		Rp 2,720,000,000		Rp 2,940,000,000		Rp 3,160,000,000		Rp 3,380,000,000		Rp 3,380,000,000	Diskominfo

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							daerah di media															
						Program informasi, komunikasi dan publikasi masyarakat	Persentase peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah				Rp 1,175,000,000		Rp 1,230,000,000		Rp 1,285,000,000		Rp 1,340,000,000		Rp 1,395,000,000		Rp 1,395,000,000	Diskominfo
						Program implementasi dan pengembangan e-government					Rp 1,410,000,000		Rp 1,510,000,000		Rp 1,530,000,000		Rp 1,530,000,000		Rp 1,450,000,000		Rp 1,450,000,000	Diskominfo
						Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					Rp 450,000,000		Rp 480,000,000		Rp 510,000,000		Rp 540,000,000		Rp 540,000,000		Rp 540,000,000	Diskominfo
						Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika					Rp 1,349,088,000		Rp 2,533,868,000		Rp 1,899,948,000		Rp 4,359,378,000		Rp 2,771,308,000		Rp 2,771,308,000	Diskominfo
					rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan					Rp 216,533,400		Rp 641,256,500		Rp 612,025,552		Rp 659,392,345		Rp 882,913,572		Rp 882,913,572	Dispendukcapil
						Program Pelayanan Pencatatan Sipil							Rp 132,200,000		Rp 172,500,000		Rp 186,000,000		Rp 201,500,000		Rp 201,500,000	Dispendukcapil
						Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan					Rp 25,444,000		Rp 78,500,000		Rp 101,500,000		Rp 139,000,000		Rp 194,000,000		Rp 194,000,000	Dispendukcapil

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Pendataan dan Informasi Kependudukan					Rp 23,450,000		Rp 437,915,000		Rp 410,340,000		Rp 582,364,016		Rp 218,571,505		Rp 218,571,505	Dispendukcapil
						Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Ketepatan waktu penyelesian perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan			100	Rp 698,757,500	100	Rp 751,978,070	100	Rp 800,000,000	100	Rp 875,500,000	100	Rp 1,020,000,000	100	Rp 1,020,000,000	DPMPST
						Program Peningakatan Pelayanan Angkutan	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana				Rp 448,150,000		Rp 450,000,000		Rp 450,000,000		Rp 455,000,000		Rp 475,000,000		Rp 475,000,000	Dishub
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	**% Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu**	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik				Rp 135,300,000		Rp 3,135,300,000		Rp 138,800,000		Rp 200,000,000		Rp 230,000,000		Rp 230,000,000	Sekda
						Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik				Rp 950,000,000		Rp 1,470,000,000		Rp 1,575,000,000		Rp 1,295,000,000		Rp 1,315,000,000		Rp 1,315,000,000	DPMD
						Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa				Rp 75,105,000		Rp 206,920,000		Rp 230,920,000		Rp 286,320,000		Rp 295,728,000		Rp 295,728,000	KECAMATAN
2	**Meningkatkan**	**Meningkatkan**	**Indeks Pemban**	**Meningkatnya**	**Angka Harapan**	Program peningkatan mutu	Jumlah guru bersertifikat pendidik	orang		1250		1250		1400		1540		1800		1800		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.	**kualitas sumberdaya manusia**	**gunan Manusia**	**derajat pendidikan masyarakat**	**Lama Sekolah**	pendidik dan tenaga pendidikan	Jumlah kelompok kerja guru yang terbina	kelompok		5	Rp 2,214,555,500	5	Rp 2,361,011,050	5	Rp 2,597,112,155	5	Rp 2,856,823,371	5	Rp 3,142,505,708	5	Rp 3,142,505,708	
							Jumlah pelatihan pendidik dan tenaga pendidik terlaksana	kegiatan		3		3		3		3		3		3			
							Jumlah guru honor	orang		55		55		55		55		55		55		
						Program manajemen pelayanan pendidikan	Jumalh operator IT yang terlatih	orang		6	Rp 395,000,000	3	Rp 434,500,000	8	Rp 477,950,000	9	Rp 525,745,000	6	Rp 578,319,500	6	Rp 578,319,500	
							Montoring evaluasi kegiatan terlaksana	Dokumen		3		3		3		3		3		3		
					Rata-Rata Lama Sekolah	Program pendidikan anak usia dini (PAUD)	TKN Pembina yang dibangun	Unit		0	Rp 2,523,210,000	1	Rp 3,676,031,000	0	Rp 4,043,634,100	0	Rp 5,448,002,310	0	Rp 5,992,802,541	0	Rp 5,992,802,541	Dinas Pendidikan
							Ruang kelas baru bertambah	ruang		2		2		2		2		2		2		
							Jumlah ruang kelas tercukupi meubeler	ruang		6		6		6		6		6		6		
							Alat praktik dan peraga tersedia	paket		2		2		2		2		2		2		
							Persentase BOP TK yang tersalur	persen		82		84		87		89		91		91		
						Pogram pendidikan Nonformal	Ruang belajar pendidikan kesetaraan terbangun	ruang		2	Rp 620,000,000	0	Rp 682,000,000	0	Rp 750,200,000	2	Rp 825,220,000	0	Rp 907,742,000	0	Rp 998,516,200	
							Jumlah lembaga pendidikan nonformal	lembaga		21		21		21		21		21		21		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							yang terdata															
						Program Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah USB Terbangun	Unit		1	Rp 14,870,750,000	0	Rp 22,715,625,000	1	Rp 24,195,430,700	0	Rp 27,614,973,770	0	Rp 30,376,471,147	0	Rp 30,376,471,147	
							Ruang kelas baru bertambah	ruang		6		6		6		6		6		6		
							Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur	ruang		9		9		9		9		9		9		
							Jumlah ruang kelas terehabilitasi	ruang		12		12		12		12		12		12		
							Jumlah kantor sekolah terbangun	unit		5		5		5		5		5		5		
							Jumlah rumah dinas guru terbangun	unit		3		3		3		3		3		3		
							Jumlah rumah dinas terehabilitasi	unit		5		5		5		5		5		5		
						Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah USB Terbangun	Unit		0	Rp 12,012,159,799	0	Rp 16,713,375,779	0	Rp 17,888,859,357	0	Rp 22,677,745,292	0	Rp 24,945,519,822	0	Rp 24,945,519,822	
							Ruang kelas baru bertambah	ruang		3		3		3		3		3		3		
							Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur	ruang		15		15		15		15		15		15		
							Jumlah ruang kelas terehabilitasi	ruang		3		3		3		3		3		3		
							Jumlah kantor sekolah terbangun	unit		4		4		4		4		4		4		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jumlah rumah dinas guru terbangun	unit		4		4		4		4		4		4		
							Jumlah rumah dinas terehabilitasi	unit		3		3		3		3		3		3		
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan sumber daya perpustakaan	Orang		0	Rp 646,464,400	20	Rp 1,717,534,056	20	Rp 2,287,930,950	45	Rp 3,029,628,926	50	Rp 2,978,238,770	50	Rp 2,978,238,770	DPK
							Bertambahnya bahan pustaka di perpustakaan	Paket		0		10		10		30		35		35		
							Terdatanya perpustakaan desa/kelurahan dan TBM	Desa		0		15		25		30		35		35		
							Bertambahnya perpustakaan berbasis IT	Paket		0		2		2		2		2		2		
							Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan binaan	Keg		0		12		12		12		12		12		
							Meningkatnya minat baca masyarakat	Keg		0		42		42		42		42		42		
							Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan dan budaya baca	Keg		0		4		4		4		4		4		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Tersediannya data perpustakaan yang akurat	Tahun		0		12		12		12		12		12		
							Tersusunnya rencana kegiatan program budaya baca	Dokumen		0		5		5		5		5		5		
							Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat	Keg		13		64		64		64		64		64		
							Meningkatnya budaya baca masyarakat	Keg/Lokasi		1/26		1/39		1/39		1/39		1/39		1/39		
								Bulan		12		12		12		12		12		12		
								Lokasi		26		39		39		39		39		39		
							Bertambahnya koleksi buku yang berkualitas	Eks		1500		3000		3000		3000		3000		3000		
							Meningkatkan koleksi beraneka ragam jenis dan berkualitas	E-book		0		60		100		150		200		200		
							Meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai sarana rekreasi dan edukasi	Buah		0		30		50		50		50		50		
							Tersedianya buku untuk program hibah buku	Eks		0		1000		2000		2000		2000		2000		
							Tersedianya sistem katalogisasi	Buah		0		32		40		48		56		56		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							yang lengkap															
							Bahan pustaka terawat dan terpeliharanya koleksi dengan baik	Eks		0		2500		3000		3500		3500		3500		
								Bundel		0		48		48		48		48		48		
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Angka Harapan Hidup**	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	angka kesakitan	%		25	Rp 7,900,000,000	24	Rp 7,168,000,000	23	Rp 6,468,000,000	22	Rp 6,292,900,000	20	Rp 6,149,710,000	20	Rp 6,149,710,000	DINKES
							angka kematian	%		15		14.5		13		12.5		11		11		
						Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	FKTP yang terakreditasi	%		60	Rp 7,510,903,250	70	Rp 9,309,083,575	80	Rp 9,645,522,625	90	Rp 10,328,455,200	100	Rp 12,185,081,000	100	Rp 12,185,081,000	
						Program Sumber Daya Kesehatan	Kondisi sarana dan Prasarana dalam kondisi mantap	%		75	Rp 52,314,919,000	80	Rp 65,292,843,400	85	Rp 69,152,992,740	87	Rp 49,574,690,000	90	Rp 53,793,786,000	90	Rp 53,793,786,000	
							Rasio dan Distribusi tenaga Kesehatan	%		60		70		75		80		85		85		
						Program Upaya kesehatan Masyarakat	Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		75	Rp 2,315,600,000	80	Rp 2,084,450,000	85	Rp 2,020,800,000	90	Rp 2,109,324,000	95	Rp 2,201,950,000	95	Rp 2,201,950,000	
					Mutu Layanan Rumah Sakit	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah kegiatan pembangunan rumah sakit	unit		10	Rp 7,700,000,000	11	Rp 7,931,000,000	11	Rp 8,168,930,000	12	Rp 8,413,997,900	12	Rp 8,666,417,837	12	Rp 8,926,410,372	RSUD
							Jumlah alat-alat rumah sakit diadakan	paket		1	Rp 35,000,000,000	1	Rp 36,050,000,000	1	Rp 37,131,500,000	1	Rp 38,245,445,000	1	Rp 39,392,808,350	1	Rp 40,574,592,601	
						Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah in service training yang diadakan	kegiatan		4	Rp 150,000,000	4	Rp 154,500,000	4	Rp 159,135,000	4	Rp 163,909,050	4	Rp 168,826,322	4	Rp 173,891,111	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jumlah seminar, workshop, pelatihan yang diikuti	kali		18	Rp 110,000,000	20	Rp 113,300,000	22	Rp 116,699,000	24	Rp 120,199,970	25	Rp 123,805,969	25	Rp 127,520,148	
							Jumlah bantuan pengobatan pasien kurang mampu yang diberikan	pasien		150	Rp 300,000,000	150	Rp 309,000,000	155	Rp 318,270,000	165	Rp 327,818,100	170	Rp 337,652,643	170	Rp 347,782,222	
						Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan	kunjungan		70000	Rp 150,000,000	72000	Rp 154,500,000	74000	Rp 159,135,000	75000	Rp 163,909,050	76000	Rp 168,826,322	76000	Rp 173,891,111	
							Jumlah kunjungan pasien rawat inap	kunjungan		70000	Rp 150,000,000	72000	Rp 154,500,000	74000	Rp 159,135,000	75000	Rp 163,909,050	76000	Rp 168,826,322	76000	Rp 173,891,111	
							Jumlah kunjungan pasien gawat darurat	kunjungan		17000	Rp 160,000,000	17500	Rp 164,800,000	18000	Rp 169,744,000	18500	Rp 174,836,320	19000	Rp 180,081,410	19000	Rp 185,483,852	
							Jumlah pelayanan tindakan rehabilitasi medik	tindakan		6000	Rp 56,000,000	6500	Rp 57,680,000	6750	Rp 59,410,400	6900	Rp 61,192,712	7000	Rp 63,028,493	7000	Rp 64,919,348	
							Jumlah pemberian pelayanan hemodialisis	tindakan		3000	Rp 1,350,000,000	3050	Rp 1,390,500,000	3100	Rp 1,432,215,000	3200	Rp 1,475,181,450	3300	Rp 1,519,436,894	3300	Rp 1,565,020,000	
							Jumlah Hari Rawat pasien rawat inap	Hari Rawat		56000	Rp 400,000,000	57000	Rp 412,000,000	57500	Rp 424,360,000	58000	Rp 437,090,800	58500	Rp 450,203,524	58500	Rp 463,709,630	
							Jumlah Hari Rawat pasien ICU	Hari Rawat		1000	Rp 75,000,000	1500	Rp 77,250,000	2000	Rp 79,567,500	2500	Rp 81,954,525	3000	Rp 84,413,161	3000	Rp 86,945,556	
							Jumlah pasien bedah sentral yang dilayani	tindakan		4500	Rp 60,000,000	4600	Rp 61,800,000	4700	Rp 63,654,000	4800	Rp 65,563,620	4800	Rp 67,530,529	4800	Rp 69,556,444	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jumlah makanan pasien yang diberikan	Hari Rawat		56000	Rp 1,800,000,000	57000	Rp 1,854,000,000	57500	Rp 1,909,620,000	58000	Rp 1,966,908,600	58500	Rp 2,025,915,858	58500	Rp 2,086,693,334	
							Jumlah pemeriksaan laboratorium PK	pemeriksaan		12000	Rp 1,800,000,000	13000	Rp 1,854,000,000	13500	Rp 1,909,620,000	14000	Rp 1,966,908,600	14500	Rp 2,025,915,858	14500	Rp 2,086,693,334	
							Jumlah pelayanan foto Rontgen	pemeriksaan		6700	Rp 510,000,000	7000	Rp 525,300,000	7500	Rp 541,059,000	7700	Rp 557,290,770	7900	Rp 574,009,493	7900	Rp 591,229,778	
							Jumlah resep obat yang dilayani	resep		88000	Rp 21,000,000,000	90000	Rp 21,630,000,000	92000	Rp 22,278,900,000	94000	Rp 22,947,267,000	96000	Rp 23,635,685,010	96000	Rp 24,344,755,560	
							Jumlah linen yang dicuci	kg		60583	Rp 155,000,000	60600	Rp 159,650,000	60900	Rp 164,439,500	61000	Rp 169,372,685	62000	Rp 174,453,866	62000	Rp 179,687,482	
							Jumlah jenazah yang diberikan pelayanan	orang		185	Rp 10,000,000	192	Rp 10,300,000	199	Rp 10,609,000	200	Rp 10,927,270	205	Rp 11,255,088	205	Rp 11,592,741	
							Jumlah kegiatan pelayanan Sarpras yang dilakukan	kegiatan		12	Rp 5,000,000,000	12	Rp 5,150,000,000	12	Rp 5,304,500,000	12	Rp 5,463,635,000	12	Rp 5,627,544,050	12	Rp 5,796,370,372	
							Jumlah kegiatan pelayanan logistik yang dilakukan	kali		10	Rp 85,000,000	11	Rp 87,550,000	12	Rp 90,176,500	13	Rp 92,881,795	14	Rp 95,668,249	14	Rp 98,538,296	
							Jumlah pegawai yg diberi pelatihan	orang		400	Rp 2,500,000,000	420	Rp 2,575,000,000	450	Rp 2,652,250,000	460	Rp 2,731,817,500	470	Rp 2,813,772,025	470	Rp 2,898,185,186	
							Jumlah pembuatan surat keterangan medik	buah		590	Rp 1,200,000,000	600	Rp 1,236,000,000	650	Rp 1,273,080,000	670	Rp 1,311,272,400	680	Rp 1,350,610,572	680	Rp 1,391,128,889	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jumlah pengadaan software SIMRS	paket		5	Rp 700,000,000	4	Rp 721,000,000	3	Rp 742,630,000	2	Rp 764,908,900	2	Rp 787,856,167	2	Rp 811,491,852	
							Jumlah Surat Keterangan Kesehatan yang dibuat	buah		7500	Rp 720,000,000	7700	Rp 741,600,000	7800	Rp 763,848,000	7900	Rp 786,763,440	7950	Rp 810,366,343	7950	Rp 834,677,333	
							Evaluasi perjanjian kerjasama pihak ke-3	buah		81	Rp 75,000,000	60	Rp 77,250,000	30	Rp 79,567,500	20	Rp 81,954,525	10	Rp 84,413,161	10	Rp 86,945,556	
							Jumlah kegiatan kepegawaian yang dilaksanakan	kegiatan		4	Rp 120,000,000	4	Rp 123,600,000	4	Rp 127,308,000	4	Rp 131,127,240	4	Rp 135,061,057	4	Rp 139,112,889	
							Jumlah kegiatan PKRS yang dilaksanakan	kali		51	Rp 320,000,000	56	Rp 329,600,000	58	Rp 339,488,000	60	Rp 349,672,640	62	Rp 360,162,819	62	Rp 370,967,704	
							Jumlah jasa pelayanan, uang makan dll yang diberikan	orang		503	Rp 45,000,000,000	507	Rp 46,350,000,000	507	Rp 47,740,500,000	510	Rp 49,172,715,000	510	Rp 50,647,896,450	510	Rp 52,167,333,344	
							Jumlah pelayanan transportasi yang dilakukan	kali		1355	Rp 350,000,000	1400	Rp 360,500,000	1430	Rp 371,315,000	1500	Rp 382,454,450	1550	Rp 393,928,084	1550	Rp 405,745,926	
							Jumlah kantong darah yang dibeli	kantong		1135	Rp 2,000,000,000	1200	Rp 2,060,000,000	1250	Rp 2,121,800,000	1300	Rp 2,185,454,000	1350	Rp 2,251,017,620	1350	Rp 2,318,548,149	
							Jumlah kegiatan perencanaan yg dilakukan	kegiatan		1	Rp 170,000,000	1	Rp 175,100,000	1	Rp 180,353,000	1	Rp 185,763,590	1	Rp 191,336,498	1	Rp 197,076,593	
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah standar pelayanan kesehatan	buku		4	Rp 445,000,000	5	Rp 458,350,000	5	Rp 472,100,500	6	Rp 486,263,515	6	Rp 500,851,420	6	Rp 515,876,963	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							yang disusun															
							Jumlah kegiatan pembangunan dan pemuthakiran data dasar	kali		4	Rp 480,000,000	4	Rp 494,400,000	4	Rp 509,232,000	4	Rp 524,508,960	4	Rp 540,244,229	4	Rp 556,451,556	
							Jumlah kunjungan pasien gawat darurat	kunjungan		17000	Rp 160,000,000	17500	Rp 164,800,000	18000	Rp 169,744,000	18500	Rp 174,836,320	19000	Rp 180,081,410	19000	Rp 185,483,852	
							Jumlah pelayanan tindakan rehabilitasi medik	tindakan		6000	Rp 56,000,000	6500	Rp 57,680,000	6750	Rp 59,410,400	6900	Rp 61,192,712	7000	Rp 63,028,493	7000	Rp 64,919,348	
							Jumlah pemberian pelayanan hemodialisis	tindakan		3000	Rp 1,350,000,000	3050	Rp 1,390,500,000	3100	Rp 1,432,215,000	3200	Rp 1,475,181,450	3300	Rp 1,519,436,894	3300	Rp 1,565,020,000	
							Jumlah Hari Rawat pasien rawat inap	Hari Rawat		56000	Rp 400,000,000	57000	Rp 412,000,000	57500	Rp 424,360,000	58000	Rp 437,090,800	58500	Rp 450,203,524	58500	Rp 463,709,630	
							Jumlah Hari Rawat pasien ICU	Hari Rawat		1000	Rp 75,000,000	1500	Rp 77,250,000	2000	Rp 79,567,500	2500	Rp 81,954,525	3000	Rp 84,413,161	3000	Rp 86,945,556	
							Jumlah pasien bedah sentral yang dilayani	tindakan		4500	Rp 60,000,000	4600	Rp 61,800,000	4700	Rp 63,654,000	4800	Rp 65,563,620	4800	Rp 67,530,529	4800	Rp 69,556,444	
							Jumlah makanan pasien yang diberikan	Hari Rawat		56000	Rp 1,800,000,000	57000	Rp 1,854,000,000	57500	Rp 1,909,620,000	58000	Rp 1,966,908,600	58500	Rp 2,025,915,858	58500	Rp 2,086,693,334	
							Jumlah pemeriksaan laboratorium PK	pemeriksaan		12000	Rp 1,800,000,000	13000	Rp 1,854,000,000	13500	Rp 1,909,620,000	14000	Rp 1,966,908,600	14500	Rp 2,025,915,858	14500	Rp 2,086,693,334	
							Jumlah pelayanan	pemeriksaan		6700	Rp 510,000,000	7000	Rp 525,300,000	7500	Rp 541,059,000	7700	Rp 557,290,770	7900	Rp 574,009,493	7900	Rp 591,229,778	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							foto Rontgen															
							Jumlah resep obat yang dilayani	resep		88000	Rp 21,000,000,000	90000	Rp 21,630,000,000	92000	Rp 22,278,900,000	94000	Rp 22,947,267,000	96000	Rp 23,635,685,010	96000	Rp 24,344,755,560	
							Jumlah linen yang dicuci	kg		60583	Rp 155,000,000	60600	Rp 159,650,000	60900	Rp 164,439,500	61000	Rp 169,372,685	62000	Rp 174,453,866	62000	Rp 179,687,482	
							Jumlah jenazah yang diberikan pelayanan	orang		185	Rp 10,000,000	192	Rp 10,300,000	199	Rp 10,609,000	200	Rp 10,927,270	205	Rp 11,255,088	205	Rp 11,592,741	
							Jumlah kegiatan pelayanan Sarpras yang dilakukan	kegiatan		12	Rp 5,000,000,000	12	Rp 5,150,000,000	12	Rp 5,304,500,000	12	Rp 5,463,635,000	12	Rp 5,627,544,050	12	Rp 5,796,370,372	
							Jumlah kegiatan pelayanan logistik yang dilakukan	kali		10	Rp 85,000,000	11	Rp 87,550,000	12	Rp 90,176,500	13	Rp 92,881,795	14	Rp 95,668,249	14	Rp 98,538,296	
							Jumlah pegawai yg diberi pelatihan	orang		400	Rp 2,500,000,000	420	Rp 2,575,000,000	450	Rp 2,652,250,000	460	Rp 2,731,817,500	470	Rp 2,813,772,025	470	Rp 2,898,185,186	
							Jumlah pembuatan surat keterangan medik	buah		590	Rp 1,200,000,000	600	Rp 1,236,000,000	650	Rp 1,273,080,000	670	Rp 1,311,272,400	680	Rp 1,350,610,572	680	Rp 1,391,128,889	
							Jumlah pengadaan software SIMRS	paket		5	Rp 700,000,000	4	Rp 721,000,000	3	Rp 742,630,000	2	Rp 764,908,900	2	Rp 787,856,167	2	Rp 811,491,852	
							Jumlah Surat Keterangan Kesehatan yang dibuat	buah		7500	Rp 720,000,000	7700	Rp 741,600,000	7800	Rp 763,848,000	7900	Rp 786,763,440	7950	Rp 810,366,343	7950	Rp 834,677,333	
							Evaluasi perjanjian kerjasama pihak ke-3	buah		81	Rp 75,000,000	60	Rp 77,250,000	30	Rp 79,567,500	20	Rp 81,954,525	10	Rp 84,413,161	10	Rp 86,945,556	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jumlah kegiatan kepegawaian yang dilaksanakan	kegiatan		4	Rp 120,000,000	4	Rp 123,600,000	4	Rp 127,308,000	4	Rp 131,127,240	4	Rp 135,061,057	4	Rp 139,112,889	
							Jumlah kegiatan PKRS yang dilaksanakan	kali		51	Rp 320,000,000	56	Rp 329,600,000	58	Rp 339,488,000	60	Rp 349,672,640	62	Rp 360,162,819	62	Rp 370,967,704	
							Jumlah jasa pelayanan, uang makan dll yang diberikan	orang		503	Rp 45,000,000,000	507	Rp 46,350,000,000	507	Rp 47,740,500,000	510	Rp 49,172,715,000	510	Rp 50,647,896,450	510	Rp 52,167,333,344	
							Jumlah pelayanan transportasi yang dilakukan	kali		1355	Rp 350,000,000	1400	Rp 360,500,000	1430	Rp 371,315,000	1500	Rp 382,454,450	1550	Rp 393,928,084	1550	Rp 405,745,926	
							Jumlah kantong darah yang dibeli	kantong		1135	Rp 2,000,000,000	1200	Rp 2,060,000,000	1250	Rp 2,121,800,000	1300	Rp 2,185,454,000	1350	Rp 2,251,017,620	1350	Rp 2,318,548,149	
							Jumlah kegiatan perencanaan yg dilakukan	kegiatan		1	Rp 170,000,000	1	Rp 175,100,000	1	Rp 180,353,000	1	Rp 185,763,590	1	Rp 191,336,498	1	Rp 197,076,593	
				Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	**Prosentase peningkatan peraihan Prestasi Pemuda**	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Tersedianya pembinaan olahraga	Keg		12 bulan	Rp 1,792,150,000	12 bulan	Rp 1,300,000,000	12 bulan	Rp 2,000,000,000	12 bulan	Rp 2,275,000,000	12 bulan	Rp 16,182,240,580	12 bulan	Rp 16,182,240,580	DISPORA
						Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Paket		12 bulan	Rp 650,000,000	12 bulan	Rp 13,376,044,136	12 bulan	Rp 13,470,743,187	12 bulan	Rp 16,161,580,735	12 bulan	Rp 4,000,000,000	12 bulan	Rp 4,000,000,000	
						Program Program Peningkatan Peran Serta	Tersedianya peran serta kepemudaan	Paket		12 bulan	Rp 870,403,700	12 bulan	Rp 956,635,000	12 bulan	Rp 1,125,000,000	12 bulan	Rp 1,250,000,000	12 bulan	Rp 1,500,000,000	12 bulan	Rp 1,500,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Kepemudaan																
3	**“Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup”**	**Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan**	**Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Jumlah industri potensial	Kecamatan		6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	
						Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Berkembangnya Industri kecil Menengah	Orang		20	Rp 181,587,500	30	Rp 256,500,000	40	Rp 284,150,000	50	Rp 313,565,000	60	Rp 354,921,500	60	Rp 354,921,500	
						Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri	Peningkatan standart produk IKM	IKM		12	Rp 101,603,000	15	Rp 123,020,000	18	Rp 145,000,000	20	Rp 161,000,000	20	Rp 164,000,000	20	Rp 164,000,000	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkanya Perdagangan dalam Negerii	Pasar		1	Rp 4,227,570,000	1	Rp 2,250,000,000	1	Rp 1,775,000,000	1	Rp 1,802,000,000	1	Rp 2,333,000,000	1	Rp 2,333,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
								Pameran		1		1		1		1		1		1		
						Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%				Rp 44,155,000		Rp 78,000,000		Rp 85,000,000		Rp 94,000,000		Rp 97,000,000		Rp 97,000,000	
						Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkat dan berkembangnya ekspor daerah	Pameran		1	Rp 139,510,000	1	Rp 153,461,000	1	Rp 168,807,100	1	Rp 185,687,810	1	Rp 204,256,591	1	Rp 204,256,591	
						Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Meningkatnya standardisasi, tertib ukur dan perlindungan konsumen				Rp 95,775,000		Rp 114,773,000		Rp 126,700,000		Rp 138,800,000		Rp 163,000,000		Rp 163,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Perdagangan																
						Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Tercapainya prosentase pembangunan pasar rakyat di wilayah kab. kotawaringin barat				Rp 3,948,915,000		Rp 8,985,000,000		Rp 747,000,000		Rp 751,000,000		Rp 755,000,000		Rp 755,000,000	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produktivitas Tanaman Pangan				Rp 1,523,246,605		Rp 3,660,854,670		Rp 3,827,415,807		Rp 6,469,770,095		Rp 6,875,869,148		Rp 6,875,869,148	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
							a. Padi	Kwintal/Ha		33.33		34.3		34.98		36.71		38.51		38.51		
							b. Jagung	Kwintal/Ha		38.42		39.54		40.32		42.32		44.4		44.4		
							c. Kedelai	Kwintal/Ha		13.63		14.3		15.02		15.77		16.56		16.56		
						Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produktivitas Hortikultura				Rp 1,231,628,000		Rp 3,958,935,000		Rp 5,603,880,000		Rp 6,125,400,000		Rp 6,344,501,000		Rp 6,344,501,000	
							a. Cabai	Kwintal/Ha		2.45		2.47		2.49		2.51		2.53		2.53		
							b. Bawang Merah	Kwintal/Ha		4.05		4.1		4.15		4.2		4.25		4.25		
							c. Sayur	Kwintal/Ha		2.2		2.25		2.3		2.35		2.4		2.4		
							d. Buah-buahan	Kwintal/Ha		0		7.5		7.6		7.7		7.8		7.8		
						Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produktivitas Perkebunan				Rp 944,785,700		Rp 9,950,017,840		Rp 12,821,581,500		Rp 18,596,790,018		Rp 20,988,750,451		Rp 20,988,750,451	
							a. Kelapa Sawit	Ton/Ha/Th		18.62		18.99		19.37		19.76		20.16		20.16		
							b. Karet	Ton/Ha/Th		0.91		0.93		0.95		0.97		0.99		0.99		
							c. Lada	Ton/Ha/Th		1		1.02		1.04		1.06		1.08		1.08		
							d. Kelapa	Ton/Ha/Th		0.73		0.75		0.76		0.78		0.79		0.79		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Prosesntase Peningkatan Prasarana, Sarana dan SDM Petani	%		5	Rp 1,914,500,000	6.00	Rp 5,841,750,000	7.00	Rp 8,027,000,000	8.00	Rp 11,295,740,000	9.00	Rp 12,688,011,600	9.00	Rp 12,688,011,600	
						Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Tenaga Penyuluh	Orang		88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kematian ternak	%		5	Rp 1,460,000,000	5	Rp 1,546,000,000	4	Rp 1,602,100,000	4	Rp 1,703,810,000	4	Rp 1,821,691,000	4	Rp 1,821,691,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Penanganan dan pencegahan penyakit menular ternak strategis dan zoonosis	%		5		5		4		4		4		4		
							Terawasinya peredaran obat ternak	Toko obat		3		3		5		5		5		5		
							Cemaran mikroba pada bahan pangan asal ternak	%		5		5		4		4		4		4		
							Pemotongan ternak di RPH	ekor/ bulan		100		100		110		110		110		110		
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya populasi ternak	%		8	Rp 3,140,000,000	8	Rp 3,530,000,000	8	Rp 4,195,000,000	8	Rp 5,065,500,000	8	Rp 5,392,050,000	8	Rp 5,392,050,000	
							Meningkatnya produksi aneka ternak	%		6		6		6		6		6		6		
						Program Peningkatan Agribisnis Peternakan	Meningkatnya nilai tukar peternak	%		0.27	Rp 1,090,000,000	0.23	Rp 1,040,000,000	0.25	Rp 1,210,000,000	0.25	Rp 1,310,000,000	0.25	Rp 1,721,000,000	0.25	Rp 1,721,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Peningkatan aksesabilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan	%		10		15		20		25		30		30		
							Peningkatan PDRB peternakan	%		10		10		10		10		10		10		
						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan	%		10	Rp 1,342,000,000	10	Rp 1,912,000,000	10	Rp 2,504,000,000	10	Rp 2,665,000,000	10	Rp 2,790,000,000	10	Rp 2,790,000,000	
							Pengembangan HPT	Ha		5		5		5		5		5		5		
							Pengembangan APPO dan rumah kompos	Unit		3		3		3		3		3		3		
							Penyediaan ban dan peralatan IB	Kec		6		6		6		6		6		6		
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	Ton/tahun		6,380	Rp 1,972,588,000	7,092	Rp 4,465,000,000	8,100	Rp 5,210,000,000	8,740	Rp 7,735,000,000	9,600	Rp 7,270,000,000	9,600	Rp 7,270,000,000	
						Program Pengembangan Perikanan	Peningkatan produksi perikanan nelayan (ton/tahun)	Ton/tahun		15,049.13	Rp 1,225,580,000	15,801.58	Rp 1,508,138,000	16,591.66	Rp 2,021,951,000	17,341.91	Rp 2,152,146,000	18,092.16	Rp 2,261,861,000	18,092.16	Rp 2,261,861,000	Dinas Perikanan
						Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	Peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun	Kg/kap/tahun		47	Rp 2,690,000,000	50.5	Rp 3,600,000,000	52.5	Rp 4,415,000,000	55	Rp 2,550,000,000	75.6	Rp 5,625,000,000	75.6	Rp 5,625,000,000	
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Ketahanan	Peningkatan Ketahanan	%		60	Rp 172,005,000	70	Rp 170,000,000	70	Rp 423,000,000	80	Rp 500,000,000	100	Rp 505,000,000	100	Rp 505,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pangan Pertanian/Perkebunan	Pangan Daerah															
						Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	Indeks		92.9	Rp 324,584,900	93.1	Rp 409,000,000	93.4	Rp 505,000,000	93.8	Rp 635,000,000	94.2	Rp 682,500,000	94.2	Rp 682,500,000	
						Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Stabilitas Harga,Pasokan dan Akses Pangan	%		<25, 5-40	Rp 123,050,000	<25, 5-40	Rp 195,000,000	<25, 5-40	Rp 400,000,000	<25, 5-40	Rp 495,000,000	<25, 5-40	Rp 580,000,000	<25, 5-40	Rp 580,000,000	
						Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Penurunan Kerawanan Pangan	%		5	Rp 224,251,200	5	Rp 290,000,000	5	Rp 295,000,000	5	Rp 428,500,000	5	Rp 575,000,000	5	Rp 575,000,000	
					Persentase Koperasi yang berkualitas	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT (kenaikan 10 % Tiap tahun)				Rp 321,812,500		Rp 284,000,000		Rp 281,000,000		Rp 277,000,000		Rp 285,000,000		Rp 285,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
						Program Pengembangan Usaha Koperasi	Meningkatnya Kemampuan SDM, Akses Permodalan dan Pemasaran produk Koperasi	Koperasi			Rp 177,000,000		Rp 214,000,000		Rp 226,000,000		Rp 230,000,000		Rp 234,000,000		Rp 234,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	**Persentase pertumbuhan wirausaha baru**	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro	UKM			Rp 121,943,000		Rp 223,000,000		Rp 231,000,000		Rp 238,000,000		Rp 247,000,000		Rp 247,000,000	
						Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Tumbuhnya Wirausaha Baru	Orang		20	Rp 121,360,000	100	Rp 50,000,000	100	Rp 55,000,000	120	Rp 70,000,000	120	Rp 75,000,000	120	Rp 75,000,000	
					Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Adanya ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	%		83	Rp 342,850,000	85	Rp 479,200,000	91	Rp 428,300,000	91	Rp 565,000,000	100	Rp 610,000,000	100	Rp 610,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kab. Kotawaringin Barat	Dok/ Kegiatan		13	Rp 662,912,500	16	Rp 1,081,667,500	16	Rp 1,022,876,737	16	Rp 1,610,000,000	16	Rp 1,450,000,000	16	Rp 1,450,000,000	
						Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Prosentase Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal	Kecamatan		60%	Rp 371,910,000	60%	Rp 379,000,000	70%	Rp 443,000,000	70%	Rp 750,000,000	80%	Rp 825,022,251	80%	Rp 825,022,251	
					Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	Data Objek Pajak Bertambah	Objek Pajak		500	Rp 272,597,800	600	Rp 638,447,000	700	Rp 1,070,000,000	800	Rp 1,389,000,000	900	Rp 1,725,000,000	900	Rp 1,725,000,000	Badan Pendapatan Daerah
						Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat	Jumlah objek pajak yang ditetapkan,	dokumen		500	Rp 801,000,000	600	Rp 1,226,000,000	700	Rp 1,800,000,000	800	Rp 2,000,000,000	900	Rp 2,150,000,000	900	Rp 2,150,000,000	
							Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	dokumen		400		420		440		460		500		500		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jumlah Keluhan Wajib Pajak	dokumen		50		45		35		30		25		25		
						Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	%		30%	Rp 756,530,400	30%	Rp 1,270,000,000	30%	Rp 2,100,000,000	30%	Rp 2,500,000,000	30%	Rp 2,700,000,000	30%	Rp 2,700,000,000	
						Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah	Prosentase piutang pajak daerah tahun berjalan terhadap realisasi pajak daerah	%		11%	Rp 270,000,000	11%	Rp 610,000,000	11%	Rp 1,427,000,000	11%	Rp 1,800,000,000	11%	Rp 2,250,000,000	11%	Rp 2,250,000,000	
				Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	**Indeks Williamson**	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	Km		950	Rp 5,448,732,800	955	Rp 6,200,000,000	960	Rp 6,200,000,000	965	Rp 6,200,000,000	970	Rp 6,200,000,000	970	Rp 6,200,000,000	Dinas PUPR
						Program pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	Km		255	Rp 8,400,000,000	270	Rp 9,500,000,000	270	Rp 9,500,000,000	270	Rp 9,750,000,000	270	Rp 9,750,000,000	270	Rp 9,750,000,000	
							Jumlah rumah tangga pengguna air bersih			54,808	Rp 3,000,000,000	58,311	Rp 3,000,000,000	65,600	Rp 2,500,000,000	70,976	Rp 2,500,000,000	75,579	Rp 1,500,000,000	75,579	Rp 1,500,000,000	
						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total	%		83.1	Rp 117,050,000,000	88.73	Rp 117,050,000,000	94.37	Rp 117,050,000,000	100	Rp 117,050,000,000	100	Rp 117,050,000,000	100	Rp 117,050,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							panjang jalan kabupaten															
						Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan informasi/ database jalan dan jembatan	Kecamatan		6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000		
						Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Luas permukiman kumuh yang tertangani	Ha		89.9 Ha	Rp 1,000,000,000	94.9 Ha	Rp 1,000,000,000	116.96 Ha	Rp 1,000,000,000	116.96 Ha	Rp 1,000,000,000	116.96 Ha	Rp 1,000,000,000	116.96 Ha	Rp 1,000,000,000		
						Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah penduduk terlayani air minum (jiwa)	Jiwa		219,231	Rp 9,299,000,000	233,245	Rp 8,299,000,000	262,401	Rp 9,299,000,000	283,903	Rp 10,299,000,000	306,317	Rp 8,299,000,000	306,317	Rp 8,299,000,000		
							Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK komunal/ SPAL terpusat (kk)	KK		62,439		67,556		72,889		74,711		76,579		76,579		
						Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan Drainase	Jiwa		140,108	Rp 12,750,000,000	149,206	Rp 12,750,000,000	156,760	Rp 12,750,000,000	154,598	Rp 12,750,000,000	172,730	Rp 12,750,000,000	172,730	Rp 12,750,000,000		
						Program Pengembangan dan	Meningkatkan layanan	DI+DIR		20 DI+DIR	Rp 12,019,750,000	20 DI+DIR	Rp 11,241,250,000	20 DI+DIR	Rp 11,067,750,000	20 DI+DIR	Rp 11,254,250,000	20 DI+DIR	Rp 11,080,750,000	20 DI+DIR	Rp 11,080,750,000		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	sarana dan prasarana jaringan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan															
						Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersediannya sumber air baku	Embung		5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	
						Program pengendalian banjir	Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi	Kawasan		7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	
						Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang	Cakupan informasi penataan ruang	Kecamatan		1 kecamatan	Rp 1,500,000,000	1 kecamatan	Rp 3,200,000,000	1 kecamatan	Rp 4,900,000,000	1 kecamatan	Rp 4,100,000,000	2 kecamatan	Rp 6,100,000,000	2 kecamatan	Rp 6,100,000,000	
							Tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
							Cakupan wilayah pengendalian	Kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							pemanfaatan ruang															
						Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas LLAJ	Keg.		1	Rp 1,055,000,000	6	Rp 3,436,000,000	3	Rp 3,100,000,000	3	Rp 7,145,000,000	4	Rp 11,361,000,000	4	Rp 11,361,000,000	Dishub
						Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan	Jenis		7	Rp 1,650,000,000	2	Rp 2,100,000,000	2	Rp 2,500,000,000								
						Program Pembangunan dan rehabilitasi /pemelihraan Prasarana dan fasilitas ASDP	Presentase tingkat kepuasan publik terhadap ketersediaan fasilitas ASDP	Jenis		8	Rp 1,237,250,000	2	Rp 525,000,000	1	Rp 2,000,000,000	1	Rp 3,000,000,000					
						Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh yang tertangani	%		80	Rp 730,000,000	90	Rp 4,310,000,000	95	Rp 8,465,000,000	97	Rp 10,275,000,000	100	Rp 12,585,000,000	100	Rp 12,585,000,000	Dinas Perkim
						Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan	Jumlah bidang Tanah yang ditata dalam penguasaa	%		60	Rp 351,600,000	62	Rp 480,000,000	65	Rp 593,000,000	68	Rp 700,000,000	70	Rp 800,000,000	70	Rp 800,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pemanfaatan Tanah	n, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di perumahan dan kawasan permukiman															
			Indeks IKLH	**Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana**	**1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan**	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan kualitas air, udara, dan tanah.Cakupan titik pengawasan terhadap penaatan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah.	Persentase		35%	Rp 275,290,000	36%	Rp 985,000,000	37%	Rp 825,000,000	38%	Rp 890,000,000	40%	Rp 2,925,000,000	40%	Rp 2,925,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
						Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan perlindungan dan konservasi SDA	Kecamatan		1	Rp 49,445,000	1	Rp 197,000,000	1	Rp 214,000,000	1	Rp 349,000,000	1	Rp 549,000,000	1	Rp 549,000,000	
						Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam serta keserasian	Persentase								10	Rp 400,000,000	15	Rp 100,000,000	15	Rp 100,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							/kelestarian lingkungan hidup															
						Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan kualitas udara	Persentase		30	Rp 55,260,000	31	Rp 90,000,000	32	Rp 430,000,000	33	Rp 580,000,000	34	Rp 610,000,000	34	Rp 610,000,000	
						Program Pengendalian kebakaran hutan	Cakupan pengendalian kebakaran hutan	Kecamatan		3	Rp 46,719,000	6	Rp 177,500,000	6	Rp 189,500,000	6	Rp 210,000,000	6	Rp 220,000,000	6	Rp 220,000,000	
						Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan lingkungan hidup	Jumlah Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup	Jumlah		20	Rp 86,430,000	25	Rp 95,000,000	30	Rp 100,000,000	30	Rp 105,000,000	30	Rp 110,000,000	30	Rp 110,000,000	
						Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Cakupan lembaga pendidikan yang meraih Adiwiyata	Sekolah		15	Rp 381,611,000	15	Rp 612,500,000	21	Rp 664,250,000	27	Rp 740,750,000	33	Rp 818,000,000	33	Rp 818,000,000	
							Cakupan wilayah yang telah berperan serta dalam mendukung kesadaran LH	Kecamatan		6		6		6		6		6		6		
						Program penanganan pengaduan dan penyelesaian	Cakupan terselesaikannya kasus-kasus lingkungan hidup	Kasus		5	Rp 23,050,000	10	Rp 57,000,000	10	Rp 70,000,000	10	Rp 73,000,000	10	Rp 81,000,000	10	Rp 81,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						sengketa lingkungan hidup																
						Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan penyediaan lahan RTH di kawasan perkotaan	Persentase		9.2	Rp 2,417,838,400	9.5	Rp 4,077,000,000	9.8	Rp 5,756,250,000	10	Rp 5,316,380,426	11	Rp 5,911,000,000	11	Rp 5,911,000,000	
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Cakupan kelompok pengelola persampahan berbasis masyarakat.	Persentase		44.78	Rp 8,063,597,200	49.64	Rp 15,991,740,000	54.67	Rp 18,515,337,273	59.35	Rp 23,689,505,910	64.93	Rp 24,751,432,186	64.93	Rp 24,751,432,186	
					Indeks Resiko Bencana	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%		24	Rp 480,600,000	33	Rp 1,012,000,000	41	Rp 941,000,000	50	Rp 1,067,000,000	59	Rp 1,674,000,000	59	Rp 1,674,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Program Tanggap Darurat	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	%		70	Rp 360,750,000	75	Rp 904,275,000	80	Rp 1,472,980,030	85	Rp 1,661,975,460	90	Rp 987,150,982	90	Rp 987,150,982	
4	**Meningkatkan kualitas**	**Mewujudkan pemban**	**Indeks Pembangunan**	**Meningkatnya toleransi**	**Persentase penuruna**	Program Pengembangan Wawasan	Persentase pelaksanaan pembangu				Rp 259,420,000		Rp 355,000,000		Rp 360,000,000		Rp 266,000,000		Rp 370,000,000		Rp 370,000,000	Badan Kesatuan Bangs

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	kehidupan beragama dan bermasyarakat.	**gunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis dengan penanaman nilai-nilai keagamaan**	**Masyarakat**	**kerukunan antar umat beragama**	**n konflik antar umat beragama**	Kebangsaan	nan yang sesuai dengan rencana															a Politik
						Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan				Rp 1,720,000,000		Rp 1,475,000,000		Rp 1,475,000,000		Rp 1,625,000,000		Rp 1,775,000,000		Rp 1,775,000,000	
						Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase pelaksanaan kegiatan dakwah dan syiar agama				Rp 800,000,000		Rp 1,042,711,100		Rp 1,050,000,000		Rp 1,450,000,000		Rp 1,600,000,000		Rp 1,600,000,000	Setda
						Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina				Rp 240,000,000		Rp 290,000,000		Rp 290,000,000		Rp 475,000,000		Rp 560,000,000		Rp 560,000,000	
				Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi	**Peningkatan jumlah Desa Mandiri**	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					Rp 1,023,951,000		Rp 1,148,603,000		Rp 1,250,133,000		Rp 1,305,133,000		Rp 1,340,133,000		Rp 1,340,133,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
						Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa		Baru			Rp 1,555,951,000		Rp 2,411,603,000		Rp 3,282,133,000		Rp 3,231,133,000		Rp 3,908,133,000		Rp 3,908,133,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				masyarakat desa		,UMKM dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin, dan Desa Tertinggal																
				Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layakk anak	**Indeks Pemberdayaan Gender**	Program peningkatan kualitas Hidup perempuan	Lembaga pemberdayaan perempuan				Rp -		Rp 130,000,000		Rp 200,000,000		Rp 239,600,000		Rp 270,000,000		Rp 270,000,000	DP3AP2KB
						Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Lembaga Organisasi Perempuan				Rp 395,071,739		Rp 401,000,000		Rp 492,000,000		Rp 585,000,000		Rp 665,000,000		Rp 665,000,000	
						Program peningkatan perlindungan Hak perempuan	Lembaga Pokja,Satgas KDRT				Rp 51,040,000		Rp 145,000,000		Rp 275,000,000		Rp 295,000,000		Rp 370,000,000		Rp 370,000,000	
						Program Pembinaan Keluarga Berencana	Frekwensi Kegiatan 10 Kali Keg.				Rp 38,990,000		Rp 155,000,000		Rp 130,000,000		Rp 145,000,000		Rp 185,000,000		Rp 185,000,000	
					Kategori Kabupaten Layak Anak		Data Keluarga Sejahtera															
						Program pengembangan Kabupaten Layak Anak	SRA, PRA, KRA. DELANA/KELANA				Rp 160,000,000		Rp 489,000,000		Rp 520,000,000		Rp 560,000,000		Rp 654,000,000		Rp 654,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Peningkatan Perlindungan Anak	Lembaga PATBM Desa/Kelurahan				Rp -		Rp 175,000,000		Rp 186,000,000		Rp 240,000,000		Rp 311,183,010		Rp 311,183,010	
						Proram Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Partisipasi Anak dan Hak Anak, Persentase Forum Anakk Tingkat Desa yang Terbentuk				Rp -		Rp 79,000,000		Rp 109,088,182		Rp 125,000,000		Rp 235,000,000		Rp 235,000,000	
5	**Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.**	**Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan**	**Angka Kemiskinan**	**Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis**	**Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk**	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (orang)			80	Rp 360,740,500	80	Rp 762,500,000	80	Rp 1,090,000,000	80	Rp 1,325,000,000	80	Rp 1,426,500,000	80	Rp 1,426,500,000	Dinas Sosial
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			100	Rp 245,650,000	100	Rp 549,150,000	100	Rp 710,000,000	100	Rp 793,150,000	100	Rp 903,150,000	100	Rp 903,150,000	
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			20	Rp 164,200,000	40	Rp 551,000,000	60	Rp 800,000,000	80	Rp 905,000,000	100	Rp 1,035,000,000	100	Rp 1,035,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						(PMKS) Lainnya.	(PMKS) Lainnnya.															
						Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (orang)			302	Rp 120,200,000	302	Rp 302,500,000	302	Rp 435,000,000	302	Rp 468,000,000	302	Rp 596,000,000	302	Rp 596,000,000	
						Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan				Rp 105,400,000		Rp 200,000,000		Rp 250,000,000		Rp 1,510,000,000		Rp 210,000,000		Rp 210,000,000	
				Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	**Persentase Penurunan jumlah Pengangguran Terebuka Terehadap Jumlah Penduduk**	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					Rp 1,618,038,030		Rp 1,790,192,833		Rp 2,052,221,757		Rp 2,352,055,020		Rp 2,806,466,024		Rp 2,806,466,024	Dinas Tenaga Kerja
						Peningkatan Kesempatan Kerja					Rp 675,000,000		Rp 810,000,000		Rp 972,000,000		Rp 1,166,400,000		Rp 1,399,680,000		Rp 1,399,680,000	
						Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					Rp 306,473,250		Rp 400,000,000		Rp 420,000,000		Rp 441,300,000		Rp 463,350,000		Rp 463,350,000	
				Meningkatnya keamanan,	**Persentase penurunan**	Program peningkatan kemanan dan kenyaman					Rp 757,075,000		Rp 679,700,200		Rp 680,200,000		Rp 680,721,000		Rp 681,521,500		Rp 681,521,500	Satpol PP

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				kenyamanan, dan ketertiban umum	**pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya**	an lingkungan																
						Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)					Rp 892,658,397		Rp 915,658,397		Rp 922,658,397		Rp 957,958,397		Rp 962,888,397		Rp 962,888,397	
						Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							Rp 66,164,000		Rp 73,141,140		Rp 87,820,000		Rp 97,820,000		Rp 97,820,000	
						Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal					Rp 111,785,000		Rp 132,285,000		Rp 111,785,000		Rp 111,785,000		Rp 111,785,000		Rp 111,785,000	
						Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal	Menjaga dan memelihara daerah Kab.Ktw.Barat agar tetap aman dan kondusif				Rp 104,975,000		Rp 500,000,000		Rp 500,000,000		Rp 600,000,000		Rp 700,000,000		Rp 700,000,000	Bakesbangpol
6	**Melestarikan situs budaya, kesenian**	**Peningkatan Pariwisa**	**Tourism Intensity**	**Meningkatnya Nilai Keraifan Lokal**	**Persentase Destinasi Wisata**	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					Rp 1,623,999,400		Rp 3,390,000,000		Rp 3,279,924,242		Rp 6,028,683,733		Rp 6,650,000,000		Rp 6,650,000,000	**Dinas Pariwisata**

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata	ta Daerah		Produk dan Destinasi Wisata	Khas Daerah Terkelola	Program Pengembangan Nilai Budaya				4	Rp 200,000,000	4	Rp 220,000,000	4	Rp 242,000,000	4	Rp 266,200,000	4	Rp 292,820,000	4	Rp 292,820,000	
					Persentase Jenis Produk Lokal Kepariwisataan	Program Pngembangan Ekonomi kreatif					Rp 759,000,000		Rp 1,786,906,850		Rp 1,775,000,000		Rp 3,200,000,000		Rp 3,430,589,693		Rp 3,430,589,693	
				Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan	Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus	Program pengembangan pemasaran pariwisata					Rp 1,267,000,000		Rp 2,350,000,000		Rp 2,575,000,000		Rp 3,100,000,000		Rp 3,450,000,000		Rp 3,450,000,000	
					Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	Program pengembangan kemitraan					Rp 420,000,000		Rp 550,000,000		Rp 550,000,000		Rp 575,000,000		Rp 700,000,000		Rp 700,000,000	



BAB VII: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Indikasi Program Prioritas disertai Indikator Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi

program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Program Prioritas II merupakan program dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Bupati terpilih yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Prioritas III merupakan program ditingkat OPD yang merupakan program rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Program prioritas III untuk dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemereintahan lainnya.

Tabel 7.1: Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022

PROGRAM	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PRIORITAS 1 :						
TOTAL (Rp)	Rp. 101,772,898,701	Rp. 110,545,317,726	Rp. 164,907,173,357	Rp. 166,314,040,409	Rp. 152,267,962,699	Rp. 152,500,411,481
% Terhadap BL	15%	15%	17.66%	17%	15%	14%
PRIORITAS 2 :						
TOTAL (Rp)	Rp. 556,383,113,461	Rp. 601,836,187,995	Rp. 717,123,351,572	Rp. 751,215,886,968	Rp. 792,788,423,191	Rp. 834,273,067,973
% Terhadap BL	81%	80%	76.78%	77%	78%	79%
PRIORITAS 3 :						
TOTAL (Rp)	Rp. 29,216,865,688	Rp. 39,579,136,600	Rp. 51,955,237,706	Rp. 57,522,721,505	Rp. 68,252,152,562	Rp. 73,911,852,465
% Terhadap BL	4%	5%	5.56%	6%	7%	7%
BELANJA LANGSUNG	**Rp. 687,372,877,850**	**Rp. 751,960,642,321**	**Rp. 933,985,762,635**	**Rp. 975,052,648,882**	**Rp. 1,013,308,538,452**	**Rp. 1,060,685,331,918**

Selain itu demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik. tentunya perlu diperhatikan pula kapasitas riil Kabupaten Kotawaringin Barat. Idealnya Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Berikut merupakan proyeksi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 7. 2: Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah Tahun 2018-2022

Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kapasita Riil Keuangan	835,622,044,000.00	853,644,069,437.74	945,133,363,484.43	1,064,169,953,150.05	1,246,642,358,119.28	1,361,009,213,203.20
Belanja	1.393.340.902.000	1.547.903.039.070	1.797.141.664.005	2.033.262.466.575	2.269.383.269.145	2.505.504.071.715
Belanja Tidak Langsung	616.998.598.000	793.903.039.070	939.141.664.005	1.045.262.466.575	1.089.303.969.190	1.202.641.954.423
Belanja Pegawai	431.635.541.000	512.371.331.704	569.561.440.957	633.135.023.277	703.804.592.226	782.362.191.045
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	26.936.865.000	27.240.462.757	29.478.470.188	31.900.346.641	34.521.198.330	37.357.372.556
Belanja Bantual Sosial	2.448.000.000	1.915.583.583	1.498.962.608	1.172.952.682	917.846.773	718.223.942
Belanja Bagi Hasil	8.701.168.700	5.628.331.062	5.233.783.932	4.866.894.636	4.525.724.352	4.208.470.173
Belanja Bantuan Keuangan	145.277.023.300	211.348.448.284	313.314.702.503	464.475.152.772	688.563.817.206	1.020.765.325.198
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000.00	2.757.310.742	1.552.276.000	873.880.750	491.966.355
Belanja Langsung	776.342.304.000	754.000.000.000	858.000.000.000	988.000.000.000	1.180.079.299.955	1.302.862.117.292

Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	104.185.864.791	119.363.216.703	154.766.094.770	200.669.391.729	260.187.509.651	337.358.575.691
Belanja Modal	262.323.797.674	285.417.687.746	342.602.141.932	411.243.705.962	493.637.852.759	592.539.961.447
Belanja Barang dan Jasa	409.832.641.535	414.567.914.159	501.965.444.665	607.787.768.980	735.919.127.598	891.062.620.878

Selanjutnya. berikut disajikan program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan berdasarkan prioritas program tersebut.

Tabel 7. 3: Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017

Program	Indikator Program	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
				2017		
				target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Rp 39,018,063,990	Seluruh SKPD
Program peningkatan disiplin aparatur					Rp 3,040,150,000	Seluruh SKPD
Program fasilitasi pindah purna tugas PNS					Rp 888,809,800	Seluruh SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Rp 373,424,000	Seluruh SKPD
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran					Rp 52,645,499,911	Seluruh SKPD
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Rp 5,806,951,000	Seluruh SKPD

Tabel 7. 4. Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022

Program	Indikator Program	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Orang		10	Rp 96,000,000	8	Rp 36,000,000	8	Rp 36,000,000	8	Rp 36,000,000	8	Rp 36,000,000	8	Rp 36,000,000	Seluruh SKPD
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bimtek, dll)	Orang				15	Rp 90,000,000	15	Rp 90,000,000	15	Rp 90,000,000	15	Rp 90,000,000	15	Rp 90,000,000	Seluruh SKPD
Program Penyusunan Dokumen Internal							Rp 39,417,500		Rp 50,000,000		Rp 58,000,000		Rp 75,000,000		Rp 75,000,000	Seluruh SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Rp 39,626,185,464		Rp 87,086,960,930		Rp 83,752,242,216		Rp 63,585,094,071		Rp 57,728,728,208		Rp 57,728,728,208	Seluruh SKPD
Program peningkatan disiplin aparatur					Rp 3,332,735,000		Rp 3,766,621,277		Rp 3,781,308,489		Rp 4,238,724,390		Rp 4,249,968,187		Rp 4,249,968,187	Seluruh SKPD
Program fasilitasi pindah purna tugas PNS					Rp 320,900,000		Rp 515,900,000		Rp 661,500,000		Rp 603,920,000		Rp 686,582,000		Rp 686,582,000	Seluruh SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Rp 1,135,402,095		Rp 1,296,515,035		Rp 1,456,274,278		Rp 1,649,939,780		Rp 1,953,145,908		Rp 1,953,145,908	Seluruh SKPD
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran					Rp 60,745,736,967		Rp 66,148,778,595		Rp 70,167,658,404		Rp 74,878,790,309		Rp 79,987,504,064		Rp 79,987,504,064	Seluruh SKPD
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Rp 5,288,358,200		Rp 5,926,980,020		Rp 6,319,057,022		Rp 7,127,494,149		Rp 7,693,483,114		Rp 7,693,483,114	Seluruh SKPD

Tabel 7. 5: Capaian Kinerja Program Prioritas 2 dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
Pendidikan						
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan	Jumlah guru bersertifikat pendidik	orang			Rp 1,879,555,500.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah kelompok kerja guru yang terbina	kelompok				
	Jumlah pelatihan pendidik dan tenaga pendidik terlaksana	kegiatan				
	Jumlah guru honor	orang				
Program manajemen pelayanan pendidikan	Jumlah operator IT yang terlatih	orang			Rp 414,690,000.00	
	Montoring evaluasi kegiatan terlaksana	Dokumen				
Program pendidikan anak usia dini (PAUD)	TKN Pembina yang dibangun Ruang kelas baru bertambah Jumlah ruang kelas tercukupi meubeler Alat praktik dan peraga tersedia Persentase BOP TK yang tersalur	Unit ruang ruang paket persen			Rp 3,456,653,500.00	
Pogram pendidikan Nonformal	Ruang belajar pendidikan kesetaraan terbangun Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang terdata	ruang lembaga			Rp 759,290,000.00	
Program Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah USB Terbangun Ruang kelas baru bertambah Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur Jumlah ruang kelas terehabilitasi Jumlah kantor sekolah terbangun Jumlah rumah dinas guru terbangun Jumlah rumah dinas terehabilitasi	Unit ruang ruang ruang unit unit unit			Rp 29,503,897,300.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah USB Terbangun Ruang kelas baru bertambah Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur Jumlah ruang kelas terehabilitasi Jumlah kantor sekolah terbangun Jumlah rumah dinas guru terbangun Jumlah rumah dinas terehabilitasi	Unit ruang ruang ruang unit unit unit				
Kesehatan						
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					Rp 5,739,702,000	DINKES
Program Upaya Kesehatan Masyarakat					Rp 19,737,017,760	
Program Pengawasan Obat dan Makanan					Rp 783,485,000	
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia					Rp 39,215,000	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					Rp 667,029,500	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat					Rp 255,200,000	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat					Rp 732,366,800	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					Rp 1,175,039,750	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					Rp 1,275,328,250	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya					Rp 6,197,500,000	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					Rp 18,793,998,000	
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita					Rp 84,254,800	
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia					Rp 76,460,000	
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					Rp 2,648,389,000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Rp 2,398,961,250	RSUD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Rp 1,370,986,500	
Program peningkatan disiplin aparatur					Rp 294,050,000	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Rp 145,500,000	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Rp 11,000,000	
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata					Rp 51,013,946,250	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					Rp 436,000,000	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat					Rp 75,900,000,000	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Brojong					Rp 1,636,303,400	Dinas PUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					Rp 145,848,309,600	
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong					Rp 11,344,000,000	
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					Rp 3,722,642,800	
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan					Rp 200,000,000	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					Rp 26,411,485,200	
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya					Rp 1,865,475,000	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					Rp 10,366,688,800	
Program Pengendalian Banjir					Rp 5,629,048,400	
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					Rp 7,615,560,000	
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan					Rp 10,298,901,500	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Program Pengembangan Perumahan					Rp 320,000,000	Dinas Perkim
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal	Menjaga dan memelihara daerah Kab.Ktw.Barat agar tetap aman dan kondusif				Rp 556,060,000	Bakesbangpol
Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana				Rp 286,705,000	
Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD				Rp 2,484,277,500	Satpol PP
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)					Rp 210,758,397	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					Rp 13,625,000	
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama					Rp 270,000,000	Setda
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan					Rp 136,050,000	
Sosial						
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (orang)				Rp 389,995,500	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnnya.					Rp 474,175,000	Dinas Sosial
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (orang)				Rp 373,220,000	
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan				Rp 113,500,000	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
Tenaga Kerja						
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					Rp 1,912,284,300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peningkatan Kesempatan Kerja					Rp 272,708,542	
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					Rp 267,078,250	
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						
Program peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan					Rp 125,251,500	DP3AP2KB
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					Rp 614,849,800	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pembinaan Keluarga Berencana					Rp 34,800,000	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					Rp 194,900,000	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					Rp 26,275,000	
Pangan						
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan					Rp 430,998,000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					Rp 132,200,000	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					Rp 387,375,200	
Pertanahan						
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					Rp 150,000,000	Dinas Perkim
Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana						
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					Rp 7,740,586,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					Rp 870,582,800	
Program Perlindungam dan Konservasi Sumber Daya Alam					Rp 27,000,000	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					Rp 460,875,000	
Program Peningkatan Pengendalian Polusi					Rp 20,000,000	
Program Pengendalian Kebakaran Hutan					Rp 73,547,000	
Program Pengelompokan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Rp 1,662,864,000	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					Rp 616,627,500	BPBD
Program Tanggap Darurat					Rp 68,250,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Program Penataan Administrasi Kependudukan					Rp 874,955,900	Dispendukcapil
Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa						
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					Rp 188,984,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa					Rp 239,700,100	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					Rp 1,346,997,000	
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					Rp 484,607,300	
Perhubungan						
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					Rp 929,982,000	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLASDP					Rp 858,100,000	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					Rp 2,555,800,000	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					Rp 480,425,000	
Komunikasi dan Informatika						
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					Rp 307,812,500	Diskominfo
Program kerjasama informsi dan media massa					Rp 964,531,500	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					Rp 1,420,350,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					Rp 892,540,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					Rp 281,030,000	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					Rp 186,777,500	
Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM					Rp 186,042,500	
Penanaman Modal						
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					Rp 156,390,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					Rp 221,948,800	
Pemuda dan Olahraga						
Program peningkatan peran serta kepemudaan					Rp 340,158,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					Rp 2,230,000,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					Rp 178,000,000	
Perpustakaan						
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					Rp 687,362,250	DPK
URUSAN PILIHAN						
Kelautan dan Perikanan						
Program Pengembangan Budidaya Perikanan					Rp 4,480,489,000	Dinas Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap					Rp 6,311,206,500	
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan					Rp 746,869,500	
Pariwisata						

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program pengembangan pemasaran pariwisata					Rp 679,033,000	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					Rp 5,167,782,500	
Program pengembangan kemitraan					Rp 50,000,000	
Pertanian						
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan					Rp 5,683,096,150	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					Rp 877,625,000	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi					Rp 133,475,000	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					Rp 1,823,376,800	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					Rp 1,953,786,250	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					Rp 1,523,844,250	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					Rp 2,926,776,450	
Perdagangan						
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					Rp 194,584,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					Rp 149,160,000	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					Rp 17,549,901,100	
Perindustrian						
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi					Rp 158,403,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					Rp 130,750,000	
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial					Rp 39,475,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah)						
Program Pengembangan data/informasi					Rp 47,007,500	Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah					Rp 1,439,103,700	
Program perencanaan pembangunan ekonomi					Rp 117,362,500	
Program perencanaan sosial budaya					Rp 178,930,500	
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam					Rp 357,185,000	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					Rp 1,338,999,500	Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					Rp 317,000,000	
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					Rp 45,189,300	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keuangan)						
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					Rp 2,070,386,600	BPKAD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp 1,773,809,900	Badan Pendapatan Daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					Rp 131,530,000	Kecamatan
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keorganisasian, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah)						
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					Rp 2,498,868,500	BKPP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	IndikatorKinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur					Rp 1,637,599,000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi					Rp 150,040,912	Setda
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					Rp 5,242,622,050	Sekwan

Tabel 7. 6. Capaian Kinerja Program Prioritas 2 dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Pendidikan																
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan	Jumlah guru bersertifikat pendidik	orang		1250	Rp 2,214,555,500	1250	Rp 2,361,011,050	1400	Rp 2,597,112,155	1540	Rp 2,856,823,371	1800	Rp 3,142,505,708	1800	Rp 3,142,505,708	Dinas Pendidikan
	Jumlah kelompok kerja guru yang terbina	kelompok		5		5		5		5		5		5		
	Jumlah pelatihan pendidik dan tenaga pendidik terlaksana	kegiatan		3		3		3		3		3		3		
	Jumlah guru honor	orang		55		55		55		55		55		55		
Program manajemen pelayanan pendidikan	Jumalh operator IT yang terlatih	orang		6	Rp 395,000,000	3	Rp 434,500,000	8	Rp 477,950,000	9	Rp 525,745,000	6	Rp 578,319,500	6	Rp 578,319,500	
	Montoring evaluasi kegiatan terlaksana	Dokumen		3		3		3		3		3		3		
Program pendidikan anak usia dini (PAUD)	TKN Pembina yang dibangun	Unit		0	Rp 2,523,210,000	1	Rp 3,676,031,000	0	Rp 4,043,634,100	0	Rp 5,448,002,310	0	Rp 5,992,802,541	0	Rp 5,992,802,541	
	Ruang kelas baru bertambah	ruang		2		2		2		2		2		2		
	Jumlah ruang kelas tercukupi meubeler	ruang		6		6		6		6		6		6		
	Alat praktik dan peraga tersedia	paket		2		2		2		2		2		2		
	Persentase BOP TK yang tersalur	persen		82		84		87		89		91		91		
Pogram pendidikan Nonformal	Ruang belajar pendidikan kesetaraan terbangun	ruang		2	Rp 620,000,000	0	Rp 682,000,000	0	Rp 750,200,000	2	Rp 825,220,000	0	Rp 907,742,000	0	Rp 998,516,200	
	Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang terdata	lembaga		21		21		21		21		21		21		
	Jumlah USB Terbangun	Unit		1		0		1		0		0		0		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pendidikan Sekolah Dasar	Ruang kelas baru bertambah	ruang		6	Rp 14,870,750,000	6	Rp 22,715,625,000	6	Rp 24,195,430,700	6	Rp 27,614,973,770	6	Rp 30,376,471,147	6	Rp 30,376,471,147	
	Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur	ruang		9		9		9		9		9		9		
	Jumlah ruang kelas terehabilitasi	ruang		12		12		12		12		12		12		
	Jumlah kantor sekolah terbangun	unit		5		5		5		5		5		5		
	Jumlah rumah dinas guru terbangun	unit		3		3		3		3		3		3		
	Jumlah rumah dinas terehabilitasi	unit		5		5		5		5		5		5		
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah USB Terbangun	Unit		0	Rp 12,012,159,799	0	Rp 16,713,375,779	0	Rp 17,888,859,357	0	Rp 22,677,745,292	0	Rp 24,945,519,822	0	Rp 24,945,519,822	
	Ruang kelas baru bertambah	ruang		3		3		3		3		3		3		
	Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur	ruang		15		15		15		15		15		15		
	Jumlah ruang kelas terehabilitasi	ruang		3		3		3		3		3		3		
	Jumlah kantor sekolah terbangun	unit		4		4		4		4		4		4		
	Jumlah rumah dinas guru terbangun	unit		4		4		4		4		4		4		
	Jumlah rumah dinas terehabilitasi	unit		3		3		3		3		3		3		
Kesehatan																
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	angka kesakitan	%		25	Rp 7,900,000,000	24	Rp 7,168,000,000	23	Rp 6,468,000,000	22	Rp 6,292,900,000	20	Rp 6,149,710,000	20	Rp 6,149,710,000	DINKES
	angka kematian	%		15		14.5		13		12.5		11		11		
Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	FKTP yang terakreditasi	%		60	Rp 7,510,903,250	70	Rp 9,309,083,575	80	Rp 9,645,522,625	90	Rp 10,328,455,200	100	Rp 12,185,081,000	100	Rp 12,185,081,000	
Program Sumber Daya Kesehatan	Kondisi sarana dan Prasarana dalam kondisi mantap	%		75	Rp 52,314,919,000	80	Rp 65,292,843,400	85	Rp 69,152,992,740	87	Rp 49,574,690,000	90	Rp 53,793,786,000	90	Rp 53,793,786,000	
	Rasio dan Distribusi tenaga Kesehatan	%		60		70		75		80		85		85		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Upaya kesehatan Masyarakat	Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		75	Rp 2,315,600,000	80	Rp 2,084,450,000	85	Rp 2,020,800,000	90	Rp 2,109,324,000	95	Rp 2,201,950,000	95	Rp 2,201,950,000	
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah kegiatan pembangunan rumah sakit	unit		10	Rp 7,700,000,000	11	Rp 7,931,000,000	11	Rp 8,168,930,000	12	Rp 8,413,997,900	12	Rp 8,666,417,837	12	Rp 8,926,410,372	
	Jumlah alat-alat rumah sakit diadakan	paket		1	Rp 35,000,000,000	1	Rp 36,050,000,000	1	Rp 37,131,500,000	1	Rp 38,245,445,000	1	Rp 39,392,808,350	1	Rp 40,574,592,601	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah in service training yang diadakan	kegiatan		4	Rp 150,000,000	4	Rp 154,500,000	4	Rp 159,135,000	4	Rp 163,909,050	4	Rp 168,826,322	4	Rp 173,891,111	
	Jumlah seminar, workshop, pelatihan yang diikuti	kali		18	Rp 110,000,000	20	Rp 113,300,000	22	Rp 116,699,000	24	Rp 120,199,970	25	Rp 123,805,969	25	Rp 127,520,148	
	Jumlah bantuan pengobatan pasien kurang mampu yang diberikan	pasien		150	Rp 300,000,000	150	Rp 309,000,000	155	Rp 318,270,000	165	Rp 327,818,100	170	Rp 337,652,643	170	Rp 347,782,222	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan	kunjungan		70000	Rp 150,000,000	72000	Rp 154,500,000	74000	Rp 159,135,000	75000	Rp 163,909,050	76000	Rp 168,826,322	76000	Rp 173,891,111	RSUD
	Jumlah kunjungan pasien rawat inap	kunjungan		70000	Rp 150,000,000	72000	Rp 154,500,000	74000	Rp 159,135,000	75000	Rp 163,909,050	76000	Rp 168,826,322	76000	Rp 173,891,111	
	Jumlah kunjungan pasien gawat darurat	kunjungan		17000	Rp 160,000,000	17500	Rp 164,800,000	18000	Rp 169,744,000	18500	Rp 174,836,320	19000	Rp 180,081,410	19000	Rp 185,483,852	
	Jumlah pelayanan tindakan rehabilitasi medik	tindakan		6000	Rp 56,000,000	6500	Rp 57,680,000	6750	Rp 59,410,400	6900	Rp 61,192,712	7000	Rp 63,028,493	7000	Rp 64,919,348	
	Jumlah pemberian pelayanan hemodialisis	tindakan		3000	Rp 1,350,000,000	3050	Rp 1,390,500,000	3100	Rp 1,432,215,000	3200	Rp 1,475,181,450	3300	Rp 1,519,436,894	3300	Rp 1,565,020,000	
	Jumlah Hari Rawat pasien rawat inap	Hari Rawat		56000	Rp 400,000,000	57000	Rp 412,000,000	57500	Rp 424,360,000	58000	Rp 437,090,800	58500	Rp 450,203,524	58500	Rp 463,709,630	
	Jumlah Hari Rawat pasien ICU	Hari Rawat		1000	Rp 75,000,000	1500	Rp 77,250,000	2000	Rp 79,567,500	2500	Rp 81,954,525	3000	Rp 84,413,161	3000	Rp 86,945,556	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah pasien bedah sentral yang dilayani	tindakan		4500	Rp 60,000,000	4600	Rp 61,800,000	4700	Rp 63,654,000	4800	Rp 65,563,620	4800	Rp 67,530,529	4800	Rp 69,556,444	
	Jumlah makanan pasien yang diberikan	Hari Rawat		56000	Rp 1,800,000,000	57000	Rp 1,854,000,000	57500	Rp 1,909,620,000	58000	Rp 1,966,908,600	58500	Rp 2,025,915,858	58500	Rp 2,086,693,334	
	Jumlah pemeriksaan laboratorium PK	pemeriksaan		12000	Rp 1,800,000,000	13000	Rp 1,854,000,000	13500	Rp 1,909,620,000	14000	Rp 1,966,908,600	14500	Rp 2,025,915,858	14500	Rp 2,086,693,334	
	Jumlah pelayanan foto Rontgen	pemeriksaan		6700	Rp 510,000,000	7000	Rp 525,300,000	7500	Rp 541,059,000	7700	Rp 557,290,770	7900	Rp 574,009,493	7900	Rp 591,229,778	
	Jumlah resep obat yang dilayani	resep		88000	Rp 21,000,000,000	90000	Rp 21,630,000,000	92000	Rp 22,278,900,000	94000	Rp 22,947,267,000	96000	Rp 23,635,685,010	96000	Rp 24,344,755,560	
	Jumlah linen yang dicuci	kg		60583	Rp 155,000,000	60600	Rp 159,650,000	60900	Rp 164,439,500	61000	Rp 169,372,685	62000	Rp 174,453,866	62000	Rp 179,687,482	
	Jumlah jenazah yang diberikan pelayanan	orang		185	Rp 10,000,000	192	Rp 10,300,000	199	Rp 10,609,000	200	Rp 10,927,270	205	Rp 11,255,088	205	Rp 11,592,741	
	Jumlah kegiatan pelayanan Sarpras yang dilakukan	kegiatan		12	Rp 5,000,000,000	12	Rp 5,150,000,000	12	Rp 5,304,500,000	12	Rp 5,463,635,000	12	Rp 5,627,544,050	12	Rp 5,796,370,372	
	Jumlah kegiatan pelayanan logistik yang dilakukan	kali		10	Rp 85,000,000	11	Rp 87,550,000	12	Rp 90,176,500	13	Rp 92,881,795	14	Rp 95,668,249	14	Rp 98,538,296	
	Jumlah pegawai yg diberi pelatihan	orang		400	Rp 2,500,000,000	420	Rp 2,575,000,000	450	Rp 2,652,250,000	460	Rp 2,731,817,500	470	Rp 2,813,772,025	470	Rp 2,898,185,186	
	Jumlah pembuatan surat keterangan medik	buah		590	Rp 1,200,000,000	600	Rp 1,236,000,000	650	Rp 1,273,080,000	670	Rp 1,311,272,400	680	Rp 1,350,610,572	680	Rp 1,391,128,889	
	Jumlah pengadaan software SIMRS	paket		5	Rp 700,000,000	4	Rp 721,000,000	3	Rp 742,630,000	2	Rp 764,908,900	2	Rp 787,856,167	2	Rp 811,491,852	
	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan yang dibuat	buah		7500	Rp 720,000,000	7700	Rp 741,600,000	7800	Rp 763,848,000	7900	Rp 786,763,440	7950	Rp 810,366,343	7950	Rp 834,677,333	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Evaluasi perjanjian kerjasama pihak ke-3	buah		81	Rp 75,000,000	60	Rp 77,250,000	30	Rp 79,567,500	20	Rp 81,954,525	10	Rp 84,413,161	10	Rp 86,945,556	
	Jumlah kegiatan kepegawaian yang dilaksanakan	kegiatan		4	Rp 120,000,000	4	Rp 123,600,000	4	Rp 127,308,000	4	Rp 131,127,240	4	Rp 135,061,057	4	Rp 139,112,889	
	Jumlah kegiatan PKRS yang dilaksanakan	kali		51	Rp 320,000,000	56	Rp 329,600,000	58	Rp 339,488,000	60	Rp 349,672,640	62	Rp 360,162,819	62	Rp 370,967,704	
	Jumlah jasa pelayanan, uang makan dll yang diberikan	orang		503	Rp 45,000,000,000	507	Rp 46,350,000,000	507	Rp 47,740,500,000	510	Rp 49,172,715,000	510	Rp 50,647,896,450	510	Rp 52,167,333,344	
	Jumlah pelayanan transportasi yang dilakukan	kali		1355	Rp 350,000,000	1400	Rp 360,500,000	1430	Rp 371,315,000	1500	Rp 382,454,450	1550	Rp 393,928,084	1550	Rp 405,745,926	
	Jumlah kantong darah yang dibeli	kantong		1135	Rp 2,000,000,000	1200	Rp 2,060,000,000	1250	Rp 2,121,800,000	1300	Rp 2,185,454,000	1350	Rp 2,251,017,620	1350	Rp 2,318,548,149	
	Jumlah kegiatan perencanaan yg dilakukan	kegiatan		1	Rp 170,000,000	1	Rp 175,100,000	1	Rp 180,353,000	1	Rp 185,763,590	1	Rp 191,336,498	1	Rp 197,076,593	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah standar pelayanan kesehatan yang disusun	buku		4	Rp 445,000,000	5	Rp 458,350,000	5	Rp 472,100,500	6	Rp 486,263,515	6	Rp 500,851,420	6	Rp 515,876,963	
	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemuthakiran data dasar	kali		4	Rp 480,000,000	4	Rp 494,400,000	4	Rp 509,232,000	4	Rp 524,508,960	4	Rp 540,244,229	4	Rp 556,451,556	
	Jumlah kunjungan pasien gawat darurat	kunjungan		17000	Rp 160,000,000	17500	Rp 164,800,000	18000	Rp 169,744,000	18500	Rp 174,836,320	19000	Rp 180,081,410	19000	Rp 185,483,852	
	Jumlah pelayanan tindakan rehabilitasi medik	tindakan		6000	Rp 56,000,000	6500	Rp 57,680,000	6750	Rp 59,410,400	6900	Rp 61,192,712	7000	Rp 63,028,493	7000	Rp 64,919,348	
	Jumlah pemberian pelayanan hemodialisis	tindakan		3000	Rp 1,350,000,000	3050	Rp 1,390,500,000	3100	Rp 1,432,215,000	3200	Rp 1,475,181,450	3300	Rp 1,519,436,894	3300	Rp 1,565,020,000	
	Jumlah Hari Rawat pasien rawat inap	Hari Rawat		56000	Rp 400,000,000	57000	Rp 412,000,000	57500	Rp 424,360,000	58000	Rp 437,090,800	58500	Rp 450,203,524	58500	Rp 463,709,630	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Hari Rawat pasien ICU	Hari Rawat		1000	Rp 75,000,000	1500	Rp 77,250,000	2000	Rp 79,567,500	2500	Rp 81,954,525	3000	Rp 84,413,161	3000	Rp 86,945,556	
	Jumlah pasien bedah sentral yang dilayani	tindakan		4500	Rp 60,000,000	4600	Rp 61,800,000	4700	Rp 63,654,000	4800	Rp 65,563,620	4800	Rp 67,530,529	4800	Rp 69,556,444	
	Jumlah makanan pasien yang diberikan	Hari Rawat		56000	Rp 1,800,000,000	57000	Rp 1,854,000,000	57500	Rp 1,909,620,000	58000	Rp 1,966,908,600	58500	Rp 2,025,915,858	58500	Rp 2,086,693,334	
	Jumlah pemeriksaan laboratorium PK	pemeriksaan		12000	Rp 1,800,000,000	13000	Rp 1,854,000,000	13500	Rp 1,909,620,000	14000	Rp 1,966,908,600	14500	Rp 2,025,915,858	14500	Rp 2,086,693,334	
	Jumlah pelayanan foto Rontgen	pemeriksaan		6700	Rp 510,000,000	7000	Rp 525,300,000	7500	Rp 541,059,000	7700	Rp 557,290,770	7900	Rp 574,009,493	7900	Rp 591,229,778	
	Jumlah resep obat yang dilayani	resep		88000	Rp 21,000,000,000	90000	Rp 21,630,000,000	92000	Rp 22,278,900,000	94000	Rp 22,947,267,000	96000	Rp 23,635,685,010	96000	Rp 24,344,755,560	
	Jumlah linen yang dicuci	kg		60583	Rp 155,000,000	60600	Rp 159,650,000	60900	Rp 164,439,500	61000	Rp 169,372,685	62000	Rp 174,453,866	62000	Rp 179,687,482	
	Jumlah jenazah yang diberikan pelayanan	orang		185	Rp 10,000,000	192	Rp 10,300,000	199	Rp 10,609,000	200	Rp 10,927,270	205	Rp 11,255,088	205	Rp 11,592,741	
	Jumlah kegiatan pelayanan Sarpras yang dilakukan	kegiatan		12	Rp 5,000,000,000	12	Rp 5,150,000,000	12	Rp 5,304,500,000	12	Rp 5,463,635,000	12	Rp 5,627,544,050	12	Rp 5,796,370,372	
	Jumlah kegiatan pelayanan logistik yang dilakukan	kali		10	Rp 85,000,000	11	Rp 87,550,000	12	Rp 90,176,500	13	Rp 92,881,795	14	Rp 95,668,249	14	Rp 98,538,296	
	Jumlah pegawai yg diberi pelatihan	orang		400	Rp 2,500,000,000	420	Rp 2,575,000,000	450	Rp 2,652,250,000	460	Rp 2,731,817,500	470	Rp 2,813,772,025	470	Rp 2,898,185,186	
	Jumlah pembuatan surat keterangan medik	buah		590	Rp 1,200,000,000	600	Rp 1,236,000,000	650	Rp 1,273,080,000	670	Rp 1,311,272,400	680	Rp 1,350,610,572	680	Rp 1,391,128,889	
	Jumlah pengadaan software SIMRS	paket		5	Rp 700,000,000	4	Rp 721,000,000	3	Rp 742,630,000	2	Rp 764,908,900	2	Rp 787,856,167	2	Rp 811,491,852	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan yang dibuat	buah		7500	Rp 720,000,000	7700	Rp 741,600,000	7800	Rp 763,848,000	7900	Rp 786,763,440	7950	Rp 810,366,343	7950	Rp 834,677,333	
	Evaluasi perjanjian kerjasama pihak ke-3	buah		81	Rp 75,000,000	60	Rp 77,250,000	30	Rp 79,567,500	20	Rp 81,954,525	10	Rp 84,413,161	10	Rp 86,945,556	
	Jumlah kegiatan kepegawaian yang dilaksanakan	kegiatan		4	Rp 120,000,000	4	Rp 123,600,000	4	Rp 127,308,000	4	Rp 131,127,240	4	Rp 135,061,057	4	Rp 139,112,889	
	Jumlah kegiatan PKRS yang dilaksanakan	kali		51	Rp 320,000,000	56	Rp 329,600,000	58	Rp 339,488,000	60	Rp 349,672,640	62	Rp 360,162,819	62	Rp 370,967,704	
	Jumlah jasa pelayanan, uang makan dll yang diberikan	orang		503	Rp 45,000,000,000	507	Rp 46,350,000,000	507	Rp 47,740,500,000	510	Rp 49,172,715,000	510	Rp 50,647,896,450	510	Rp 52,167,333,344	
	Jumlah pelayanan transportasi yang dilakukan	kali		1355	Rp 350,000,000	1400	Rp 360,500,000	1430	Rp 371,315,000	1500	Rp 382,454,450	1550	Rp 393,928,084	1550	Rp 405,745,926	
	Jumlah kantong darah yang dibeli	kantong		1135	Rp 2,000,000,000	1200	Rp 2,060,000,000	1250	Rp 2,121,800,000	1300	Rp 2,185,454,000	1350	Rp 2,251,017,620	1350	Rp 2,318,548,149	
	Jumlah kegiatan perencanaan yg dilakukan	kegiatan		1	Rp 170,000,000	1	Rp 175,100,000	1	Rp 180,353,000	1	Rp 185,763,590	1	Rp 191,336,498	1	Rp 197,076,593	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	Km		950	Rp 5,448,732,800	955	Rp 6,200,000,000	960	Rp 6,200,000,000	965	Rp 6,200,000,000	970	Rp 6,200,000,000	970	Rp 6,200,000,000	
Program pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	Km		255	Rp 8,400,000,000	270	Rp 9,500,000,000	270	Rp 9,500,000,000	270	Rp 9,750,000,000	270	Rp 9,750,000,000	270	Rp 9,750,000,000	Dinas PUPR
	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih			54808	Rp 3,000,000,000	58311	Rp 3,000,000,000	65600	Rp 2,500,000,000	70976	Rp 2,500,000,000	75579	Rp 1,500,000,000	75579	Rp 1,500,000,000	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	%		83.1	Rp 117,050,000,000	88.73	Rp 117,050,000,000	94.37	Rp 117,050,000,000	100	Rp 117,050,000,000	100	Rp 117,050,000,000	100	Rp 117,050,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan informasi/database jalan dan jembatan	Kecamatan		6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000	6 Kec.	Rp 300,000,000	
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Luas permukiman kumuh yang tertangani	Ha		89.9 Ha	Rp 1,000,000,000	94.9 Ha	Rp 1,000,000,000	116.96 Ha	Rp 1,000,000,000	116.96 Ha	Rp 1,000,000,000	116.96 Ha	Rp 1,000,000,000	116.96 Ha	Rp 1,000,000,000	
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah penduduk terlayani air minum (jiwa)	Jiwa		219231	Rp 9,299,000,000	233245	Rp 8,299,000,000	262401	Rp 9,299,000,000	283903	Rp 10,299,000,000	306317	Rp 8,299,000,000	306317	Rp 8,299,000,000	
	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK komunal/ SPAL terpusat (kk)	KK		62439		67556		72889		74711		76579		76579		
Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan Drainase	Jiwa		140108	Rp 12,750,000,000	149206	Rp 12,750,000,000	156760	Rp 12,750,000,000	154598	Rp 12,750,000,000	172730	Rp 12,750,000,000	172730	Rp 12,750,000,000	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatkan layanan sarana dan prasarana jaringan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan	DI+DIR		20 DI+DIR	Rp 12,019,750,000	20 DI+DIR	Rp 11,241,250,000	20 DI+DIR	Rp 11,067,750,000	20 DI+DIR	Rp 11,254,250,000	20 DI+DIR	Rp 11,080,750,000	20 DI+DIR	Rp 11,080,750,000	
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya sumber air baku	Embung		5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	5 embung	Rp 825,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pengendalian banjir	Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi	Kawasan		7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	7 kawasan	Rp 4,555,000,000	
Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang	Cakupan informasi penataan ruang	Kecamatan		1 kecamatan	Rp 1,500,000,000	1 kecamatan	Rp 3,200,000,000	1 kecamatan	Rp 4,900,000,000	1 kecamatan	Rp 4,100,000,000	2 kecamatan	Rp 6,100,000,000	2 kecamatan	Rp 6,100,000,000	
	Tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	%		1		1		1		1		1		1		
	Cakupan wilayah pengendalian pemanfaatan ruang	Kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh yang tertangani	%		80%	Rp 730,000,000	90%	Rp 4,310,000,000	95%	Rp 8,465,000,000	97%	Rp 10,275,000,000	100%	Rp 12,585,000,000	100%	Rp 12,585,000,000	Dinas Perkim
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																
Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal	Menjaga dan memelihara daerah Kab.Ktw.Barat agar tetap aman dan kondusif				Rp 104,975,000		Rp 500,000,000		Rp 500,000,000		Rp 600,000,000		Rp 700,000,000		Rp 700,000,000	Bakesbangpol
Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana				Rp 259,420,000		Rp 355,000,000		Rp 360,000,000		Rp 266,000,000		Rp 370,000,000		Rp 370,000,000	
Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD				Rp 757,075,000		Rp 679,700,200		Rp 680,200,000		Rp 680,721,000		Rp 681,521,500		Rp 681,521,500	Satpol PP
Program pemeliharaan kantrantibmas dan					Rp 111,785,000		Rp 132,285,000		Rp 111,785,000		Rp 111,785,000		Rp 111,785,000		Rp 111,785,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
pencegahan tindak kriminal																
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)					Rp 892,658,397		Rp 915,658,397		Rp 922,658,397		Rp 957,958,397		Rp 962,888,397		Rp 962,888,397	
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							Rp 66,164,000		Rp 73,141,140		Rp 87,820,000		Rp 97,820,000		Rp 97,820,000	
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan				Rp 1,720,000,000		Rp 1,475,000,000		Rp 1,475,000,000		Rp 1,625,000,000		Rp 1,775,000,000		Rp 1,775,000,000	
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase pelaksanaan kegiatan dakwah dan syiar agama				Rp 800,000,000		Rp 1,042,711,100		Rp 1,050,000,000		Rp 1,450,000,000		Rp 1,600,000,000		Rp 1,600,000,000	Setda
Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina				Rp 240,000,000		Rp 290,000,000		Rp 290,000,000		Rp 475,000,000		Rp 560,000,000		Rp 560,000,000	
Sosial																
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan			80	Rp 360,740,500	80	Rp 762,500,000	80	Rp 1,090,000,000	80	Rp 1,325,000,000	80	Rp 1,426,500,000	80	Rp 1,426,500,000	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kesejahteraan Sosial (orang)															
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			100	Rp 245,650,000	100	Rp 549,150,000	100	Rp 710,000,000	100	Rp 793,150,000	100	Rp 903,150,000	100	Rp 903,150,000	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnnya.			20	Rp 164,200,000	40	Rp 551,000,000	60	Rp 800,000,000	80	Rp 905,000,000	100	Rp 1,035,000,000	100	Rp 1,035,000,000	
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (orang)			302	Rp 120,200,000	302	Rp 302,500,000	302	Rp 435,000,000	302	Rp 468,000,000	302	Rp 596,000,000	302	Rp 596,000,000	
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan			40	Rp 105,400,000	40	Rp 200,000,000	40	Rp 250,000,000	40	Rp 1,510,000,000	40	Rp 210,000,000	40	Rp 210,000,000	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
Tenaga Kerja																
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					Rp 1,618,038,030		Rp 1,790,192,833		Rp 2,052,221,757		Rp 2,352,055,020		Rp 2,806,466,024		Rp 2,806,466,024	
Peningkatan Kesempatan Kerja					Rp 675,000,000		Rp 810,000,000		Rp 972,000,000		Rp 1,166,400,000		Rp 1,399,680,000		Rp 1,399,680,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					Rp 306,473,250		Rp 400,000,000		Rp 420,000,000		Rp 441,300,000		Rp 463,350,000		Rp 463,350,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak																
Program peningkatan kualitas Hidup perempuan	Lembaga pemberdayaan perempuan						Rp 130,000,000		Rp 200,000,000		Rp 239,600,000		Rp 270,000,000		Rp 270,000,000	DP3AP2KB
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Lembaga Organisasi Perempuan				Rp 395,071,739		Rp 401,000,000		Rp 492,000,000		Rp 585,000,000		Rp 665,000,000		Rp 665,000,000	
Program peningkatan perlindungan Hak perempuan	Lembaga Pokja,Satgas KDRT				Rp 51,040,000		Rp 145,000,000		Rp 275,000,000		Rp 295,000,000		Rp 370,000,000		Rp 370,000,000	
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Frekwensi Kegiatan 10 Kali Keg.				Rp 38,990,000		Rp 155,000,000		Rp 130,000,000		Rp 145,000,000		Rp 185,000,000		Rp 185,000,000	
	Data Keluarga Sejahtera															
Program pengembangan Kabupaten Layak Anak	SRA, PRA, KRA. DELANA/KELANA				Rp 160,000,000		Rp 489,000,000		Rp 520,000,000		Rp 560,000,000		Rp 654,000,000		Rp 654,000,000	
Program Peningkatan Perlindungan Anak	Lembaga PATBM Desa/Kelurahan						Rp 175,000,000		Rp 186,000,000		Rp 240,000,000		Rp 311,183,010		Rp 311,183,010	
Proram Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Partisipasi Anak dan Hak Anak, Persentase Forum Anakk Tingkat Desa yang Terbentuk						Rp 79,000,000		Rp 109,088,182		Rp 125,000,000		Rp 235,000,000		Rp 235,000,000	
Pangan																
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	%		60	Rp 172,005,000	70	Rp 170,000,000	70	Rp 423,000,000	80	Rp 500,000,000	100	Rp 505,000,000	100	Rp 505,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	Indeks		92.90	Rp 324,584,900	93.10	Rp 409,000,000	93.40	Rp 505,000,000	93.80	Rp 635,000,000	94.20	Rp 682,500,000	94.20	Rp 682,500,000	
Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Stabilitas Harga,Pasokan dan Akses Pangan	%		<25,5-40	Rp 123,050,000	<25,5-40	Rp 195,000,000	<25,5-40	Rp 400,000,000	<25,5-40	Rp 495,000,000	<25,5-40	Rp 580,000,000	<25,5-40	Rp 580,000,000	
Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Penurunan Kerawanan Pangan	%		5	Rp 224,251,200	5	Rp 290,000,000	5	Rp 295,000,000	5	Rp 428,500,000	5	Rp 575,000,000	5	Rp 575,000,000	
Pertanahan																
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah bidang Tanah yang ditata dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di perumahan dan kawasan permukiman	%		60	Rp 351,600,000	62	Rp 480,000,000	65	Rp 593,000,000	68	Rp 700,000,000	70	Rp 800,000,000	70	Rp 800,000,000	Dinas Perkim
Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana																
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan kualitas air, udara, dan tanah.Cakupan titik pengawasan terhadap penaatan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah.	Persentase		35%	Rp 275,290,000	36%	Rp 985,000,000	37%	Rp 825,000,000	38%	Rp 890,000,000	40%	Rp 2,925,000,000	40%	Rp 2,925,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan perlindungan dan konservasi SDA	Kecamatan		1	Rp 49,445,000	1	Rp 197,000,000	1	Rp 214,000,000	1	Rp 349,000,000	1	Rp 549,000,000	1	Rp 549,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam serta keserasian/kelestarian lingkungan hidup	Persentase								10	Rp 400,000,000	15	Rp 100,000,000	15	Rp 100,000,000	
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan kualitas udara	Persentase		30	Rp 55,260,000	31	Rp 90,000,000	32	Rp 430,000,000	33	Rp 580,000,000	34	Rp 610,000,000	34	Rp 610,000,000	
Program Pengendalian kebakaran hutan	Cakupan pengendalian kebakaran hutan	Kecamatan		3	Rp 46,719,000	6	Rp 177,500,000	6	Rp 189,500,000	6	Rp 210,000,000	6	Rp 220,000,000	6	Rp 220,000,000	
Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan lingkungan hidup	Jumlah Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup	Jumlah		20	Rp 86,430,000	25	Rp 95,000,000	30	Rp 100,000,000	30	Rp 105,000,000	30	Rp 110,000,000	30	Rp 110,000,000	
Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Cakupan lembaga pendidikan yang meraih Adiwiyata	Sekolah		15	Rp 381,611,000	15	Rp 612,500,000	21	Rp 664,250,000	27	Rp 740,750,000	33	Rp 818,000,000	33	Rp 818,000,000	
	Cakupan wilayah yang telah berperan serta dalam mendukung kesadaran LH	Kecamatan		6		6		6		6		6		6		
Program penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Cakupan terselesaikannya kasus-kasus lingkungan hidup	Kasus		5	Rp 23,050,000	10	Rp 57,000,000	10	Rp 70,000,000	10	Rp 73,000,000	10	Rp 81,000,000	10	Rp 81,000,000	
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan penyediaan lahan RTH di kawasan perkotaan	Persentase		9.20	Rp 2,417,838,400	9.50	Rp 4,077,000,000	9.80	Rp 5,756,250,000	10	Rp 5,316,380,426	11	Rp 5,911,000,000	11	Rp 5,911,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Cakupan kelompok pengelola persampahan berbasis masyarakat.	Persentase		44.78	Rp 8,063,597,200	49.64	Rp 15,991,740,000	54.67	Rp 18,515,337,273	59.35	Rp 23,689,505,910	64.93	Rp 24,751,432,186	64.93	Rp 24,751,432,186	
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%		24	Rp 480,600,000	33	Rp 1,012,000,000	41	Rp 941,000,000	50	Rp 1,067,000,000	59	Rp 1,674,000,000	59	Rp 1,674,000,000	BPBD
Program Tanggap Darurat	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	%		70	Rp 360,750,000	75	Rp 904,275,000	80	Rp 1,472,980,030	85	Rp 1,661,975,460	90	Rp 987,150,982	90	Rp 987,150,982	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Penataan Administrasi Kependudukan					Rp 216,533,400		Rp 641,256,500		Rp 612,025,552		Rp 659,392,345		Rp 882,913,572		Rp 882,913,572	Dispendukcapil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil							Rp 132,200,000		Rp 172,500,000		Rp 186,000,000		Rp 201,500,000		Rp 201,500,000	
Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan					Rp 25,444,000		Rp 78,500,000		Rp 101,500,000		Rp 139,000,000		Rp 194,000,000		Rp 194,000,000	
Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa																
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik				Rp 135,300,000		Rp 3,135,300,000		Rp 138,800,000		Rp 200,000,000		Rp 230,000,000		Rp 230,000,000	Sekda
Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa				Rp 75,105,000		Rp 206,920,000		Rp 230,920,000		Rp 286,320,000		Rp 295,728,000		Rp 295,728,000	KECAMATAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa ,UMKM dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin, dan Desa Tertinggal					Rp 1,555,951,000		Rp 2,411,603,000		Rp 3,282,133,000		Rp 3,231,133,000		Rp 3,908,133,000		Rp 3,908,133,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					Rp 1,073,951,000		Rp 1,198,603,000		Rp 1,300,133,000		Rp 1,355,133,000		Rp 1,390,133,000		Rp 1,390,133,000	
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik				Rp 950,000,000		Rp 1,470,000,000		Rp 1,575,000,000		Rp 1,295,000,000		Rp 1,315,000,000		Rp 1,315,000,000	
Perhubungan																
Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas LLAJ	Kegiatan		1	Rp 1,055,000,000	6	Rp 3,436,000,000	3	Rp 3,100,000,000	3	Rp 7,145,000,000	4	Rp 11,361,000,000	4	Rp 11,361,000,000	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan	Jenis		7	Rp 1,650,000,000	2	Rp 2,100,000,000	2	Rp 2,500,000,000	0						
Program Peningaktan Pelayanan Angkutan	peresentase tingkat kesadaran publik dalam berlalu lintas	Tahun		1	Rp 448,150,000	1	Rp 450,000,000	1	Rp 450,000,000	1	Rp 455,000,000	1	Rp 500,000,000	1	Rp 500,000,000	
Komunikasi dan Informatika																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan desiminasi informasi dan komunikasi				Rp 1,189,500,000		Rp 1,520,000,000		Rp 1,570,000,000		Rp 1,620,000,000		Rp 1,670,000,000		Rp 1,670,000,000	
Program layanan penyediaan informasi publik pemerintah daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan desiminasi informasi dan komunikasi				Rp 1,189,500,000		Rp 1,520,000,000		Rp 1,570,000,000		Rp 1,620,000,000		Rp 1,670,000,000		Rp 1,670,000,000	
Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase akses informasi publik melalui saluran komunikasi yang disediakan				Rp 2,185,000,000		Rp 2,332,000,000		Rp 2,489,000,000		Rp 2,726,000,000		Rp 2,873,000,000		Rp 2,873,000,000	
Program kerjasama informasi dengan media massa	Rasio berita positif dan berita negatif mengenai pemerintah daerah di media				Rp 2,500,000,000		Rp 2,720,000,000		Rp 2,940,000,000		Rp 3,160,000,000		Rp 3,380,000,000		Rp 3,380,000,000	Diskominfo
Program informasi, komunikasi dan publikasi masyarakat	Persentase peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah				Rp 1,175,000,000		Rp 1,230,000,000		Rp 1,285,000,000		Rp 1,340,000,000		Rp 1,395,000,000		Rp 1,395,000,000	
Program implementasi dan pengembangan e-government					Rp 1,410,000,000		Rp 1,510,000,000		Rp 1,530,000,000		Rp 1,530,000,000		Rp 1,450,000,000		Rp 1,450,000,000	
Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah					Rp 450,000,000		Rp 480,000,000		Rp 510,000,000		Rp 540,000,000		Rp 540,000,000		Rp 540,000,000	
Program pengembangan infrastruktur					Rp 1,349,088,000		Rp 2,533,868,000		Rp 1,899,948,000		Rp 4,359,378,000		Rp 2,771,308,000		Rp 2,771,308,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
komunikasi dan informatika																
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT (kenaikan 10 % Tiap tahun)				Rp 321,812,500		Rp 284,000,000		Rp 281,000,000		Rp 277,000,000		Rp 285,000,000		Rp 285,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Usaha Koperasi	Meningkatnya Kemampuan SDM, Akses Permodalan dan Pemasaran produk Koperasi	Koperasi			Rp 177,000,000		Rp 214,000,000		Rp 226,000,000		Rp 230,000,000		Rp 234,000,000		Rp 234,000,000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro	UKM			Rp 121,943,000		Rp 223,000,000		Rp 231,000,000		Rp 238,000,000		Rp 247,000,000		Rp 247,000,000	
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Tumbuhnya Wirausaha Baru	Orang		20	Rp 121,360,000	100	Rp 50,000,000	100	Rp 55,000,000	120	Rp 70,000,000	120	Rp 75,000,000	120	Rp 75,000,000	
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Adanya ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	%		83	Rp 342,850,000	85	Rp 479,200,000	91	Rp 428,300,000	91	Rp 565,000,000	100	Rp 610,000,000	100	Rp 610,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kab. Kotawaringin Barat	Dok/ Kegiatan		13	Rp 662,912,500	16	Rp 1,081,667,500	16	Rp 1,022,876,737	16	Rp 1,610,000,000	16	Rp 1,450,000,000	16	Rp 1,450,000,000	
Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Prosentase Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal	Kecamatan		60%	Rp 371,910,000	60%	Rp 379,000,000	70%	Rp 443,000,000	70%	Rp 750,000,000	80%	Rp 825,022,251	80%	Rp 825,022,251	
Program optimalisasi pelayanan	Ketepatan waktu penyelesian perizinan	%		100%	Rp 698,757,500	100%	Rp 751,978,070	100%	Rp 800,000,000	100%	Rp 955,600,000	100%	Rp 1,020,000,000	100%	Rp 1,020,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
perizinan dan non perizinan	usaha, perizinan tertentu dan non perizinan															
Pemuda dan Olahraga																
Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Tersedianya pembinaan olahraga	Keg		12 bulan	Rp 1,792,150,000	12 bulan	Rp 1,300,000,000	12 bulan	Rp 2,000,000,000	12 bulan	Rp 2,275,000,000	12 bulan	Rp 16,182,240,580	12 bulan	Rp 16,182,240,580	DISPORA
Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Paket		12 bulan	Rp 650,000,000	12 bulan	Rp 13,376,044,136	12 bulan	Rp 13,470,743,187	12 bulan	Rp 16,161,580,735	12 bulan	Rp 4,000,000,000	12 bulan	Rp 4,000,000,000	
Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Tersedianya peran serta kepemudaan	Paket		12 bulan	Rp 870,403,700	12 bulan	Rp 956,635,000	12 bulan	Rp 1,125,000,000	12 bulan	Rp 1,250,000,000	12 bulan	Rp 1,500,000,000	12 bulan	Rp 1,500,000,000	
Kebudayaan																
Program Pengembangan Nilai Budaya				4	Rp 200,000,000	4	Rp 220,000,000	4	Rp 242,000,000	4	Rp 266,200,000	4	Rp 292,820,000	4	Rp 292,820,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perpustakaan																
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan sumber daya perpustakaan	Orang		0	Rp 646,464,400	20	Rp 1,717,534,056	20	Rp 2,287,930,950	45	Rp 3,029,628,926	50	Rp 2,978,238,770	50	Rp 2,978,238,770	DPK
	Bertambahnya bahan pustaka di perpustakaan	Paket		0		10		10		30		35		35		
	Terdatanya perpustakaan desa/kelurahan dan TBM	Desa		0		15		25		30		35		35		
	Bertambahnya perpustakaan berbasis IT	Paket		0		2		2		2		2		2		
	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan binaan	Keg		0		12		12		12		12		12		
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Keg		0		42		42		42		42		42		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan dan budaya baca	Keg		0		4		4		4		4		4		
	Tersediannya data perpustakaan yang akurat	Tahun		0		12		12		12		12		12		
	Tersusunnya rencana kegiatan program budaya baca	Dokumen		0		5		5		5		5		5		
	Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat	Keg		13		64		64		64		64		64		
	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Keg/Lokasi		1/26		1/39		1/39		1/39		1/39		1/39		
		Bulan		12		12		12		12		12		12		
		Lokasi		26		39		39		39		39		39		
	Bertambahnya koleksi buku yang berkualitas	Eks		1500		3000		3000		3000		3000		3000		
	Meningkatkan koleksi beraneka ragam jenis dan berkualitas	E-book		0		60		100		150		200		200		
	Meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai sarana rekreasi dan edukasi	Buah		0		30		50		50		50		50		
	Tersedianya buku untuk program hibah buku	Eks		0		1000		2000		2000		2000		2000		
	Tersedianya sistem katalogisasi yang lengkap	Buah		0		32		40		48		56		56		
	Bahan pustaka terawat dan terpeliharanya koleksi dengan baik	Eks		0		2500		3000		3500		3500		3500		
		Bundel		0		48		48		48		48		48		
URUSAN PILIHAN																
Kelautan dan Perikanan																
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	Ton/tahun		6,380	Rp 1,972,588,000	7,092	Rp 4,465,000,000	8,100	Rp 5,210,000,000	8,740	Rp 7,735,000,000	9,600	Rp 7,270,000,000	9,600	Rp 7,270,000,000	Dinas Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Perikanan	Peningkatan produksi perikanan nelayan (ton/tahun)	Ton/tahun		15,049	Rp 1,225,580,000	15,802	Rp 1,508,138,000	16,592	Rp 2,021,951,000	17,342	Rp 2,152,146,000	18,092	Rp 2,261,861,000	18,092	Rp 2,261,861,000	
Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	Peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun	Kg/kap/tahun		47	Rp 2,690,000,000	51	Rp 3,600,000,000	53	Rp 4,415,000,000	55	Rp 2,550,000,000	76	Rp 5,625,000,000	76	Rp 5,625,000,000	
Pariwisata																
Program pengembangan pemasaran pariwisata					Rp 1,267,000,000		Rp 2,350,000,000		Rp 2,575,000,000		Rp 3,100,000,000		Rp 3,450,000,000		Rp 3,450,000,000	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					Rp 1,623,999,400		Rp 3,390,000,000		Rp 3,279,924,242		Rp 6,028,683,733		Rp 6,650,000,000		Rp 6,650,000,000	
Program pengembangan kemitraan					Rp 420,000,000		Rp 550,000,000		Rp 550,000,000		Rp 575,000,000		Rp 700,000,000		Rp 700,000,000	
Program Pengembangan Ekonomi kreatif					Rp 759,000,000		Rp 1,786,906,850		Rp 1,775,000,000		Rp 3,200,000,000		Rp 3,430,589,693		Rp 3,430,589,693	
Pertanian																
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produktivitas Tanaman Pangan				Rp 1,523,246,605		Rp 3,660,854,670		Rp 3,827,415,807		Rp 6,469,770,095		Rp 6,875,869,148		Rp 6,875,869,148	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	a. Padi	Kwintal/Ha		33.33		34.3		34.98		36.71		38.51		38.51		
	b. Jagung	Kwintal/Ha		38.42		39.54		40.32		42.32		44.4		44.4		
	c. Kedelai	Kwintal/Ha		13.63		14.3		15.02		15.77		16.56		16.56		
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produktivitas Hortikultura				Rp 1,231,628,000		Rp 3,958,935,000		Rp 5,603,880,000		Rp 6,125,400,000		Rp 6,344,501,000		Rp 6,344,501,000	
	a. Cabai	Kwintal/Ha		2.45		2.47		2.49		2.51		2.53		2.53		
	b. Bawang Merah	Kwintal/Ha		4.05		4.1		4.15		4.2		4.25		4.25		
	c. Sayur	Kwintal/Ha		2.2		2.25		2.3		2.35		2.4		2.4		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	d. Buah-buahan	Kwintal/Ha		0		7.5		7.6		7.7		7.8		7.8		
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produktivitas Perkebunan				Rp 944,785,700		Rp 9,950,017,840		Rp 12,821,581,500		Rp 18,596,790,018		Rp 20,988,750,451		Rp 20,988,750,451	
	a. Kelapa Sawit	Ton/Ha/Th		18.62		18.99		19.37		19.76		20.16		20.16		
	b. Karet	Ton/Ha/Th		0.91		0.93		0.95		0.97		0.99		0.99		
	c. Lada	Ton/Ha/Th		1		1		1		1		1		1		
	d. Kelapa	Ton/Ha/Th		0.73		0.75		0.76		0.78		0.79		0.79		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Prosesntase Peningkatan Prasarana, Sarana dan SDM Petani	%		5	Rp 1,914,500,000	6	Rp 5,841,750,000	7	Rp 8,027,000,000	8	Rp 11,295,740,000	9	Rp 12,688,011,600	9	Rp 12,688,011,600	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Tenaga Penyuluh	Orang		88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	88.00	Rp 773,321,000	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kematian ternak	%		5	Rp 1,460,000,000	5	Rp 1,546,000,000	4	Rp 1,602,100,000	4	Rp 1,703,810,000	4	Rp 1,821,691,000	4	Rp 1,821,691,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Penanganan dan pencegahan penyakit menular ternak strategis dan zoonosis	%		5		5		4		4		4		4		
	Terawasinya peredaran obat ternak	Toko obat		3		3		5		5		5		5		
	Cemaran mikroba pada bahan pangan asal ternak	%		5		5		4		4		4		4		
	Pemotongan ternak di RPH	ekor/bulan		100		100		110		110		110		110		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya populasi ternak	%		8	Rp 3,140,000,000	8	Rp 3,530,000,000	8	Rp 4,195,000,000	8	Rp 5,065,500,000	8	Rp 5,392,050,000	8	Rp 5,392,050,000	
	Meningkatnya produksi aneka ternak	%		6		6		6		6		6		6		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Agribisnis Peternakan	Meningkatnya nilai tukar peternak	%		0.27	Rp 1,090,000,000	0.23	Rp 1,040,000,000	0.25	Rp 1,210,000,000	0.25	Rp 1,310,000,000	0.25	Rp 1,721,000,000	0.25	Rp 1,721,000,000	
	Peningkatan aksesabilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan	%		10		15		20		25		30		30		
	Peningkatan PDRB peternakan	%		10		10		10		10		10		10		
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan	%		10	Rp 1,342,000,000	10	Rp 1,912,000,000	10	Rp 2,504,000,000	10	Rp 2,665,000,000	10	Rp 2,790,000,000	10	Rp 2,790,000,000	
	Pengembangan HPT	Ha		5		5		5		5		5		5		
	Pengembangan APPO dan rumah kompos	Unit		3		3		3		3		3		3		
	Penyediaan ban dan peralatan IB	Kec		6		6		6		6		6		6		
Perdagangan																
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkanya Perdagangan dalam Negerii	Pasar		1	Rp 4,227,570,000	1	Rp 2,250,000,000	1	Rp 1,775,000,000	1	Rp 1,802,000,000	1	Rp 2,333,000,000	1	Rp 2,333,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
		Pameran		1		1		1		1		1		1		
Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%				Rp 75,355,000		Rp 109,000,000		Rp 113,000,000		Rp 119,000,000		Rp 122,000,000		Rp 122,000,000	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya standardisasi, tertib ukur dan perlindungan konsumen				Rp 95,775,000		Rp 114,773,000		Rp 126,700,000		Rp 138,800,000		Rp 163,000,000		Rp 163,000,000	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkat dan berkembangnya ekspor daerah	Pameran		1	Rp 139,510,000	1	Rp 153,461,000	1	Rp 168,807,100	1	Rp 185,687,810	1	Rp 204,256,591	1	Rp 204,256,591	
Program Pembinaan dan	Tercapainya prosentase pembangunan pasar				Rp 3,948,915,000		Rp 8,985,000,000		Rp 747,000,000		Rp 751,000,000		Rp 755,000,000		Rp 755,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengelolaan Pasar	rakyat di wilayah kab. kotawaringin barat															
Perindustrian																
Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Jumlah industri potensial	Kecamatan		6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	6	Rp 34,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Berkembangnya Industri kecil Menengah	Orang		20	Rp 181,587,500	30	Rp 256,500,000	40	Rp 284,150,000	50	Rp 313,565,000	60	Rp 354,921,500	60	Rp 354,921,500	
Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri	Peningkatan standart produk IKM	IKM		12	Rp 101,603,000	15	Rp 123,020,000	18	Rp 145,000,000	20	Rp 161,000,000	20	Rp 164,000,000	20	Rp 164,000,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah)																
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi			60	Rp 150,000,000	60	Rp 200,000,000	63	Rp 200,000,000	63	Rp 250,000,000	65	Rp 275,000,000	65	Rp 275,000,000	Sekda
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat tercapainya proses pengawasan internal dan pembinaan terhadap obyek pemeriksaan				Rp 3,149,515,025		Rp 3,719,538,673		Rp 3,996,836,292		Rp 4,352,371,370		Rp 4,823,381,193		Rp 4,823,381,193	Inspektorat
Program Penelitian & Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD				Rp 511,683,000		Rp 838,000,000		Rp 1,174,000,000		Rp 1,562,000,000		Rp 1,053,000,000		Rp 1,053,000,000	Bappeda

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana				Rp 500,000,000		Rp 793,496,000		Rp 659,476,000		Rp 706,393,500		Rp 753,311,000		Rp 753,311,000	
Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan				Rp 145,000,000		Rp 1,510,000,000		Rp 1,035,000,000		Rp 635,000,000		Rp 160,000,000		Rp 160,000,000	
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan				Rp 300,000,000		Rp 1,277,400,000		Rp 945,145,000		Rp 864,964,800		Rp 957,757,600		Rp 957,757,600	
Program Perencanaan Sos. dan Pmerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan				Rp 745,000,000		Rp 1,803,500,000		Rp 2,718,345,000		Rp 902,600,000		Rp 983,750,000		Rp 983,750,000	
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terlaksananya penyusunan dokumen kebijakan sistem, prosedur pengawasan dan peningkatan kapabilitas APIP				Rp 105,000,000		Rp 140,250,000		Rp 115,762,500		Rp 160,305,675		Rp 176,301,514		Rp 176,301,514	Inspektorat
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tercapainya peningkatan kapasitas SDM APIP				Rp 379,250,000		Rp 395,212,500		Rp 441,973,125		Rp 519,571,781		Rp 588,050,370		Rp 588,050,370	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keuangan)																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					Rp 3,527,600,000		Rp 2,101,994,462		Rp 3,028,254,230		Rp 3,755,967,261		Rp 3,938,250,000		Rp 3,938,250,000	BPKAD
Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian	Persentase SKPD yang tepat fungsi				Rp 350,000,000		Rp 500,000,000		Rp 505,000,000		Rp 1,025,000,000					Setda
Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	Data Objek Pajak Bertambah	Objek Pajak		500	Rp 272,597,800	600	Rp 638,447,000	700	Rp 1,070,000,000	800	Rp 1,389,000,000	900	Rp 1,725,000,000	900	Rp 1,725,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat	Jumlah objek pajak yang ditetapkan,	dokumen		500	Rp 801,000,000	600	Rp 1,226,000,000	700	Rp 1,800,000,000	800	Rp 2,000,000,000	900	Rp 2,150,000,000	900	Rp 2,150,000,000	
	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	dokumen		400		420		440		460		500		500		
	Jumlah Keluhan Wajib Pajak	dokumen		50		45		35		30		25		25		
Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah	Prosentase piutang pajak daerah tahun berjalan terhadap realisasi pajak daerah	%		30%	Rp 756,530,400	30%	Rp 1,270,000,000	30%	Rp 2,100,000,000	30%	Rp 2,500,000,000	30%	Rp 2,700,000,000	30%	Rp 2,700,000,000	
Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	%		11%	Rp 270,000,000	11%	Rp 610,000,000	11%	Rp 1,427,000,000	11%	Rp 1,800,000,000	11%	Rp 2,250,000,000	11%	Rp 2,250,000,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keorganisasian, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah)																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan karir					Rp 661,489,000		Rp 702,250,000		Rp 1,056,116,009		Rp 1,673,813,600		Rp 1,809,570,500		Rp 1,809,570,500	BKPP
Program Pendidikan kedinasan					Rp 2,490,527,000		Rp 2,874,000,000		Rp 3,399,469,200		Rp 3,477,727,608		Rp 3,860,000,000		Rp 3,860,000,000	
Program Pembinaan Aparatur					Rp 258,322,500		Rp 270,000,000		Rp 340,750,200		Rp 379,221,250		Rp 420,000,000		Rp 420,000,000	
Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian	Persentase SKPD yang tepat fungsi				Rp 350,000,000		Rp 500,000,000		Rp 505,000,000		Rp 1,025,000,000					Sekda
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					Rp 10,485,244,100		Rp 10,730,719,982		Rp 11,038,289,581		Rp 11,355,086,269		Rp 11,681,386,857		Rp 11,681,386,857	Sekwan

Tabel 7. 7: Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					Rp 1,158,102,800	Dinas PUPR
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Program Pengelolaan Areal Pemakaman					Rp 2,012,520,000	Dinas Perkim
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					Rp 248,200,000	Sekwan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					Rp 573,500,000	Setda
Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum					Rp 399,700,000	
Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia					Rp 74,400,000	
Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan				Rp 238,298,500	Bakesbangpol
Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					Rp 232,990,000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					Rp 1,386,925,500	Satpol PP
Sosial						
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma					Rp 53,555,000	Dinas Sosial
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					Rp 545,718,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan					Rp 80,442,400	
Penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil Desa dan Kelurahan					Rp 44,637,500	
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						
Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Frekwensi Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi 100x				Rp 92,349,500	DP3AP2KB
Program Pelayanan Kontrasepsi	Kesertaan / Cakupan peserta KB Aktif				Rp 105,605,000	
Program Keluarga Berencana	Ratio Peserta KB				Rp 26,912,500	
Program Pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya kuantitas dan kualitas PIK-R/M.				Rp 162,438,750	
Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kader Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL)				Rp 31,796,250	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak					Rp 20,947,500	
Tenaga Kerja						
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					Rp 610,960,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pertanahan						
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					Rp 9,323,079,000	BPKAD
Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana						
Program Tanggap Darurat Pasca Bencana					Rp 237,410,000	BPBD
Perhubungan						
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas					Rp 1,482,450,000	Dishub
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					Rp 1,112,250,000	
Komunikasi dan Informatika						
Program Pengembangan data/informasi					Rp 155,950,000	Setda
Kebudayaan						
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					Rp 1,233,768,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya					Rp 2,017,505,000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Kearsipan						
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan					Rp 102,807,000	DPK
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah					Rp 8,750,000	
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan					Rp 3,000,000	
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi					Rp 13,565,000	
URUSAN PILIHAN						
Perdagangan						
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan					Rp 297,176,500	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan					Rp 50,000,000	Setda
Energi dan Sumber daya Mineral						
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					Rp 955,000,000	Setda
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan					Rp 30,000,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah)						
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					Rp 249,959,088	Setda
Program perencanaan pembangunan daerah					Rp 972,475,000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan					Rp 189,075,000	
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh					Rp 1,233,881,000	Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar					Rp 86,600,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keorganisasian, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah)						
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					Rp 91,300,000	Setda
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					Rp 1,270,864,700	

Tabel 7. 8. Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Pembinaan konstruksi	Persentase pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	%		100%	Rp 1,500,000,000	100%	Rp 1,287,000,000	100%	Rp 1,400,000,000	100%	Rp 1,542,000,000	100%	Rp 1,661,000,000	100%	Rp 1,661,000,000	Dinas PUPR
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan	%		100%	Rp 1,250,000,000	100%	Rp 4,968,633,000	100%	Rp 4,866,828,576	100%	Rp 3,933,216,437	100%	Rp 4,432,814,468	100%	Rp 4,432,814,468	
Prog. Pengembangan Wilayah Perbatasan	Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten	Perbup		5	Rp 80,000,000	5	Rp 80,000,000	5	Rp 80,000,000	5	Rp 110,000,000	5	Rp 150,000,000	5	Rp 150,000,000	Setda
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	%		75%	Rp 1,240,000,000	77%	Rp 3,080,000,000	78%	Rp 6,595,000,000	80%	Rp 8,557,000,000	82%	Rp 8,230,000,000	82%	Rp 8,230,000,000	Dinas Perkim
Sosial																
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma				10	Rp 67,500,000	10	Rp 129,000,000	10	Rp 180,000,000	10	Rp 174,000,000	10	Rp 174,000,000	10	Rp 174,000,000	Dinas Sosial
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo												1	Rp 1,300,000,000	1	Rp 1,300,000,000	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Pendataan dan Informasi Kependudukan					Rp 23,450,000		Rp 47,165,000		Rp 73,265,000		Rp 646,939,016		Rp 1,008,146,505		Rp 1,008,146,505	Dispendukcapil
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak																
Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Frekwensi Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi 100x				Rp 126,255,000		Rp 305,000,000		Rp 265,000,000		Rp 410,000,000		Rp 315,000,000		Rp 315,000,000	DP3AP2KB

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Kontrasepsi	Kesertaan / Cakupan peserta KB Aktif						Rp 74,000,000		Rp 103,000,000		Rp 110,000,000		Rp 145,000,000		Rp 145,000,000	
Program Keluarga Berencana	Ratio Peserta KB				Rp 70,000,000		Rp 160,000,000		Rp 215,000,000		Rp 237,000,000		Rp 256,000,000		Rp 256,000,000	
Program Pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya kuantitas dan kualitas PIK-R/M.						Rp 90,000,000		Rp 135,000,000		Rp 145,000,000		Rp 195,000,000		Rp 195,000,000	
Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kader Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL)				Rp 27,000,000		Rp 42,000,000		Rp 57,500,000		Rp 60,000,000		Rp 110,000,000		Rp 110,000,000	
Program pengelolaan Data Gender dan Anak							Rp 75,000,000		Rp 75,000,000		Rp 80,000,000		Rp 90,000,000		Rp 90,000,000	
Tenaga Kerja																
Program Perencanaan Potensi Kawasan Transmigrasi					Rp 725,000,000		Rp 760,000,000		Rp 785,000,000		Rp 800,000,000		Rp 825,000,000		Rp 825,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi					Rp 12,825,000,000		Rp 13,355,000,000		Rp 13,875,000,000		Rp 14,415,000,000		Rp 14,316,000,000		Rp 14,316,000,000	
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi					Rp 4,140,000,000		Rp 4,430,000,000		Rp 4,580,000,000		Rp 4,680,000,000		Rp 4,970,000,000		Rp 4,970,000,000	
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					Rp 248,200,000		Rp 248,200,000		Rp 248,200,000		Rp 248,200,000		Rp 248,200,000		Rp 248,200,000	Sekwan

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat				Rp 573,500,000		Rp 575,000,000		Rp 575,000,000		Rp 725,000,000		Rp 735,000,000		Rp 735,000,000	Setda
Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	Persentase permasalahan hukum tertangani				Rp 293,100,000		Rp 290,000,000		Rp 290,000,000		Rp 350,000,000		Rp 350,000,000		Rp 350,000,000	
Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	Angka pelanggaran HAM				Rp 58,100,000		Rp 58,000,000		Rp 58,000,000		Rp 80,000,000		Rp 100,000,000		Rp 100,000,000	
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					Rp 403,100,000		Rp 1,033,100,000		Rp 1,133,100,000		Rp 1,183,100,000		Rp 1,233,100,000		Rp 1,233,100,000	Satpol PP
Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan				Rp 271,940,000		Rp 380,000,000		Rp 380,000,000		Rp 380,000,000		Rp 380,000,000		Rp 380,000,000	Bakesbangpol
Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					Rp 190,210,000		Rp 200,000,000		Rp 200,000,000		Rp 200,000,000		Rp 200,000,000		Rp 200,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna					Rp 188,000,000		Rp 640,000,000		Rp 370,000,000		Rp 325,000,000		Rp 330,000,000		Rp 330,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pertanahan																
Program Sistem Pendaftaran Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang didaftar agar tertib administrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Desa/ Kel.		10	Rp 150,000,000	10	Rp 150,000,000	10	Rp 160,000,000	10	Rp 170,000,000	10	Rp 180,000,000	10	Rp 180,000,000	Dinas Perkim

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (Redunden)	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD			100	Rp 3,400,000,000	100	Rp 3,500,000,000	100	Rp 3,750,000,000	100	Rp 5,000,000,000	100	Rp 6,000,000,000	100	Rp 6,000,000,000	BPKAD
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (redunden)	Jumlah SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang revisi terbaru Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) kawasan Hutan Primer dan Gambut	Dok			Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 518,850,000	1	Rp 518,850,000	1	Rp 518,850,000	Setda
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jumlah produk yang dapat dipromosikan dan dikembangkan				Rp 100,000,000		Rp 100,000,000		Rp 100,000,000		Rp 175,000,000		Rp 118,500,000		Rp 118,500,000	Setda
Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana																
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pembuatan kampung organik	Lokasi		2	Rp 409,364,600	2	Rp 495,000,000	3	Rp 630,000,000	4	Rp 710,000,000	5	Rp 775,000,000	5	Rp 775,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pembuatan taman Keanekaragaman Hayati	Lokasi		0		1		1		1		1		1		
	Cakupan ketersediaan informasi SDA dan LH	Dokumen		47		22		24		24		24		24		
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan					Rp 150,000,000		Rp 150,000,000		Rp 150,000,000		Rp 200,000,000		Rp 225,000,000		Rp 225,000,000	Setda
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Prosentase Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditindaklanjuti	%		na	Rp 155,000,000	na	Rp 250,000,000	na	Rp 308,500,000	na	Rp 370,000,000	na	Rp 570,000,000	na	Rp 570,000,000	BPBD
Komunikasi dan Informatika																

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penyebaran Informasi dan Dokumentasi	Persentase Publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah				Rp 430,000,000		Rp 422,000,000		Rp 425,000,000		Rp 490,000,000		Rp 550,000,000		Rp 550,000,000	Setda
Program Pengembangan Data/ Informasi Bidang Pengadaan ****	Persentase data/ informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik				Rp 225,000,000		Rp 250,000,000		Rp 250,000,000		Rp 334,250,000		Rp 359,250,000		Rp 359,250,000	
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (Inspektort)	Presentase terselesaikannya sebuah sistem informasi untuk layanan publik				Rp 50,000,000											Inspektorat
Kearsipan																
Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis					Rp 10,925,000		Rp 430,971,153		Rp 1,036,978,526		Rp 1,378,853,640		Rp 1,615,293,386		Rp 1,615,293,386	DPK
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Kearsipan					Rp 10,600,000		Rp 141,371,153		Rp 239,800,000		Rp 310,203,364		Rp 361,405,874		Rp 361,405,874	
Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan					Rp 10,000,000		Rp 183,500,000		Rp 221,500,000		Rp 241,250,000		Rp 286,925,000		Rp 286,925,000	
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah					Rp 8,500,000		Rp 84,630,000		Rp 220,508,700		Rp 275,800,700		Rp 338,000,000		Rp 338,000,000	
Kebudayaan																
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				9	Rp 1,225,000,000	9	Rp 1,347,500,000	9	Rp 1,482,250,000	9	Rp 1,630,475,000	9	Rp 1,793,522,500	9	Rp 1,793,522,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				7	Rp 1,500,000,000	7	Rp 1,650,000,000	7	Rp 1,815,000,000	7	Rp 1,996,500,000	7	Rp 2,196,150,000	7	Rp 2,196,150,000	
Perhubungan																
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Presentase ketersediaan fasilitas keselamatan	Jenis		1	Rp 87,000,000	10	Rp 1,544,217,400	11	Rp 1,440,090,703	11	Rp 1,601,814,405	11	Rp 1,676,650,905	11	Rp 1,676,650,905	Dishub

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Presentase meningkatnya kelaikan kendaraan wajib uji	Jenis		1	Rp 25,000,000	2	Rp 225,000,000	1	Rp 25,000,000	2	Rp 225,000,000	1	Rp 25,000,000	1	Rp 25,000,000	
URUSAN PILIHAN																
Perindustrian																
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil		Orang		60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Perdagangan																
Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Menurunnya peredaran barang kena cukai ilegal	lokasi		6	Rp 63,775,000	6	Rp 65,000,000	6	Rp 66,000,000	6	Rp 67,000,000	6	Rp 68,000,000	6	Rp 68,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase jumlah pendistribusian BBM dan LPG tepat sasaran sesuai ketetapan pemerintah				Rp 32,967,000		Rp 50,000,000		Rp 50,000,000		Rp 50,000,000		Rp 75,000,000		Rp 75,000,000	Setda
Energi dan Sumber daya Mineral																
Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 Kecamatan Kab. Kobar				Rp 1,500,000,000		Rp 1,750,000,000		Rp 1,850,000,000		Rp 5,100,000,000		Rp 5,750,000,000		Rp 5,750,000,000	Setda
Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	Persentase jumlah pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan sesuai dengan aturan perundang-undangan				Rp 50,000,000		Rp 50,000,000		Rp 50,000,000		Rp 50,000,000		Rp 75,000,000		Rp 75,000,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keuangan)																

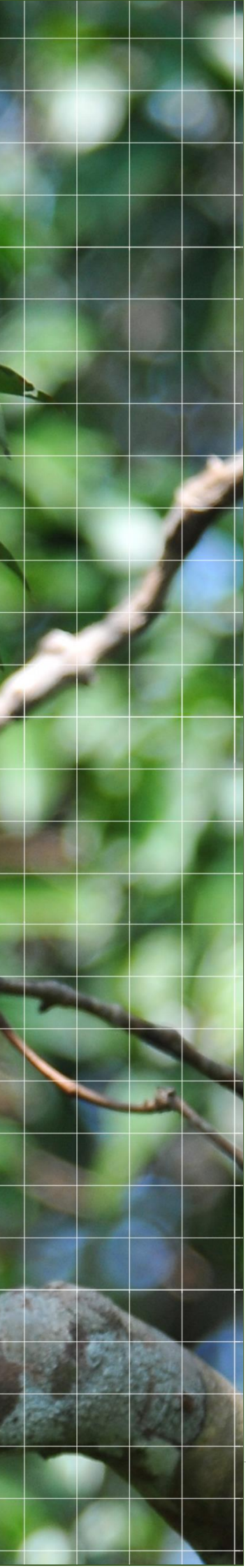
Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Kesekretariatan Daerah	Persentase aset Setda yang terinventarisasi dengan baik				Rp 250,000,000		Rp 250,000,000		Rp 250,000,000		Rp 525,000,000		Rp 585,000,000		Rp 585,000,000	Setda
Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah)																
Program Penyusunan Kebijakan dan Administrasi Pembangunan	Persentase data dan informasi bidang administrasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan				Rp 355,000,000		Rp 345,000,000		Rp 405,000,000		Rp 490,000,000		Rp 510,000,000		Rp 510,000,000	Setda
Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan			1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 110,000,000	1	Rp 140,000,000	1	Rp 140,000,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keorganisasian, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah)																
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan			75	Rp 248,200,000	80	Rp 248,200,000	85	Rp 248,200,000	90	Rp 248,200,000	95	Rp 248,200,000	95	Rp 248,200,000	Sekwan
Prog. Pengembangan Wilayah Perbatasan	Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten	Perbup		5	Rp 80,000,000	5	Rp 80,000,000	5	Rp 80,000,000	5	Rp 110,000,000	5	Rp 150,000,000	5	Rp 150,000,000	Setda
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah MoU yang disepakati				Rp 95,000,000	10	Rp 95,000,000	14	Rp 100,000,000	18	Rp 125,000,000	20	Rp 200,000,000	20	Rp 200,000,000	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Jumlah kecamatan baru yang terbentuk				Rp 300,000,000		Rp 315,000,000		Rp 315,000,000		Rp 320,000,000	1	Rp 350,000,000	1	Rp 350,000,000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan SDM pengadaan barang dan jasa				Rp 750,000,000		Rp 700,000,000		Rp 750,000,000		Rp 800,000,000		Rp 850,000,000		Rp 850,000,000	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat				Rp 573,500,000		Rp 575,000,000		Rp 575,000,000		Rp 725,000,000		Rp 735,000,000		Rp 735,000,000	
Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	Persentase permasalahan hukum tertangani				Rp 293,100,000		Rp 290,000,000		Rp 290,000,000		Rp 350,000,000		Rp 350,000,000		Rp 350,000,000	
Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	Angka pelanggaran HAM				Rp 58,100,000		Rp 58,000,000		Rp 58,000,000		Rp 80,000,000		Rp 100,000,000		Rp 100,000,000	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Persentase pelayanan kedinasan KDH/ WKDH yang terlaksana baik				Rp 2,397,750,000		Rp 2,740,750,000		Rp 2,740,750,000		Rp 3,265,750,000		Rp 3,544,593,827		Rp 3,544,593,827	
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bimtek, dll)						Rp 90,000,000		Rp 90,000,000		Rp 90,000,000		Rp 90,000,000		Rp 90,000,000	Bappeda
Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan							Rp 273,500,000		Rp 58,250,000		Rp 65,250,000		Rp 72,250,000		Rp 72,250,000	Kecamatan Kumai
Program Pengembangan Kecamatan							Rp 39,750,000		Rp 38,250,000		Rp 42,750,000		Rp 47,250,000		Rp 47,250,000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Fasilitasi Tata Batas Wilayah Antar Desa/Kelurahan							Rp 9,750,000		Rp 9,750,000		Rp 9,750,000		Rp 9,750,000		Rp 9,750,000	
Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan;	Prosentase usulan kegiatan dari masyarakat terealisasi	Bulan		12		12	Rp 18,000,000	12	Rp 18,000,000	12	Rp 18,000,000	12	Rp 18,000,000	12	Rp 18,000,000	Kecamatan Aruta
Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;				12		12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	
Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan;				12		12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	
Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan						12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	
Program Optimalisasi pelayanan perijinan dan non perijinan							Rp 20,500,000		Rp 20,500,000	43	Rp 20,500,000	43	Rp 20,500,000	43	Rp 20,500,000	Kecamatan Lada
Program Pengembangan kecamatan							Rp 20,000,000		Rp 25,000,000		Rp 25,000,000		Rp 25,000,000		Rp 25,000,000	
Program Penegakan perda dan perbup di kecamatan							Rp 15,500,000		Rp 15,500,000		Rp 15,500,000		Rp 15,500,000		Rp 15,500,000	
Program Pemberdayaan masyarakat kecamatan							Rp 20,000,000		Rp 20,000,000		Rp 20,000,000		Rp 20,000,000		Rp 20,000,000	
Pogram ptimalisasi pelayanan perijinan dan non perijinan							Rp 60,000,000		Rp 60,000,000		Rp 70,000,000		Rp 70,000,000		Rp 70,000,000	Kecamatan Arsel
Program Pengembangan kecamatan							Rp 115,000,000		Rp 115,000,000		Rp 190,000,000		Rp 199,000,000		Rp 199,000,000	
Program Pemberdayaan masyarakat kecamatan							Rp 115,000,000		Rp 115,000,000		Rp 135,000,000		Rp 135,000,000		Rp 135,000,000	



BAB 8: Penetapan Indikator Kinerja Daerah



8.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah , yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) maupun indikator sasaran (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Kotawaringin Barat diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersedian pelayanan publik. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8. 1: Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 - 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat

Indikator	Satuan	Target tahun ke					
		2017	2018	2019	2020	2021	202
Indeks Good Governance	Skala	NA	6,04	6,14	6,2	6,24	6,2
Indeks Pembangunan Manusia	%	71.58	72,03	72,48	72,93	73,38	73,8
Pertumbuhan Ekonomi	%	NA	7,48	7,53	7,58	7.63	7,6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skala	0,3561	57,33	60,00	62,67	65,33	68,0
Indeks Pembangunan Masyarakat	skala	NA	6,12	6,2	6,4	6,8	7,1
Angka Kemiskinan	%	NA	4,96	4,72	4,24	3,98	3,4
Tourism Intencity Index	NA	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	menin

8.2 Indikator Sasaran

Tabel 8. 2: Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (*impact*) Tahun 2017 - 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
A	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**									
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	-2.22%	N/A	5%	10%	15%	20%	25%	25%
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	18.33%	N/A	5%	8%	11%	14%	20%	20%
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-23.30%	N/A	10%	12%	13%	15%	15%	15%
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
A	**Fokus Kesejahteraan Masyarakat**									
	Pendidikan									
1	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	70,21	70,40	70,59	70,79	70,98	71,17	71,36	71,36

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kesehatan									
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,21	70,40	70,59	70,79	70,98	71,17	71,36	71,36
B	**Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
	Pendidikan									
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,61	12,80	13,00	13,19	13,38	13,57	13,57
	Kesehatan									
2	Prosentase lembaga layanan kesehatan yang terakreditasi		NA	50%	60%	70%	80%	90%	90%	90%
	Pekerjaan Umum									
3	Indeks Williamson	Indeks	N/A	N/A	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
5	Indeks Toleransi (Kohesi Sosial)	Persen	N/A	0,65	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,76

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Terhadap tahun Sebelumnya	Persen	NA	10%	10%	15%	18%	20%	23%	23%
	Sosial									
7	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	%	20%	18,50%	17,00%	15,50%	14,00%	12,50%	10,00%	10,00%
C	**Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**									
	Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.15%	3,04	2,93	2,82	2,71	2,61	2,50	2,50
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	NA	92,69	94,01	95,33	96,65	97,98	99,30	99,30
3	Kategori Kabupaten Layak Anak		NA	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pangan									
4	Skor Pola Pangan Harapan	%	84,95	N/A	92,9	93,1	93,4	93,8	94,2	94,2
	Lingkungan Hidup									
5	Indeks Kualitas Air	Indeks	N/A	50%	53%	56%	59%	62%	65%	65%
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	N/A	N/A	60%	63%	66%	69%	72%	72%
7	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	N/A	56,83%	59%	61%	63%	65%	67%	67%
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	N/A	115	108	101	94	87	80	80
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
9	Persentase Desa Mandiri	%	NA	0	5%	5%	6%	6%	12%	25%
	Komunikasi dan Informatika									
10	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E Goverment	%	NA	40%	50%	60%	75%	80%	85%	85%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
11	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	N/A	N/A	5,5	6,5	7,5	9,5	10	10
12	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	N/A	N/A	13,04	34,78	56,52	78,26	100	100
	Penanaman Modal									
13	Persentase Peretumbuhan nilai PMA dan PMDN	%	N/A	N/A	8%	12%	16%	20%	24%	24%
	Kepemudaan dan Olahraga									
14	Persentase Peningkatan Peraihan Prestasi Pemuda	%	NA	20%	25%	30%	30%	40%	60%	60%
	Perpustakaan									
15	Indeks Minat Baca	Indeks	NA	NA	10%	20%	30%	40%	60%	60%
D	**Fokus Urusan Pilihan**									
	Pariwisata									

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Destinasi Wisata Khas lokal	Persen	NA	70%	75%	78%	80%	83%	85%	85%
2	Persentase Jenis Produk kepariwisataan Khas Lokal	Persen	NA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
3	Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus	Persen	20,11%	20%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
4	Presentase kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	Persen	NA	10%	15%	15%	20%	25%	30%	30%
E	**Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pendukung**									
1	Opini atas audit BPK	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Skor	C	CC	B	A	A	A	A	A
3	rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Skor	NA	85	87	90	95	96	99	99
4	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	Rasio	N/A	14,21	11,81	11,86	11,91	11,96	12	12
5	Maturitas SPIP	Level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
7	Persentase Desa yang Telag Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang benar dan tepat Waktu	%	NA	65%	70%	80%	85%	90%	90%	90%



BAB IX: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2017 hingga tahun 2022. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, perlu disusun RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2028 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 kepada masyarakat;
b. Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022;
d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini;
f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta

para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD".
i. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional

.

1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.

3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

9.4. Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan satu tahun yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2017 hingga tahun 2022. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, perlu disusun RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun selanjutnya.

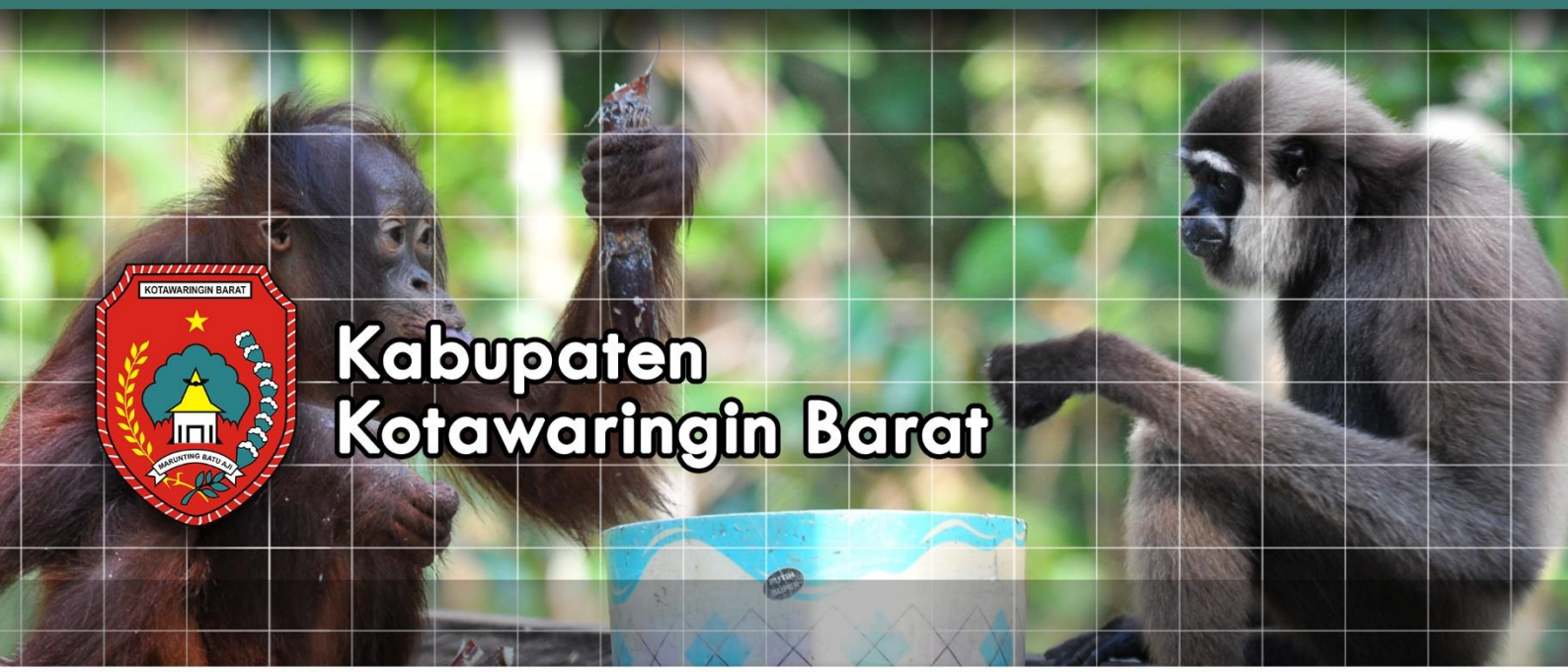
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan kaidah sebagai berikut:

j. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 kepada masyarakat;
k. Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
l. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-

target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022;

m. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
n. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini;
o. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
p. Bappeda dengan SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
q. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD".
r. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2017-2022